

BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perengkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

16. Kegiatan adalah sekumpulan Tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan perencanaan penganggaran dan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
(2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sekitar yang berbatasan.

Pasal 4

(1) Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan sistematika sebagai berikut :
    a. Bab I : Pendahuluan;
    b. Bab II : Gambaran umum daerah;
    c. Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. Bab V : Penutup.

(2) Penjabaran lebih lanjut atas RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2025 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau sampai dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 20 Agustus 2025

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 162-7/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang berfungsi sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah terpilih, yang selanjutnya memuat arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, serta kerangka pendanaan yang akan digunakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan demikian, RPJMD berfungsi tidak hanya sebagai pedoman pembangunan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 memuat arah pembangunan yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian berbasis potensi lokal, pemerataan pembangunan antar wilayah, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan disusunnya RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, berkesinambungan, dan berkeadilan. Selain itu, RPJMD juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai landasan hukum dan pedoman resmi dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga seluruh proses pembangunan dapat dilaksanakan secara terukur, efektif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN I-10
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-13
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN I-14
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1.1 EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2021-2026 ..... II-1
2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-2
2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-40
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-76
2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM II-92
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH II-149
2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU II-151
2.2.2 NERACA DAERAH II-155
2.2.3 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU II-168
2.2.3.3 KERANGKA PENDANAAN II-205
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-216
2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN II-216
2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH II-227
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN III-1
3.1.1 VISI III-1
3.1.2 MISI III-3
3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN III-7
3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-17
3.2.1 STRATEGI III-17
3.2.2 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD III-18
3.2.3 LOKUS PEMBANGUNAN WILAYAH III-24
3.2.4 PROGRAM PRIORITAS III-31
EKONOMI KAWASAN III-34

3.2.5 ARAH KEBIJAKAN III-49
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1. RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH IV-1
4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-88
4.2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA IV-88
4.2.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH IV-89
BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Evaluasi Capaian Pembangunan RPJMD Kabupaten Sumenep Periode 2021-2026 ..... II-1
Tabel II-2 Luas Wilayah Kabupaten Sumenep berdasarkan Kecamatan II-3
Tabel II-3 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumenep II-5
Tabel II-4 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep II-6
Tabel II-5 Kondisi Iklim berdasarkan Suhu dan Kelembaban di Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ..... II-8
Tabel II-6 Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ..... II-8
Tabel II-7 Kondisi Iklim Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ..... II-9
Tabel II-8 Hasil Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Sumenep II-12
Tabel II-9 Daya Dukung Pertanian (Pangan) di Kabupaten Sumenep II-14
Tabel II-10 Proyeksi Daya Dukung Pertanian (Pangan) di Kabupaten Sumenep II-16
Tabel II-11 Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep II-17
Tabel II-12 Proyeksi Daya Dukung Sumberdaya Air di Kabupaten Sumenep .II-19
Tabel II-13 Daya Dukung Lahan Permukiman II-21
Tabel II-14 proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman II-23
Tabel II-15 Penurunan Intensitas Emisi GRK Kumulatif di Kabupaten Sumenep II-33
Tabel II-16 Struktur Demografi Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ..... II-36
Tabel II-17 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 ..... II-39
Tabel II-18 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhannya II-43
Tabel II-19 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024 ..... II-46
Tabel II-20 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-49
Tabel II-21 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share II-52
Tabel II-22 Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024 ..... II-69
Tabel II-23 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 ... II-76
Tabel II-24 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 .... II-77
Tabel II-25 Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 .. II-79
Tabel II-26 Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 .. II-80
Tabel II-27 Perkembangan dan Struktur Modal Tetap Bruto Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-84
Tabel II-28 Perkembangan dan Struktur Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel II-29 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2023 ..... II-86
Tabel II-30 Capaian Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Kabupaten Sumenep tahun 2022-2024 ..... II-98
Tabel II-31 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-99

Tabel II-32 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2024 ..... II-101
Tabel II-33 Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan kesehatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 ..... II-102
Tabel II-34 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024 ..... II-105
Tabel II-35 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024 ..... II-107
Tabel II-36 Realisasi Pelaksanaan Penerapan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ..... II-110
Tabel II-37 Standar Pelayanna Minimal (SPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2024 ..... II-111
Tabel II-38 Kinerja UrusanTenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 II-113
Tabel II-39 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 ..... II-119
Tabel II-40 Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep II-120
Tabel II-41 Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sumenep 2019-2023 II-121
Tabel II-42 Kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Sumenep 2020-2024 ..... II-123
Tabel II-43 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-124
Tabel II-44 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-127
Tabel II-45 Persentase Informasi Daerah yang Diamankan dan Diarsipkan Kabupaten Sumenep II-129
Tabel II-46 Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 ..... II-131
Tabel II-47 *Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023* II-131
Tabel II-48 Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2023 II-134
Tabel II-49 Kinerja Urusan Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-135
Tabel II-50 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perdagangan Tahun 2019-2023 ..... II-137
Tabel II-51 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perindustrian Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 ..... II-139
Tabel II-52 Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019-2023 ..... II-140
Tabel II-53 Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 ..... II-141
Tabel II-54 Capaian Nilai Opini BPK Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 .... II-143
Tabel II-55 Kinerja Unsur Kepegawaian Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 II-145
Tabel II-56 Capaian Level APIP Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 ..... II-146
Tabel II-57 Petumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2024 ..... II-154

Tabel II-58 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024.....II-150
Tabel II-59 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024.....II-152
Tabel II-60 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024 II-151
Tabel II-61 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024.....II-154
Tabel II-62 Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2020– 2024 II-156
Tabel II-63 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024.....II-169
Tabel II-64 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....II-171
Tabel II-65 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....II-173
Tabel II-66 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....II-175
Tabel II-67 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas.....II-176
Tabel II-68 Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan PMK Nomor 84/PMK.07/2023.....II-178
Tabel II-69 Rasio Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024..II-181
Tabel II-70 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024.....II-184
Tabel II-71 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024.....II-186
Tabel II-72 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024.....II-192
Tabel II-73 Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029.....II-195
Tabel II-74 Defisit Riil Anggaran dan Penutup Defisit Ril Anggaran Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024.....II-197
Tabel II-75 Komposisi Penutup Defisit Rill Kabupaten Sumenep 2020-2024.....II-198
Tabel II-76 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sumenep 2020-2024.....II-200
Tabel II-77 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024.....II-202
Tabel II-78 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Sumenep 2025-2030.....II-204
Tabel II-79 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2030.....II-208
Tabel II-80 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 – 2029.....II-215
Tabel II-81 List Permasalahan Pembangunan Daerah.....II-238
Tabel II-82 Proyek Kawasan Kabupaten Sumenep.....II-246
Tabel II-83 Linearitas Arah Kebijakan Periode 2025 – 2029 Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep.....II-255
Tabel II-84 Indikator Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sumenep 2025 – 2045.....II-259
Tabel II-85 Indikator Sasaran Pokok Misi RPJPD Kabupaten Sumenep 2025 – 2045.....II-260
Tabel II-86 Tujuan dan arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Sumenep.....II-267

Tabel II-87 Sinkronisasi Program Prioritas RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029 dan RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2024–2044... II-269
Tabel II-88 LInearitas Isu Strategis Kabuaten Sumenep II-275

Tabel III- 1 Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Sumenep III-12
Tabel III- 2 Skoring penentuan lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Sumenep III-25
Tabel III- 3 Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Sumenep III-32
Tabel III- 4 Program Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 ..... III-37
Tabel III- 5 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sumenep III-50

DAFTAR GAMBAR

Gambar I- 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-11
Gambar II-1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep II-3
Gambar II-2 Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Sumenep II-15
Gambar II-3 Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Sumenep. II-17
Gambar II-4 Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ..... II-19
Gambar II-5 Proyeksi Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Sumenep Tahun 2023 II-21
Gambar II-6 Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Sumenep Tahun 2023. II-23
Gambar II-7 Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ..... II-25
Gambar II-8 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-26
Gambar II-9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2023 ..... II-27
Gambar II-10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumenep Tahun 2020 2024 ..... II-28
Gambar II-11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2023 ..... II-30
Gambar II-12 Timbulan Sampah dan Sampah Terkelola di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-31
Gambar II-13 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-32
Gambar II-14 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-34
Gambar II-15 Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-35
Gambar II-16 Piramida Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ..... II-38
Gambar II-17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-41
Gambar II-18 Analisis Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 ..... II-43

Gambar II-19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional II-55
Gambar II-20 PDRB Per Kapita Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-57
Gambar II-21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional II-58
Gambar II-22 Indeks Gini Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-60
Gambar II-23 Indeks Pembangunan Manusia (Hasil Long Form SP2020) Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-62
Gambar II-24 Umur Harapan Hidup (Hasil Long Form SP2020) Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-64
Gambar II-25 Prevalensi Stunting Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-65
Gambar II-26 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-66
Gambar II-27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-68
Gambar II-28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024 ..... II-70
Gambar II-29 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2023 ..... II-72
Gambar II-30 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2023 ....II-73
Gambar II-31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2023 ..... II-74
Gambar II-32 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-75
Gambar II-33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-78
Gambar II-34 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-88
Gambar II-35 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-90
Gambar II-36 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-91
Gambar II-37 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2024 ..... II-92
Gambar II-38 Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 II-95
Gambar II-39 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024.... II-96
Gambar II-40 Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-106
Gambar II-41 Capaian Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 ..... II-109
Gambar II-42 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024.II-112
Gambar II-43 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumenep II-114
Gambar II-44 Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024.. II-115
Gambar II-45 Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024.. II-116
Gambar II-46 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-118
Gambar II-47 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-125
Gambar II-48 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2021-2024 II-128

Gambar II-49 Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024 II-130
Gambar II-50 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024 ..... II-132
Gambar II-51 Persentase Hasil Penelitian yang Menjadi Bahan Kebijakan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 ..... II-142
Gambar II-52 Persentase Pertumbuhan PAD Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 .II-144
Gambar II-53 Persentase Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019-2023 ..... II-147
Gambar II-54 Nilai SKM Unit-Unit Layanan Kecamatan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023 ..... II-148
Gambar II-55 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-153
Gambar II-56 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep II-152
Gambar II-57 Total Aset Kabupaten Sumenep 2020-2024 ..... II-160
Gambar II-58 Perbandingan Nilai Aset dan Kewajiban Kabupaten Sumenep 2020-2024 ..... II-161
Gambar II-59 Rasio Likuiditas Kabupaten Sumenep 2020-2024 ..... II-163
Gambar II-60 Rasio Solvabilitas Kabupaten Sumenep 2020-2024 ..... II-165
Gambar II-61 Rasio Aktivitas Kabupaten Sumenep 2020-2024 ..... II-166
Gambar II-60 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024 ..... II-169
Gambar II-63 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-171
Gambar II-64 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-173
Gambar II-65 Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 .II-175
Gambar II-66 Rasio Efektivitas Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-176
Gambar II-67 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 II-178
Gambar II-68 Rasio Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 II-180
Gambar II-69 Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-182
Gambar II-70 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-187
Gambar II-71 Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-188
Gambar II-72 Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum II-189
Gambar II-73 Proporsi SiLPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 ..... II-190
Gambar II-74 Visi Misi Presiden 2025 – 2029 ..... II-241
Gambar II-75 Arah Pembangunan Wilayah Jawa Timur II-244
Gambar II-76 Visi Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2045 ..... II-251
Gambar II-77 Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 - 2045 ..... II-252

Gambar III- 1 Keselarasan Visi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep III-2
Gambar III- 2 Visi-Misi Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 ..... III-3

Gambar III- 3 Keselarasan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep.....III-6
Gambar III- 4 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 1.....III-7
Gambar III- 5 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2 Terkait Kemiskinan.....III-8
Gambar III- 6 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2 Terkait Ekonomi.....III-9
Gambar III- 7 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 3.....III-10
Gambar III- 8 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 5.....III-11
Gambar III- 9 Lokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Sumenep.....III-27
Gambar III- 10 Lokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Sumenep.....III-31
Gambar III- 11 Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep.....III-32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Pasca pelatikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenenep masa bakti 2025 – 2029 pada tanggal 20 Februari 2025 dan berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan politis adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Visi dan misi bupati dan wakil bupati harus diterjemahkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2024-2044 serta memperhatikan RPJMN 2025-2029.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian SDG`s, isu-

isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Sumenep juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Mengacu periodisasi RPJMD, RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-1 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045. Artinya dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep pada periode ini merupakan tahapan pertama dari capaian RPJPD Kabupaten Sumenep.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep harus menggunakan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*). Pendekatan pertama yakni "**Pendekatan Teknokratik**" yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Secara praktis pendekatan teknokratik dalam penyususnan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029 direpresentasikan melalui penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumenep dengan pendekatan akademis dan ilmiah, analisis data dan informasi sebagai upaya dalam melihat objektifitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di Kabupaten Sumenep.

Pendekatan kedua yakni "**Pendekatan Partisipatif**" yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD, segala proses dan tahapan dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dilingkup Kabupaten Sumenep. Praktisnya pendekatan

partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 dapat direpresentasikan melalui stakeholder yang melibatkan Akademisi, masyarakat Kabupaten Sumenep, Komunitas, maupun masyarakat ekonomi atau private sector di Kabupaten Sumenep. Pendekatan ketiga yakni "**Pendekatan Politis**" yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD dilaksanakan proses penerjemahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Kaitannya dengan tahapan ini, secara praktis Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 melalui Tujuan dan Sasaran yang direpresentasikan dengan indikator dan targetnya. Penerjemahan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumenep melalui tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan agar, berhasil atau tidaknya pemerintah dapat terukur melalui IKU atau indikator tujuan. Selain itu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumenep yang diterjemahkan melalui visi dan misi Bupati terpilih juga menjadi pedoman perangkat daerah dalam menentukan program pembangunan.

Terakhir pendekatan keempat yakni "***Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up***", yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029 merupakan hasil perencanaan yang diseleraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Praktisnya penetapan RPJMD Kabupaten Sumenep dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi Musrenbang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029 selanjutnya diacu oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep sesuai tugas Pokok dan Fungsinya yang dituangkan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep.

Dokumen RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Sumenep dapat dikatakan sebagai muara seluruh rencana pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah

Kabupaten Sumenep yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang harapkan.

Berbagai poin-poin tahapan sebagaimana di atas telah dilaksanakan. Selanjutnya penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029 menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2025-2029. RENSTRA Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dengan berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD, setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja tahunan berupa RENJA Perangkat Daerah. RENJA Perangkat Daerah inilah yang menjadi acuan teknis pelakasanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merujuk pada sejumlah dasar hukum sebagaimana berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesoa Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 107);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123).
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 5);

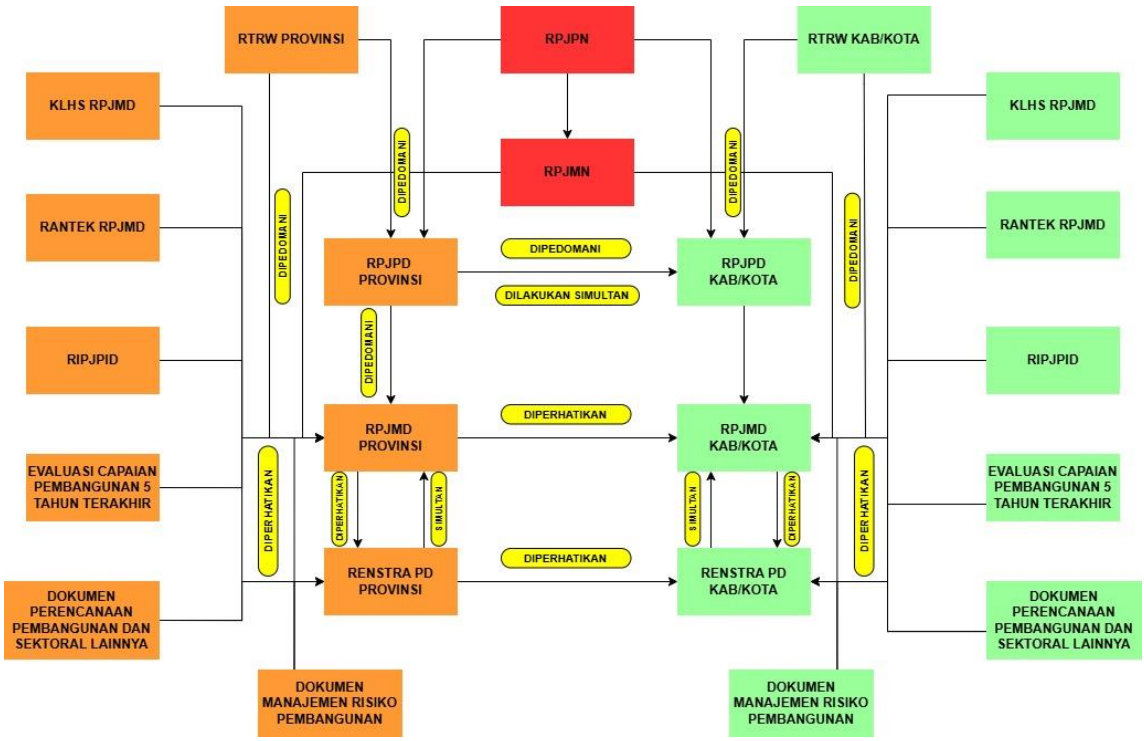
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan. Secara tersurat dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa sebelum disusunnya RPJMD baik di Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota disusun dulu Rancangan

Teknokratis RPJMD yang berujung terhadap munculnya isu strategis sebagai pedoman pembangunan daerah.

Tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan rancangan dokumen RPJMD sesuai platform politik dari Bupati/Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 1- 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Sumenep memperhatikan dan selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Sumenep bertujuan adalah untuk melihat arah pembangunan nasional 2025-2029. Pada prinsipnya, melalui arahan pembangunan nasional tahun 2025-2029 yang dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN 2025-2045 periode ke I menjadi acuan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029.
2. RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Penyelarasan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan kewilayahan dan seluruh urusan (sektoral) lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
3. RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045 Tahap I. Dengan demikian dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Sumenep juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045 Tahap I.
4. RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sumenep, seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep tahun 2024-2044. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakatnya merupakan tempat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan terhadap pencapaian TPB di daerah. Dukungan Pemkab dalam TPB secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya

melalui rencana kuadran identitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembanguan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

6. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RIPJPID (Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah) memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan yang bersifat menyeluruh dan lintas sektor, sedangkan RIPJPID adalah dokumen strategis yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN). RIPJPID memberikan arah dan kerangka dasar penguatan riset serta inovasi yang kemudian dijabarkan secara lebih operasional ke dalam RPJMD melalui program dan kebijakan konkret sesuai prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD berperan mengintegrasikan sasaran RIPJPID ke dalam tahapan implementasi jangka menengah agar pembangunan daerah berlangsung konsisten, berkelanjutan, dan berbasis inovasi.

Sementara itu, secara subtantif keselarasan antara dokumen perencanaan pusat dan provinsi, berserta dokumen KLHS dan RTRW dibahas sebagai bahan telaah isu. Maka keselarasan subtansi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat di bab IV permasalahan dan isu strategis.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2025- 2029 adalah menjabarkan visi misi program untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029 juga

memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2025- 2029 yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2025- 2029;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2025- 2029;
4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sumenep tahun 2025- 2029;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat Kabupaten Sumenep yang semakin maju, sejahtera, dan berkah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang terdiri atas 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2 Gambaran Keuangan Daerah
2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
b. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
4. 1. Program Perangkat Daerah
4. 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2021-2026

Evaluasi capaian pembangunan RPJMD Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 menjadi langkah strategis dalam menilai efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti dalam perencanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga pembangunan ke depan dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan capaian RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 direpresentasikan oleh capaian indikator capaian pembangunan sebagaimana berikut:

Tabel II-1 Evaluasi Capaian Pembangunan RPJMD Kabupaten Sumenep Periode 2021-2026

No	Indikator	Target Akhir Perencanaan	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,82	69,78	98,53%
2	Prosentase Penduduk Miskin	17	17,78	95,61%
3	Pertumbuhan Ekonomi	4	3,77	94,25%
4	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	65	78,08	120,12%
5	Indeks Kesalehan Sosial	64,5	85,91	133,19%
6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	84	82,2	97,85%

Sumber: Data Diolah, 2025

Data capaian indikator pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar target RPJMD mendekati atau bahkan melampaui sasaran akhir. Indeks Pembangunan Manusia telah mencapai 98,53% dari target, mencerminkan peningkatan kualitas SDM meskipun belum sepenuhnya sesuai harapan. Persentase penduduk miskin masih di atas target (17,78% dibanding target 17%), sehingga capaian hanya 95,61% dan menjadi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan ekonomi juga sedikit di bawah target dengan capaian 94,25%, menandakan perlunya penguatan sektor produktif. Sebaliknya, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kesalehan

Sosial jauh melampaui target, masing-masing 120,12% dan 133,19%, yang menggambarkan keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan dan penguatan nilai sosial. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur mendekati target dengan capaian 97,85%, menunjukkan kinerja yang relatif baik meskipun masih perlu percepatan agar mencapai sasaran penuh.

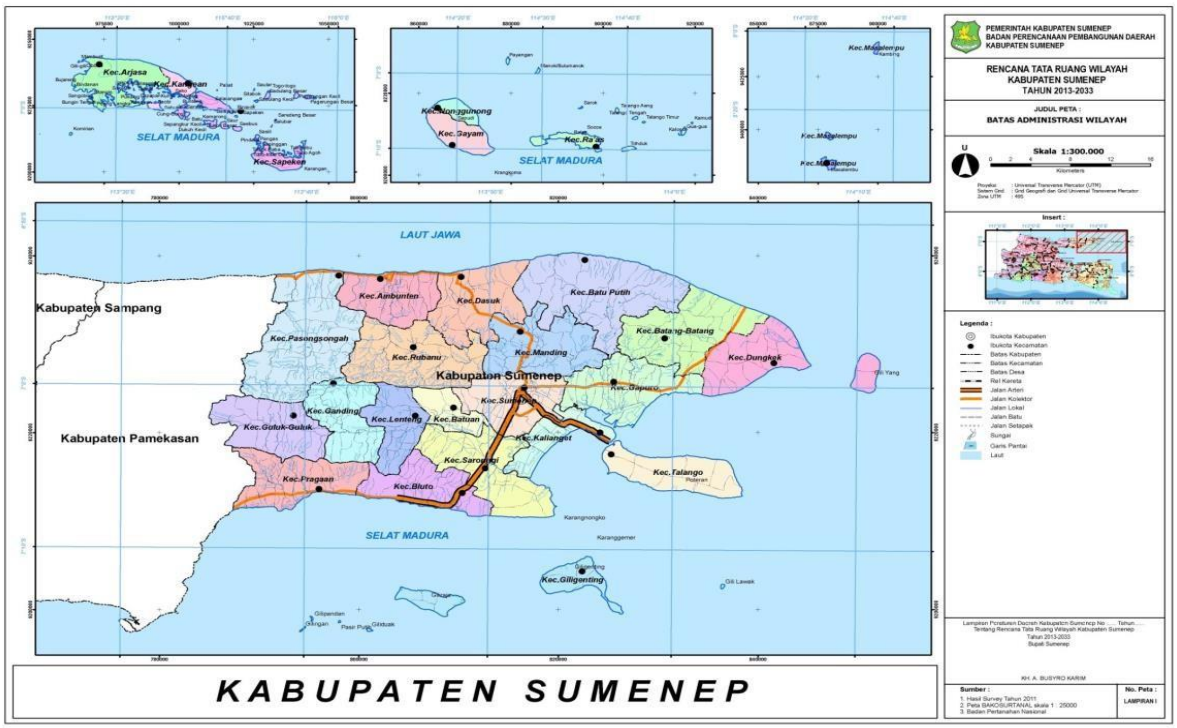
2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.2.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

2.1.2.1.1 LUAS WILAYAH DAN LETAK GEOGRAFIS

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Sumenep merupakan salah satu Kabupaten yang ditetapkan berada pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura. Kabupaten Sumenep memilik luas luas mencapai 2.084,02 km^2 (208.402 Ha). Dimana 54,79% merupakan wilayah daratan dan 45,21% adalah wilayah lautan. Wilayah Kabupaten Sumenep berada di ujung timur Pulau Madura yang terletak pada koordinat di antara 113°32’54”-116°16’48” Bujur Timur dan di antara 4°55’-7°24’ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Selatan	:	Berbatasan dengan Selat Madura
Utara	:	Berbatasan dengan Laut Jawa
Barat	:	Berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan
Timur	:	Berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores



Gambar II-1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep

Sumber: Bappeda Kabupaten Sumenep, 2025

Berdasarkan pada peta administrasi di atas, Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas dua bagian wilayah yang terdiri dari:

1. Bagian Daratan dengan luas wilayah 1.146,93 Km2 (54,79%) terbagi atas 18 (delapan belas) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kota Sumenep, Batuan, Lenteng, Ganding, Guluk-Guluk, Pragaan, Bluto, Saronggi, Kalianget, Gapura, Dungkek, Batang-Batang, Batuputih, Manding, Dasuk, Rubaru, Pasongsongan dan Ambunten dengan jumlah desa sebanyak 260 desa dan 4 kelurahan;
2. Bagian Kepulauan dengan luas wilayah 946,54 Km2 (45,21%) terbagi atas 9 (sembilan) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Talango, Nonggunong, Gayam, Ra'as, Masalembu, Sapeken, Kangayan, Arjasa dan Giligenting, dengan jumlah desa sebanyak 70 desa.

Secara administratif Kabupaten Sumenep terbagi menjadi 27 Kecamatan, 340 Desa dan 4 Kelurahan, 1.564 Dusun, 2.026 Rukun Warga (RW), 5.058 Rukun Tetangga (RW), dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau, yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Berikut merupakan rincian luas total area kecamatan dan jumlah pulau berdasarkan kecamatan di Kabupaten Sumenep:

Tabel II-2 Luas Wilayah Kabupaten Sumenep berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Total Area (km2)	Jumlah Pulau

1.	Pragaan	56.75	**0**
2.	Bluto	51.52	**0**
3.	Saronggi	68.92	**0**
4.	Giligenting	29.14	**8**
5.	Talango	49.74	**5**
6.	Kalianget	28.44	**0**
7.	Kota Sumenep	29.09	**0**
8.	Batuan	27.22	**0**
9.	Lenteng	72.21	**0**
10.	Ganding	53.15	**0**
11.	Guluk Guluk	63.95	**0**
12.	Pasongsongan	118.25	**0**
13.	Ambunten	48.26	**0**
14.	Rubaru	82.31	**0**
15.	Dasuk	63.16	**0**
16.	Manding	65.96	**0**
17.	Batuputih	112.10	**0**
18.	Gapura	66.77	**0**
19.	Batang Batang -	80.12	**0**
20.	Dungkek	63.12	**1**
21.	Nonggunong	39.71	**3**
22.	Gayam	87.63	**1**
23.	Raas	38.18	**14**
24.	Sapeken	201.47	**52**
25.	Arjasa	245.86	**12**
26.	Kangayan	200.01	**26**
27.	Masalembu	40.98	**4**
Kabupaten Sumenep		**2084.02**	**126**

Sumber : Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2024

Selain luas wilayah secara administratif di Kabupaten Sumenep, terdapat penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Sumenep terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi lindung meliputi hutan, hutan rawa, pasir pantai dan untuk fungsi budidaya meliputi hutan produksi, lahan sawah, permukiman dan tempat kegiatan.Pada peruntukan permukiman, secara eksisting di dalamnya ditunjang oleh fasilitas pendukung meliputi perdagangan dan jasa, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas perkantoran dan fasilitas lainnya. Berikut merupakan luasan penggunaan lahan di Kabupaten Sumenep:

Tabel II-3 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumenep

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Danau/Situ	1,277099
Empang	1,894926
Hamparan Pasir	9,925416
Hutan	0,255355
Hutan Bakau/Mangrove	0,5842
Padang Rumput	1,97096
Penggaraman	2,043271
Perkebunan/Kebun	4,868571
Permukiman dan Tempat Kegiatan	306,972569
Rawa	2,043551
Sawah	0,677482
Sawah Tadah Hujan	3,367744
Semak Belukar	2,424853
Sungai	1,553531
Tegalan/Ladang	10,265612

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumenep, 2025

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, penggunaan lahan Kabupaten Sumenep tertinggi digunakan sebagai lahan permukiman sebesar 88%, hamparan pasir, dan persawahan.

2.1.2.1.2 TOPOGRAFI

Kabupaten Sumenep memiliki kondisi topografi yang secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut, yang tergolong pada daerah dataran rendah dengan sedikit berbukit di sebagian wilayahnya. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan laut. Tergolong pada daerah dataran rendah dengan sedikit berbukit di sebagian wilayahnya, ketinggian lahan di Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Wilayah dengan ketinggian 0-500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau mencapai luasan sekitar 99,72% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep

b) Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dpl mencapai luasan 578,42 Ha atau sekitar 0,28% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.

Selain ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat berdasarkan kemiringan lahan. Wilayah Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar 2.093,47 Km2 (209.347 Ha), memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi dantaranya sebagai berikut:

a) Wilayah dengan kemiringan antara 0-30% memiliki luas mencapai 1.613,29 Ha atau 77,51%;
b) Wilayah dengan kemiringan antara 30-60% memiliki luas mencapi 437,39 Ha atau 21,02% yang dapat dijumpai pada kawasan perbukitan;
c) Wilayah dengan kemiringan > 60% berupa area pegunungan yang hanya mencapai luas sekitar 30,75 Ha atau 1,48%.

Berikut adalah rincian dari kondisi topografi Kabupaten Sumenep berdasarkan kecamatan:

Tabel II-4 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Pragaan	**30**
2.	Bluto	**25**
3.	Saronggi	**25**
4.	Giligenting	**50**
5.	Talango	**40**
6.	Kalianget	**20**
7.	Kota Sumenep	**10**
8.	Batuan	**30**
9.	Lenteng	**15**
10.	Ganding	**15**
11.	Guluk Guluk	**30**
12.	Pasongsongan	**25**
13.	Ambunten	**30**
14.	Rubaru	**35**
15.	Dasuk	**40**
16.	Manding	**30**
17.	Batuputih	**25**
18.	Gapura	**30**
19.	Batang Batang -	**40**
20.	Dungkek	**20**
21.	Nonggunong	**20**
22.	Gayam	**20**
23.	Raas	**40**
24.	Sapeken	**25**
25.	Arjasa	**50**
26.	Kangayan	**30**

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
27	Masalembu	5

Sumber : Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2024

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), terdapat 2 kecamatan yang berada di ketinggian 50 mdpl yaitu: Kecamatan Giligenting dan Kecamatan Arjasa. Sedangkan 24 kecamatan sisanya berada di ketinggian kurang dari 50 mdpl dengan Kecamatan Masalembu adalah yang paling rendah yaitu dengan hanya 5 mdpl.

2.1.2.1.3 GEOLOGI

Kabupaten Sumenep secara geologis memiliki jenis atau struktur tanah yang didominas pada beberapa jenis tanah sebagai berikut:

a) Alluvial Hodromorf, yang mana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Saronggi dan Batang-batang
b) Alluvial Kelabu Kekuningan, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kota Sumenep dan Saronggi
c) Jenis Tanah Litosol, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Guluk-guluk dan Lenteng
d) Assosiasi Litosol dan Mediterian, dimana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Bluto, Saronggi dan Talango
e) Regusol Coklat Kekuningan, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Giligenting dan Gapura
f) Complek Brown Fores Litosol dan Mediterian, yang mana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Saronggi, dan Ambunten
g) Grumosol Kelabu, dimana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Ganding dan Kalianget
h) Complek Mediterian Grumosol, Regusol dan Litosol, terdapat di Kecamatan Batuputih dan Gapura

Delapan jenis tanah yang mendominasi struktur tanah di Kabupaten Sumenep ini merupakan jenis tanah yang masih sangat muda atau baru yang berada pada tingkat permulaan dalam perkembangannya dan terjadi penimbunan lihat pada horizon bawah, bersifat masam dan kejenuhan basa pada kedalaman 180 sentimeter dari permukaan tanah kurang dari 15%. Pada tanah Grumosol kandungan litany cukup tinggi (> 30%) di seluruh horizon, mempunyai sifat mengembang dan

mengerut (sifat vertik): yang dalam keadaan kering, tanah akan mengerut sehingga pecah-pecah dan keras, dalam keadaan basah akan mengembang dan lengket. Kondisi tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan tanaman dan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, jika tidak didukung oleh perlakuan teknis budidaya tanaman yang mampu menyeimbangkan keberadaan unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam jumlah banyak, utamanya dengan perlakuan pemupukan.

2.1.2.1.4 KLIMATOLOGI

Kondisi klimatologi di daerah Kabupaten Sumenep di tahun 2023 berdasarkan pada kondisi suhu, kondisi kelembaban, kondisi kecepatan angin, keadaan tekanan udara, jumlah curah hujan serta keadaan penyinaran matahari terdapat pada rincian tabel di bawah ini:

Tabel II-5 Kondisi Iklim berdasarkan Suhu dan Kelembaban di Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	22,4	27,9	33,8	74	83	**91**
Februari	22,8	27,4	32,0	80	86	**95**
Maret	23,8	27,6	33,4	79	87	**92**
April	24,2	28,2	33,2	75	86	**94**
Mei	24,4	28,5	33,2	71	80	**94**
Juni	22,6	28,1	32,6	73	80	**89**
Juli	23,8	28,0	32,3	65	76	**92**
Agustus	23,4	28,1	32,8	67	74	**82**
September	23,8	28,6	34,0	61	70	**76**
Oktober	25,0	30,0	34,6	66	73	**78**
November	24,2	30,6	35,4	67	74	**84**
Desember	**24,9**	**29,6**	**34,4**	**68**	**80**	**91**

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep, Tahun 2024

Tabel II-6 Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Bulan	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)
	Rata-Rata	Rata-Rata
Januari	4,2	1009.5
Februari	5,3	1009,2
Maret	2,7	1010,9
April	2,9	1010,0
Mei	4,5	1011,9
Juni	4,7	1011,9

Bulan	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)
	Rata-Rata	Rata-Rata
Juli	5,8	1012,7
Agustus	7,3	1013,8
September	7,7	1013,2
Oktober	6,4	1013,5
November	4,6	1011,2
Desember	2,8	1010,8

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep, Tahun 2024

Curah hujan sampai dengan bulan desember sebesar 94,2 mm/11 hari hujan. Penyinaran matahari paling tinggi terjadi pada bulan september dan bulan oktober memancarkan sinarnya sebesar 100 %. Sebaliknya sinar matahari terganggu sehingga tidak maksimal, terjadi pada bulan desember. Meskipun matahari memancarkan sinarnya dengan persentase relative tinggi, bukan berarti pada bulan-bulan itu suhu udara berada pada titik paling tinggi. Sebab menurut catatan yang ada, suhu udara tertinggi sebesar 35,4 derajat celcius pada bulan november, dan suhu udara menunjukkan titik terendah yakni 24,2 derajat celcius. Data geografi lain adalah kecepatan angin terbanyak bertiup dari arah Tenggara. Kecepatan angin rata-rata sebesar 4,9 Knots . Kecepatan angin rata-rata tertinggi sebesar 7,7 Knots , sedangkan kecepatan angin rata rata terendah sebesar 2,7 Knots. Sedangkan kecepatan angin maksimum tercatat sebesar 24,0 Knots terjadi pada bulan november 2023. Berikut di bawah ini merupakan rincian kondisi iklim di Kabupaten Sumenep:

Tabel II-7 Kondisi Iklim Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	162,8	23
Februari	360,5	20
Maret	272,3	15
April	118,2	17
Mei	81,1	7
Juni	30,3	4
Juli	30,5	5
Agustus	2	2
September	0	1
Oktober	0	0
November	110	7
Desember	94,2	11

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep, 2024

2.1.2.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, Jawa Timur, dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Secara geografis, Kabupaten Sumenep terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi ini menjadikan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah strategis dalam pengembangan sektor perikanan, pariwisata, serta pertanian. Namun demikian, tantangan lingkungan yang dihadapi juga tidak sedikit, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selaras dengan berbagai amcam potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Sumenep juga memiliki beberapa karateristik wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan strategis. Adapun Kawasan yang memiliki potensi dan wilayah yang masuk dalam potensi wilayah tersebut yakni:

2.1.2.2.1 KAWASAN STRATEGIS EKONOMI

Kawasan strategis ekonomi merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait sebagai area dengan potensi ekonomi yang signifikan dan memiliki prioritas tinggi untuk pengembangan ekonomi. Biasanya Kawasan ini memiliki infrastruktur yang baik, aksesibilitas tinggi, dan sumber daya yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, industri, pariwisata, dan jasa. Tujuan utama dari penetapan Kawasan Strategis Ekonomi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Kawasan ini sering mendapatkan perhatian khusus dalam bentuk kebijakan, insentif, dan dukungan infrastruktur dari pemerintah untuk memaksimalkan potensi ekonominya.

Kawasan Minapolitan	:	Kecamatan Arjasa
		Kecamatan Pasongsongan
		Kecamatan Bluto
Kawasan Agropolitan	:	Kecamatan Rubaru
Kawasan Pelabuhan	:	Kecamatan Kalianget
		Kecamatan Arjasa
		Kecamatan Raas
		Kecamatan Pasongsongan
		Kecamatan Sapeken

Kawasan Bandar Udara	:	Kota Sumenep
Kawasan Perdagangan I	:	Perkotaan Sumenep sebagai PKL wilayah daratan
Kawasan Perdagangan II	:	Perkotaan Kecamatan Arjasa sebagai PKL wilayah kepulauan

2.1.2.2.2 KAWASAN STRATEGIS SOSIO KULTURAL

Kawasan strategis sosio kultural merupakan Kawasan yang memiliki kepentingan khusus dalam hal sosial dan budaya, yang pengelolaannya diprioritaskan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Kawasan ini biasanya memiliki kekayaan budaya yang signifikan, tradisi unik, warisan sejarah, serta nilai-nilai sosial yang penting bagi identitas dan keberlanjutan komunitas lokal.

Masjid Agung Wisata Religi	:	Kecamatan Kota Sumenep
Pemakaman Asta Katandur	:	Kecamatan Kota Sumenep
Asta Belingi, Asta Nyamplong, Asta Adipoday, dan Asta Simo Wonokromo	:	Kecamatan Gayam
Asta K. Abdullah	:	Kecamatan Guluk-guluk
Asta Gumuk	:	Kecamatan Kalianget
Asta K. Faqih/Nyi Sitir dan Pemakaman Pekke	:	Kecamatan Lenteng
Asta Jokotole terletak	:	Kecamatan Manding
Bujuk/Asta Ponjuk	:	Kecamatan Nonggunong
Pemakaman Anggo Suto	:	Kecamatan Saronggi
Asta Agung Ali Akbar dan Asta/Bujuk Panaongan	:	Kecamatan Pasongsongan
Asta Sayid Yusuf	:	Kecamatan Talango
Gunung Leket	:	Kecamatan Ganding
Upacara Adat Nyaddar dan Petik Laut	:	Kecamatan Saronggi
Upacara Petik Laut, Upacara Labuh Laut terletak	:	Kecamatan Bluto
Upacara Rokatan Laut terletak	:	Kecamatan Masalembu
Benteng VOC	:	Kecamatan Kalianget

Industri batik tulis Sumenep : Desa Pakandangan Barat – Kecamatan Bluto

2.1.2.2.3 KAWASAN STRATEGIS PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TINGGI

Kawasan ini merupakan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai area dengan potensi besar untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta pengembangan dan penerapan teknologi tinggi. Kawasan ini diprioritaskan untuk dioptimalkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Penetapan dan pengelolaan Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi wilayah tersebut, mendorong inovasi teknologi, dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara efisien dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel II-8 Hasil Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Sumenep

No	Jenis komoditi	Jumlah Produksi (MMBTU/Barel)			Kontraktor	Lokasi
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1.	Gas Bumi (MMBTU)	2.168.195,80	1.876.255,51	1.366.888,05	Kangean Energy Indonesia Ltd.	Kec. Sapeken dan Ra'as
		2.168.195,80	1.876.255,51	1.366.888,05		
2.	Minyak Bumi (barel)		50.364,00		Kangean Energy Indonesia Ltd.	Kec. Sapeken dan Ra'as

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Sumenep

2.1.2.2.4 KAWASAN STRATEGIS PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP

Kawasan ini merupakan wilayah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait dengan tujuan utama untuk melindungi, memulihkan, dan melestarikan lingkungan hidup. Kawasan ini memiliki prioritas tinggi dalam hal pengelolaan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah degradasi lingkungan, dan mengatasi masalah-masalah lingkungan yang mendesak. Penetapan Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

merupakan bagian penting dari upaya global dan nasional untuk mengatasi tantangan lingkungan yang semakin mendesak, memastikan keberlanjutan ekosistem, dan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pelestarian lingkungan.

Kawasan DAS wilayah daratan dan kepulauan

Kawasan pantai, taman laut, cagar alam, dan hutan:

Kawasan Pantai Lombang	:	Kecamatan Batang-batang
Kawasan Pantai Slopeng	:	Kecamatan Dasuk
Kawasan Taman Laut Mamburit	:	Kecamatan Arjasa
Kawasan Taman Laut Pulau Saebus	:	Kecamatan Sapeken
Kawasan Taman Laut Gili Labak	:	Pulau Gili Labak
Kawasan Taman Laut Pulau Kemudi	:	Kecamatan Ra'as
Kawasan Taman Laut Saor	:	Pulau Saor
Kawasan Cagar Alam	:	Pulau Saobi
Kawasan Hutan	:	Pulau Gili Lawak

2.1.2.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung memuat terkait dengan kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktifitas sampai pada batas tertentu. Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan biasanya pencemaran dan kemampuan media mempertahankan habitat di dalamnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa variabel antara lain daya dukung tanah atau lahan dan air. Daya dukung dan daya tampung tersebut terdiri dari:

a. Daya Dukung Pertanian (Pangan)

Daya dukung lahan pertanian (pangan) merupakan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi pangan khususnya beras, untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat sehingga mereka dapat hidup sejahtera atau mencapai swasembada pangan. Untuk itu perlu diketahui berapa luas lahan rata-rata yang dibutuhkan per kepala keluarga, potensi lahan yang tersedia dan penggunaannya

untuk kegiatan pertanian. Sebagaimana produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas dalam bentuk pangan pokok khususnya beras. Untuk mengetahui sejauh mana daya dukung wilayah untuk pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

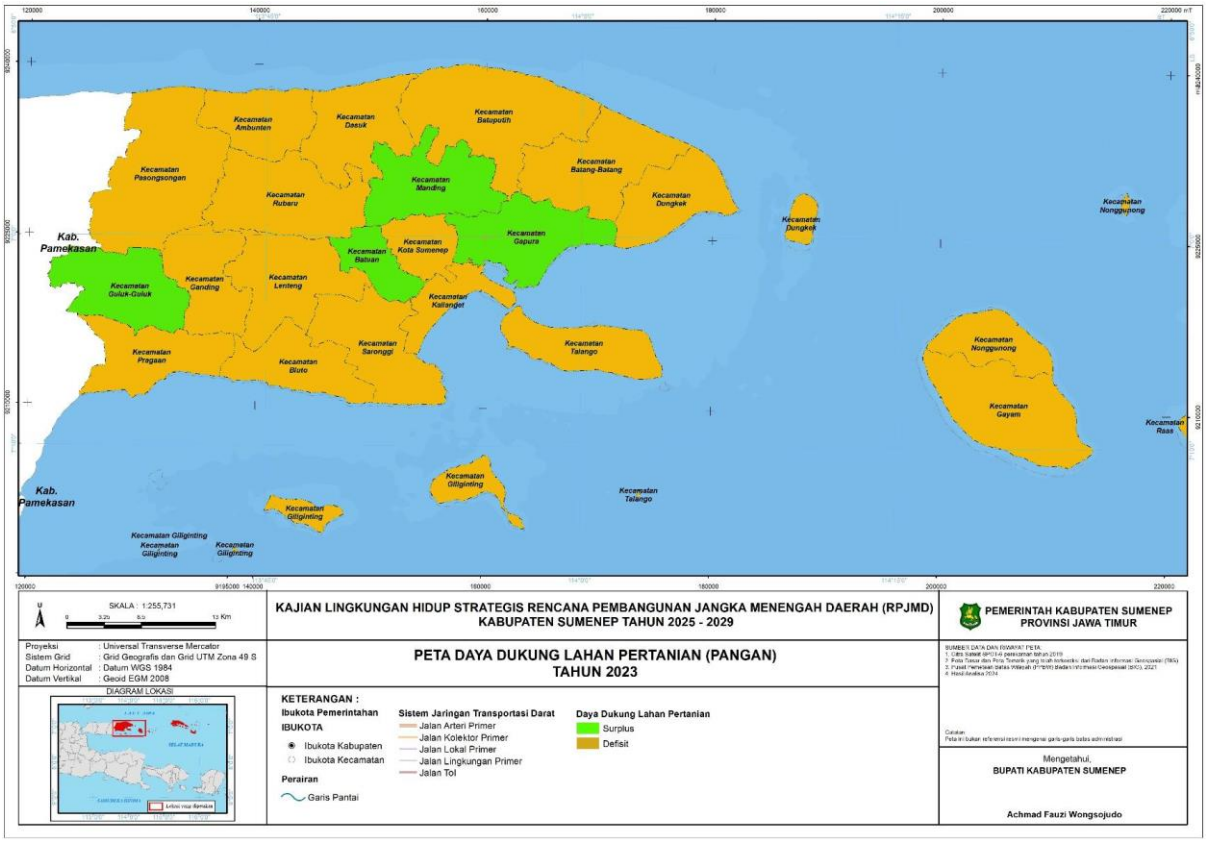
Tabel II-9 Daya Dukung Pertanian (Pangan) di Kabupaten Sumenep

Kecamatan	Penduduk* (2023)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	K (KFM/ Produktifitas tanaman pangan (beras))	Daya Dukung	Keterangan
Pragaan	67,193	0,007	0.008	0.803	SURPLUS
Bluto	49,319	0,001	0.068	0.007	SURPLUS
Saronggi	38,607	0,037	0.065	0.577	SURPLUS
Giligenting	24,534	0,000	0.000	0.000	DEFISIT
Talango	38,743	0,000	0.000	0.000	SURPLUS
Kalianget	42,791	0,002	0.068	0.023	DEFISIT
Kota Sumenep	76,409	0,017	0.066	0.259	DEFISIT
Batuan	13,591	0,103	0.064	1.610	DEFISIT
Lenteng Ganding	62,574	0,030	0.065	0.467	DEFISIT
Ganding	36,989	0,026	0.064	0.403	DEFISIT
Guluk Guluk	50,357	0,077	0.066	1.177	DEFISIT
Pasongsongan	51,945	0,018	0.066	0.278	DEFISIT
Ambunten	40,894	0,032	0.067	0.483	DEFISIT
Rubaru	40,343	0,049	0.068	0.579	DEFISIT
Dasuk	31,102	0,029	0.065	0.446	DEFISIT
Manding	30,467	0,068	0.065	1.044	SURPLUS
Batuputih	44,894	0,008	0.067	0.114	DEFISIT
Gapura	38,752	0,068	0.064	1.066	SURPLUS
Batang Batang	55,690	0,026	0.065	0.403	DEFISIT
Dungkek	36,637	0,020	0.064	0.321	DEFISIT
Nonggunong	13,749	0,030	0.068	0.444	DEFISIT
Gayam	32,020	0,021	0.066	0.318	DEFISIT
Raas	32,165	0,007	0.068	0.097	DEFISIT
Sapeken	55,011	0,027	0.066	0.411	DEFISIT
Arjasa	84,729	0,099	0.065	1.522	SURPLUS
Kangayan	26,974	0,064	0.066	0.976	DEFISIT
Masalembu	26,002	0,000	0.069	0.004	DEFISIT
Kabupaten Sumenep	**1,142,210**	**0,032**	**0.068**	**0.444**	**DEFISIT**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

Dari hasil perhitungan tabel daya dukung dan daya tampung Kabupaten Sumenep di atas menunjukkan bahwa secara umum skor hitung t pada tabel diatas memiliki skor 0,529. Angka tersebut memiliki skor <1 dengan mengindikasikan

bahwa ketersediaan pangan yang dihasilkan oleh sawah dan ladang padi tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan. Dari 28 kecamatan, sebanyak 5 kecamatan memiliki skor >1 dengan skor tertinggi diperoleh di Kecamatan Batuan (1,610) dan 23 kecamatan memiliki skor <1 dengan skor terendah diperoleh di Kecamatan Talango dan Kecamatan Giligenting. Hal Ini menunjukkan bahwa 5 dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep mampu untuk menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri. Kecamatan Batuan mempunyai lahan panen komoditas padi terluas dan produksi tertinggi se-kabupaten sehingga berdampak terhadap ketersediaan pangan. Kecamatan dengan daya dukung rendah mempunyai tingkat produksi rendah sedangkan jumlah penduduknya relatif tinggi. Kondisi tersebut merupakan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan. Sebaran wilayah daya dukung lahan pertanian (pangan) di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada peta di bawah ini :



Gambar II-2 Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Sumenep

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

Selain kondisi Eksisting Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan), terdapat proyeksi dari Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) yang memproyeksi hingga 5

tahun kedepan atau hingga tahun 2029. Adapun proyeksi dari Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

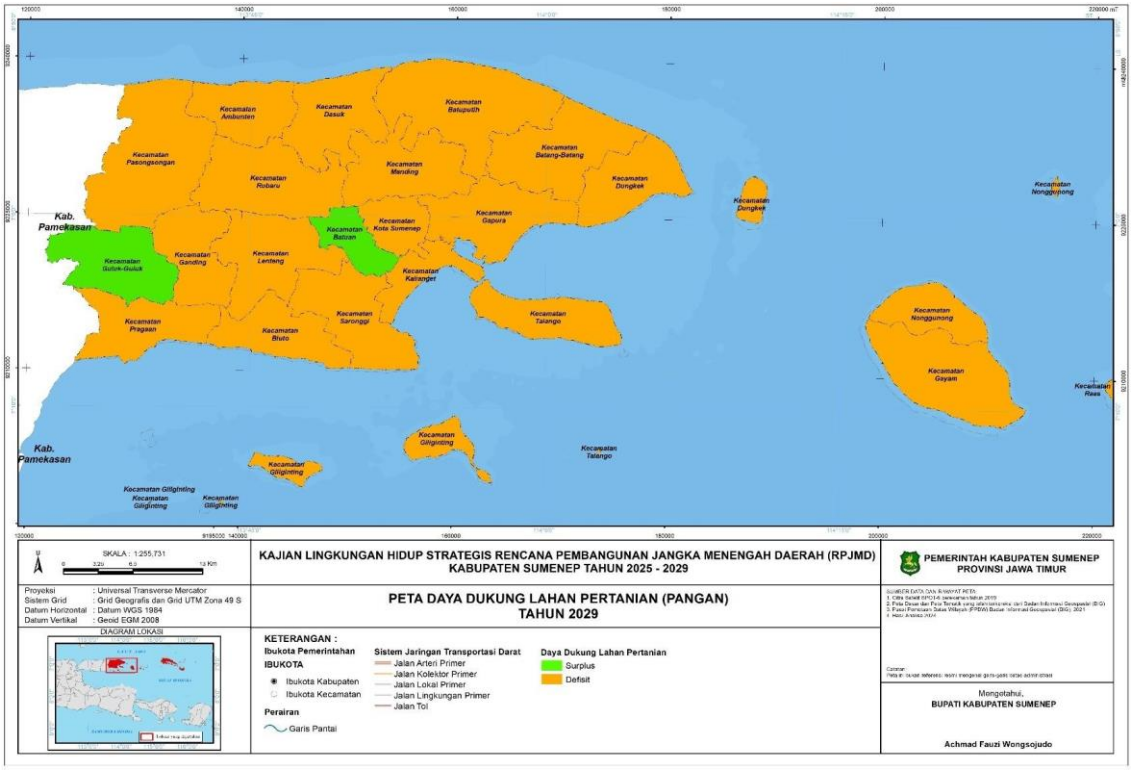
Tabel II-10 Proyeksi Daya Dukung Pertanian (Pangan) di Kabupaten Sumenep

Kecamatan	Penduduk* (2029)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	K (KFM/ Produktifitas tanaman pangan (beras))	Daya Dukung	Keterangan
Pragaan	72,186	0.006	0.008	0.747	DEFISIT
Bluto	57,986	0.000	0.068	0.006	DEFISIT
Saronggi	42,971	0.034	0.065	0.519	DEFISIT
Giligenting	27,983	0.000	0.000	0.000	DEFISIT
Talango	39,841	0.000	0.000	0.000	DEFISIT
Kalianget	44,668	0.002	0.068	0.022	DEFISIT
Kota Sumenep	86,893	0.015	0.066	0.228	DEFISIT
Batuan	14,251	0.098	0.064	1.536	SURPLUS
Lenteng Ganding	68,230	0.028	0.065	0.428	DEFISIT
Ganding	40,575	0.024	0.064	0.367	DEFISIT
Guluk Guluk	53,131	0.073	0.066	1.116	SURPLUS
Pasongsongan	57,641	0.016	0.066	0.250	DEFISIT
Ambunten	43,288	0.031	0.067	0.456	DEFISIT
Rubaru	44,032	0.036	0.068	0.531	DEFISIT
Dasuk	34,876	0.026	0.065	0.397	DEFISIT
Manding	33,439	0.062	0.065	0.951	DEFISIT
Batuputih	48,940	0.007	0.067	0.104	DEFISIT
Gapura	44,449	0.059	0.064	0.929	DEFISIT
Batang Batang	58,640	0.025	0.065	0.382	DEFISIT
Dungkek	38,420	0.019	0.064	0.306	DEFISIT
Nonggunong	13,032	0.031	0.068	0.459	DEFISIT
Gayam	30,317	0.022	0.066	0.336	DEFISIT
Raas	10,704	0.020	0.068	0.291	DEFISIT
Sapeken	67,796	0.022	0.066	0.334	DEFISIT
Arjasa	82,589	0.101	0.065	1.561	SURPLUS
Kangayan	32,553	0.053	0.066	0.809	DEFISIT
Masalembu	21,869	0.000	0.069	0.005	DEFISIT
Kabupaten Sumenep	**1,211,299**	**0.030**	**0.060**	**0.499**	**DEFISIT**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

Sesuai dengan tabel proyeksi Daya Dukung Pertanian (Pangan) Kabupaten Sumenep hingga tahun 2029, diperoleh bahwa Daya Dukung Pertanian (Pangan) hingga tahun

2029 DEFISIT. Hal tersebut sesuai dengan kondisi eksisting dari Daya Dukung Pertanian (Pangan) yang juga memiliki kondisi DEFISIT, maka, dapat dikatakan Daya Dukung Pertanian (Pangan) di Kabupaten Sumenep tidak memiliki perubahan status.



Gambar II-3 Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Sumenep

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

b. Daya Dukung Sumber Daya Air

Daya dukung sumber daya air suatu wilayah merupakan parameter yang memperlihatkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air atau dapat didefinisikan sebagai kemampuan maksimal wilayah menyediakan air bagi penduduk dalam jumlah tertentu beserta kegiatannya. Apabila daya dukung untuk suatu wilayah telah terlampaui, maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak bisa mendapatkan air dalam jumlah yang memadai sehingga terjadilah gejala krisis air atau defisit air. Untuk mengetahui daya dukung sumber daya air Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini:

Tabel II-11 Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep

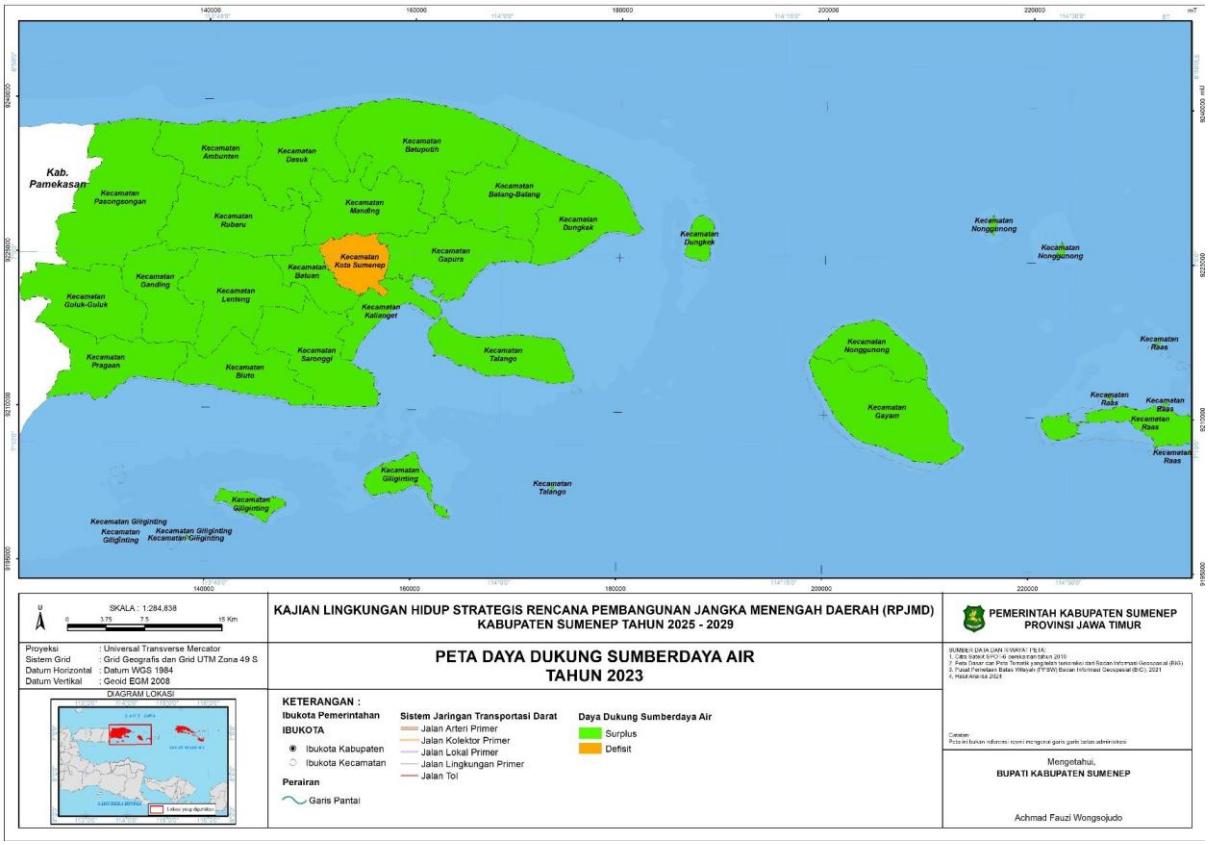
Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Daya Dukung Air		Keterangan
Pragaan	32,633,573	20,084,931	12,548,642	1.624778931	SURPLUS
Bluto	28,737,259	14,966,687	13,770,572	1.920081495	SURPLUS

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Daya Dukung Air		Keterangan
Saronggi	39,134,868	11,816,666	27,318,202	3.311836813	SURPLUS
Giligenting	18,910,936	7,375,852	11,535,084	2.563898508	SURPLUS
Talango	27,516,440	11,664,283	15,852,157	2.35903394	SURPLUS
Kalianget	46,264,883	12,616,588	33,648,295	3.666988519	SURPLUS
Kota Sumenep	19,202,801	22,478,624	-3,275,823	0.854269416	DEFISIT
Batuan	13,290,830	4,071,084	9,219,746	3.264690641	SURPLUS
Lenteng Ganding	36,827,502	19,255,164	17,572,338	1.912603902	SURPLUS
Ganding	30,241,004	11,313,183	18,927,821	2.673076464	SURPLUS
Guluk-guluk	29,611,962	15,151,131	14,460,832	1.954439134	SURPLUS
Pasongsongan	49,244,766	15,622,152	33,622,615	3.152239675	SURPLUS
Ambunten	25,642,152	12,338,623	13,303,529	2.078202087	SURPLUS
Rubaru	37,155,170	12,257,336	24,897,835	3.031259954	SURPLUS
Dasuk	30,234,011	9,487,654	20,746,357	3.186668788	SURPLUS
Manding	31,967,364	9,206,042	22,761,322	3.472433062	SURPLUS
Batuputih	51,482,917	13,809,389	37,673,528	3.728109638	SURPLUS
Gapura	36,077,480	11,649,081	24,428,399	3.097023656	SURPLUS
Batang Batang	45,017,765	16,673,298	28,344,467	2.699991608	SURPLUS
Dungkek	32,558,431	11,181,964	21,376,467	2.911691704	SURPLUS
Nonggunong	14,273,982	4,415,367	9,858,615	3.232796308	SURPLUS
Gayam	42,027,343	10,094,119	31,933,223	4.163547287	SURPLUS
Raas	20,747,384	9,582,869	11,164,515	2.16504938	SURPLUS
Sapeken	55,200,320	16,211,254	38,989,066	3.405061768	SURPLUS
Arjasa	72,652,960	25,053,573	47,599,387	2.899904113	SURPLUS
Kangayan	46,751,111	8,040,260	38,710,851	5.814626897	SURPLUS
Masalembu	26,484,961	7,733,969	18,750,992	3.424497884	SURPLUS
Kabupaten Sumenep	**939,890,175**	**344,151,141**	**595,739,033**	**2.731038958**	**SURPLUS**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

Secara umum status daya dukung sumber daya air di Kabupaten Sumenep berada pada kondisi "Surplus", dimana kecamatan yang memiliki status defisit hanya satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Sumenep. Kebutuhan air penduduk Kabupaten Sumenep mencapai 344,151,141 m3 per tahun dengan asumsi berdasarkan jumlah penduduk tahun 2023. Hasil antara ketersediaan dan kebutuhan air akan dibandingkan untuk mengetahui kondisi daya dukung eksisting. Jumlah kebutuhan lebih kecil dibandingkan ketersediaan sehingga daya dukung air Kabupaten Sumenep Surplus secara agregat. Hal yang harus menjadi perhatian bahwa perhitungan ini

hanya melihat sudut pandang penyerapan air hujan, padahal sumber air masyarakat tidak hanya mengandalkan air tanah dalam memenuhi kebutuhannya. Walaupun begitu, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan dalam rangka penyediaan air. Sebaran daya dukung lahan sumber daya air di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada peta di bawah ini :



Gambar II-4 Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

Selain kondisi Eksisting Daya Dukung Sumberdaya Air , terdapat proyeksi dari Daya Dukung Sumberdaya air yang memproyeksi hingga 5 tahun kedepan atau hingga tahun 2029. Adapun proyeksi dari Daya Dukung Sumberdaya Air dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

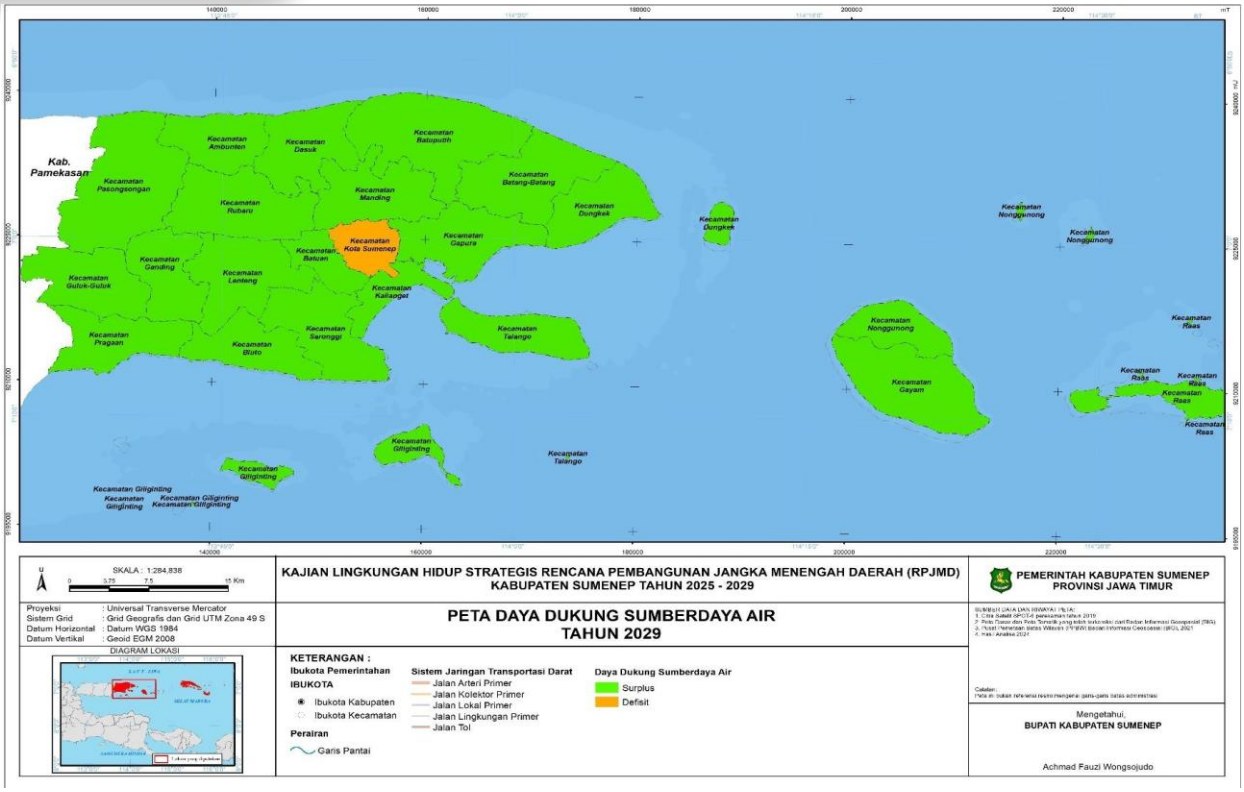
Tabel II-12 Proyeksi Daya Dukung Sumberdaya Air di Kabupaten Sumenep

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/ Tahun)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun) Tahun 202G	Daya Dukung Air		Keterangan
Pragaan	32,633,573	26,348,072	6,285,502	1.23855642	SURPLUS
Bluto	28,737,259	21,165,063	7,572,195	1.357768617	SURPLUS
Saronggi	39,134,868	15,684,491	23,450,377	2.495131535	SURPLUS
Giligenting	18,910,936	10,213,787	8,697,149	1.851510677	SURPLUS

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/ Tahun)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun) Tahun 202G	Daya Dukung Air		Keterangan
Talango	27,516,440	14,541,885	12,974,554	1.892219549	SURPLUS
Kalianget	46,264,883	16,303,650	29,961,233	2.837700923	SURPLUS
Kota Sumenep	19,202,801	31,715,979	-12,513,178	0.605461396	DEFISIT
Batuan	13,290,830	5,201,640	8,089,190	2.555123049	SURPLUS
Lenteng Ganding	36,827,502	24,903,971	11,923,531	1.478780332	SURPLUS
Ganding	30,241,004	14,809,715	15,431,289	2.041970635	SURPLUS
Guluk-guluk	29,611,962	19,392,714	10,219,248	1.526963264	SURPLUS
Pasongsongan	49,244,766	21,038,877	28,205,889	2.34065565	SURPLUS
Ambunten	25,642,152	15,800,295	9,841,857	1.62289068	SURPLUS
Rubaru	37,155,170	16,071,539	21,083,631	2.311861303	SURPLUS
Dasuk	30,234,011	12,729,643	17,504,368	2.375087055	SURPLUS
Manding	31,967,364	12,205,256	19,762,108	2.61914729	SURPLUS
Batuputih	51,482,917	17,863,011	33,619,906	2.882096195	SURPLUS
Gapura	36,077,480	16,223,980	19,853,499	2.22371321	SURPLUS
Batang Batang	45,017,765	21,403,526	23,614,239	2.103287342	SURPLUS
Dungkek	32,558,431	14,023,263	18,535,168	2.321744297	SURPLUS
Nonggunong	14,273,982	4,756,631	9,517,352	3.000859847	SURPLUS
Gayam	42,027,343	11,065,689	30,961,653	3.797986849	SURPLUS
Raas	20,747,384	6,239,237	14,508,147	3.325307922	SURPLUS
Sapeken	55,200,320	24,745,648	30,454,671	2.230708142	SURPLUS
Arjasa	72,652,960	30,145,026	42,507,934	2.410114359	SURPLUS
Kangayan	46,751,111	11,881,670	34,869,441	3.934725684	SURPLUS
Masalembu	26,484,961	7,982,361	18,502,600	3.317935681	SURPLUS
Kabupaten Sumenep	**939,890,175**	**444,456,622**	**495,433,553**	**2.114694951**	**SURPLUS**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

Sesuai dengan tabel proyeksi Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Sumenep hingga tahun 2029, diperoleh bahwa Daya Dukung Sumberdaya Air hingga tahun 2029 SURPLUS. Hal tersebut sesuai dengan kondisi eksisting dari Daya Dukung Sumberdaya Air yang juga memiliki kondisi SURPLUS maka, dapat dikatakan Daya Dukung Sumberdaya Air di Kabupaten Sumenep tidak memiliki perubahan status.



Gambar II-5 Proyeksi Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

c. Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya dukung lahan permukiman merepresentasikan seberapa banyak orang yang dapat ditampung oleh suatu wilayah tanpa menyebabkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas hidup. Konsep ini melibatkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan tidak melebihi kapasitas yang dapat ditopang oleh lingkungan antara lain ketersediaan sumber daya alam, kualitas lingkungan, infrastruktur yang ada, dan kapasitas layanan publik. Untuk mengetahui daya dukung lahan permukiman di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.

Tabel II-13 Daya Dukung Lahan Permukiman

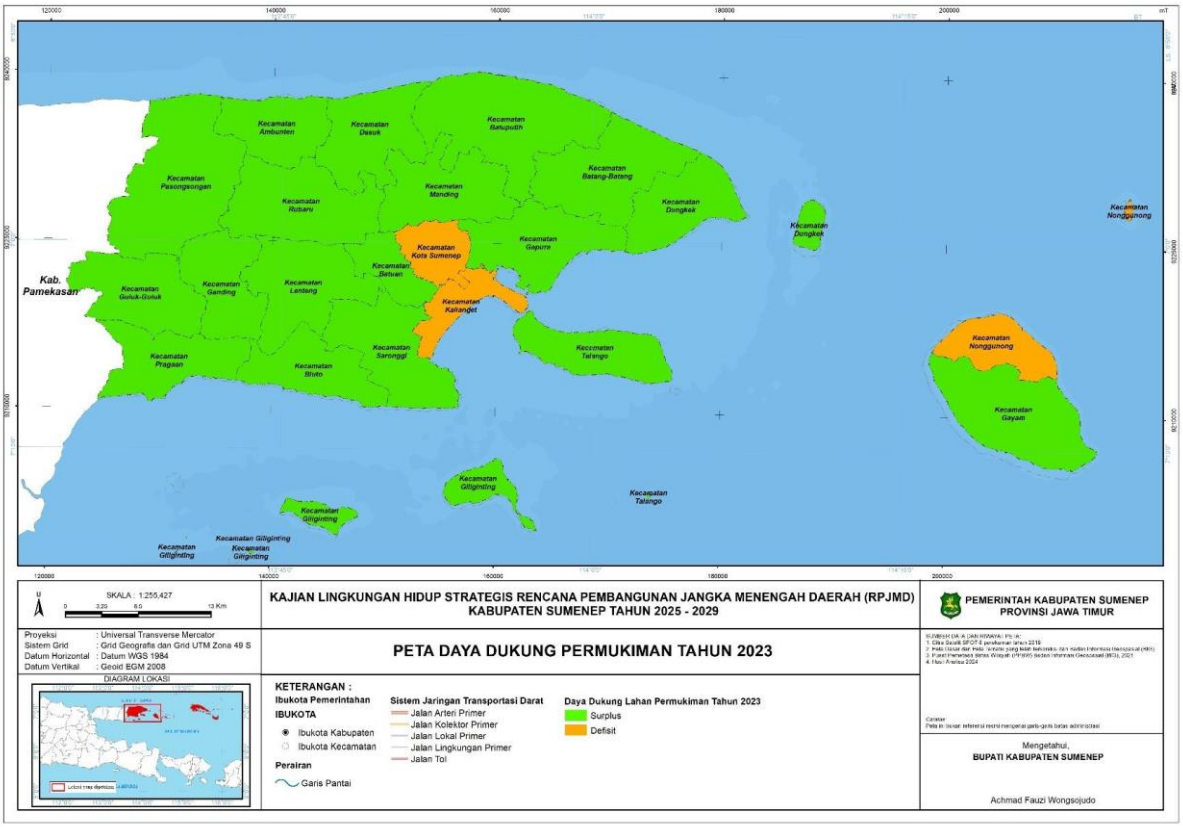
Kecamatan	Luas Lahan yang Layak untuk Permukiman (M2)	Jumlah Penduduk (2023)	Koefisien Luas Kebutuhan Ruang (M2/ Kapita)	Daya Dukung Permukiman	Keterangan
Pragaan	12,180,000	67,193	150	1.208	SURPLUS
Bluto	8,835,000	49,319	150	1.194	SURPLUS
Saronggi	8,728,900	38,607	150	1.507	SURPLUS
Giligenting	7,118,000	24,534	150	1.934	SURPLUS

Kecamatan	Luas Lahan yang Layak untuk Permukiman (M2)	Jumlah Penduduk (2023)	Koefisien Luas Kebutuhan Ruang (M2/ Kapita)	Daya Dukung Permukiman	Keterangan
Talango	8,292,000	38,743	150	1.427	SURPLUS
Kalianget	5,580,000	42,791	150	0.869	DEFISIT
Kota Sumenep	10,406,600	76,409	150	0.908	DEFISIT
Batuan	2,753,000	13,591	150	1.350	SURPLUS
Lenteng Ganding	12,225,000	62,574	150	1.302	SURPLUS
Ganding	10,860,000	36,989	150	1.957	SURPLUS
Guluk-guluk	9,875,000	50,357	150	1.307	SURPLUS
Pasongsongan	11,370,000	51,945	150	1.459	SURPLUS
Ambuten	9,410,000	40,894	150	1.534	SURPLUS
Rubaru	9,603,000	40,343	150	1.587	SURPLUS
Dasuk	9,347,000	31,102	150	2.004	SURPLUS
Manding	8,495,000	30,467	150	1.859	SURPLUS
Batuputih	16,070,000	44,894	150	2.386	SURPLUS
Gapura	9,270,000	38,751	150	1.595	SURPLUS
Batang Batang	16,430,000	55,690	150	1.967	SURPLUS
Dungkek	11,517,000	36,637	150	2.096	SURPLUS
Nonggunong	1,290,000	13,479	150	0.638	DEFISIT
Gayam	10,450,000	32,020	150	2.176	SURPLUS
Raas	6,400,000	32,165	150	1.326	SURPLUS
Sapeken	9,190,000	55,011	150	1.114	SURPLUS
Arjasa	9,220,000	84,729	150	0.725	DEFISIT
Kangayan	3,760,000	26,974	150	0.929	DEFISIT
Masalembu	4,550,000	26,002	150	1.167	SURPLUS
Kabupaten Sumenep	**243,225,500**	**1,142,210**	**150**	**1.420**	**243,225,500**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

Dari hasil perhitungan tabel Daya Dukung permukiman Kabupaten Sumenep di atas menunjukkan bahwa secara umum skor hitung t pada tabel diatas memiliki skor 1,420. Angka tersebut memiliki skor >1 dengan mengindikasikan bahwa kapasitas wilayah tersebut untuk menampung penduduk lebih besar daripada jumlah penduduk yang ada saat ini sehingga wilayah tersebut memiliki potensi untuk pengembangan permukiman di masa depan. Dari 28 kecamatan, sebanyak 23 kecamatan memiliki skor >1 dengan skor tertinggi diperoleh di Kecamatan Batuputih (2,386) dan 5 kecamatan memiliki skor <1 yaitu Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan.

Sebaran wilayah daya dukung permukiman di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada peta di bawah ini :



Gambar II-6 Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

Selain kondisi Eksisting Daya Dukung Lahan Permukiman , terdapat proyeksi dari Daya Dukung Lahan Permukiman yang memproyeksi hingga 5 tahun kedepan atau hingga tahun 2029. Adapun proyeksi dari Daya Dukung Lahan Permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

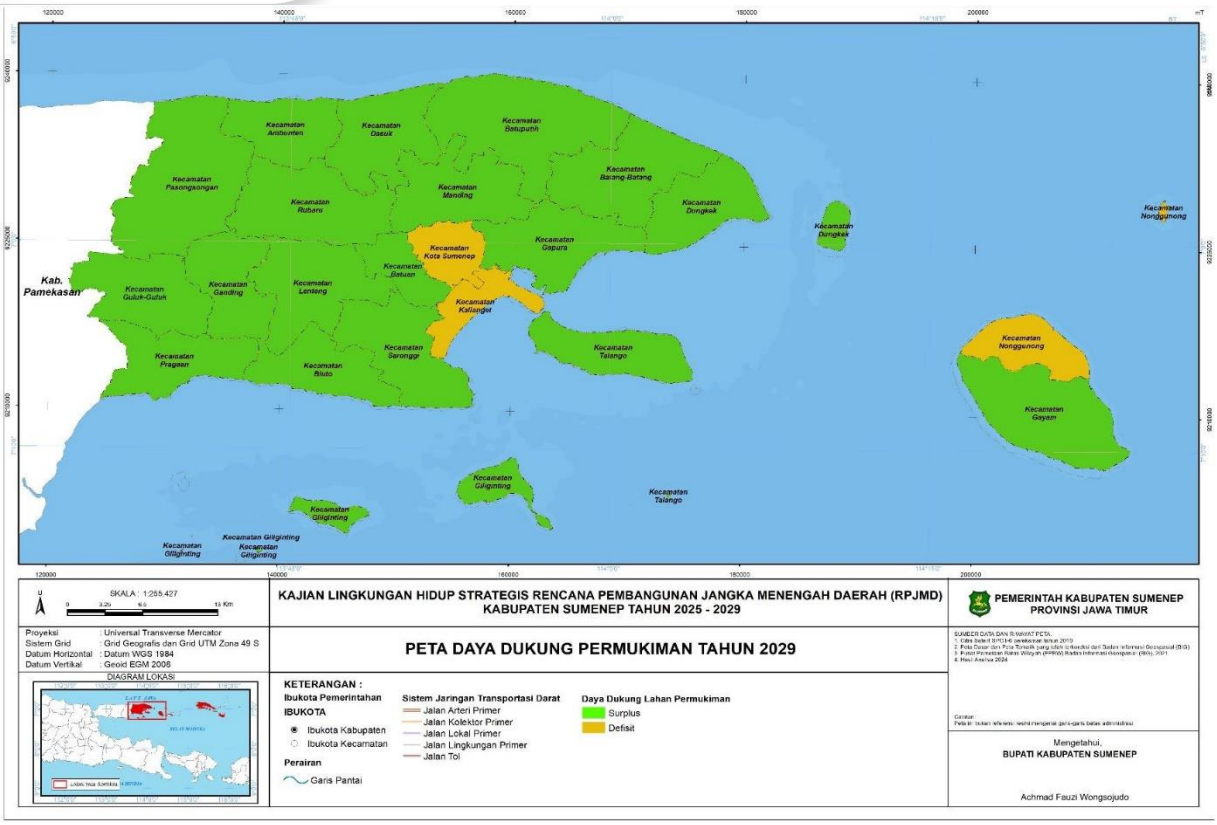
Tabel II-14 proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman

Kecamatan	Luas Lahan yang Layak untuk Permukiman (M2)	Jumlah Penduduk (2029)	Koefisien Luas Kebutuhan Ruang (M2/ Kapita)	Daya Dukung Permukiman	Keterangan
Pragaan	12,180,000	72,186	150	1.125	SURPLUS
Bluto	8,835,000	57,986	150	1.016	SURPLUS
Saronggi	8,728,900	42,971	150	1.354	SURPLUS
Giligenting	7,118,000	27,983	150	1.696	SURPLUS
Talango	8,292,000	39,841	150	1.388	SURPLUS
Kalianget	5,580,000	44,668	150	0.833	DEFISIT
Kota Sumenep	10,406,600	86,893	150	0.798	DEFISIT

Kecamatan	Luas Lahan yang Layak untuk Permukiman (M2)	Jumlah Penduduk (2029)	Koefisien Luas Kebutuhan Ruang (M2/ Kapita)	Daya Dukung Permukiman	Keterangan
Batuan	2,753,000	14,251	150	1.288	SURPLUS
Lenteng Ganding	12,225,000	68,230	150	1.194	SURPLUS
Ganding	10,860,000	40,575	150	1.784	SURPLUS
Guluk-guluk	9,875,000	53,131	150	1.239	SURPLUS
Pasongsongan	11,370,000	57,641	150	1.315	SURPLUS
Ambuten	9,410,000	43,288	150	1.449	SURPLUS
Rubaru	9,603,000	44,032	150	1.454	SURPLUS
Dasuk	9,347,000	34,876	150	1.787	SURPLUS
Manding	8,495,000	33,439	150	1.694	SURPLUS
Batuputih	16,070,000	48,940	150	2.189	SURPLUS
Gapura	9,270,000	44,449	150	1.390	SURPLUS
Batang Batang	16,430,000	58,640	150	1.868	SURPLUS
Dungkek	11,517,000	38,420	150	1.998	SURPLUS
Nonggunong	1,290,000	13,032	150	0.660	DEFISIT
Gayam	10,450,000	30,317	150	2.298	SURPLUS
Raas	6,400,000	10,704	150	2.496	SURPLUS
Sapeken	9,190,000	67,796	150	0.904	DEFISIT
Arjasa	9,220,000	82,589	150	0.744	DEFISIT
Kangayan	3,760,000	32,553	150	0.770	DEFISIT
Masalembu	4,550,000	21,869	150	1.387	SURPLUS
Kabupaten Sumenep	**243,225,500**	**1,211,299**	**150**	**1.339**	**SURPLUS**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

Sesuai dengan tabel proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Sumenep hingga tahun 2029, diperoleh bahwa Daya Dukung Lahan Permukiman hingga tahun 2029 SURPLUS. Hal tersebut sesuai dengan kondisi eksisting dari Daya Dukung Lahan Permukiman yang juga memiliki kondisi SURPLUS maka, dapat dikatakan Daya Dukung Lahan Permukiman di Kabupaten Sumenep tidak memiliki perubahan status.



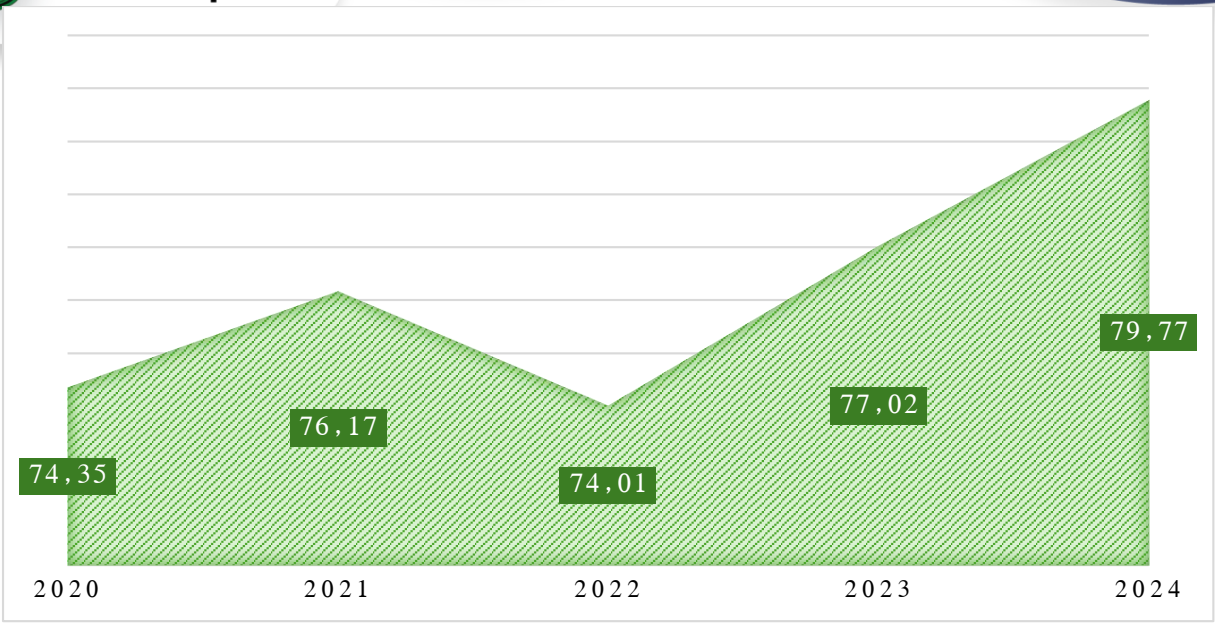
Gambar II-7 Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (diolah), 2024

2.1.2.4 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

2.1.2.4.1 INDEKS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. Tersedianya informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Berikut merupakan capaian skor Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024:



Gambar II-8 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

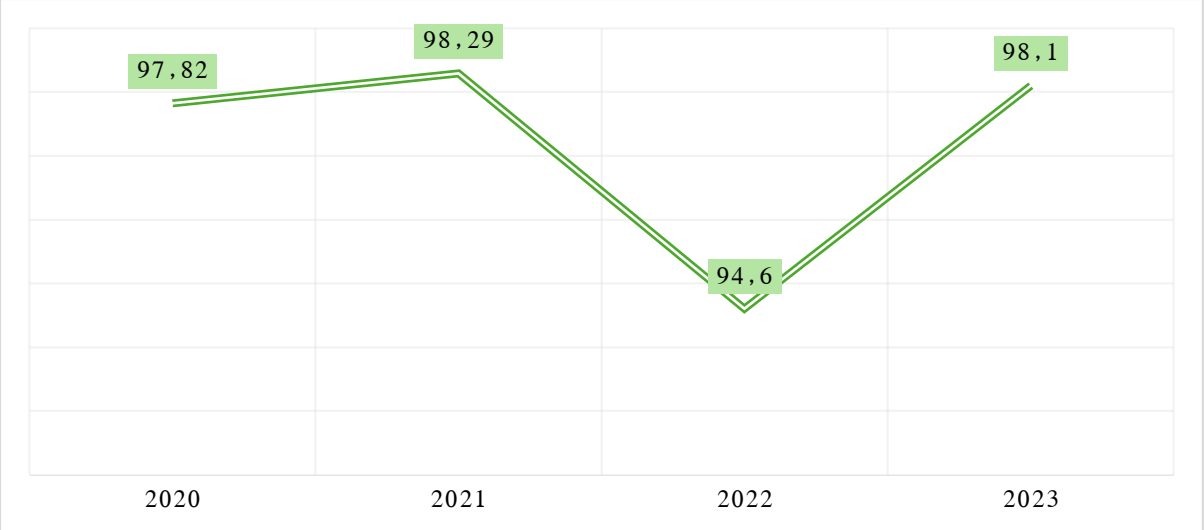
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif, namun dalam dua tahun terakhir ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 74,35 dan meningkat sedikit menjadi 76,17 di tahun 2021. Lonjakan konsisten terjadi di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai 77,02 pada tahun 2023 dan 79,77 pada tahun 2024. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian yang merupaka sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022, akan tetapi nilai indeks 2 tahun setelahnya meningkat dan meraih capaian terbaik dalam periode 2020-2024 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep masih cukup baik, meskipun tetap perlu upaya untuk meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian.

2.1.2.4.2 AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP KONSUMSI AIR MINUM

Gambaran daerah yang berketahanan air sebagai upaya mencapai tujuan SDGs pada tahun 2030 pada Tujuan Keenam yaitu Akses Air Bersih dan Sanitasi, menetapkan bahwa rumah tangga dianggap memiliki akses terhadap sumber air minum layak jika menggunakan air dari PDAM, sumur bor yang terlindungi, mata air yang terlindungi, air hujan yang dikelola dengan baik, atau air kemasan dengan kualitas terjamin. Ketersediaan sumber air minum menjadi indikator krusial dalam

meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup warga. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan, Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises), Tersedia setiap saat dibutuhkan, dan Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023. Adapun perhitungan untuk akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yaitu, Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan = Jumlah rumah tangga dengan akses Perpipaan di Perkotaan / Jumlah Rumah Tangga Perkotaan x 100%. Berikut merupakan capaian rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap konsumsi air minum dalam rentang tahun 2020-2023 di Kabupaten Sumenep:.



Gambar II-9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

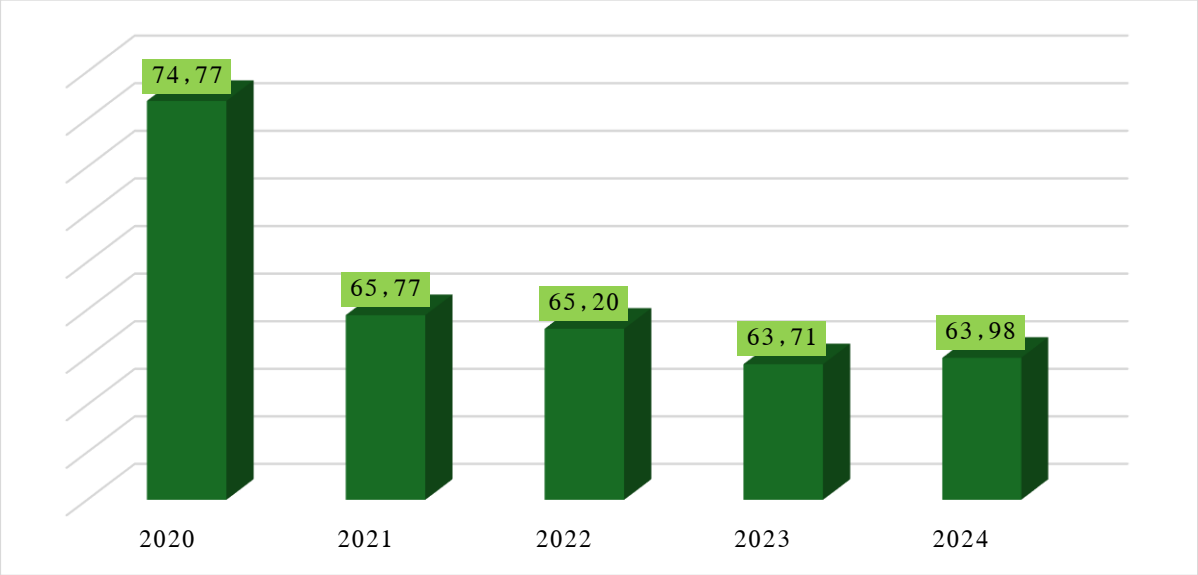
Persentase rumah tangga dengan akses terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Sumenep menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2023, dengan angka tertinggi sebesar 98,29% pada 2021, dan dengan capaian akhir di angka 98,1% di tahun 2023. Berdasarkan grafik di atas akses terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Sumenep sudah sangat baik dan mendekati sempurna, walaupun sempat menurun di tahun 2022. Meskipun cakupan akses air minum layak sudah tinggi, namun masih terdapat daerah yang menghadapi tantangan, terutama di wilayah rawan kekeringan.

Berdasarkan standar SDGs, akses air minum layak idealnya mencapai 100% untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan terutama di daerah yang masih menghadapi kendala dalam penyediaan air bersih. Meskipun capaian Kabupaten Sumenep selama periode ini sudah cukup baik dengan rata-rata di atas 90%,

2.1.2.5 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

2.1.2.5.1 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Untuk dapat mengetahui kondisi kualitas lingkungan hidup, indikator yang mampu merepresentasikan hal tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut merupakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024:



Gambar II-10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, 2025

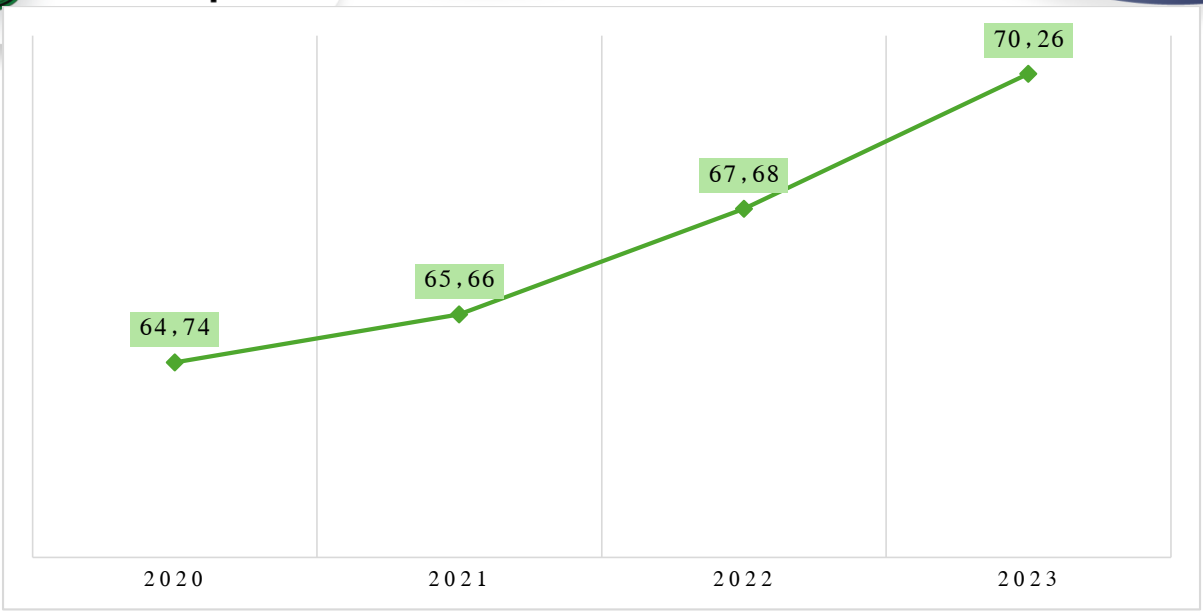
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sumenep menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, dengan penurunan signifikan dari 74.77 hingga titik terendah di 63.71, sebelum mengalami sedikit pemulihan menjadi 63.98 di tahun 2024. Masih banyak terdapat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep mengindikasikan bahwa upaya

rehabilitasi lingkungan, termasuk program penghijauan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta penguatan regulasi terkait tata ruang, perlu menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kembali IKLH di masa mendatang.

Dari nilai capaian IKLH di Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024 yang mengalami penurunan, disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor dari komponen IKLH yang antara lain yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Faktor permasalahan yang menyebabkan menurunnya nilai IKLH yaitu antara lain pembakaran terbuka (sampah/limbah pertanian) dan emisi transportasi antarpulau saat musim kering dapat menurunkan IKU secara episodik apabila penegakan & layanan persampahan belum optimal, aktivitas pesisir/laut dan pelayaran (serta potensi risiko dari kegiatan migas lepas pantai/antar-pulau) menambah sumber tekanan pada kualitas perairan bila pengawasan/standar lingkungan tidak ketat, degradasi/penyusutan mangrove historis cukup nyata di wilayah pesisir Sumenep dan upaya rehabilitasi beberapa tahun terakhir terkendala kewenangan & anggaran—keduanya menahan perbaikan IKL dan Ekspansi/aktivitas lahan garam yang luas (±1.700–2.000 ha aktif beberapa musim) berpotensi mengubah mosaik tutupan lahan pesisir bila tidak diimbangi zona hijau/mangrove buffer.

2.1.2.5.2 RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN

Indikator rumah tangga dengan sanitasi aman merujuk pada berbagai parameter yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, sehat, dan tidak mencemari lingkungan. Sanitasi aman berarti seluruh limbah domestik, termasuk tinja dan air limbah, dikelola dengan cara yang higienis sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Di Kabupaten Sumenep, berikut merupakan capaian rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap sanitasi aman dalam rentang tahun 2020-2023:



Gambar II-11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

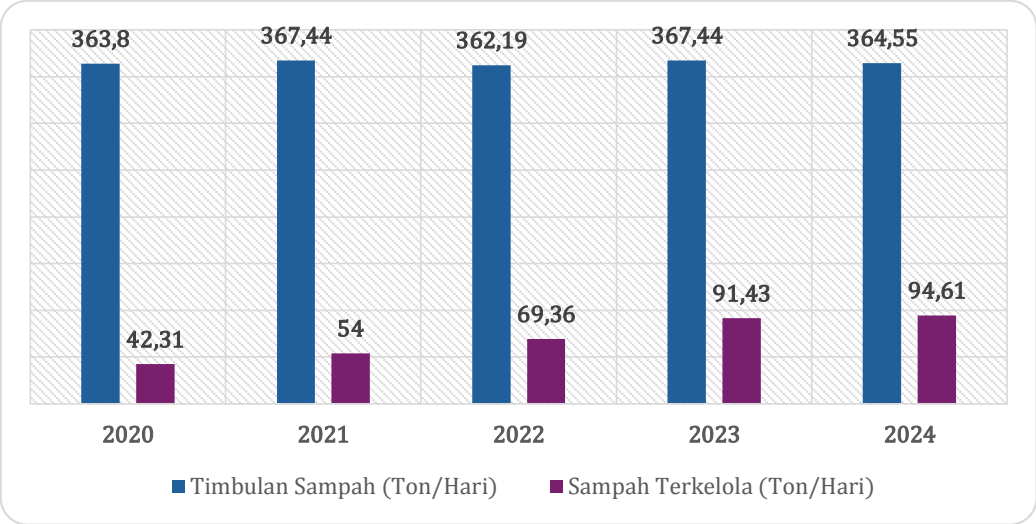
Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Sumenep meningkat dari 64,74% pada 2020 menjadi 70,26% pada 2023, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam periode tersebut. Meskipun tren ini positif, pencapaian 100% sanitasi aman sesuai target SDGs Tujuan Keenam yaitu Akses Air Bersih dan Sanitasi pada tahun 2030 masih sulit tanpa percepatan signifikan. Diperlukan dorongan melalui investasi infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan dukungan program pemerintah agar akses sanitasi layak dapat mencapai target lebih cepat.

2.1.2.5.3 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pengelolaan persampahan adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam upaya mengurangi serta menangani sampah sejak dari sumber, melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha. Hal tersebut telah tertuang didalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Didalam pengelolaan persampahan membahas mengenai timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah mengacu pada jumlah atau volume sampah yang berhasil dikumpulkan dan diproses di berbagai

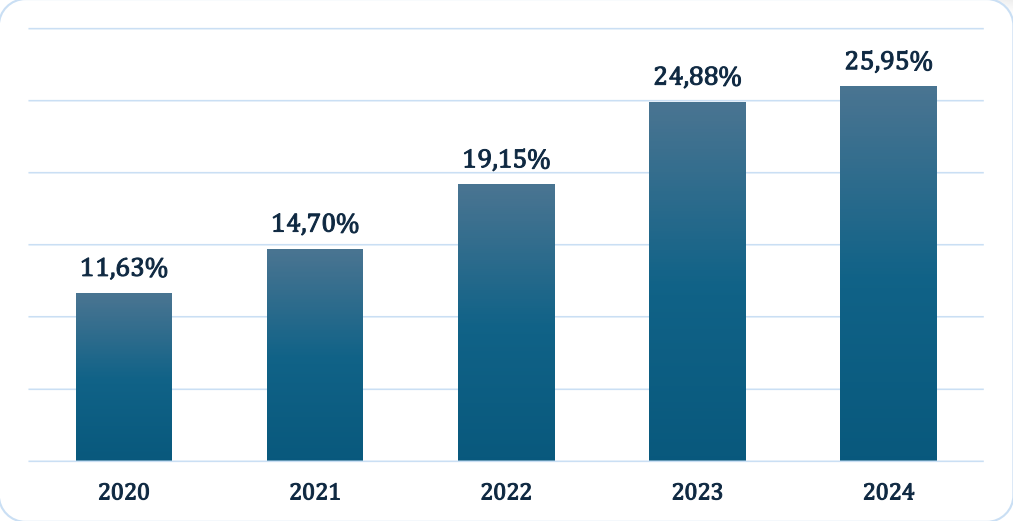
fasilitas pengelolaan sampah, sehingga mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pengolahan timbulan sampah di fasilitas pengelolaan merupakan langkah krusial dalam manajemen sampah yang berkelanjutan. Berikut merupakan capaian pengolahan timbulan sampah di fasilitas pengolahan sampah pada Kabupaten Sumenep periode 2021-2024:



Gambar II-12 Timbulan Sampah dan Sampah Terkelola di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, 2025

Sesuai dengan grafik diatas, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren fluktuatif, namun menurun apabila dibandingkan dengan capaian 2023. Pada tahun 2024, Kabupaten Sumenep menghasilkan sampah yang terolah sekitar 94,61 ton/hari. Mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang menghasilkan sekitar 91,43 ton/hari. Selanjutnya di bawah ini akan disajikan data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Sumenep :



Gambar II-13 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, 2025

Pada gambar Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Sumenep diatas, memiliki tren yang meningkat dengan capaian tahun 2024 adalah sebesar 25,95%. Nilai capaian yang mengalami peningkatan tetap memiliki beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Permasalahan mengenai persampahan yang mengikuti jumlah penduduk yang semakin bertambah menjadi masalah yang harus dihadapi dari sisi pengelolaan persampahan. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi adalah TPA Torbang kelebihan muatan, sementara alternatif TPST yang belum merata, perilaku masyarakat dalam pemilahan sampah yang masih minim, masih banyak sampah liar, dan kapasitas mesin pengolahan yang masih terbatas dengan jumlah timbulan sampah yang meningkat.

2.1.2.6 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

2.1.2.6.1 PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK KUMULATIF

Indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu wilayah, sektor, atau negara dalam mengurangi emisi GRK relatif terhadap pertumbuhan ekonominya. Indeks ini biasanya dinyatakan dalam ton CO_2e per unit PDB (Produk Domestik Bruto) atau dalam bentuk persentase penurunan emisi. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi faktor kunci dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu salah satu indikator penting dalam menilai tingkat ketahanan suatu

daerah adalah penurunan intensitas gas rumah kaca (GRK), yang mencerminkan efektivitas kebijakan mitigasi perubahan iklim

Berdasarkan data dari website AKSARA milik Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, Kabupaten Sumenep telah melaksanakan 84 Kegiatan Aksi PRK Perubahan Iklim dengan total 94528,3 Ton CO2EQ Total Potensi Penurunan Emisi Kumulatif serta 2.6 Ton CO2EQ / Milyar Rupiah Intensitas Emisi.

Tabel II-15 Penurunan Intensitas Emisi GRK Kumulatif di Kabupaten Sumenep

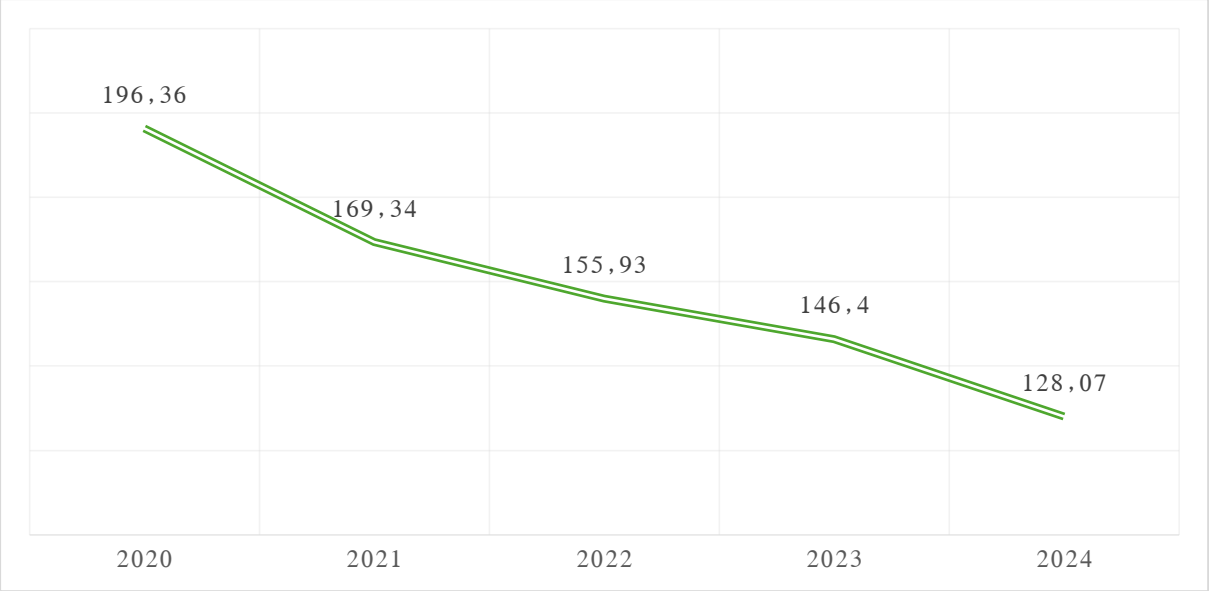
Total	Ton CO2EQ				
pencapaian	2020	2021	2022	2023	2024
penurunan emisi GRK	169,6421	1.030,7052	84.643,0152	85.517,1849	94.528,2999

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Berdasarkan tabel terbaru di atas, menunjukkan bahwa total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 mengalamipeningkatan potensi penurunan emisi sebesar 9.011,115 ton CO2e atau apabila dipresentasekan kenaikannya sebesar 10,54%. Artinya ada upaya positif dan kemajuan yang dilakukan Kabupaten Sumenep dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, namun perlu untuk ditinjau ulang kembali apakah capaian tersebut cukup untuk mencapai target net zero emissions dalam jangka panjang atau hanya sementara saja.

2.1.2.6.2 INDEKS RISIKO BENCANA

Dalam mengukur atau menilai Tingkat risiko bencana yang dihadapi oleh suatu wilayah maka Pemerintah Indonesia menggunakan indeks resiko bencana. Indeks resiko bencana ini biasanya merupakan hasil dari analisis yang menggabungkan berbagai faktor, seperti potensi bahaya, kerentanan dan kapasitas adaptasi atau kesiapsiagaan suatu wilayah. Adapun indeks Resiko Bencana yang ada di Kabupaten Sumenep periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar II-14 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: BNPB, 2025

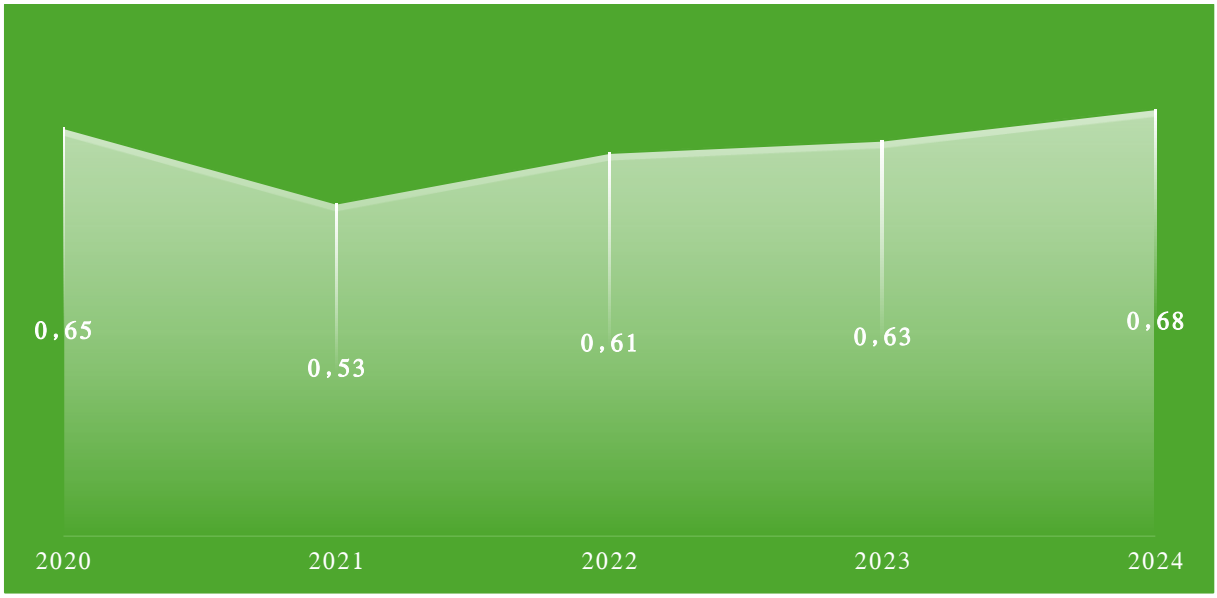
Berdasarkan pada kajian risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dapat dilihat bahwa Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sumenep mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 capaian menujukkan di angka 196,36, namun pada tahun 2024 terjadi penyesuaian capaian dengan basis data bencana dan kerentanan tahun 2021 (H&V 2021). Capaian Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berdasarkan buku IRBI 2024 yang dikeluarkan oleh BNPB (dg H&V 2021) sebesar 128,07. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berhasil melakukan pengurangan terhadap risiko bencana melalui program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui desa Tangguh bencana (destana), mitigasi bencana, pemenuhan logistik, peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

Berdasarkan data capaian IRB Kabupaten Sumenep yang semakin menurun, dapat disimpulkan bahwa upaya Kabupaten Sumenep dalam mitigasi dan penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana sudah sangat baik, namun jika mengacu pada jumlah kerugian dan jumlah kejadian bencana khususnya pada tahun 2022 yang terjadi peningkatan, maka dapat dikatakan bahwa capaian IRB Kabupaten Sumenep yang menurun pada tahun 2022 tidak sejalan dengan jumlah kerugian akibat bencana. Namun jika dilihat secara lebih detail pada jumlah bencana yang terjadi berdasarkan jenis bencana pada tahun 2021 sampai tahun 2023, maka jenis bencana yang kejadiannya paling banyak adalah angin puting beliung dan hujan deras dan angin kencang. Pada tahun 2021 jumlah kejadian bencana angin puting beliung sebanyak

85 kejadian dan jumlah kejadian bencana hujan deras dan angin kencang sebanyak 119 kejadian. Pada tahun 2022 jumlah kedua jenis bencana tersebut meningkat, bencana angin puting beliung sebanyak 68 kejadian dan bencana hujan deras dan angin kencang sebanyak 202 kejadian. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah kejadian bencana angin puting beliung sebanyak 9 kejadian dan bencana hujan deras dan angin kencang sebanyak 145 kejadian.

2.1.2.6.3 INDEKS KETAHANAN DAERAH

Dalam upaya untuk mengukur tingkat kesiapan, kemampuan, dan daya tahan suatu daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat lingkungan, sosial, ekonomi, maupun bencana. Maka dibentuklah indikator yang diberi nama Indikator Ketahanan Daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah dapat bertahan, beradaptasi, dan pulih dari tekanan atau gangguan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Sumenep di tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar II-15 Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Kabupaten Sumenep, 2025

Berdasarkan grafik di atas, tren skor Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir secara umum mengalami peningkatan sedikit dari 0,65 pada tahun 2020 menjadi 0,68 hingga 2024. Peningkatan IKD mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek ketahanan daerah terhadap bencana, yang bisa berasal dari penguatan kebijakan mitigasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau perbaikan infrastruktur kebencanaan. Namun, penurunan indeks

di tahun 2022 mengindikasikan bahwa laju peningkatan ketahanan daerah juga menghadapi hambatan dalam penguatan lebih lanjut. Sehingga untuk meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Sumenep seiring fluktuasi nilai Indeks Risiko Bencana yang ada, diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga dan mengoptimalkan investasi dalam sarana dan prasarana kebencanaan agar lebih adaptif terhadap ancaman yang terus berkembang diikuti peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana karena merupakan tanggungjawab bersama.

2.1.2.7 DEMOGRAFI

Kondisi demografi merupakan penjelasan terkait karakteristik populasi manusia dalam suatu wilayah yang di dalamnya mencakup aspek-aspek seperti jumlah penduduk, distribusi, struktur, dan dinamika populasi. Secara keseluruhan, kondisi demografi memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik penduduk dalam suatu wilayah dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Berikut merupakan kondisi demografi Kabupaten Sumenep Tahun 2024:

Tabel II-16 Struktur Demografi Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024	Rasio Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
Pragaan	67.621	1,41	94,21	1169
Bluto	40.765	4,38	95,12	971
Saronggi	39.007	3,66	91,61	576
Giligenting	24.006	-0,63	89,26	792
Talango	38.720	-0,06	87,10	770
Kalianget	42.697	0,61	95,08	1414
Kota Sumenep	76.701	1,24	94,47	2755
Batuan	13.852	4,21	94,20	511
Lenteng	62.606	1,71	92,45	877
Ganding	37.326	2,47	92,96	692
Guluk Guluk	50.498	0,74	93,12	848
Pasongsongan	52.023	-0,54	96,89	437
Ambunten	40.832	1,28	89,31	808
Rubaru	40.681	2,94	92,19	482
Dasuk	31.424	3,78	93,33	487
Manding	30.611	2,60	92,51	444

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024	Rasio Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
Batuputih	45.000	2,61	91,40	401
Gapura	38.871	4,04	91,80	591
Batang Batang -	55.781	1,52	91,98	694
Dungkek	36.821	1,27	89,14	581
Nonggunong	13.597	-1,97	90,94	339
Gayam	32.012	-1,70	88,51	362
Raas	32.420	-19,47	92,98	833
Sapeken	55.416	6,39	99,43	274
Arjasa	83.986	-3,67	97,72	347
Kangayan	25.178	-4,96	98,93	123
Masalembu	25.550	-3,36	98,22	625
Kabupaten Sumenep	**1.143.002**	**0,42**	**93,44**	**546**

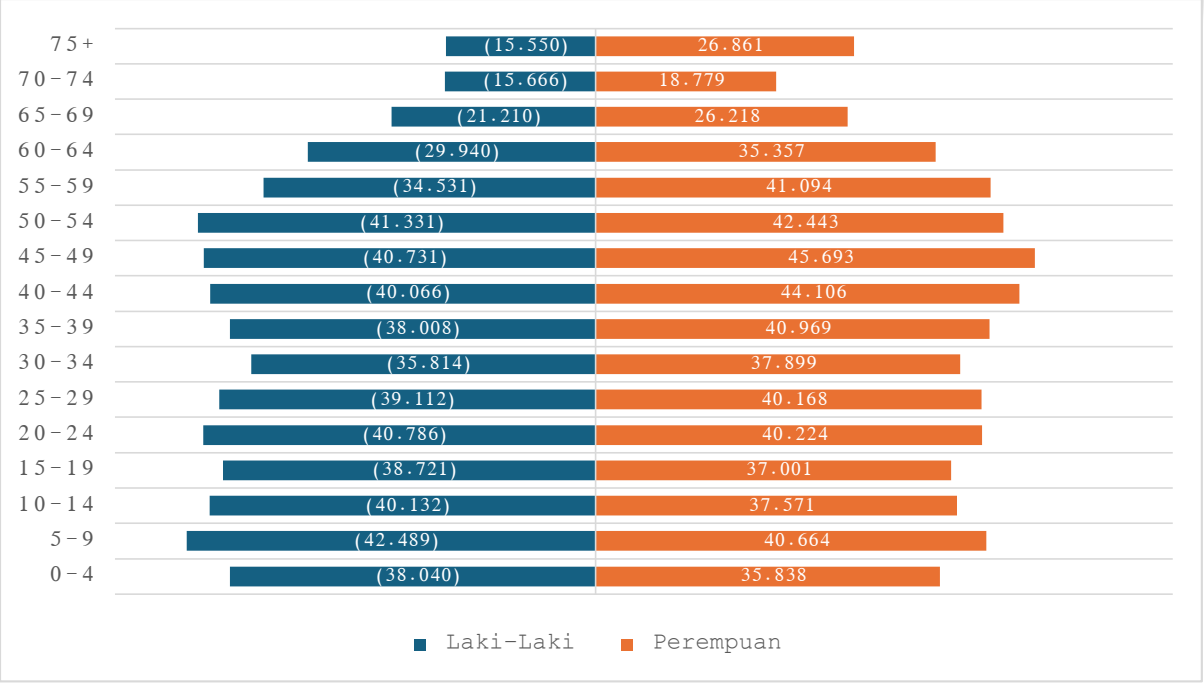
Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2025

2.1.2.7.1 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam persen per tahun. Laju ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta migrasi masuk dan keluar. Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1.143.002 ribu jiwa. Dalam tahun 2024, Kabupaten Sumenep mengalami laju pertumbuhan penduduk yang relatif sedang menuju tinggi, yakni sebesar 0,42% per tahun. Beberapa kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk, dengan Kecamatan Sapeken mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,39% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Raas sebesar –19,47%.

2.1.2.7.2 RASIO PENDUDUK

Rasio penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan variabel tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk usia produktif, atau jumlah penduduk berdasarkan jenis kelami yang digunakan untuk menganalisis distribusi dan keseimbangan demografi dalam suatu wilayah. Berikut dibawah ini merupakan pembagian komposisi jumlah penduduk berdasarkan dengan umur dan jenis kelamin:



Gambar II-16Piramida Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2025

Sumber: Data Diolah, 2025

Apabila dilihat dari piramida penduduk di atas, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Sumenep lebih dominan dibandingan jumlah penduduk laki-lakinya. Sedangkan dari piramida penduduk tersebut dapat menunjukkan mayoritas penduduk Kabupaten Sumenep terbanyak ada pada usia 45-49 tahun dan 50-54 tahun. Secara keseluruhan, rasio penduduk Kabupaten Sumenep adalah 93,44, menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. yang menunjukkan bahwa dalam populasi tersebut terdapat 93,44 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa jumlah Perempuan di Kabupaten Sumenep lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Selain itu rasio tersebut juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor demografis dan sosial. Selain itu dampak dari ketidak seimbangan rasio kependudukan tersebut dapat memicu tantangan pernikahan, hubungan sosial dan dinamika ekonomi.

2.1.2.7.3 KEPADATAN PENDUDUK

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.143.002 orang yang tinggal di wilayah Kabupaten Sumenep seluas 2.093,47 km^2, maka rata-rata terdapat 546 orang yang tinggal di setiap kilometer persegi dari wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan distribusi penduduk yang cukup padat, selain itu wilayah di Kabupaten Sumenep

dapat mencerminkan adanya Tingkat urbanisasi yang tinggi dengan banyaknya rumah, bangunan beserta infrastruktur penunjang lainnya yang dibangun untuk mendukung kehidupan Masyarakat. Wilayah dengan kepadatan tinggi cenderung memiliki ekonomi yang dinamis dengan banyak peluang kerja dan kegiatan ekonomi yang cukup beragam di dalamnya. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dengan baik. Hal ini dapat dipastikan dengan infrastruktur dan layanan publik yang memadai untuk mendukung kualitas hidup yang baik bagi seluruh penduduk di Kabupaten Sumenep.

2.1.2.7.4 PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2025-2029

Proyeksi penduduk *(population projections)* merupakan suatu ramalan *(forecast)* yang didasarkan pada asumsi asumsi rasional tertentu yang dibuat untuk kecenderungan masa yang akan datang dengan menggunakan peralatan statistik atau perhitungan matematik. Dengan memahami tren pertumbuhan penduduk, Kabupaten Sumenep dapat merancang program pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029:

Tabel II-17 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Proyeksi Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pragaan	68.857	69.690	70.522	71.354	72.186	
2	Bluto	52.208	53.653	55.097	56.542	57.986	
3	Saronnggi	40.062	40.789	41.516	42.244	42.971	
4	Giligenting	25.684	26.259	26.833	27.408	27.983	
5	Talango	39.109	39.292	39.475	39.658	39.841	
6	Kalianget	43.417	43.730	44.042	44.355	44.668	
8	Kota Sumenep	79.904	81.651	83.398	85.146	86.893	
9	Batuan	13.811	13.921	14.031	14.141	14.251	
10	Lenteng	64.459	65.402	66.345	67.287	68.230	
11	Ganding	38.184	38.782	39.380	39.977	40.575	
12	Guluk Guluk	51.282	51.744	52.206	52.669	53.131	
13	Pasosongan	53.844	54.793	55.742	56.692	57.641	
14	Ambunten	41.692	42.091	42.490	42.889	43.288	
15	Rubaru	41.573	42.188	42.802	43.417	44.032	
16	Dasuk	32.360	32.989	33.618	34.247	34.876	
17	Manding	31.458	31.953	32.448	32.944	33.439	
18	Batuputih	46.243	46.917	47.591	48.266	48.940	

No	Kecamatan	Proyeksi Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Gapura	40.650	41.600	42.550	43.499	44.449	
20	Batang Batang	23.259	32.105	40.950	49.795	58.640	
21	Dungkek	37.231	37.529	37.826	38.123	38.420	
22	Nonggunong	13.330	13.256	13.181	13.107	13.032	
23	Gayam	12.240	16.760	21.279	25.798	30.317	
24	Raas	25.011	21.435	17.858	14.281	10.704	
25	Sapeken	59.273	61.404	63.534	65.665	67.796	
26	Arjasa	84.016	83.659	83.302	82.946	82.589	
27	Kangayan	28.834	29.764	30.693	31.623	32.553	
28	Masalembu	24.624	23.936	23.247	22.558	21.869	
Total		**1.112.614**	**1.137.286**	**1.161.957**	**1.186.629**	**1.211.300**	

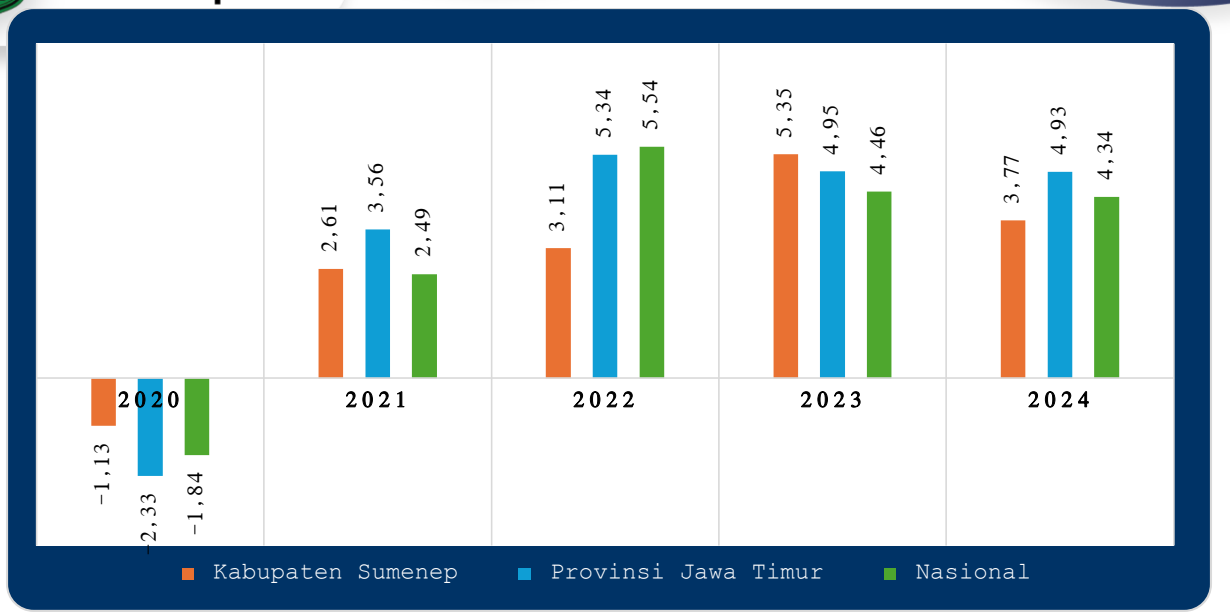
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.3.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

2.1.3.1.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator fundamental dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu daerah. Indikator ini mencerminkan perubahan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, sehingga mampu menggambarkan dinamika ekonomi secara menyeluruh. Bagi pemerintah daerah, Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan dan perencanaan strategis. Selain itu, bagi para pemangku kepentingan lainnya, indikator ini memberikan gambaran mengenai prospek investasi dan daya saing daerah dalam konteks regional maupun nasional. Oleh karena itu, memahami tren Laju Pertumbuhan Ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kabupaten Sumenep sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur juga perlu memperhatikan Laju Pertumbuhan Ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disajikan data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar II-17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kabupaten Sumenep mengalami dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, perekonomian Sumenep mengalami kontraksi sebesar -1,13% yang diduga kuat merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi, terutama sektor pariwisata dan perdagangan. Pada tahun berikutnya, 2021, Kabupaten Sumenep mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan tingkat pertumbuhan mencapai 2,61%, seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan implementasi berbagai program pemulihan ekonomi oleh pemerintah daerah. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 3,11%, yang turut didorong oleh meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah.

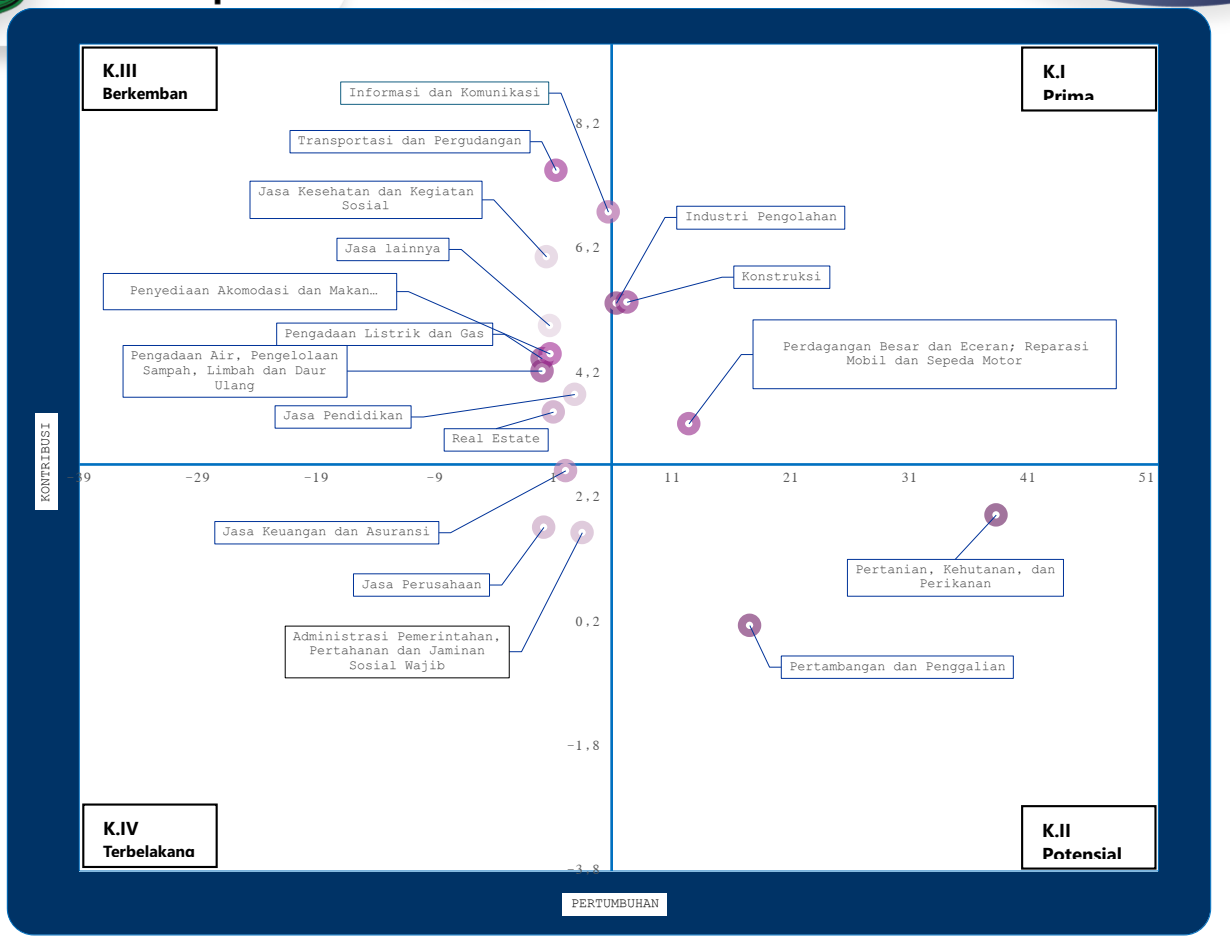
Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Sumenep mencapai puncaknya sebesar 5,35%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 4,95% dan nasional sebesar 4,46%. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 ini menunjukkan adanya perbaikan di berbagai sektor ekonomi, termasuk revitalisasi sektor pariwisata dan optimalisasi potensi lokal, seperti produksi garam dan perikanan. Namun, pada tahun 2024, terjadi sedikit perlambatan dengan laju pertumbuhan sebesar 3,77%. Meski begitu, capaian ini masih menunjukkan adanya stabilitas dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 4,93% dan nasional sebesar 4,34%,

pertumbuhan Sumenep pada tahun 2024 masih relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan daya saing produk lokal dan optimalisasi sektor jasa.

Peluang untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep ke depan masih cukup terbuka, terutama dengan adanya berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara lebih optimal. Sumenep dikenal dengan kekayaan sumber daya alam, terutama pada sektor perikanan dan pertanian. Selain itu, pengembangan potensi pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan dalam hal penguatan daya saing dan efisiensi produksi, terutama pada komoditas unggulan seperti garam dan produk perikanan. Strategi pengembangan ekonomi yang tepat, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi modern dalam pengolahan produk, akan menjadi kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada masa mendatang.

Dalam rangka memahami lebih mendalam mengenai struktur ekonomi Kabupaten Sumenep, tidak cukup hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga perlu dianalisis bagaimana kontribusi setiap sektor terhadap pertumbuhan tersebut. Setiap sektor memiliki peran yang berbeda dalam membentuk daya tahan dan dinamika perekonomian daerah. Beberapa sektor tertentu dapat menjadi penggerak utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, sementara sektor lainnya mungkin mengalami perlambatan atau bahkan stagnasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, Analisis Tipologi Klassen menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengelompokkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB. Dengan metode ini, sektor-sektor unggulan yang perlu diperkuat sebagai pilar utama ekonomi daerah dapat diidentifikasi, begitu pula dengan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut serta sektor-sektor yang mengalami perlambatan dan membutuhkan intervensi kebijakan agar tetap berdaya saing. Hasil analisis ini menjadi landasan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif, baik dalam perencanaan investasi, pengembangan infrastruktur, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor-sektor tertentu di Kabupaten Sumenep.



Gambar II-18 Analisis Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel II-18 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhannya

Kontribusi Sektoral / Laju Pertumbuhan Sektoral	Kontribusi Besar ($Y_{Sektor} \geq Y_{PDRB}$)	Kontribusi Kecil ($Y_{Sektor} < Y_{PDRB}$)
Tumbuh Cepat ($r_{Sektor} \geq r_{PDRB}$)	**Sektor Prima** (Industri Pengolahan; Kontruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	**Sektor Berkembang** (Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Pendidikan; dan Real Estate)
Tumbuh Lambat ($r_{Sektor} < r_{PDRB}$)	**Sektor Potensial** (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian)	**Sektor Terbelakang** (Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib)

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024, terlihat adanya perbedaan tingkat pertumbuhan dan kontribusi dari berbagai sektor ekonomi yang memiliki peran yang berbeda dalam membentuk struktur ekonomi daerah. Beberapa sektor unggulan menunjukkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang besar terhadap PDRB, yang menjadi pilar utama dalam menopang perekonomian Kabupaten Sumenep. Salah satu sektor utama adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencatat kontribusi terbesar sebesar 38,34% meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah sebesar 1,93%. Sektor ini menjadi andalan utama bagi perekonomian Kabupaten Sumenep, namun laju pertumbuhannya yang lambat menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan.

Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor strategis lainnya dengan kontribusi sebesar 12,41% dan tingkat pertumbuhan sebesar 3,39%. Sektor ini memberikan peran penting dalam mendukung pergerakan ekonomi lokal, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan distribusi produk-produk lokal. Sektor lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah Industri Pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 5,33% dan kontribusi sebesar 6,31%, serta Konstruksi dengan tingkat pertumbuhan 5,35% dan kontribusi 7,20%. Kedua sektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui investasi dan inovasi teknologi guna meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan.

Beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi namun dengan kontribusi yang relatif rendah terhadap PDRB juga perlu diperhatikan. Sektor Transportasi dan Pergudangan misalnya, mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 7,46% namun kontribusinya hanya 1,24%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang, perannya dalam perekonomian daerah masih perlu ditingkatkan. Demikian pula dengan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 4,51% dengan kontribusi 0,73%, serta sektor Informasi dan Komunikasi dengan tingkat pertumbuhan 6,79% dan kontribusi 5,65%. Pengembangan sektor-sektor ini perlu difokuskan pada peningkatan kualitas layanan, perluasan jaringan, dan inovasi digital agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sumenep.

Di sisi lain, beberapa sektor menunjukkan tingkat pertumbuhan yang rendah sekaligus memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi hanya tumbuh sebesar 2,64% dengan kontribusi sebesar 2,02%, sementara sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memiliki tingkat pertumbuhan 1,64% dengan kontribusi 3,42%. Selain itu, sektor Jasa Pendidikan juga mencatat kontribusi yang rendah sebesar 2,79% meskipun memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 3,87%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut belum sepenuhnya berkembang dan perlu dilakukan transformasi yang tepat agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian daerah.

Hasil Analisis Tipologi Klassen ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Sumenep masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, meskipun sektor ini memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Sektor perdagangan, industri, dan konstruksi juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, terdapat beberapa sektor yang memiliki potensi besar tetapi kontribusinya terhadap PDRB masih rendah. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi yang tepat perlu difokuskan pada upaya pengembangan sektor unggulan, peningkatan produktivitas sektor-sektor potensial, dan transformasi sektor yang memiliki kontribusi rendah agar dapat lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam upaya mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis di Kabupaten Sumenep, diperlukan analisis menyeluruh untuk menentukan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Salah satu metode yang digunakan adalah Analisis Location Quotient (LQ), yang bertujuan untuk mengelompokkan sektor ekonomi ke dalam kategori sektor basis (unggulan) dan sektor non-basis. Analisis LQ berfungsi untuk mengukur tingkat spesialisasi suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dengan cara membandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap total perekonomian lokal dengan kontribusi sektor yang sama di tingkat provinsi. Metode ini merupakan pendekatan umum dalam model ekonomi basis, yang digunakan sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi sektor-sektor pemicu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, metode ini juga membantu mengevaluasi konsentrasi relatif suatu sektor, sehingga dapat mempermudah dalam

menetapkan sektor unggulan sebagai leading sector untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Perhitungan Location Quotient (LQ) dilakukan dengan membandingkan proporsi output dari sektor tertentu di Kabupaten Sumenep dengan proporsi sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Analisis ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagai wilayah analisis, serta data PDRB Provinsi Jawa Timur pada periode yang sama sebagai wilayah acuan. Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) untuk masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Sumenep selama periode 2020 hingga 2024. Hasil analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang perlu diperkuat sebagai pilar utama perekonomian daerah serta memberikan gambaran mengenai sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Tabel II-19 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024

No	Sektor PDRB	Rata-Rata LQ	Ket
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,312	BASIS
B	Pertambangan & Penggalian	4,741	BASIS
C	Industri Pengolahan	0,211	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,116	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,509	NON BASIS
F	Konstruksi	0,803	NON BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,694	NON BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	0,448	NON BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,153	NON BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	1,086	BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,844	NON BASIS
L	Real Estate	0,646	NON BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	0,267	NON BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,495	BASIS
P	Jasa Pendidikan	1,084	BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,631	NON BASIS
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,541	NON BASIS

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Sumenep dibandingkan dengan skala provinsi. Sektor dengan nilai LQ lebih dari 1 dikategorikan sebagai sektor basis, yang berarti sektor tersebut memiliki spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan

bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama dalam mendorong perekonomian daerah. Sebaliknya, sektor-sektor dengan nilai LQ di bawah 1 termasuk dalam kategori non-basis, yang artinya kontribusinya terhadap perekonomian lokal masih rendah dibandingkan dengan provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024, terdapat lima sektor yang termasuk dalam kategori sektor basis. Sektor dengan nilai LQ tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata LQ sebesar 4,741, yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keunggulan komparatif yang sangat kuat di Kabupaten Sumenep. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, meskipun kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih tergolong rendah.

Sektor kedua dengan nilai LQ tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ sebesar 3,312. Sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Sumenep karena menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu sebesar 38,34%. Tingginya nilai LQ ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki keunggulan komparatif dalam sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun, rendahnya tingkat pertumbuhan sebesar 1,93% menunjukkan bahwa sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya produktivitas dan minimnya inovasi dalam pengolahan produk.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai LQ sebesar 1,495 juga termasuk dalam sektor basis. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor ini dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik sangat penting bagi perekonomian Kabupaten Sumenep. Selain itu, sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai LQ sebesar 1,086 juga dianggap sebagai sektor basis, mengindikasikan bahwa layanan telekomunikasi dan teknologi informasi di Kabupaten Sumenep berkembang dengan cukup baik dan memiliki potensi untuk terus ditingkatkan. Sektor Jasa Pendidikan juga masuk dalam kategori sektor basis dengan nilai LQ sebesar 1,084. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Sumenep memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain di tingkat provinsi. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki keunggulan dalam penyediaan

layanan pendidikan yang perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, sektor-sektor yang termasuk dalam kategori non-basis antara lain Industri Pengolahan (0,211), Pengadaan Listrik dan Gas (0,116), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,509), serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,694). Sektor Transportasi dan Pergudangan (0,448) serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,153) juga tergolong non-basis, menunjukkan bahwa sektor-sektor ini masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap PDRB dan perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat berkembang lebih baik.

Analisis ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Sumenep masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam, khususnya Pertambangan dan Penggalian serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun, adanya sektor-sektor basis lain seperti Administrasi Pemerintahan, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Pendidikan memberikan peluang besar bagi Kabupaten Sumenep untuk mengembangkan perekonomiannya ke arah yang lebih terdiversifikasi. Upaya untuk mengoptimalkan sektor-sektor potensial dan meningkatkan sektor-sektor non-basis perlu dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Sumenep diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Kinerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan berbagai metode, salah satunya adalah analisis shift share. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan memisahkannya ke dalam tiga komponen utama serta mengukur kontribusi dari masing-masing komponen tersebut (Curtis, 1972). Analisis shift share membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas, seperti provinsi atau nasional, sehingga dapat digunakan untuk mengukur produktivitas dan daya saing suatu daerah. Dengan metode ini, dapat diidentifikasi seberapa cepat atau lambat pertumbuhan suatu sektor ekonomi, serta sektor mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing daerah dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, analisis ini juga berguna dalam memahami peranan

dan pergeseran suatu sektor dalam perekonomian daerah terhadap sektor yang sama di tingkat nasional.

Analisis shift share terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan. Pertama, komponen regional share, yang mengukur dampak pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan membandingkan perubahan agregat sektoral terhadap sektor yang sama di wilayah yang lebih luas yang dijadikan acuan. Kedua, komponen proportional shift, yang digunakan untuk menilai apakah struktur ekonomi daerah lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor dengan pertumbuhan cepat dibandingkan dengan wilayah acuan. Ketiga, komponen differential shift, yang bertujuan untuk mengidentifikasi daya saing sektor ekonomi di suatu daerah dengan membandingkannya dengan sektor yang sama di wilayah yang lebih luas.

Dalam konteks Kabupaten Sumenep, analisis shift share digunakan untuk mengevaluasi kinerja sektor-sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dan membandingkannya dengan PDRB Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah acuan. Melalui metode ini, dapat diidentifikasi sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sumenep sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif. Adapun hasil perhitungan shift share sektor ekonomi di Kabupaten Sumenep untuk periode 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-20 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

No	Sektor PDRB	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differential Shift (Dij)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.574,120	-1.100,302	238,882
B	Pertambangan & Penggalian	1.037,441	-1.566,729	580,588
C	Industri Pengolahan	285,201	5,479	151,320
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,611	2,479	-1,990
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,396	-0,738	0,542
F	Konstruksi	328,808	37,216	244,176
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	584,273	209,515	-13,988
H	Transportasi dan Pergudangan	54,821	86,620	6,358
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35,937	18,084	13,579
J	Informasi dan Komunikasi	334,002	109,972	8,826
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,281	-39,780	8,499

No	Sektor PDRB	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differential Shift (Dij)
L	Real Estate	54,459	-19,247	8,588
M,N	Jasa Perusahaan	9,543	2,662	-4,405
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	147,211	-85,681	14,770
P	Jasa Pendidikan	137,869	-56,695	45,626
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,462	-2,653	4,791
R,S,T,U	Jasa lainnya	31,125	32,383	8,592

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan Shift Share sektor ekonomi di Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024, terlihat adanya perbedaan kontribusi dan daya saing dari berbagai sektor ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis ini dibagi menjadi tiga komponen utama yaitu Regional Share, Proportional Shift, dan Differential Shift. Pada komponen Regional Share, sektor yang memiliki nilai terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai sebesar 1.574,120. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep dibandingkan sektor-sektor lainnya. Selain itu, sektor Pertambangan & Penggalian memiliki nilai Regional Share yang juga cukup tinggi, yaitu sebesar 1.037,441. Kontribusi kedua sektor ini mencerminkan dominasi sektor-sektor berbasis sumber daya alam dalam struktur perekonomian Kabupaten Sumenep. Sektor lain yang memiliki nilai Regional Share yang signifikan adalah Informasi dan Komunikasi (334,002), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (584,273), serta Konstruksi (328,808).

Komponen Proportional Shift digunakan untuk mengukur apakah sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sumenep berkembang lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi. Sektor dengan nilai Proportional Shift negatif mengindikasikan bahwa pertumbuhannya lebih lambat daripada perekonomian di tingkat provinsi. Nilai Proportional Shift yang negatif ditemukan pada sektor-sektor unggulan seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-1.100,302) dan Pertambangan & Penggalian (-1.566,729). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor-sektor ini memiliki kontribusi besar dalam struktur ekonomi daerah, namun laju pertumbuhannya masih perlu ditingkatkan. Sebaliknya, beberapa sektor yang memiliki nilai Proportional Shift positif antara lain Konstruksi (37,216), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (209,515), dan Informasi dan Komunikasi (109,972). Nilai positif ini menunjukkan bahwa sektor-

sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi, sehingga perlu dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Pada komponen Differential Shift, sektor-sektor yang menunjukkan keunggulan daya saing antara lain Pertambangan & Penggalian (580,588), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (238,882), serta Konstruksi (244,176). Tingginya nilai Differential Shift pada sektor-sektor ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ini mampu bersaing lebih baik dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Sektor lain yang juga menunjukkan keunggulan kompetitif meskipun dengan nilai yang lebih kecil antara lain Informasi dan Komunikasi (8,826), Jasa Pendidikan (45,626), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (14,770). Meskipun kontribusi sektor-sektor ini terhadap PDRB belum besar, potensi pengembangan tetap ada dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Namun, terdapat pula sektor-sektor yang memiliki nilai Differential Shift negatif seperti Pengadaan Listrik dan Gas (-1,990) serta Jasa Perusahaan (-4,405), yang mengindikasikan rendahnya daya saing sektor-sektor ini dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi di Kabupaten Sumenep agar dapat memperbaiki sektor-sektor dengan daya saing rendah.

Hasil analisis shift share ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor unggulan di Kabupaten Sumenep masih didominasi oleh sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan & Penggalian. Namun, sektor-sektor lain seperti Informasi dan Komunikasi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup baik. Dalam rangka mengoptimalkan perekonomian daerah, perlu dilakukan peningkatan daya saing sektor-sektor dengan Differential Shift negatif serta pengembangan sektor-sektor potensial yang sudah menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik daripada provinsi.

Tabel II-21 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share

KUADRAN I (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing)	KUADRAN III (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Tidak Berdaya Saing)
○ **Industri Pengolahan** ○ **Kontruksi** ○ **Transportasi dan Pergudangan** ○ **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** ○ **Informasi dan Komunikasi** ○ **Jasa Keuangan dan Asuransi**	○ Pengadaan Listrik dan Gas ○ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ○ Jasa Perusahaan
KUADRAN II (Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing)	**KUADRAN IV** (Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing)
○ **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** ○ **Pertambangan & Penggalian** ○ **Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang** ○ **Jasa Keuangan dan Asuransi** ○ **Real Estate** ○ **Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib** ○ **Jasa Pendidikan** ○ **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**	-

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024 yang dianalisis menggunakan metode Shift Share, sektor-sektor ekonomi dikelompokkan menjadi empat kuadran. Kuadran I yang mencakup sektor dengan pertumbuhan cepat dan memiliki daya saing meliputi Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Kehadiran sektor-sektor ini dalam kuadran unggulan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya tumbuh dengan pesat tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi. Hal ini menandakan bahwa sektor-sektor ini perlu terus didorong perkembangannya melalui investasi, inovasi teknologi, dan peningkatan kualitas pelayanan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Sumenep.

Di sisi lain, Kuadran II mencakup sektor-sektor yang memiliki daya saing tetapi pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi. Sektor-sektor ini antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan & Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa

Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Meskipun sektor-sektor ini memiliki daya saing, rendahnya pertumbuhan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi sektor-sektor ini agar mampu tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Di sisi lain, Kuadran III yang terdiri dari sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Jasa Perusahaan, mengindikasikan bahwa meskipun sektor-sektor ini tumbuh cepat, daya saingnya masih rendah. Strategi peningkatan daya saing perlu difokuskan pada peningkatan akses pasar, perbaikan infrastruktur, dan optimalisasi rantai nilai agar sektor-sektor ini dapat berkembang dengan lebih baik. Uniknya, tidak ada sektor yang masuk dalam Kuadran IV yang menunjukkan bahwa tidak ada sektor di Kabupaten Sumenep yang mengalami pertumbuhan lambat dan tidak memiliki daya saing, menandakan potensi ekonomi daerah yang dapat terus dikembangkan.

Berdasarkan hasil analisis Shift Share, Kabupaten Sumenep memiliki enam sektor di Kuadran I yang menunjukkan pertumbuhan cepat dan daya saing kuat, yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor-sektor ini menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong efek pengganda pada sektor lain. Oleh karena itu, arah kebijakan tidak hanya berhenti pada penguatan secara umum, melainkan harus diterjemahkan ke dalam rencana tindak nyata yang spesifik dan terukur.

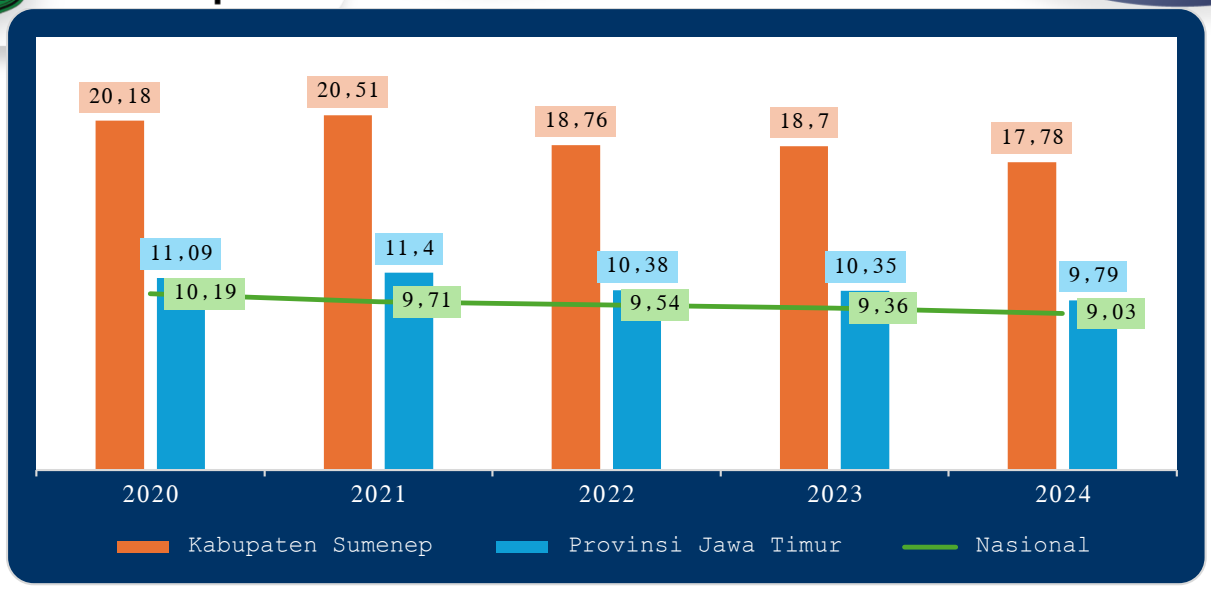
Pada sektor Industri Pengolahan, strategi dapat diarahkan pada hilirisasi produk pertanian dan perikanan agar tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi menghasilkan produk jadi bernilai tambah. Contoh langkah konkret adalah pembangunan sentra pengolahan garam rakyat, pengembangan industri pengemasan tembakau dan olahan ikan, serta percepatan revitalisasi Pasar Anom dan pembangunan Pasar Batuan sebagai pusat distribusi hasil olahan. Sektor Transportasi dan Pergudangan dapat diperkuat melalui percepatan pembangunan Pelabuhan Dungkek dan perbaikan akses jalan utama menuju pelabuhan rakyat, serta

pengembangan kawasan logistik modern di sekitar Kalianget untuk mendukung rantai pasok hasil pertanian dan perikanan.

Sementara itu, sektor Konstruksi dapat dipacu dengan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) pada proyek pemerintah, percepatan pembangunan jalan Pabean dan rekonstruksi Jalan Angon-Angon Pajennagger, serta penyederhanaan perizinan investasi infrastruktur. Pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, strategi diarahkan pada pengembangan destinasi wisata bahari seperti Gili Labak dan Gili Iyang dengan dukungan promosi digital, serta peningkatan kualitas layanan homestay dan kuliner lokal melalui program sertifikasi higienitas. Selanjutnya, sektor Informasi dan Komunikasi dapat ditindaklanjuti dengan percepatan pembangunan jaringan internet di desa kepulauan, pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk efisiensi pelayanan publik, serta pelatihan literasi digital bagi UMKM agar lebih adaptif dalam pemasaran online.

2.1.3.1.2 TINGKAT KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan persentase penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Mengukur tingkat kemiskinan secara akurat menjadi sangat penting karena dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak program-program ekonomi dan sosial yang dilaksanakan, serta menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, indikator ini juga berfungsi sebagai alat untuk membandingkan kondisi kemiskinan antar wilayah, baik di tingkat provinsi maupun nasional, yang kemudian dapat mengidentifikasi ketimpangan pembangunan yang perlu diatasi. Berikut ini merupakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar II-19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep selama periode 2020-2024 menunjukkan tren penurunan yang positif, meskipun angkanya masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep mencapai angka yang sangat tinggi sebesar 20,18%, jauh di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang hanya 11,09% dan Nasional sebesar 10,19%. Dampak pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ekonomi dan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Sumenep. Kondisi ini sedikit memburuk pada tahun 2021 dengan tingkat kemiskinan meningkat menjadi 20,51%, sementara Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi 11,4% dan Nasional 9,71%.

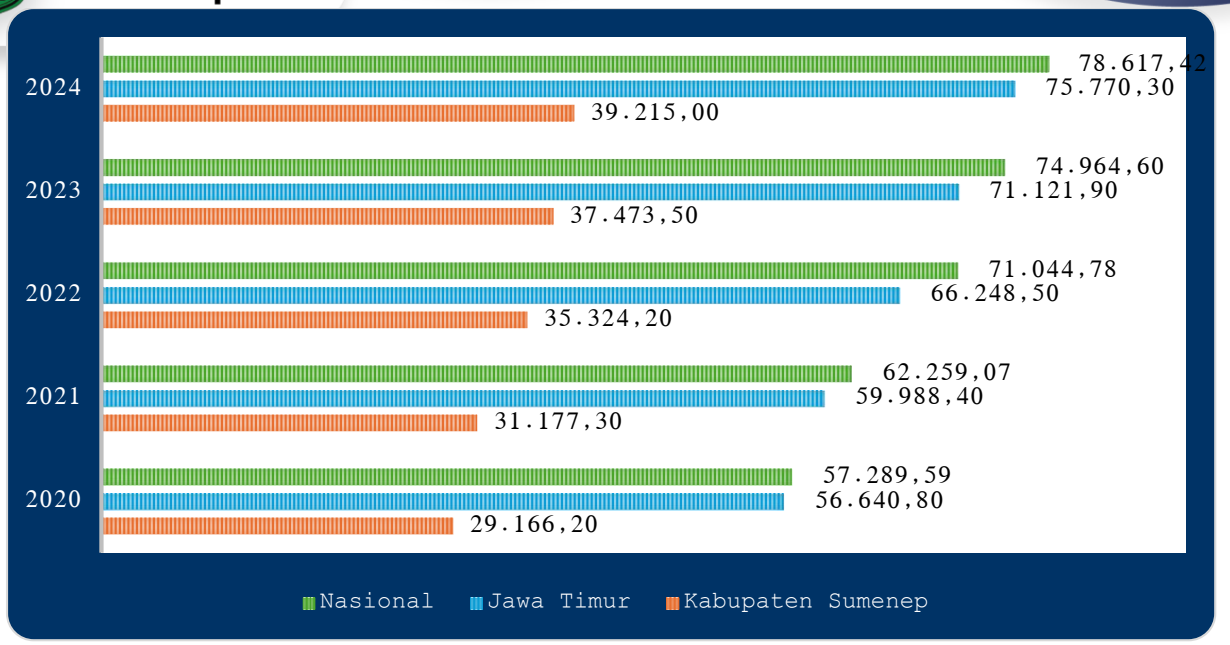
Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Sumenep mulai menunjukkan perbaikan secara perlahan. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 18,76% pada tahun 2022, sementara Provinsi Jawa Timur dan Nasional masing-masing mencapai 10,38% dan 9,54%. Pada tahun 2023, penurunan kemiskinan berlanjut dengan angka sebesar 18,7%, meskipun angka ini masih jauh di atas Provinsi Jawa Timur yang berada pada 10,35% dan Nasional 9,36%. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumenep berhasil menurun menjadi 17,78%, namun tetap lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur (9,79%) dan Nasional (9,03%). Tren penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan mulai membuahkan hasil, meskipun upaya

yang lebih serius masih diperlukan agar Kabupaten Sumenep dapat menyamai atau setidaknya mendekati rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Dari sisi potensi, Kabupaten Sumenep sebenarnya memiliki berbagai sektor yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, seperti sektor perikanan, pertanian, serta potensi wisata yang belum dikembangkan secara maksimal. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan, infrastruktur yang belum memadai, serta minimnya penguasaan teknologi oleh masyarakat lokal. Mengatasi tantangan ini memerlukan perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mengintegrasikan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dan perbaikan infrastruktur ekonomi untuk mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan di masa depan.

2.1.3.1.3 PDRB PER KAPITA

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang mengukur rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah dari seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi dalam satu periode tertentu. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, di mana semakin tinggi PDRB per kapita, semakin besar pula kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. PDRB per kapita juga digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan yang telah diterapkan. Berikut ini disajikan data PDRB Per Kapita Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar II-20 PDRB Per Kapita Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

PDRB per kapita Kabupaten Sumenep menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Sumenep tercatat sebesar Rp 29.166,20, angka ini meningkat menjadi Rp 31.177,30 pada tahun 2021. Tren positif ini terus berlanjut dengan pencapaian sebesar Rp 35.324,20 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi Rp 37.473,50 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angka PDRB per kapita Kabupaten Sumenep berhasil mencapai Rp 39.215,00.

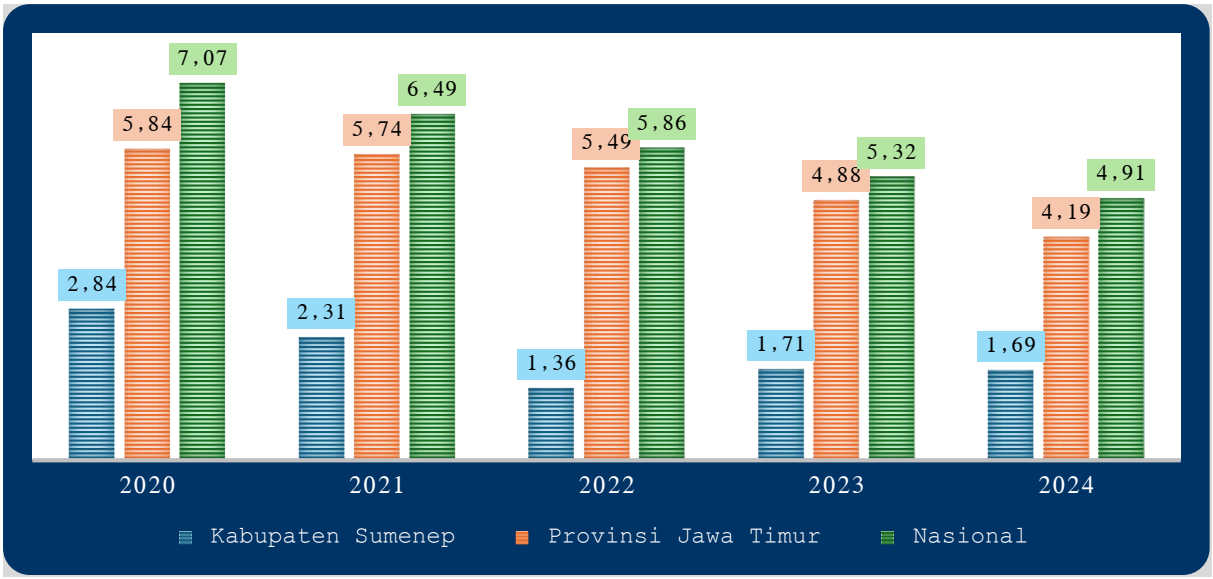
Namun, jika dibandingkan dengan PDRB per kapita di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, capaian Kabupaten Sumenep masih berada di bawah rata-rata. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar Rp 75.770,30 dan PDRB per kapita Nasional mencapai Rp 78.617,42. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Ketertinggalan ini disebabkan oleh dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang produktivitasnya masih rendah dibandingkan dengan sektor industri dan jasa.

Meskipun demikian, Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan dan pariwisata berbasis kepulauan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PDRB per kapita. Beberapa strategi yang perlu diterapkan meliputi peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi dalam

produksi perikanan, promosi pariwisata, serta penguatan sektor industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.1.4 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah, tetapi juga menjadi cerminan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Tingginya TPT dapat menunjukkan adanya masalah struktural dalam perekonomian seperti kurangnya lapangan kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, serta rendahnya investasi yang menciptakan kesempatan kerja. Pemantauan yang konsisten terhadap TPT diperlukan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Di bawah ini disajikan data TPT Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar II-21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kabupaten Sumenep berhasil mengurangi tingkat pengangguran terbuka secara signifikan selama periode 2020-2024, meskipun menghadapi tantangan besar akibat

pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, TPT di Kabupaten Sumenep tercatat sebesar 2,84%, sementara Provinsi Jawa Timur dan Nasional masing-masing berada pada angka yang jauh lebih tinggi, yaitu 5,84% dan 7,07%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum, Kabupaten Sumenep memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Namun, dampak pandemi tetap dirasakan pada sektor-sektor yang rentan, seperti pariwisata dan sektor informal. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Sumenep menurun menjadi 2,31%, yang jauh lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Timur (5,74%) dan Nasional (6,49%). Penurunan ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi mulai berjalan dengan baik di tingkat daerah, meskipun belum sepenuhnya optimal.

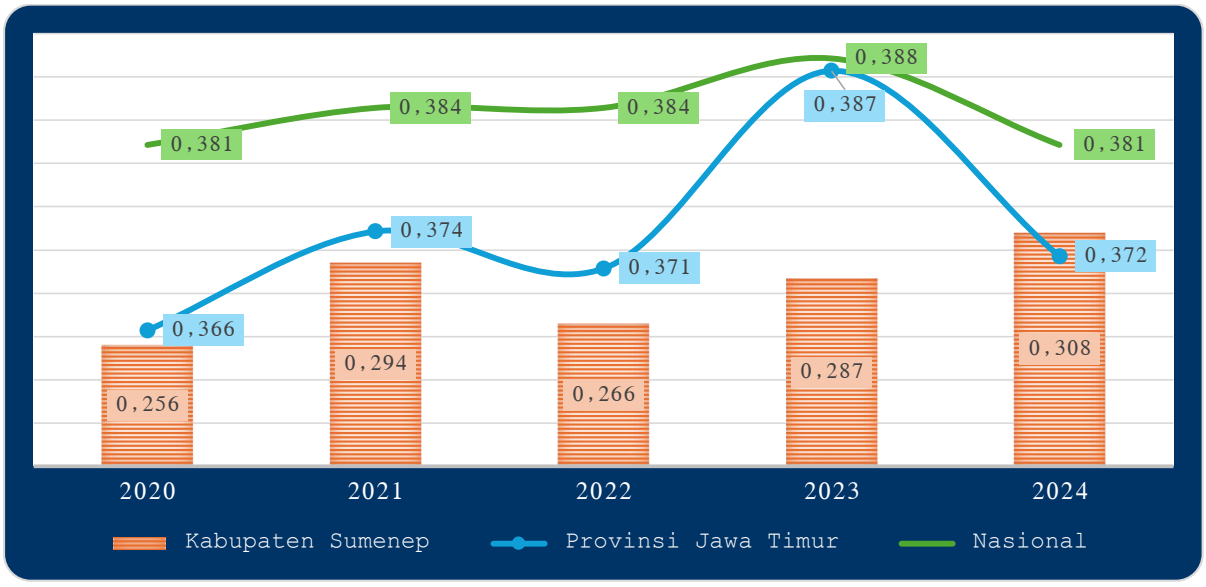
Perbaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan TPT menurun drastis menjadi 1,36%, sementara Provinsi Jawa Timur dan Nasional mencatat angka masing-masing sebesar 5,49% dan 5,86%. Kabupaten Sumenep menjadi daerah dengan TPT terendah di Jawa Timur pada tahun tersebut, mencerminkan keberhasilan program-program penanggulangan pengangguran yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2023, TPT di Kabupaten Sumenep sedikit meningkat menjadi 1,71%, namun angka ini tetap lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur (4,88%) dan Nasional (5,32%). Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Sumenep kembali menurun menjadi 1,69%, sementara Provinsi Jawa Timur dan Nasional masing-masing mencatat angka 4,19% dan 4,91%. Meskipun tren penurunan ini merupakan indikasi yang positif, angka pengangguran yang rendah di Kabupaten Sumenep tidak sepenuhnya mencerminkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena sektor ekonomi utama di Sumenep masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional dan perikanan dengan produktivitas rendah.

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengurangi pengangguran, seperti penyelenggaraan job fair, program pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga menjadi peluang yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi minimnya keterampilan masyarakat lokal dalam mengadopsi teknologi modern dan rendahnya akses terhadap pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Strategi pembangunan yang lebih terpadu dengan melibatkan

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus diterapkan untuk memastikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

2.1.3.1.5 INDEKS GINI

Indeks Gini adalah indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sementara nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Indikator ini penting karena mencerminkan sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya kemiskinan, menurunnya kohesi sosial, dan potensi konflik. Oleh karena itu, pemantauan Indeks Gini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Berikut ini disajikan data Indeks Gini Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar II-22 Indeks Gini Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

ndeks Gini Kabupaten Sumenep Selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini mengalami perburukan. Pada tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Sumenep tercatat sebesar 0,256, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 0,366 dan Nasional sebesar 0,381. Nilai yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Sumenep

relatif lebih merata dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Namun, tren peningkatan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan Indeks Gini naik menjadi 0,294, sementara Provinsi Jawa Timur dan Nasional masing-masing mencapai 0,374 dan 0,384.

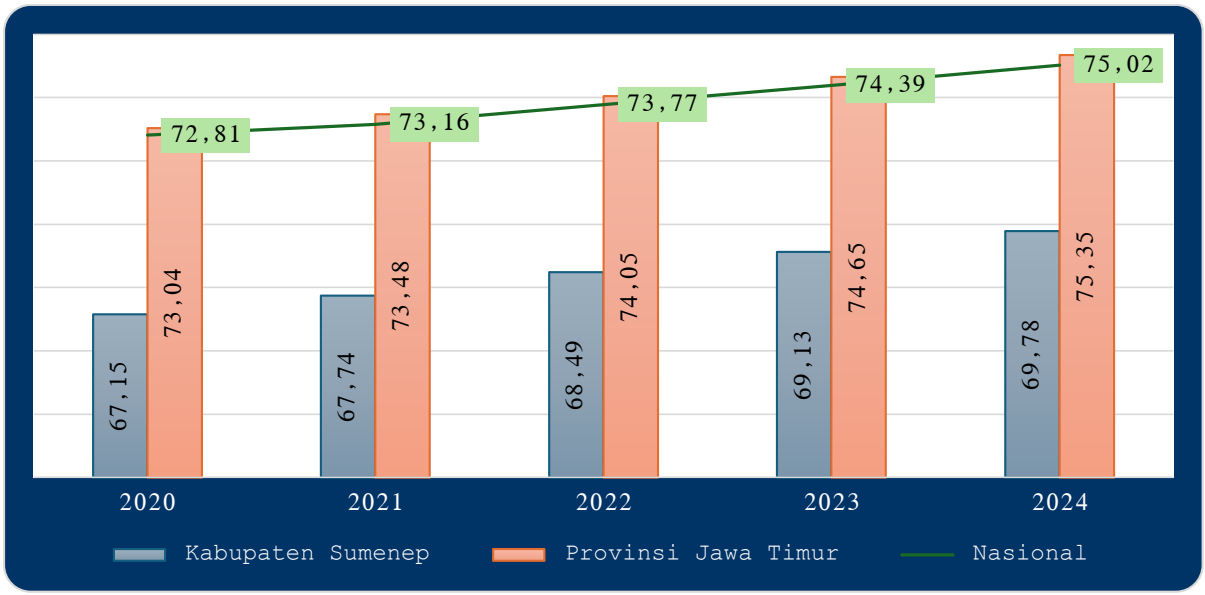
Pada tahun 2022, Indeks Gini Kabupaten Sumenep sedikit menurun menjadi 0,266, namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 0,371 dan Nasional sebesar 0,384. Meskipun penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, tren positif tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Sumenep kembali naik menjadi 0,287, sementara Provinsi Jawa Timur mencapai puncak tertingginya pada angka 0,387 dan Nasional sebesar 0,388. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Sumenep meskipun relatif lebih rendah, tetap mengalami peningkatan seiring dengan ketimpangan di level provinsi dan nasional. Pada tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Sumenep naik menjadi 0,308, angka ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur sebesar 0,372 dan Nasional sebesar 0,381.

Peningkatan ketimpangan di Kabupaten Sumenep dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketergantungan ekonomi terhadap sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan yang umumnya berpendapatan rendah. Di sisi lain, meskipun sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan ekonomi kreatif mulai dikembangkan, kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat masih terbatas. Permasalahan dalam pengelolaan pemasaran hasil pertanian, keterbatasan akses terhadap teknologi modern, serta minimnya diversifikasi ekonomi turut memperburuk kondisi ketimpangan di wilayah ini. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah memperbaiki infrastruktur pendukung, terutama untuk memperlancar distribusi hasil produksi dari sektor pertanian dan perikanan. Pemberdayaan petani dan nelayan melalui peningkatan keterampilan, adopsi teknologi baru, serta pemanfaatan platform digital untuk pemasaran hasil produksi dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi ketimpangan.

2.1.3.1.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur pencapaian suatu wilayah dalam tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pembangunan dan menilai kualitas hidup

masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang saling terkait. Pemerintah daerah perlu terus memantau perkembangan IPM untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Bagi Kabupaten Sumenep, upaya dalam meningkatkan IPM sangat penting karena berkaitan erat dengan kemampuan daerah dalam menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, khususnya di wilayah kepulauan yang masih menghadapi berbagai tantangan. Berikut ini merupakan data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar II-23 Indeks Pembangunan Manusia (Hasil *Long Form* SP2020) Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Kabupaten Sumenep Selama periode 2020 hingga 2024 mengalami tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup konsisten meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Sumenep tercatat sebesar 67,15, sementara IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional masing-masing mencapai 73,04 dan 72,81. Perbedaan yang cukup signifikan ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Sumenep masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur maupun nasional. Meskipun demikian, upaya peningkatan terus dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang cukup baik. Pada tahun 2021, IPM Sumenep meningkat menjadi 67,74, sementara Provinsi Jawa Timur mencapai 73,48 dan Nasional 73,16. Peningkatan ini

terus berlanjut hingga tahun 2022 dengan IPM Sumenep mencapai 68,49, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur (74,05) dan Nasional (73,77).

Peningkatan IPM Kabupaten Sumenep yang relatif lambat dibandingkan dengan provinsi dan nasional menunjukkan adanya tantangan serius dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses terhadap layanan dasar, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2023, IPM Sumenep meningkat menjadi 69,13, sementara Provinsi Jawa Timur dan Nasional masing-masing mencapai 74,65 dan 74,39. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan lebih lanjut dengan IPM Sumenep sebesar 69,78, meskipun masih tertinggal dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 75,35 dan Nasional yang mencapai 75,02.

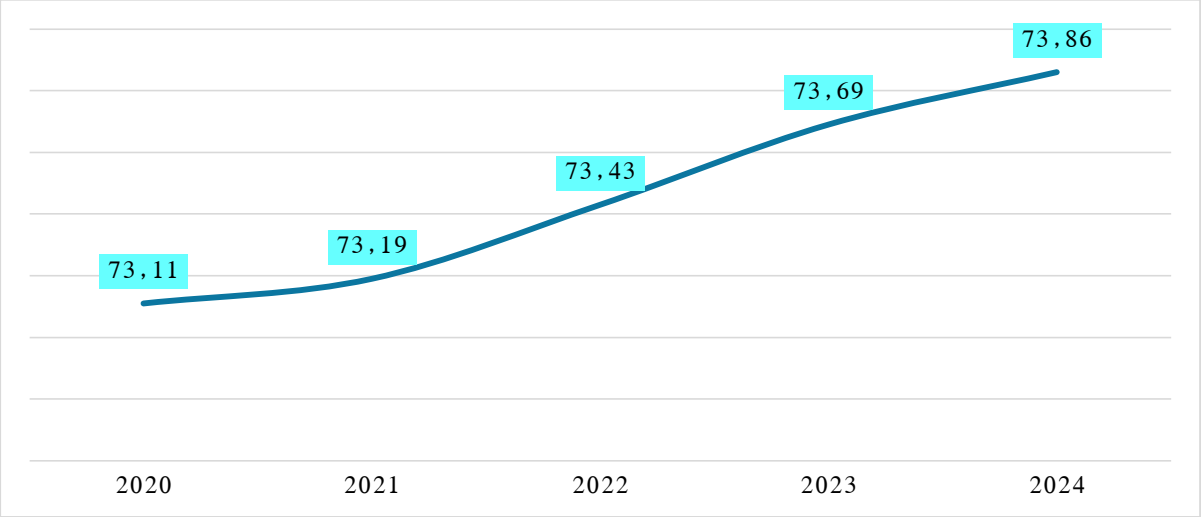
Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Sumenep mencakup peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana di berbagai wilayah terpencil, termasuk daerah kepulauan. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan juga terus dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan. Namun, tantangan terbesar masih berada pada kurangnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep. Sektor-sektor potensial seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian juga perlu dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas juga perlu terus diperkuat agar target peningkatan IPM dapat tercapai lebih cepat.

2.1.3.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

2.1.3.2.1 UMUR HARAPAN HIDUP

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator demografis yang menunjukkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan mempertimbangkan tingkat mortalitas yang berlaku. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan, status gizi, serta faktor sosial-ekonomi lainnya. Peningkatan UHH seringkali dihubungkan dengan perbaikan kesejahteraan umum, akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, dan peningkatan standar hidup.

Oleh karena itu, memahami tren UHH menjadi esensial dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan publik.



Gambar II-24 Umur Harapan Hidup (Hasil Long Form SP2020) Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

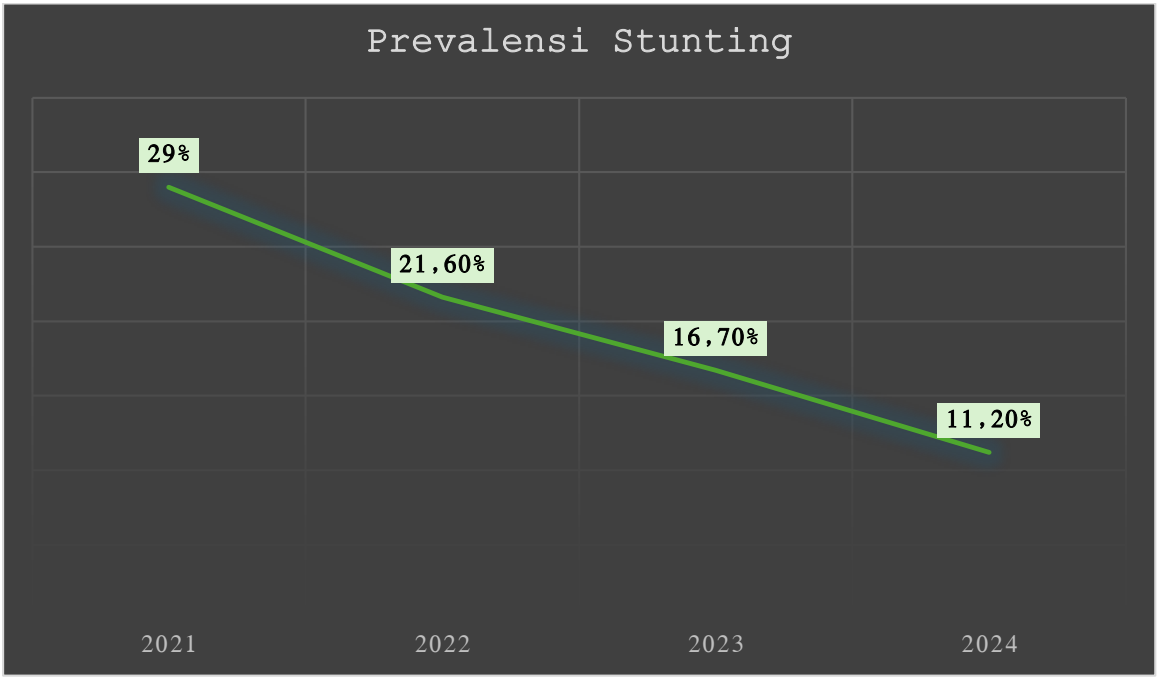
Umur Harapan Hidup di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren peningkatan yang stabil sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka UHH tercatat sebesar 73,11 tahun, yang kemudian mengalami peningkatan bertahap menjadi 73,19 tahun pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 73,43 tahun pada tahun 2022. Tren ini berlanjut dengan peningkatan lebih lanjut pada tahun 2023 menjadi 73,69 tahun, dan akhirnya mencapai 73,86 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep berhasil meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, baik dari segi fasilitas kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, maupun penyediaan program kesehatan yang lebih merata.

Meskipun terjadi peningkatan yang positif, tantangan dalam bidang kesehatan tetap ada di Kabupaten Sumenep. Beberapa masalah kesehatan yang perlu diperhatikan adalah tingginya angka stunting pada anak-anak, prevalensi penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TBC), serta akses layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil yang perlu terus diperbaiki. Selain itu, angka kematian akibat penyakit menular yang tercatat masih perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan program-program kesehatan yang ada. Dengan adanya berbagai tantangan ini, upaya untuk terus meningkatkan angka Umur Harapan Hidup di Kabupaten Sumenep perlu difokuskan pada peningkatan infrastruktur kesehatan, penyediaan tenaga medis yang kompeten,

serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan secara umum.

2.1.3.2.2 PREVALENSI STUNTING

Prevalensi stunting adalah persentase balita (anak usia di bawah lima tahun) yang mengalami kondisi stunting pada suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh balita yang ada. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun), yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya (diukur menggunakan indikator *height-for-age Z-score* < -2 SD menurut standar WHO). Di Kabupaten Sumenep, berikut capaian prevalensi stunting yang disajikan pada grafik dibawah ini:



Gambar II-25 Prevalensi Stunting Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, 2025

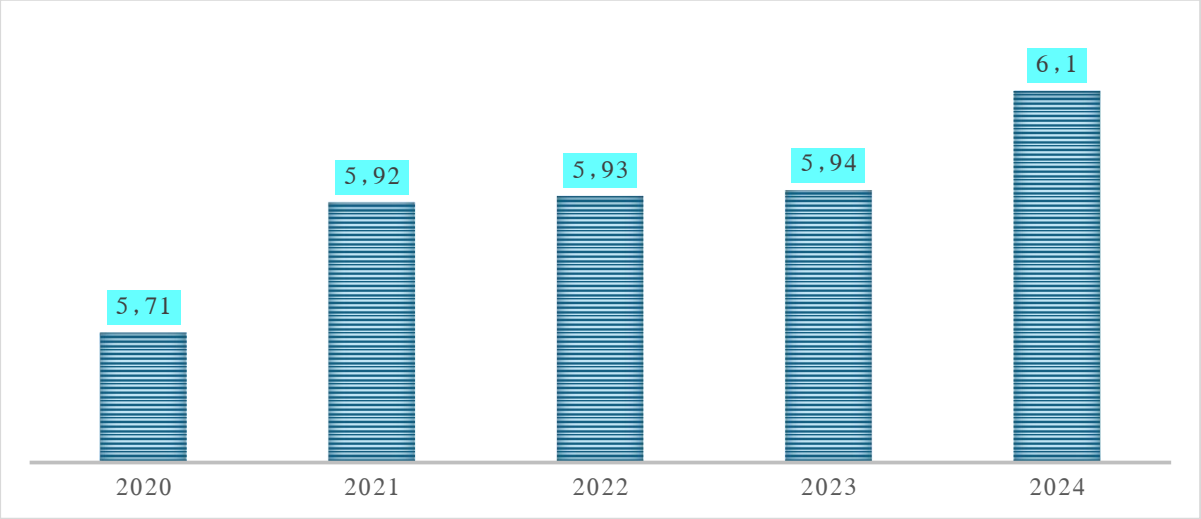
Berdasarkan data hasil pemantauan, prevalensi stunting di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, prevalensi stunting masih berada pada angka 29%, kemudian turun menjadi 21,60% pada tahun 2022. Penurunan ini terus berlanjut hingga mencapai 16,70% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 berhasil ditekan hingga 11,20%.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep berhasil melampaui target penurunan stunting nasional yang ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024, sehingga menjadi salah satu daerah dengan progres cepat dalam upaya percepatan penurunan stunting.

2.1.3.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

2.1.3.3.1 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian pendidikan di suatu daerah dengan mengukur jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini menjadi cerminan dari tingkat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Signifikansi dari indikator ini terletak pada kemampuannya dalam menggambarkan keberhasilan sistem pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama Sekolah, semakin besar kemungkinan masyarakat memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Dengan demikian, indikator ini menjadi dasar yang penting dalam perumusan kebijakan pendidikan, terutama dalam rangka memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di suatu daerah. Berikut ini adalah data Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024.



Gambar II-26 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, 2025

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sumenep mengalami tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, RLS tercatat

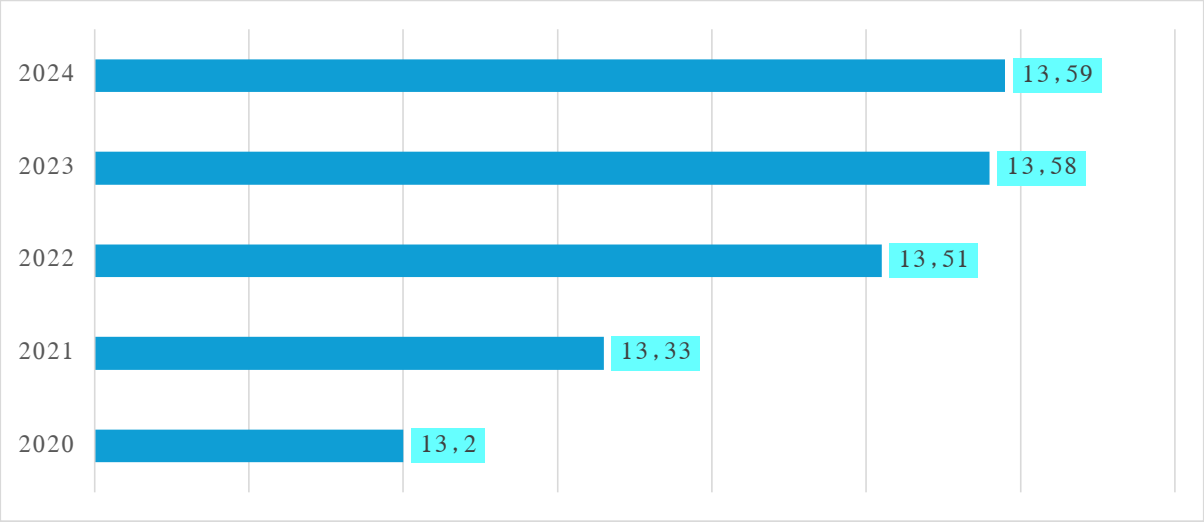
sebesar 5,71 tahun, kemudian meningkat menjadi 5,92 tahun pada tahun 2021. Angka ini terus bertambah menjadi 5,93 tahun pada tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 5,94 tahun pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan RLS mencapai 6,1 tahun. Meskipun peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan partisipasi pendidikan di Kabupaten Sumenep, angka ini masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 8,28 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep masih menghadapi tantangan dalam memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama di wilayah kepulauan yang cenderung sulit dijangkau.

Rendahnya RLS di Kabupaten Sumenep dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta tantangan geografis yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Sapeken. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah tingginya ketergantungan pada guru honorer yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Meskipun demikian, terdapat potensi besar untuk meningkatkan RLS melalui berbagai strategi seperti peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik, serta program-program pendampingan dan pengawasan rutin di sekolah-sekolah yang tersebar di wilayah Sumenep. Jika strategi-strategi ini diterapkan secara konsisten, diharapkan angka RLS di Kabupaten Sumenep dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3.3.2 HARAPAN LAMA SEKOLAH

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh seorang anak yang lahir pada tahun tertentu, dengan asumsi bahwa sistem pendidikan yang ada tidak mengalami perubahan. Indikator ini memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana akses dan kualitas pendidikan tersedia di suatu daerah. Signifikansi HLS terletak pada kemampuannya untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan serta upaya dalam pengembangan sumber daya manusia. Semakin tinggi angka HLS, semakin besar kemungkinan generasi mendatang dapat mengakses pendidikan yang lebih baik, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi daerah. Dengan demikian, HLS menjadi dasar yang penting dalam

merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dan mendorong pemerataan pendidikan yang lebih adil. Berikut ini merupakan data Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024.



Gambar II-27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, 2025

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka HLS tercatat sebesar 13,20 tahun. Angka ini kemudian mengalami peningkatan bertahap menjadi 13,33 tahun pada tahun 2021, kemudian menjadi 13,51 tahun pada tahun 2022. Peningkatan ini terus berlanjut dengan angka HLS 13,58 tahun pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, angka HLS di Kabupaten Sumenep telah mencapai 13,59 tahun.

Peningkatan HLS ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dan peningkatan partisipasi pendidikan di Kabupaten Sumenep. Meskipun demikian, tantangan utama yang perlu diatasi adalah memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumenep antara lain keterbatasan akses ke sekolah di wilayah kepulauan, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, dan ketergantungan pada guru honorer. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi peningkatan HLS dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, serta program-program yang mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, diharapkan HLS di Kabupaten Sumenep dapat terus meningkat dan

memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.3.3 TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA

Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) adalah indikator yang mengukur seberapa sering dan seberapa lama masyarakat terlibat dalam aktivitas membaca. Indikator ini mencerminkan budaya literasi di suatu daerah dan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingginya TKM menunjukkan masyarakat yang memiliki akses informasi yang baik, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, memahami dan meningkatkan TKM menjadi urgensi bagi pemerintah daerah dalam upaya menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan berpengetahuan luas. Berikut ini merupakan data Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024.

Tabel II-22 Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024

Tingkat Kegemaran Membaca	2022	2023	2024
Skor	57,8	63,7	78,90
Predikat	Sedang	Tinggi	Tinggi

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2025

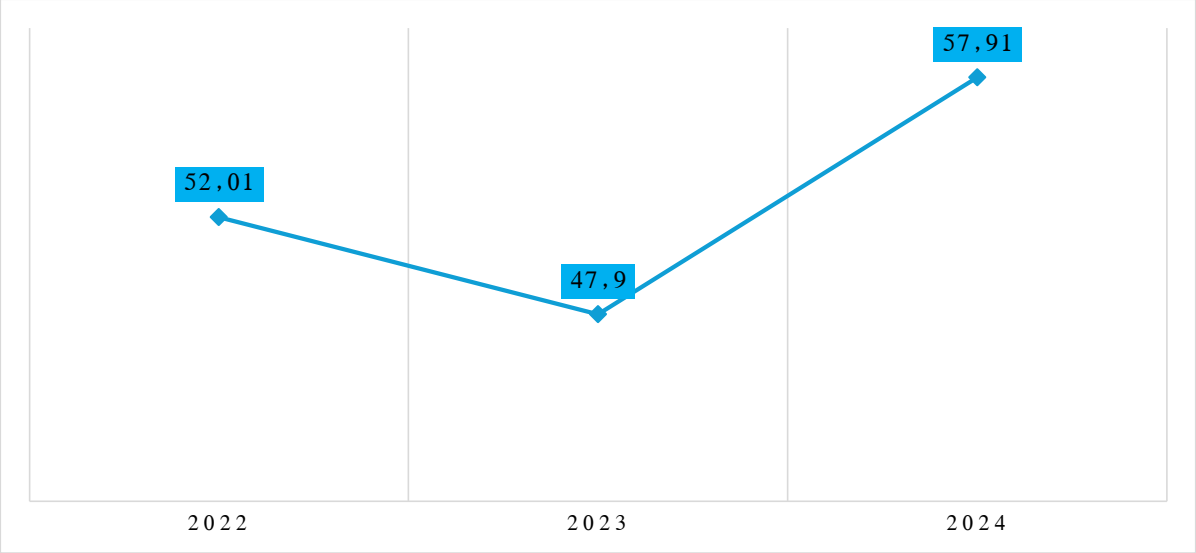
Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, TKM tercatat dengan skor 57,8 yang berada pada kategori Sedang. Namun, pada tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 63,7 dan memperoleh predikat Tinggi. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan skor yang lebih tinggi, yaitu 78,9 yang tetap berada pada kategori Tinggi.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat telah menunjukkan hasil yang baik. Berbagai program literasi seperti Madura Writers and Readers Festival serta layanan perpustakaan keliling (Perpusling) yang mengunjungi sekolah-sekolah turut berperan dalam peningkatan TKM. Meskipun demikian, tantangan dalam meningkatkan minat baca masyarakat masih ada, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau seperti daerah kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan serta mengintegrasikan kegiatan literasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan literasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di

Kabupaten Sumenep serta mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

2.1.3.3.4 INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembangan literasi dalam suatu wilayah, yang mencakup akses terhadap bahan bacaan, layanan perpustakaan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Indikator ini penting karena mengukur sejauh mana masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan untuk mengelola dan mengaplikasikan informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Tingginya nilai IPLM menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap informasi dan pemanfaatan pengetahuan yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, pemantauan IPLM sangat penting untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi peningkatan literasi di Kabupaten Sumenep..



Gambar II-28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2025

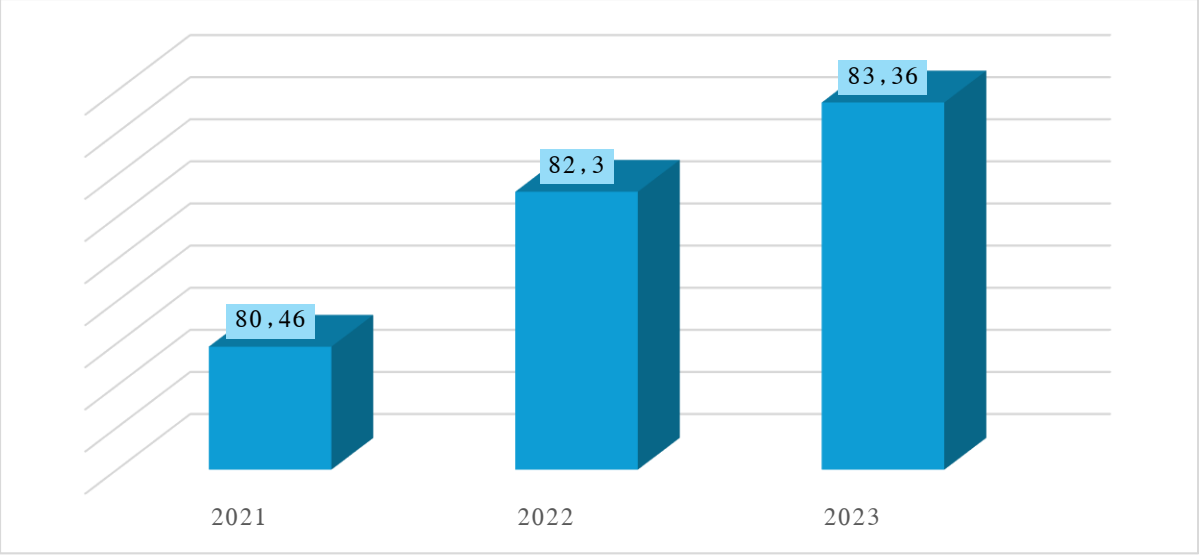
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Sumenep mengalami fluktuasi selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, IPLM tercatat sebesar 52,01, menunjukkan kondisi literasi yang berada pada tingkat sedang. Namun, pada tahun 2023, IPLM justru mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 47,9, yang mengindikasikan adanya penurunan kualitas literasi masyarakat. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses terhadap bahan bacaan, rendahnya minat baca, serta tantangan geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari banyak wilayah kepulauan.

Meskipun sempat mengalami penurunan, IPLM Kabupaten Sumenep berhasil mengalami peningkatan tajam pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 57,91. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan literasi serta akses terhadap bahan bacaan di masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, seperti promosi literasi melalui program perpustakaan keliling, penyediaan perpustakaan digital, serta kegiatan literasi di sekolah-sekolah, menjadi faktor pendukung dalam peningkatan ini. Namun, tantangan utama yang perlu diatasi adalah memastikan bahwa peningkatan literasi dapat terdistribusi merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan. Untuk memastikan keberlanjutan dari peningkatan IPLM, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mengembangkan infrastruktur literasi, serta mengintegrasikan teknologi digital dalam upaya peningkatan literasi di Kabupaten Sumenep.

2.1.3.4 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

2.1.3.4.1 INDEKS KESALEHAN SOSIAL

Indeks Kesalehan Sosial (IKS) adalah indikator yang mengukur tingkat kepedulian, solidaritas, dan stabilitas sosial dalam suatu komunitas. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan interaksi sosial positif terjalin di masyarakat. Tingginya IKS menunjukkan hubungan sosial yang harmonis dan kuat, yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemantauan IKS menjadi urgensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kohesi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini ditampilkan data Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2023.



Gambar II-29 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2023

Sumber: Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, 2025

Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kabupaten Sumenep menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, IKS tercatat sebesar 80,46, yang sudah berada dalam kategori sangat baik. Angka ini meningkat menjadi 82,30 pada tahun 2022, dan mencapai 84,71 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya nilai-nilai solidaritas, stabilitas, dan gotong royong di masyarakat Sumenep.

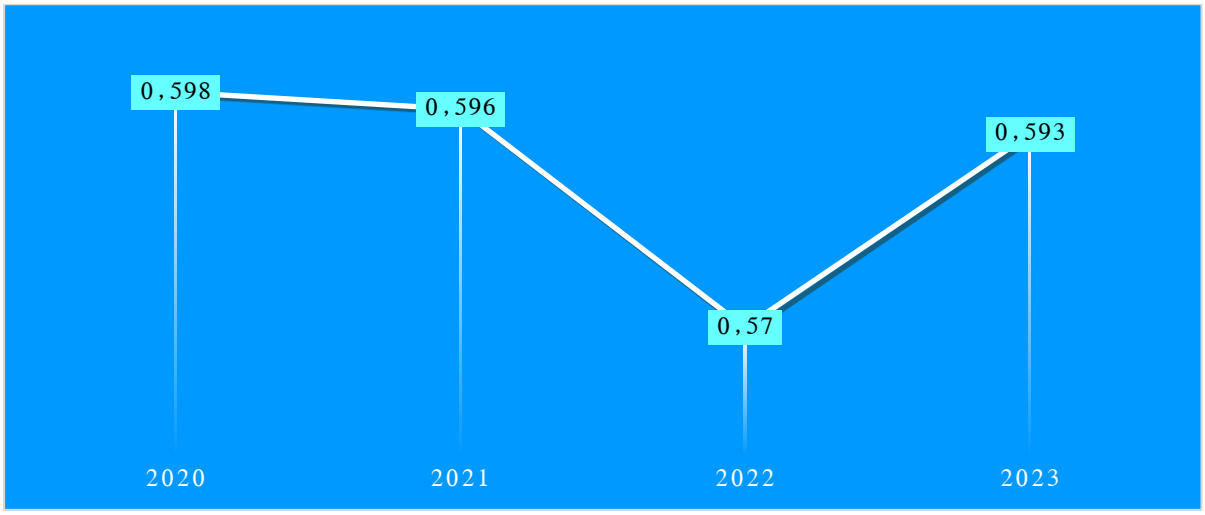
Peningkatan IKS di Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pemberdayaan sosial dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Kepedulian terhadap para guru ngaji, lembaga keagamaan, kaum marginal, anak, dan perempuan menjadi faktor penopang utama dalam peningkatan ini. Selain itu, semangat gotong royong yang tinggi di masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial yang harmonis.

2.1.3.5 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

2.1.3.5.1 INDEKS KETIMPANGAN GENDER

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang mengukur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. IKG mencerminkan kerugian potensial dalam pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender. Semakin tinggi nilai IKG (mendekati 1), semakin besar ketimpangan gender yang terjadi; sebaliknya, nilai yang lebih rendah menunjukkan kesetaraan yang lebih

baik antara laki-laki dan perempuan. Indikator ini penting karena memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah.



Gambar II-30 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

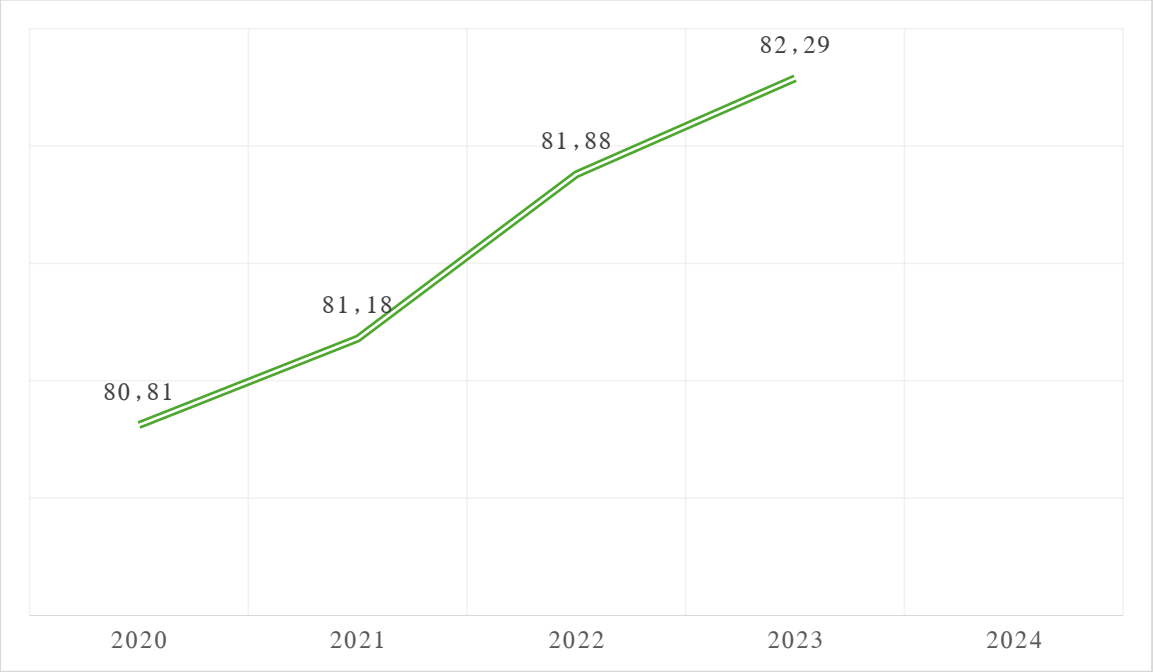
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Sumenep menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, IKG tercatat sebesar 0,598 yang kemudian sedikit menurun menjadi 0,596 pada tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan adanya sedikit perbaikan dalam kesetaraan gender dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022, IKG mengalami penurunan cukup tajam menjadi 0,570, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesetaraan gender di Kabupaten Sumenep.

Namun, tren penurunan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2023, IKG mengalami kenaikan kembali menjadi 0,593. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan gender masih menjadi tantangan di Kabupaten Sumenep. Fluktuasi IKG di Kabupaten Sumenep mencerminkan dinamika kompleks dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kesetaraan gender. Penurunan IKG pada tahun 2023 dapat diartikan sebagai hasil dari upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Namun, peningkatan IKG pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tantangan dalam mencapai kesetaraan gender masih ada, seperti akses perempuan terhadap pendidikan, partisipasi dalam pasar tenaga kerja, dan

keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang berkelanjutan dan komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi, dan promosi kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan.

2.1.3.5.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang ditujukan untuk mengukur implementasi pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan dan laki-laki. Capaian IPG mencerminkan tingkat kesetaraan dan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Kesetaraan gender merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berperan dan berpartisipasi di kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, capaian IPG yang tinggi menunjukkan bahwa upaya yang mencakup program-program pembangunan untuk meningkatkan kesetaraan gender di suatu wilayah dilaksanakan dengan efektif. Berikut merupakan capaian IPG Kabupaten Sumenep.



Gambar II-31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2023

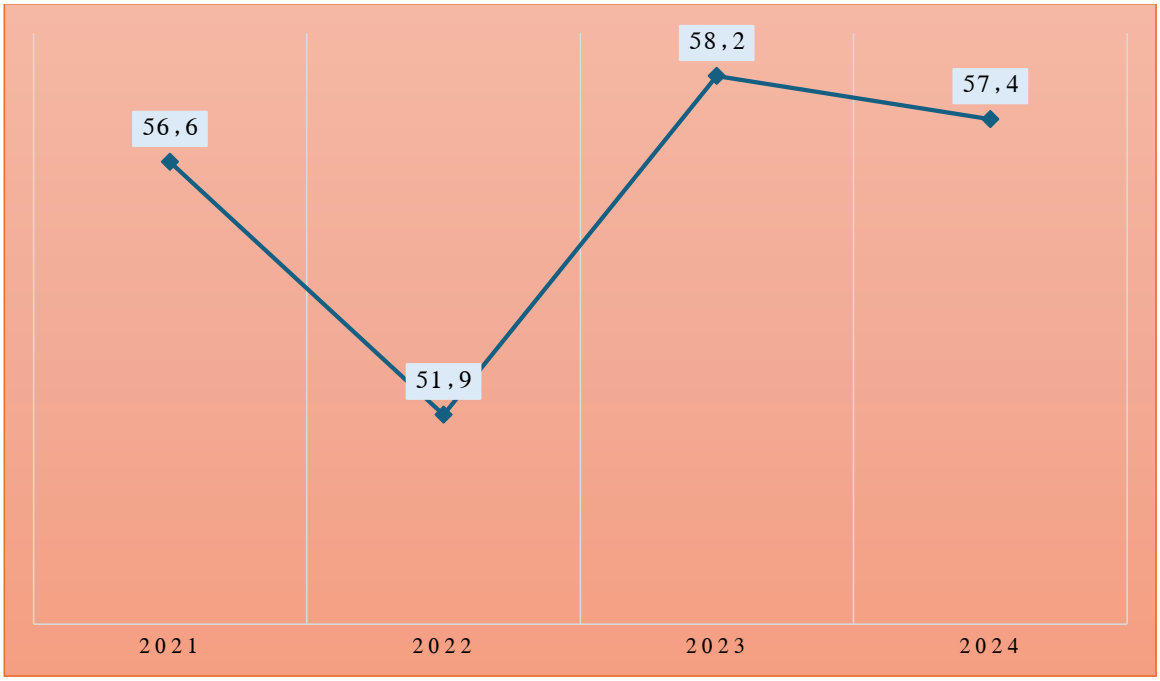
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Grafik di atas menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sumenep selama empat tahun dari 2020 sampai 2023. Secara keseluruhan, IPG Sumenep meningkat secara konsisten dalam lima tahun berturut-

turut. Pada tahun 2020, IPG mencapai 80,81 yang kemudian meningkat secara bertahap sehingga mencapai 81,88 pada tahun 2022. IPG tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan capaian 82,29. Hal ini menandakan perkembangan signifikan menuju kesetaraan gender. Nilai tersebut juga menunjukkan bahwa Sumenep termasuk dalam kategori kabupaten dengan IPG di kisaran 80-an, masih berada di bawah rata-rata provinsi namun terus menunjukkan potensi peningkatan.

2.1.3.5.3 INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menilai kualitas pembangunan keluarga di Indonesia. Indeks ini menilai sejauh mana sebuah keluarga bisa dikategorikan keluarga berkualitas, dengan melihat tiga dimensi utama yaitu Ketentraman, Kemandirian, dan Kebahagaiaan. Berikut merupakan capaian iBangga Kabupaten Sumenep.



Gambar II-32 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, 2025

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Sumenep dalam periode 2021–2024 menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2021, iBangga tercatat sebesar 56,6, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 51,9. Penurunan ini menggambarkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga di daerah.

Pada tahun 2023, capaian iBangga mangalami peningkatan signifikan hingga mencapai 58,2, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas keluarga, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun ketahanan ekonomi. Namun, pada tahun 2024, nilainya mengalami penurunan menjadi 57,4, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan capaian awal tahun 2021.

Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan meskipun masih menghadapi fluktuasi dari tahun ke tahun. Upaya konsisten melalui program pembangunan keluarga, penguatan ketahanan keluarga, serta integrasi dengan program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting diharapkan dapat menjaga tren positif dan meningkatkan capaian iBangga ke depan.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

2.1.4.1.1 ANGKA KETERGANTUNGAN

Tingkat ketergantungan/rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi produktif dalam mendukung populasi non-produktif. Rasio ini mengindikasikan proporsi penduduk yang dianggap tidak produktif (usia muda dan usia tua) terhadap penduduk yang berada dalam usia produktif. Rasio ketergantungan adalah indikator penting dalam memahami struktur demografi dan beban ekonomi dalam suatu wilayah, serta dalam merencanakan kebijakan yang efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam rasio ketergantungan di Kabupaten Sumenep, maka dapat dilihat adanya peningkatan rasionya, hal ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak orang yang bergantung pada setiap individu yang berada dalam usia produktif. Hal ini bisa menjadi indikasi beban ekonomi yang lebih berat bagi penduduk usia produktif, karena mereka harus mendukung lebih banyak orang yang tidak bekerja. Berikut di bawah ini merupakan rincian capaian di Kabupaten Sumenep:

Tabel II-23 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk usia <15 tahun	210.977	218.862	222.199	230.437	308.368
2.	Jumlah penduduk	121.137	109.258	111.933	112.133	119.750

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	usia > 64 tahun					
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif	332.114	328.120	334.132	342.570	428.118
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	802.015	810.048	800.678	793.333	790.436
5.	Rasio ketergantungan	41,41%	40,59%	41,73%	43,18%	44,50%

Sumber: Dispendukcail Kabupaten Sumenep, 2023

Rasio lulusan strata (S1/S2/S3) menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap 10.000 penduduk dalam satu tahun. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 dan 2023 yaitu 2,94%. Secara umum perkembangan rasio S1/S2/S3 menunjukkan angka yang cukup stabil, sebagaimana diuraikan tabel berikut:

Tabel II-24 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah lulusan D4/S1	23.042	27.103	28.862	31.480	33.571
2.	Jumlah lulusan S2	1.369	1.513	1.584	1.765	1.903
3.	Jumlah lulusan S3	158	158	148	141	153
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	24.569	28.774	30.594	33.386	35.627
5.	Jumlah Penduduk	1.134.129	1.138.168	1.134.810	1.135.903	1.142.210
6.	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	2,17%	2,53%	2,70%	2,94%	2,94%

Sumber: Dispendukcail Kabupaten Sumenep, 2023

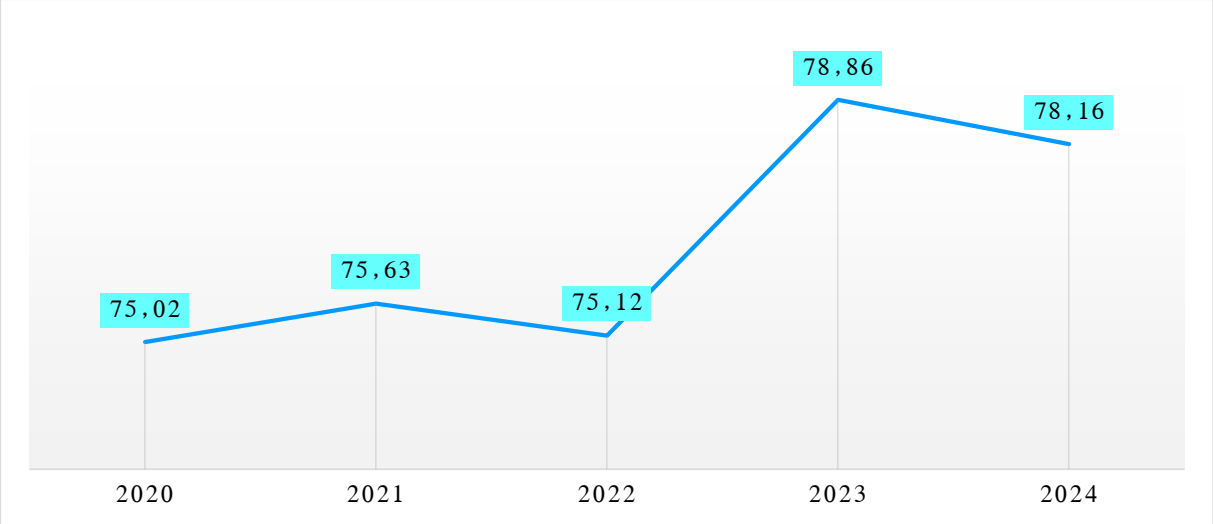
Melihat angka rasio lulusan D4/S1/S2/S3 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat merepresentasikan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan akses dan kualitas Pendidikan tinggi Dimana lebih banyak mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana. Selain itu peningkatan kesadaran dan minat Masyarakat juga mengalami perubahan yang cukup baik. Sehingga dapat mengembangkan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep. Peningkatan rasio lulusan

D4/S1/S2/S3 setiap tahunnya adalah indikasi positif dari kemajuan dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Ini juga mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.4.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

2.1.4.2.1 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator yang mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total populasi usia kerja dalam suatu wilayah. TPAK merupakan indikator penting dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, yang digunakan untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di suatu daerah atau negara. Di bawah ini merupakan capaian TPAK di Kabupaten Sumenep dalam rentang tahun 2020-2024:



Gambar II-33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Tren TPAK di Kabupaten Sumenep menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan nilai 78,86%, dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 75,12%. Setelahnya pada tahun 2024, TPAK tercatat sedikit menurun di angka 78,16%, turun 0,70% dibandingkan tahun 2024. Hal ini sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Kabupaten Sumenep dengan memperbanyak peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 adalah sebanyak 727.652 jiwa, dengan TPAK Kabupaten Sumenep sebesar 78,16 persen, artinya dari setiap 100 penduduk Kabupaten Sumenep yang berusia 15 tahun ke atas,

ada sekitar 78-79 orang yang tersedia untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa.

2.1.4.2.2 INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Indeks Inovasi Daerah dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah Provinsi dan antar pemerintah Kabupaten atau Kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Berikut merupakan capaian Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024:

Tabel II-25 Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Indeks Inovasi Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Skor	76.69	50.38	50.63	43,23	42,10
Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2025

Dalam lima tahun terakhir, jika dilihat secara predikat maka terjadi penurunan dari predikat Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten “Sangat Inovatif” menjadi “Inovatif” dalam rentang tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan mekanisme perhitungan Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2021 dengan penyesuaian indikator dan metode penilaian, sehingga skala skor berbeda dari tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan langsung dengan 2020. Meskipun demikian, Kabupaten Sumenep tetap berada dalam kategori "Inovatif" sejak 2021, menunjukkan konsistensi dalam inovasi daerah meskipun mengalami fluktuasi skor yang menunjukkan tantangan dalam konsistensi inovasi. Harapannya untuk tahun selanjutnya Kabupaten Sumenep dapat memperbanyak inovasi dan inisiatif dan berkomitmen untuk terus mendorong budaya inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan public dan Pembangunan daerah.

2.1.4.2.3 KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN

Kabupaten Sumenep memiliki potensi yang signifikan dalam sektor industri pengolahan. Dikenal dengan keberagaman industri kecil dan menengah (IKM),

Sumenep menggambarkan panorama industri yang berkembang dengan beragam sektor seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan tradisional, serta produksi tekstil dan batik. Kehadiran IKM ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang penting bagi daerah, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal melalui produk-produk yang unik dan bernilai tambah tinggi. Selain itu, Sumenep terus mendorong inovasi dan peningkatan kualitas dalam industri lokal untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, menciptakan peluang kerja baru serta memberdayakan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.

Tabel II-26 Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Terhadap Total PDRB	Persen	6,16	6,23	6,10	6,35	6,73
2	Presentase Pertumbuhan Sektor PDRB Industri Pengolahan	Persen	-1,49	5,55	7,89	6,42	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, 2025

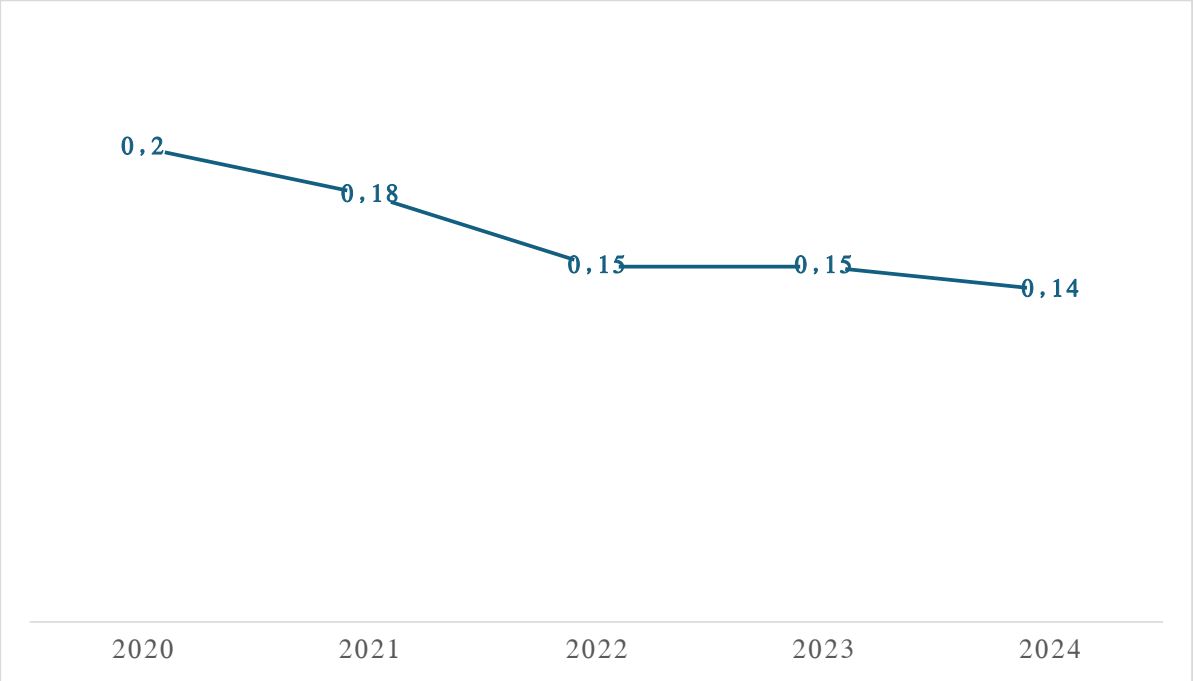
Berdasarkan tabel di atas Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap Total PDRB secara garis besar mengalami capaian fluktuatif Pada tahun 2022, Industri Pengolahan menyumbang sebesar 6,10 % terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Tahun berikutnya, pada 2023, kontribusinya sedikit meningkat menjadi 6,35 %. Sementara untuk tahun 2024, sektor ini tercatat menyumbang 6,73 %, menjadikannya salah satu sektor utama dalam perekonomian lokal yang menduduki peringkat setelah pertanian, pertambangan, perdagangan, dan konstruksi.

Kemudian tabel di atas menggambarkan bahwa adanya peningkatan terhadap pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Sumenep. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada Tahun 2023 sebesar 6,42 % lebih rendah jika dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar 7,89 %. Meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 5,55 % dan pada Tahun 2020 sebesar -1,49%.

2.1.4.2.4 KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PROVINSI

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu indikator penting untuk melihat peranan dan posisi relatif perekonomian daerah di tingkat regional. Semakin

besar kontribusi yang diberikan, maka semakin besar pula peran Kabupaten Magetan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi. Berikut merupakan capaian kontribusi PDRB Sumenep terhadap Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2024.

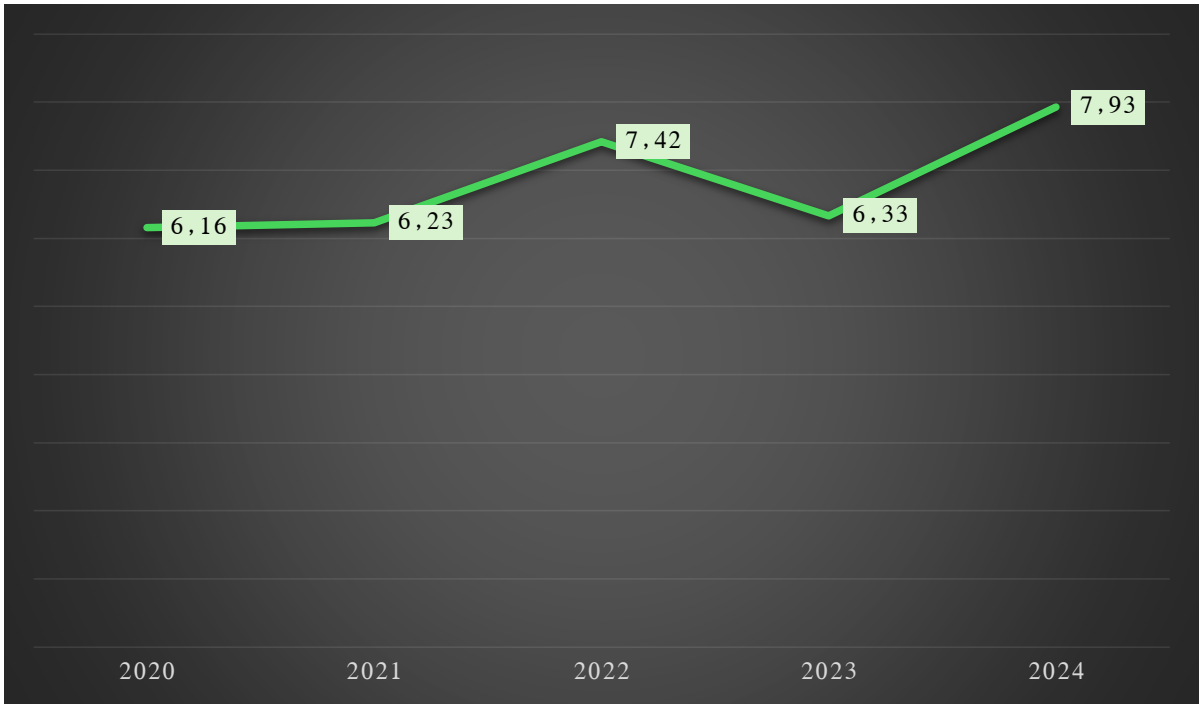


Berdasarkan grafik di atas, mmenunjukkan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Sumenep terhadap perekonomian Jawa Timur mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 kontribusi masih berada di angka 0,20%, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,14% pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi diakibatkan oleh sektor unggulan dari Sumenep yang belum dioptimalkan secara maksimal. Diperlukan inovasi dan perbaikan untuk meningkatkan peran ekonomi Sumenep melalui penguatan sektor unggulan, pengembangan nilai tambah, serta integrasi dalam perekonomian regional Jawa Timur.

2.1.4.2.5 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha digunakan untuk mengukur persentase sumbangan nilai tambah bruto dari masing-masing lapangan usaha terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sumenep. Kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB menunjukkan besarnya peranan atau share dari suatu sektor atau lapangan usaha tertentu terhadap total PDRB di Sumenep. Angka ini dihitung dengan cara membandingkan nilai tambah bruto lapangan usaha tertentu dengan nilai total PDRB, lalu dikalikan 100 persen. Berikut

di bawah ini capaian kontribusi PDRB menurut lapangan usaha di Sumenep pada tahun 2020-2024.



Di Kabupaten Sumenep, berdasarkan grafik di atas capaian kontribusi PDRB menurut lapangan usaha dalam periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2020 kontribusi tercatat sebesar 6,16%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 6,23% persen. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan kontribusi mencapai 7,42%, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 6,33%. Selanjutnya, pada tahun 2024 kontribusi kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi 7,93%.

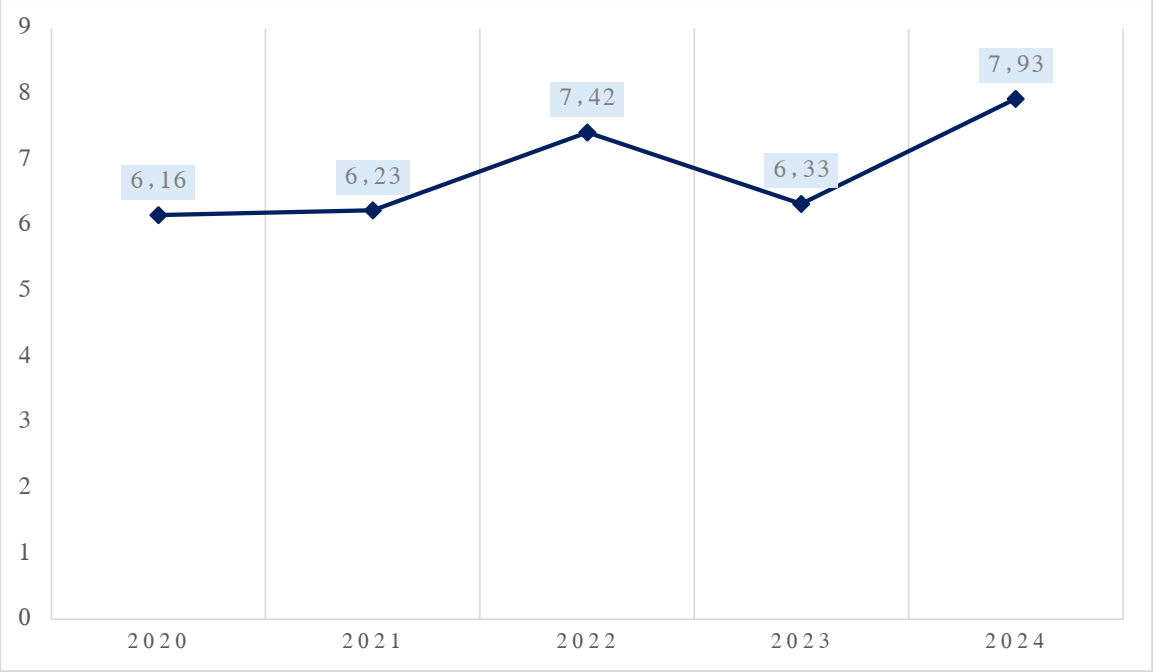
Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor-sektor lapangan usaha tertentu di Kabupaten Sumenep masih memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian daerah. Peningkatan pada tahun 2022 dan 2024 mengindikasikan adanya penguatan kegiatan ekonomi di sektor-sektor produktif, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Sementara itu, penurunan pada tahun 2023 dapat dikaitkan dengan adanya tekanan maupun hambatan struktural yang dihadapi oleh sektor-sektor usaha.

2.1.4.2.6 RASIO PDRB AKOMODASI MAKAN DAN MINUM

Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum adalah persentase kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap total Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah pada harga berlaku maupun harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sub sektor Akomodasi Makan dan Minum termasuk ke dalam sektor tersier (jasa). Kaitannya dengan produktivitas ekonomi daerah karena mencerminkan pertumbuhan pariwisata, konsumsi lokal, dan aktivitas ekonomi berbasis jasa. Sektor ini menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan UMKM dan inovasi layanan. Semakin besar kontribusinya, semakin kuat pula daya tarik dan ketahanan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.

PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Pada rasio ini menggunakan perhitungan Rasio PDRB Penyedia Akmamin = (PDRB ADHB Penyedia Akmamin / Total PDRB ADHB) x 100%. Berikut merupakan capaian rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024.



Kontribusi sektor Akomodasi, Makan dan Minum terhadap rasio PDRB Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, namun secara umum cenderung meningkat. Pada tahun 2020 kontribusi sektor ini tercatat sebesar 6,16%, lalu mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,23% pada tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, yaitu

mencapai seebsar 7,42%, yang menggambarkan mulai pulihnya aktivitas pariwisata, perhotelan, serta usaha kuliner pascapandemi.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan kontribusi menjadi 6,33%, penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya perlambatan aktivitas pariwisata maupun pergeseran pola konsumsi masyarakat. Namun, sektor ini kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024, dengan capaian tertinggi selama periode lima tahun terakhir yaitu 7,93%, menandakan adanya peningkatan permintaan jasa akomodasi serta pertumbuhan industri kuliner yang semakin kuat.

2.1.4.3 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

2.1.4.3.1 MODAL TETAP BRUTO

Modal Tetap Bruto merupakan salah satu komponen penting dalam penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. Pada konsepnya, Modal tetap bruto merupakan ukuran investasi dalam bentuk aset tetap yang digunakan dalam proses produksi selama lebih dari satu tahun. Indikator ini mencerminkan tingkat akumulasi modal suatu negara atau daerah dalam suatu periode tertentu.pengeluaran untuk membeli barang modal yang tidak dikonsumsi, tetapi memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, Bangunan lain seperti jalan dan bandara, mesin dan peralatan. Berikut merupakan perkembangan dan struktur Modal Tetap Bruto Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024:

Tabel II-27 Perkembangan dan Struktur Modal Tetap Bruto Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total PMBT					
a. **ADHB (Milyar Rp)**	8.388,92	8.732,20	9.688,21	10.571,00	11.376,87
b. **ADHK (Milyar Rp)**	5.799,03	5.941,37	6.224,70	6.589,91	6.960,51
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	25,61	24,74	24,07	24,60	25,16

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep, 2025

Tren Modal Tetap Bruto di Kabupaten Sumenep selama periode 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan investasi yang cenderung meningkat setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Berdasarkan data ADHB, nilai investasi mengalami kenaikan dari Rp8.388,92 miliar pada 2020 menjadi Rp11.376,87 miliar pada 2024, yang mencerminkan pertumbuhan investasi secara nominal. Sementara itu, dalam ADHK, terjadi peningkatan dari Rp5.799,03 miliar pada 2020 menjadi Rp6.969,51

miliar pada 2024, yang menunjukkan pertumbuhan investasi riil setelah disesuaikan dengan inflasi.. Pada tahun 2020, ekonomi mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif sebesar -1,13% akibat dampak pandemi COVID-19. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan mencapai 2,61%, dan terus meningkat pada tahun 2022 dengan angka 3,11%. Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun Sumenep mengalami pertumbuhan yang lebih lambat pada awalnya, wilayah ini menunjukkan pemulihan yang kuat dan signifikan pasca-pandemi.

Dari segi proporsi terhadap PDRB, PMTB Kabupaten Sumenep berada di kisaran 24,07%–25,61%, hasil ini terlihat belum ideal. Menurut teori Harrod-Domar, investasi yang kuat seharusnya berkontribusi lebih besar terhadap PDRB agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di beberapa daerah dengan tingkat investasi yang lebih tinggi, proporsi PMTB terhadap PDRB bisa mencapai 45% atau lebih, yang mencerminkan sektor riil yang lebih dinamis. Secara keseluruhan, tren PMTB di Kabupaten Sumenep menunjukkan pemulihan investasi pasca-pandemi, dengan pertumbuhan yang cukup stabil. Namun, untuk mencapai kondisi ideal, diperlukan akselerasi investasi lebih lanjut, terutama di sektor produktif seperti industri, pariwisata, dan infrastruktur, agar pertumbuhan ekonomi daerah lebih berkelanjutan.

2.1.4.3.2 EKSPOR BARANG DAN JASA

Indikator Ekspor Barang dan Jasa adalah ukuran yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara atau daerah ke luar negeri dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menjadi bagian penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan menunjukkan tingkat keterbukaan ekonomi suatu wilayah terhadap perdagangan internasional. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Sumenep terhadap ekonomi atau produk wilayah lain. Berikut merupakan perkembangan dan struktur Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024:

Tabel II-28 Perkembangan dan Struktur Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Net Ekspor Barang dan Jasa					
a. **ADHB (Milyar Rp)**	-1.618,32	-758,06	7.769,35	8.324,28	8.761,99
b. **ADHK (Milyar Rp)**	-277,87	-408,81	-482,43	-1.297,6	-2.093,82

Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-4,94	-2,15	-1,20	-3,02	-4,63

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep, 2025

Kabupaten Sumenep mengalami defisit ekspor barang dan jasa dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan Kabupaten Sumenep memiliki ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah, namun deficit yang dialami Kabupaten Sumenep terlihat belum terlalu tinggi. Proporsi defisit terhadap PDRB yang berkisar -1,20% hingga -4,90% mengindikasikan bahwa ekspor daerah belum mampu menutupi kebutuhan impor. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat daerah dengan daya saing tinggi seharusnya memiliki neraca perdagangan yang lebih seimbang atau bahkan surplus. Kabupaten Sumenep perlu memperkuat sektor ekspor agar mampu mengurangi defisit dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah agar mampu mengurangi ketergantungan impor melalui substitusi produk lokal.

2.1.4.4 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

2.1.4.4.1 INDEKS INFRASTRUKTUR/ INDEKS KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR

Kabupaten Sumenep berupaya mengadakan fasilitas wilayah atau infrastruktur dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi kawasan sekitar. Kinerja atas aspek fasilitas wilayah atau infrastruktur di Kabupaten Sumenep dapat dilihat berdasarkan pada indikator indeks infrastruktur yang ada di Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan penyusun indeks infrastruktur mencakup indeks jalan dan jembatan, indeks bangunan gedung, indeks air minum dan indeks sumber daya air. Berikut di bawah ini merupakan indeks kepuasan layanan infrastruktur yang dicapai Kabupaten Sumenep pada tahun 2022-2023:

Tabel II-29 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2023

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	2022	2023
	80,84	82,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, 2025

Di Kabupaten Sumenep indeks kepuasan infrstruktur baru dilakukan perhitungan sejak tahun 2021, yang jika dilihat capaiannya mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan nilai 82,2 dibandingkan tahun 2022 dengan nilai 80,84. Tentunya hal ini mengindikasikan jika pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan, khususnya infrastruktur yang mendukung

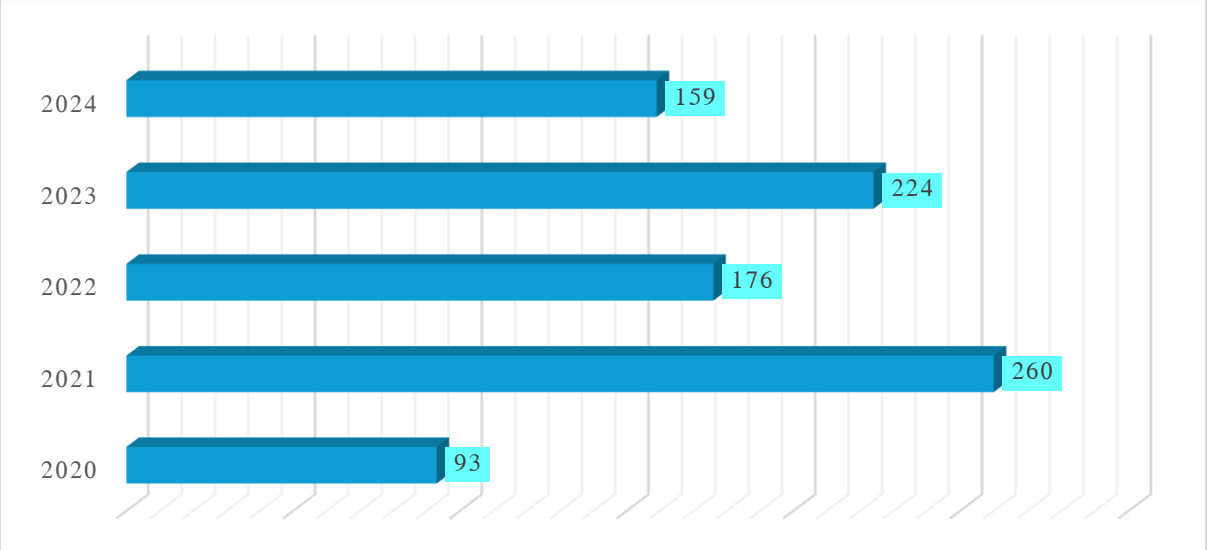
wilayah ekonomi strategis dan cepat tumbuh dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep.

2.1.4.4.2 RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK

Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak adalah ukuran yang digunakan untuk menilai persentase rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan aspek keselamatan bangunan, kecukupan ruang, akses terhadap air minum, sanitasi yang layak, dan infrastruktur dasar lainnya. Definisi operasional dari Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak yaitu rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, danberkelanjutan memenuhi:

a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:
    1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
    2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2
    3. Memiliki akses air minum layak
    4. Memiliki akses sanitasi layak;

Berikut merupakan capaian indikator rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020-2024:



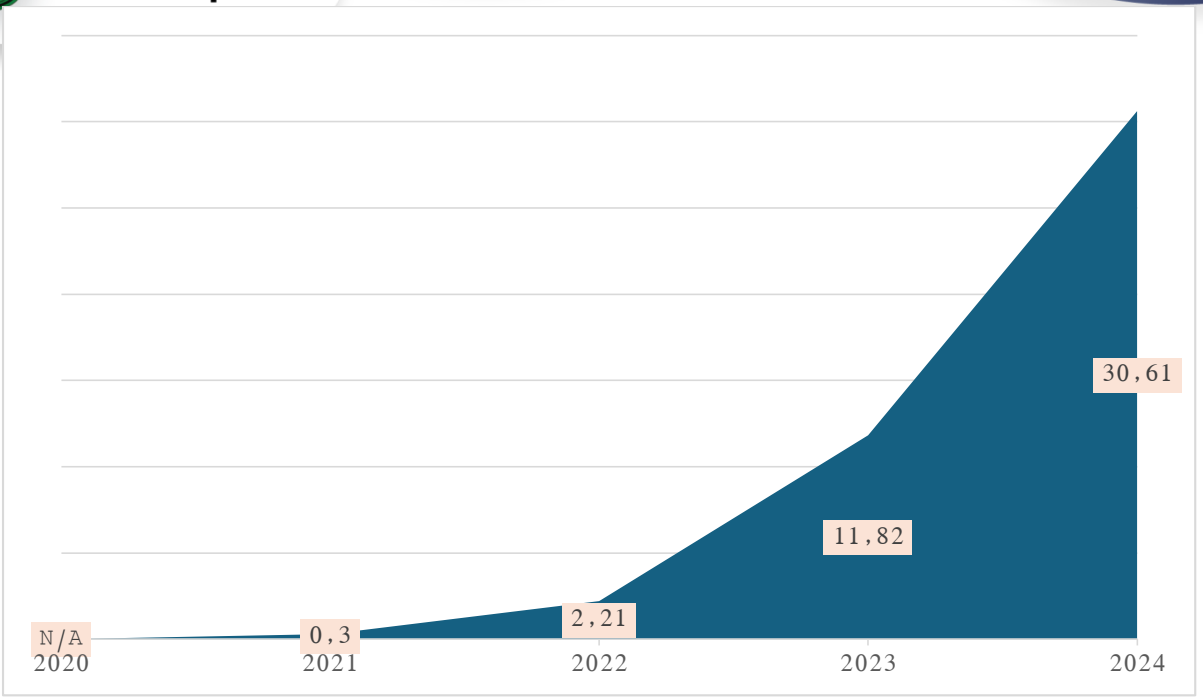
Gambar II-34 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep, 2025

Grafik di atas menyajikan perkembangan rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, capaian indikator rumah tangga dengan kases hunian layak di Kabupaten Sumenep mengalami tren fluktuatif dalam lima tahun terkahir. Pada tahun 2020, menjadi capaian terendah dalam periode 2020-2024 dengan hasil 93 yang kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 260 pada tahun 2021 sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam periode tersebut. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 dimana rumah tangga dengan akses hunian layak menjadi 176, lalu pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 224 dan diakhiri dengan penuruan di tahun 2024 menjadi sebesar 159 yang bahkan lebihrendah dari capaian di tahun 2022. Permasalahan yang muncul pada bidang ini adalah banyaknya hunian masyarakat yang belum memenuhi standar kelayakan akibat kuranya kesadaran akan pentingnya kelayakan hunian seperti belum tersedianya sanitasi yang memadai, kurangnya keselamatan bangunan, dan juga akses air minum yang kurang layak.

2.1.4.4.3 PERSENTASE DESA MANDIRI

Persentase desa mandiri mencerminkan kapasitas desa dalam pelayanan, ketahanan, dan ekonomi lokal, serta menjadi indikator daya saing wilayah dalam memperkuat perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini kini disempurnakan melalui penggunaan Indeks Desa (ID) yang memberikan gambaran lebih utuh terhadap kemandirian dan kemajuan desa. Berikut merupakan capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir:



Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, persentase desa mandiri di Kabupaten Sumenep menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, hanya belum ada desa yang berstatus mandiri, namun angka ini meningkat tajam menjadi 30,61% pada tahun 2024. Peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai program strategis pemberdayaan masyarakat desa dan optimalisasi dana desa. Peniengkatan signifika pada tahun 2024 menunjukkan bahwa intervensi pembangunan berbasis partisipatif dan penguatan kapasitas kelembagaan desa mulai menunjukkan hasil nyata.

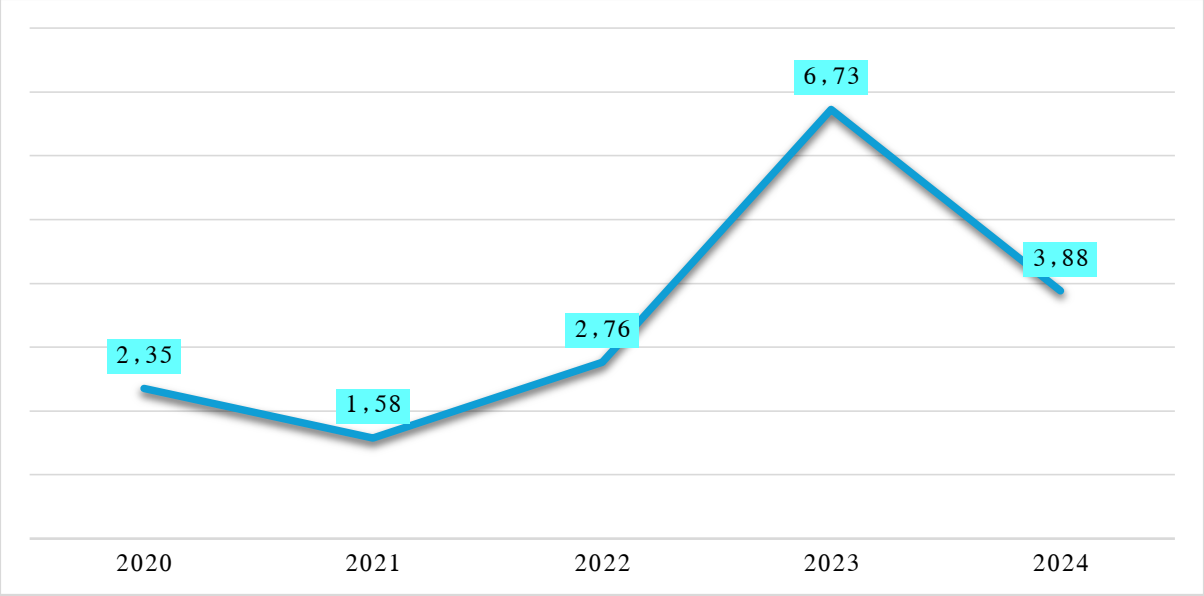
Pada tahun 2025, indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan desa mengalami perubahan. Sebelumnya penghitungan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), maka selanjutnya pengukuran diganti menjadi Indeks Desa. Perubahan diharapkan mampu menyempurnakan metode penilaian agar dapat menggambarkan kondisi desa secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga dari sisi sosial, ekonomi, dan tata kelola.

2.1.4.5 STABILITAS EKONOMI MAKRO

2.1.4.5.1 TINGKAT INFLASI

Indikator tingkat inflasi adalah ukuran yang menunjukkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu,

biasanya dihitung secara tahunan atau bulanan. Inflasi mengindikasikan perubahan daya beli uang dan stabilitas ekonomi suatu negara. Inflasi adalah kondisi ekonomi yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan harga secara umum (*Price Level*). Disebut secara umum karena barang dan jasa di pasar memiliki jumlah dan jenis yang sangat beragam. Kenaikan harga sebagian besar barang tersebut mengakibatkan terjadinya inflasi. Pada dasarnya, tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian. Inflasi ringan, yang berada di bawah sepuluh persen, justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini karena inflasi dapat memberikan dorongan kepada pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka. Kenaikan harga membuat pengusaha lebih bersemangat memperluas produksi karena keuntungan yang lebih besar. Berikut di bawah ini disajikan grafik tentang ca[aian Tingkat inflasi di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020-2024:



Gambar II-35 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

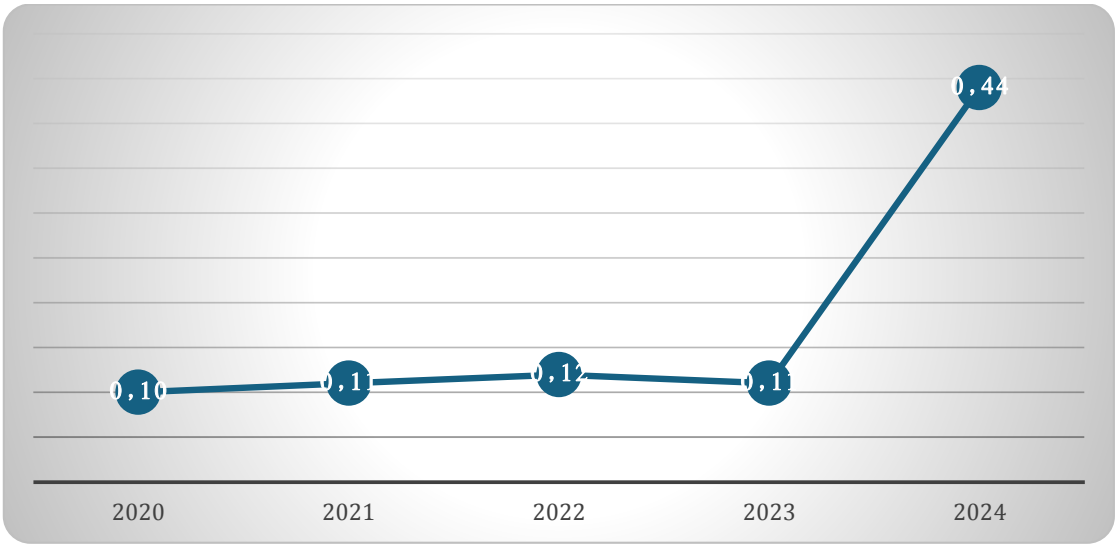
Sumber: BPS Kabupaten Sumenep, 2025

Grafik di atas menunjukkan tingkat inflasi Kabupaten Sumenep dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 2,35%, yang kemudian sedikit menurun menjadi 1,58% pada tahun 2021. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan inflasi yang moderat ke angka 2,76%. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan sehingga mencapai puncaknya pada 6,73%, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi termasuk dampak pascapandemi dan tekanan harga global. Pada tahun 2023, inflasi kembali menurun drastis menjadi 3,88%, meskipun belum terlalu mendekati tingkat inflasi pada tahun-

tahun sebelumnya. Data ini mencerminkan fluktuasi signifikan dalam laju inflasi di Kabupaten Sumenep, yang artinya terjadi ketidakstabilan yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir.

2.1.4.5.2 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dengan melihat seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar rasio, semakin tinggi kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian wilayah, maka mencerminkan kemandirian fiskal daerah yang baik. Bila Rasio kecil menunjukkan ketergantungan daerah pada sumber pendapatan lain (misalnya transfer pusat). Adapun berikut ini merupakan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024:



Gambar II-36 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumenep (diolah), 2025

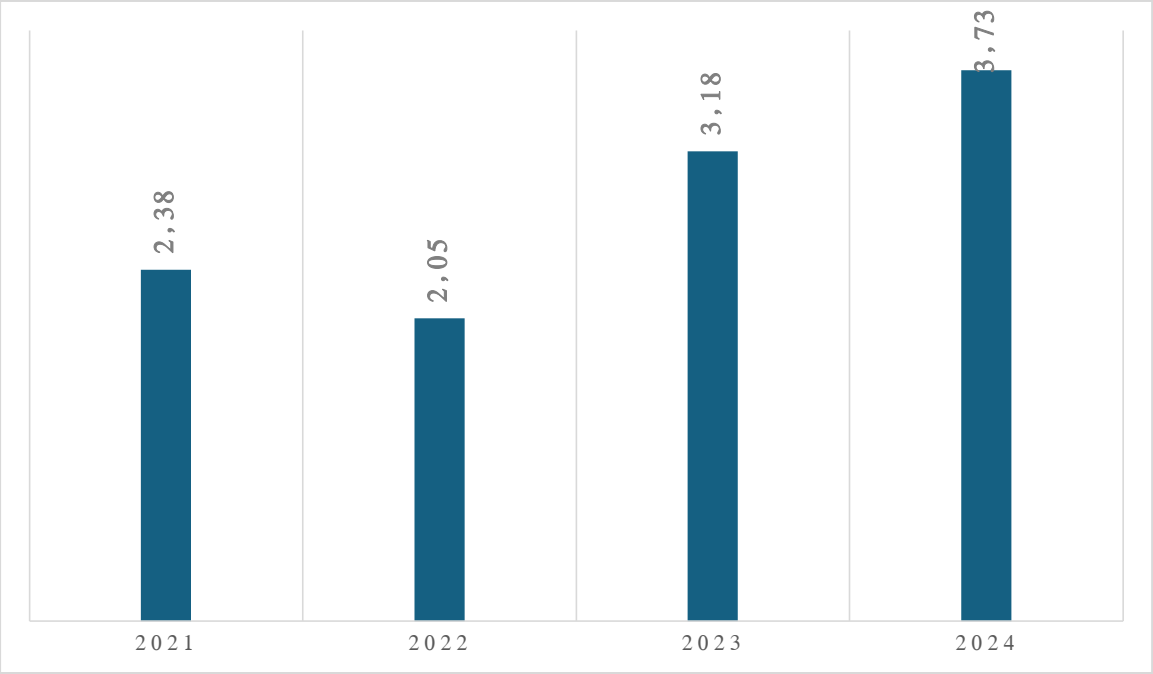
Dari gambar Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB diatas, Kabupaten Sumenep berada di angka rasio antara 0,10-0,44. Dimana capaian rasio tertinggi atau meningkat secara signifikan berada di tahun 2024. Peningkatan secara signifikan tersebut menunjukkan bahwa adanya pendapatan pajak daerah yang meningkat secara signifikan, hal tersebut terbukti dengan penerimaan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2024 yaitu sebesar Rp 53.588.069.906,48. Maka, dari peningkatan jumlah pajak daerah tersebut, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan secara signifikan.

2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.5.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

2.1.5.1.1 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Tata kelola yang berintegritas dan adaptif salah satunya tercermin dalam capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut Indeks SPBE), yang menjadi tolok ukur efektivitas transformasi digital dalam pemerintahan. Indeks SPBE menggambarkan sejauh mana kebijakan, tata kelola, serta layanan publik berbasis teknologi diterapkan secara transparan, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Berikut merupakan capaian Indeks SPBE di Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2024:



Gambar II-37 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, 2025

Indeks SPBE Kabupaten Sumenep pada periode 2021–2024 menunjukkan tren yang cukup dinamis dengan fluktuasi di awal, namun memperlihatkan peningkatan signifikan di dua tahun terakhir. Pada 2021, indeks berada di angka 2,38 dan justru menurun menjadi 2,05 di tahun 2022, yang mengindikasikan adanya tantangan serius dalam implementasi kebijakan digitalisasi birokrasi. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas SDM aparatur yang belum optimal, atau ketidakselarasan regulasi di tingkat daerah dengan kebijakan pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya digitalisasi belum

terinternalisasi secara merata di semua perangkat daerah, sehingga menyebabkan kinerja SPBE mengalami kemunduran sementara.

Tren membaik terlihat sejak 2023 dengan peningkatan tajam ke 3,18 dan berlanjut hingga 3,73 di 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan sistemik baik dari aspek tata kelola, integrasi aplikasi, maupun peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital. Lonjakan tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil melakukan akselerasi digitalisasi, kemungkinan melalui penguatan kebijakan SPBE, pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kolaborasi lintas sektor. Kenaikan yang konsisten juga memperlihatkan adanya komitmen politik dan teknis yang lebih kuat untuk mengadopsi teknologi dalam birokrasi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas pelayanan. Jika tren ini terus dijaga, Sumenep berpotensi mencapai kategori SPBE yang lebih matang dan sejajar dengan daerah-daerah dengan tingkat digitalisasi lebih maju di Jawa Timur.

2.1.5.1.2 INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik dihasilkan dari perhitungan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yakni upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep menurut data Kemenpan RB Tahun 2023 sebesar 3,6 artinya dalam kategori kelas B (Baik). Predikat ini memberikan klasifikasi bahwasanya unit pelayanan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menjalankan kebijakan pelayanan, namun masih belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari segi fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai, sementara berbagai inovasi telah dikembangkan, tetapi penerapannya masih belum maksimal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan.

2.1.5.1.3 SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)

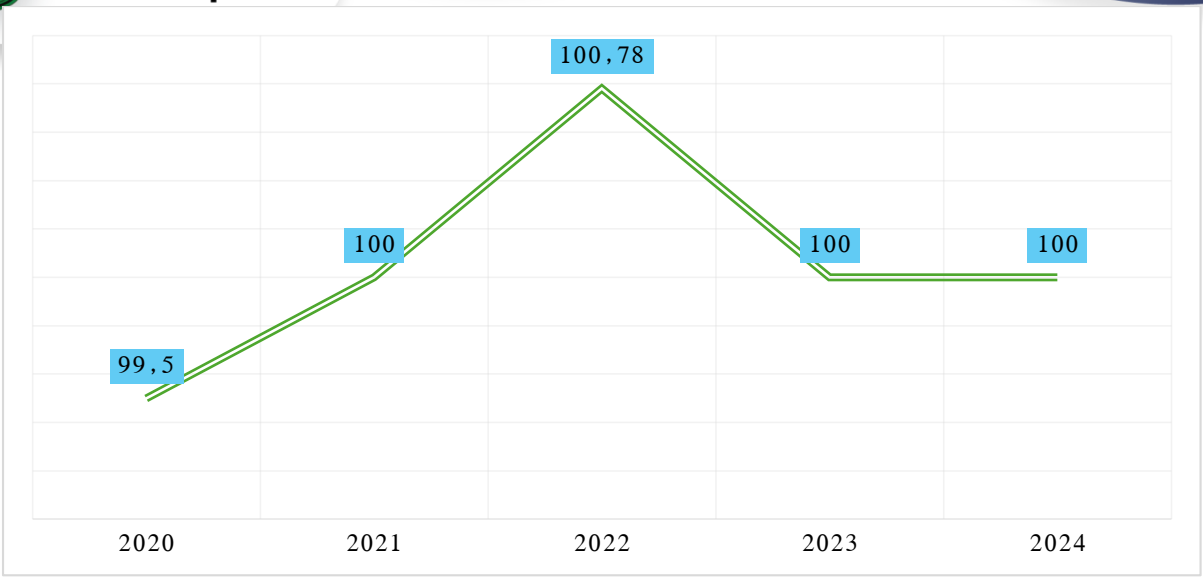
Survei Penilaian Integritas (SPI) diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas instansi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Survei ini berperan penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hasil SPI diberikan dalam skor 0-100, di mana skor yang lebih tinggi mencerminkan tingkat integritas yang lebih baik.

Kabupaten Sumenep berhasil meraih skor tertinggi SPI di Jawa Timur pada tahun 2024 dengan nilai 77,58, yang mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Keunggulan terbesar terlihat pada dimensi transparansi (87,81) dan perdagangan pengaruh (82,23), menunjukkan adanya keterbukaan informasi serta minimnya intervensi yang tidak sehat dalam kebijakan publik. Namun, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek pengelolaan sumber daya manusia (71,27) dan pengadaan barang dan jasa (71,55), yang perlu diperkuat agar efektivitas tata kelola pemerintahan semakin optimal. Secara keseluruhan, capaian ini menjadi bukti bahwa upaya antikorupsi di Sumenep telah berjalan dengan baik, meskipun tetap memerlukan penguatan di beberapa aspek strategis.

2.1.5.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

2.1.5.2.1 PERSENTASE PENEGAKAN PERDA

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial di suatu wilayah, termasuk di Kabupaten Sumenep. Dalam konteks keamanan daerah, keberhasilan penegakan Perda berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif, di mana pelanggaran hukum dapat diminimalisir dan kepatuhan terhadap aturan semakin meningkat. Dengan demikian, tingginya persentase penegakan Perda tidak hanya menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam menegakkan hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban umum, mengurangi potensi konflik sosial, serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat. Berikut merupakan realisasi persentase penegakan perda di Kabupaten Sumenep dalam tahun 2020-2024:



Gambar II-38 Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

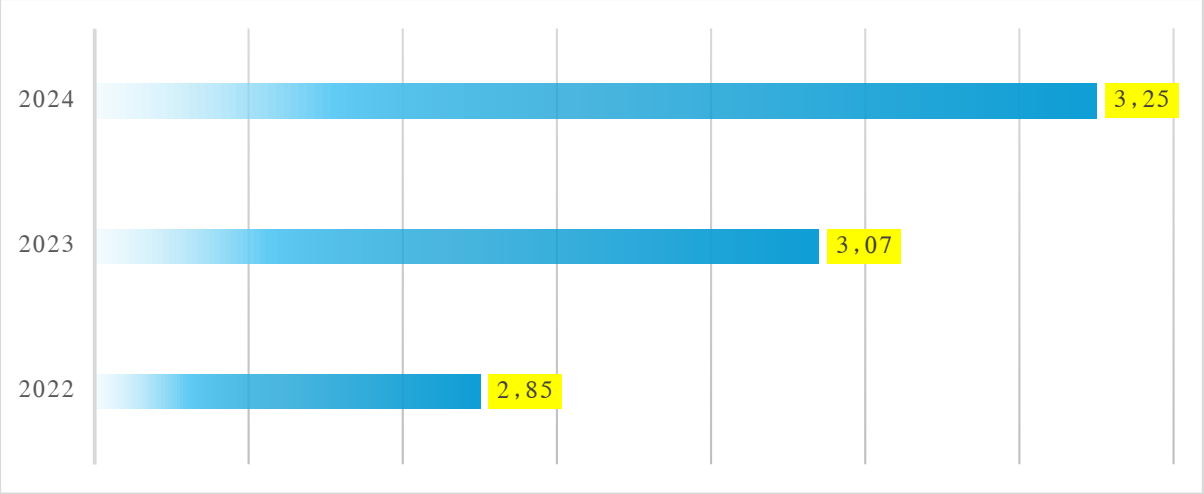
Sumber: Satpol PP Kabupaten Sumenep, 2025

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil dengan capaian di sekitar atau melebihi 100%. Peningkatan signifikan pada tahun 2022 menandakan adanya upaya maksimal dalam implementasi Perda, sementara stabilisasi pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan konsistensi dalam penegakan aturan. Hal ini mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku, yang berkontribusi pada ketertiban dan keamanan wilayah. Namun, untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitasnya, evaluasi berkala dan inovasi dalam strategi penegakan tetap diperlukan agar kepatuhan terhadap penegakan peraturan daerah semakin optimal.

2.1.5.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

2.1.5.3.1 INDEKS DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah menjadi tolok ukur penting yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menganalisis tren serta faktor-faktor yang memengaruhi indeks daya saing daerah sangat penting dalam perumusan kebijakan strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal ini di Kabupaten Sumenep. Berikut merupakan capaian nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024:



Gambar II-39 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan data dalam grafik, Indeks Daya Saing Daerah mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 2,85 pada tahun 2022 menjadi 3,07 pada tahun 2023, dan mencapai 3,25 pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan pada Pilar 10, yaitu ukuran pasar, yang mencerminkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan meningkatnya rasio nilai impor terhadap PDRB. Faktor ini menunjukkan bahwa struktur industri Kabupaten Sumenep semakin kuat dan lebih kompetitif. Selain itu, Pilar 1 yang berkaitan dengan institusi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing, yang dapat mencerminkan adanya kebijakan yang lebih efektif serta birokrasi yang lebih efisien dalam mendukung ekosistem bisnis di daerah.

Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam peningkatan daya saing masih terletak pada Pilar 9, yaitu sistem keuangan. Kelemahan dalam pilar ini disebabkan oleh rendahnya akses terhadap pembiayaan, seperti terbatasnya kredit usaha rakyat per penduduk, minimnya dukungan dari lembaga ventura terhadap UMKM dan start-up, serta tingginya rasio kredit bermasalah dibandingkan dengan total pinjaman. Masalah ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah karena sektor usaha, khususnya UMKM, sulit mendapatkan modal untuk ekspansi dan inovasi. Oleh karena itu, meskipun indeks daya saing daerah terus meningkat, perbaikan dalam sektor keuangan sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Sumenep, ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Sumenep ditopang oleh pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD), salah

satunya sektor industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Sektor ini dipilih karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian lokal sekaligus menjadi penggerak utama pembangunan perdesaan. Inovasi diarahkan pada peningkatan kapasitas petani dan nelayan melalui penerapan teknologi tepat guna, pembangunan industri pengolahan, serta penguatan branding produk daerah. Selain itu, program unggulan kepala daerah seperti Program Pengembangan Petani dan Nelayan Muda serta Program Ketahanan Pangan dan Perikanan memperkuat dukungan kelembagaan, SDM, dan jejaring riset untuk meningkatkan daya saing Sumenep dalam rantai nilai regional maupun nasional.

Di sisi lain, permasalahan utama daerah yang masuk kategori super prioritas adalah tingginya angka kemiskinan yang masih menempati salah satu peringkat tertinggi di Jawa Timur. Untuk menjawab tantangan tersebut, ekosistem riset diarahkan tidak hanya pada peningkatan produktivitas sektor unggulan, tetapi juga pada pemecahan kendala struktural seperti keterbatasan modal, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta akses infrastruktur dan pasar. Integrasi antara program penguatan PUD dengan strategi pengentasan kemiskinan menciptakan sinergi: hilirisasi sektor pertanian dan perikanan tidak hanya menambah nilai ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Dengan demikian, narasi ekosistem riset dan inovasi di Sumenep menggambarkan upaya simultan memperkuat daya saing daerah sekaligus mengatasi masalah kemiskinan yang menjadi fokus kebijakan super prioritas

2.1.5.4 KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.5.4.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. PENDIDIKAN

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan nonformal menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk pendidikan tinggi dan penetapan standar nasional pendidikan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, terdapat beberapa isu permasalahan pada pendidikan yang perlu diperhatikan, seperti akses pelayanan pendidikan yang belum merata dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun terdapat kewenangan yang jelas, implementasi di lapangan masih memerlukan peningkatan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan yang adil dan merata. Maka, sebagai pengukuran indikator kinerja urusan pendidikan, terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator diluar SPM, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-30 Capaian Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Kabupaten Sumenep tahun 2022-2024

No	Indikator SPM	Capaian (%)		
		2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	58,65	100	94,54
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	103,64	100	96,69
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	81,05	100	100
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nacional	45,45	47,35	52,49
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	34,19	35,99	42,03
6	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	53,26	55,8	58,49
7	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	51,47	50,92	54,67
8	Penirigkatan Proporsi dumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	73,17%	67,27	68,54
9	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualiftkasi S1 / D IV	na	64,7	80,81
10	Iklim keamanan SD	66,63	65,64	67,73
11	Iklim keamanan SMP	59,98	60,01	60,9
12	Iklim kebinekaan SD	57,81	65,61	68,62
13	Iklim kebinekaan SMP	55,79	59,72	65,34

No	Indikator SPM	Capaian (%)		
		2022	2023	2024
14	lklim inklusivitas SD	52,66	54,39	52,11

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, 2025

Berdasarkan tabel realisasi SPM urusan pendidikan di Kabupaten Sumenep tahun 2022-2024, capaian untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD ditahun 2022-2023, mengalami kenaikan cukup signifikan dan mencapai target sebesar 100%, namun tahun 2024 mengalami penurunan sedikit dengan capaian sebesar 94,54%. Sementara capaian Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami penurunan dengan capaian akhir tahun 2024 sebesar 96,69%. Indikator SPM ketiga adalah Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami tren peningkatan dengan adanya kenaikan tahun 2023 dan konsisten hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% yang telah mencapai target.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, terdapat tambahan SPM tentang posyandu, dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, melainkan masuk ke seluruh urusan wajib pelayanan dasar yang diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan pendidikan, posyandu mengampu tentang edukasi orang tua terkait stimulasi anak, literasi, numerasi seperti Layanan screening tumbuh kembang untuk anak PAUD, Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dasar dan pencegahan putus sekolah, Informasi pendaftaran dan bantuan pendidikan, ketentraban dan ketertiban, permasalahan sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Selain capaian SPM, terdapat beberapa indikator diluar SPM yang ada pada tabel dibawah ini:

Tabel II-31 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar					
	Tingkat PAUD Formal	58,510	58,560	58,560	67,960	73,1
	Jenjang SD/Sederajat	103,5	103,54	103,64	103,7	100
	Jenjang SMP/Sederajat	104,88	104,95	104,98	105,04	100
2	Angka Partisipasi Sekolah					
	Usia 5-6 Tahun	58,51	58,56	58,65	67,96	73,1

	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Usia 7-12 Tahun	92,53	92,64	92,68	92,75	92,85
	Usia 13-15 Tahun	76,31	76,35	76,39	76,47	76,6
	Usia 7-18 Kesetaraan	n/a	n/a	n/a	11,97	45,77
	Usia 4-15 Penyandang Disabilitas	n/a	n/a	n/a	50	29,48
2	Indeks Pendidikan	0,557	0,568	0,573	0,575	0,581
3	Indeks Pembangunan Manusia	67,15	67,74	68,49	69,13	69,78
4	Harapan Lama Sekolah	12,92	13,02	13,29	13,36	13,59
5	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	5,71	5,92	5,93	5,94	6,10
6	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	n/a	n/a	21,57%	40,76%	40,60%
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, 2025

Pada indikator terkait Angka Partisipasi Kasar (APK) yang didalamnya terdapat pada jenjang PAUD, SD/Sederajat, SMP/Sederajat dengan capaian tahun 2020-2023 memiliki angka yang mengalami kenaikan. Capaian APK tingkat PAUD ditahun 2023 memiliki capaian sebesar 61,03%, sementara jenjang SD/Sederajat memiliki capaian sebesar 103,70%, dan di jenjang SMP/Sederajat sebesar 105,04%. Namun, untuk capaian tahun 2024 masih belum memiliki data yang terupdate untuk indikator APK di semua jenjang. Sementara indikator kedua terkait Angka Partisipasi Sekolah, hanya memiliki capaian ditahun 2023-2024 dengan capaian yang cenderung mengalami penurunan. Penurunan secara signifikan terjadi di capaian usia 7-18 kesetaraan dari 44,11% ditahun 2023 menjadi sebesar 9,49% ditahun 2024. Indikator ketiga terkait Indeks Pendidikan dengan capaian tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang capaian tahun 2020 sebesar 0,557 dan setiap tahun mengalami peningkatan hingga capaian ditahun 2024 adalah sebesar 0,581.

Sementara capaian SPM menurut rapor pendidikan di Kabupaten Sumenep tahun 2023 memiliki capaian sebesar 52,58% yaitu Belum Tuntas dan kemudian ditahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 67,61% yaitu Tuntas Muda. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan APK, Iklim Keamanan, dan Kebhinekaan, menunjukkan akses yang lebih baik dan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Meningkatkan nilai SPM dalam rapor pendidikan membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari sekolah, pemerintah, orang tua, hingga komunitas

masyarakat. Upaya yang berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak pada hasil belajar yang lebih baik.

B. KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Hal ini melibatkan seluruh potensi, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah, dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif dan humanisme tanpa diskriminatif dalam pelayanan, yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya yang berkualitas serta kemampuan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik.

Kesehatan juga merupakan salah satu pelayanan dasar wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kinerjanya. Saat ini, permasalahan kesehatan di Indonesia masih cukup beragam, termasuk masalah penyakit menular dan tidak menular, serta angka kematian yang bervariasi di setiap daerah. Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular menjadi masalah pokok yang harus dihadapi. Akar masalahnya terletak pada kualitas infrastruktur dan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar yang masih kurang. Selain itu, kebijakan dan sistem kesehatan pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung kebutuhan masyarakat. Kebiasaan hidup sehat masyarakat yang rendah juga turut memperburuk situasi. Baik buruknya kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari angka harapan hidup masyarakat yang ada. Apabila angka harapan hidup suatu daerah tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan di daerah tersebut telah mencapai pencapaian yang baik. Sebaliknya, jika angka harapan hidup rendah, maka upaya kesehatan masih memerlukan banyak perbaikan dan peningkatan. Maka, sebagai pengukuran indikator kinerja urusan pendidikan, terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator diluar SPM, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-32 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2024

No	Indikator SPM	Tahun Capaian		
		2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,94	93,28	80,70

No	Indikator SPM	Tahun Capaian		
		2022	2023	2024
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98,66	100	78,81
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,41	100	79,89
4	Pelayanan Kesehatan Balita	96,89	95,71	91,19
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia pendidikan Dasar	83,41	88,06	96,65
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	80,03	89,17	94,34
7	Pelayanan kesehtan Pada usia Lanjut	85,61	90,71	99,75
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	83,48	83,36	89,58
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	97,50	97,50	96,14
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gnagguan Jiwa (ODJG) Berat	95,84	100	95,26
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahka Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeaficiensy Virus)	90,50	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, 2025

Adapun berikut Realisasi kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan di Kabupaten Sumenep tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu:

Tabel II-33 Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan kesehatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks	3,25	3,25	3,34	3,49	3,54
2	Jumlah BTA positif yang ditangani	Angka	812	1.059	730	1.113	925
3	Data jumlah kasus TB baru dan kambuh*	Orang	1.882	1.924	1.529	2.077	2.245
4	Persentase Prevalensi HIV (%)	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Persentase Kunjungan bayi (%)	%	108,91	100,62	100,4	99,9	103.2
6	Persentase Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan (%)	%	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023
7	Persentase Penduduk yang dilindungi JKN/Asuransi Kesehatan	%	68,9	71,2	75,5	99	98,4
8	Persentase Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunizatioan (UCI)	%	84	90,7	40,4	79	87,7
9	Persentase Jumlah Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100	100	100
10	Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	92,2	85,8	100	109,1
11	Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	102,9	104	96,8	98,7	96.6
12	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	21	21	21	21	21
13	Persentase Realisasi Imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	102	99,1	88,3	108,1	100,8
14	Angka Harapan Hidup (AHH)	%	73,75	73,86	74,26	74,64	73,86
15	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	1,91	2,09	1.89	2,3	1.9
16	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	69,87	65,4	114,58	92,99	69,8
17	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,02	0,04	0,049	0,04
18	BOR (Bed Occupancy Rate)/Persen	%	60,97	44,01	38,23	55,3	43,3
19	TOI (Turn Over Interval)/kali	Kali	2,21	4,16	6,65	3,1	4,5
20	ALOS (Average Length of Stay)/hari	hari	4,4	3,76	4,14	3,83	2,9
21	CRR (Cost Recovery Rate)	Angka	107,44	126,55	143,19	80,22	102,63
22	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita*	Rasio	3,13	4,6	3,4	4,7	4,38
23	Rasio Puskesmas dan Pustu terhadap jumlah penduduk*	Rasio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
24	Persentase Puskesmas yang melayani rawat inap*	%	100	100	100	100	100
25	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk*	Rasio	0,003	0,003	0,003	0.003	0,003
26	Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar*	%	75	100	100	100	100
27	Persentase puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin*	%	100	100	100	100	100
28	Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan*	Rasio	133,8	144,9	144,9	208,3	408

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023
29	Prevelensi Wasting	%	12,3		9,9	10,7	3,3
30	Persentase RSUD terakreditasi	%	100	100	100	100	100
31	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	67	70	73	73	73
32	Prevelensi obesitas	%	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
33	Puskesmas tersedia obat esensial	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, 2025

Berdasarkan tabel di atas kinerja layanan kesehatan di Kabupaten Sumenep mencakup berbagai aspek penting. Indikator-indikator tersebut meliputi kepuasan masyarakat, prevalensi penyakit seperti TB dan HIV, cakupan imunisasi dan gizi, serta ketersediaan dan akreditasi fasilitas kesehatan. Selain itu, indikator juga mencakup jumlah tenaga kesehatan, ketersediaan obat, dan berbagai layanan kesehatan dasar yang disediakan oleh puskesmas dan rumah sakit. Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya dan capaian Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya.

C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan bidang yang mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur serta tata ruang suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan kualitas standar kehidupan masyarakat, terutama dalam memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan yang potensial dan strategis. Selain itu, penyediaan infrastruktur juga berdampak pada penciptaan kesejahteraan dengan meningkatkan aksesibilitas untuk memfasilitasi aktivitas masyarakat. Namun, terdapat beberapa masalah pokok yang perlu diperhatikan, seperti perubahan ekosistem secara signifikan, ketaatan perizinan tata ruang dan pertanahan, serta pertumbuhan ekonomi yang belum berkembang secara maksimal. Dengan demikian, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diperlukan upaya yang lebih baik dalam penataan ruang dan pengelolaan infrastruktur. Maka, di Kabupaten Sumenep terdapat beberapa capaian Standar Pelayan Minimal (SPM) dan capaian indikator diluar SPM yang dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

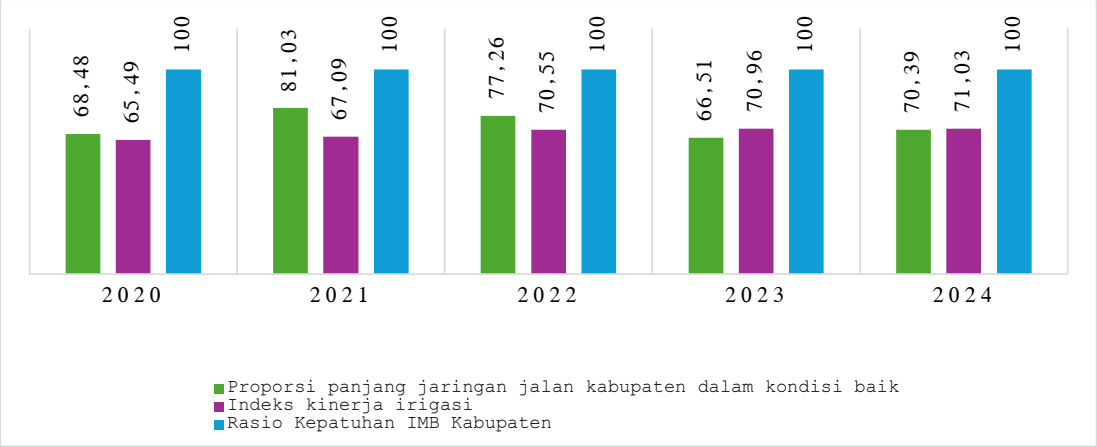
Tabel II-34 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian (%)		
			2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	91,66	93,06	94,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestiK	81,63	82,01	85,00

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Sumenep tahun 2022-2024, untuk Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten, mengalami tren yang meningkat dengan capaian ditahun 2022 adalah sebesar 91,66% yang kemudian meningkat menjadi 94% ditahun 2024. Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ditahun 2022-2024 juga mengalami kenaikan, dari capaian ditahun 2022 sebesar 81,63% meningkat menjadi sebesar 85% ditahun 2024.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dijelaskan bahwa posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, posyandu mengampu tentang edukasi dan informasi akses air minum aman serta sanitasi layak seperti Sosialisasi pengelolaan air bersih rumah tangga dan Edukasi pengelolaan limbah rumah tangga. Adapun selain capaian SPM, terdapat juga indikator lain diluar SPM yang ada pada grafik dibawah ini:



Gambar II-40 Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, 2025

Sesuai SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 bahwa Panjang Jalan Kabupaten Sumenep adalah sepanjang 27,599 Km, yang terdiri atas tiga ruas jalan, yaitu Jln. Imam Bonjol, Jln. Raya Gapura, BTS. Kota Sumenep – Pantai lombang. Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024 mengalami tren yang fluktuatif dengan capaian yang mengalami penurunan secara signifikan ada ditahun 2023 yaitu menjadi sebesar 66,51% yang sebelumnya ditahun 2022 memiliki capaian sebesar 77,26%. Tren yang fluktuatif pada capaian indikator diakibatkan karena belum semua jaringan jalan dalam kondisi baik, sehingga proses perpindahan orang dan distribusi barang tersendat dan dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Indikator kedua yaitu Indeks Kinerja Irigasi ditahun 2020-2024 yang mengalami tren meningkat dengan capaian awal di tahun 2020 adalah sebesar 65,49% yang kemudian setiap tahun mengalami peningkatan hingga capaian ditahun 2024 adalah sebesar 71,03%. Meningkatnya capaian pada indikator Indeks Kinerja Irigasi, dapat meningkatkan keberhasilan usaha di bidang pertanian atau yang membutuhkan jaringan irigasi semakin meningkat, sehingga, bidang pertanian dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sementara Rasio kepatuhan IMB Kabupaten ditahun 2020-2024, telah mencapai target dengan capaian sebesar 100%, dari capaian yang telah mencapai target tersebut, berpotensi untuk mengurangi risiko terhadap bencana dapat semakin diminimalisir.

D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Secara fundamental, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan upaya perencanaan dan pembangunan kota untuk menyediakan tempat

tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat. Perumahan rakyat berkaitan dengan program pemerintah yang menyediakan hunian dengan harga terjangkau bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan aksesibilitas terhadap tempat tinggal yang layak. Sementara itu, kawasan permukiman mencakup lingkup yang lebih luas yaitu seluruh lingkungan tempat tinggal yang terencana dengan baik yang terdiri dari infrastruktur, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan layanan masyarakat. Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan capaian indikator yang berada diluar SPM, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-35 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian (%)		
			2022	2023	2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100
3					

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Sumenep, 2025

Pada tabel Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diatas, terdapat dua indikator SPM yaitu terkait Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Selain beberapa SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana posyandu saat ini

tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, posyandu mengampu tentang informasi dan pendampingan rumah layak huni, seperti adanya Sosialisasi program rumah layak huni dan bantuan perbaikan rumah dan Edukasi tentang lingkungan sehat di permukiman.

Di Kabupaten Sumenep, di Tahun 2024 terdapat sebesar 112,32 Ha kawasan kumuh dan perumahan kumuh yang dihuni sebanyak 19.069 jiwa dengan tingkat kekumuhan ringan dan sedang, sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan kawasan kumuh. Kriteria kawasan kumuh ditentukan berdasarkan kepadatan penduduk dan bangunan, kualitas konstruksi dan ventilasi bangunan, ketersediaan jalan, drainase, toilet, cara pembuangan sampah, dan pencahayaan jalan.

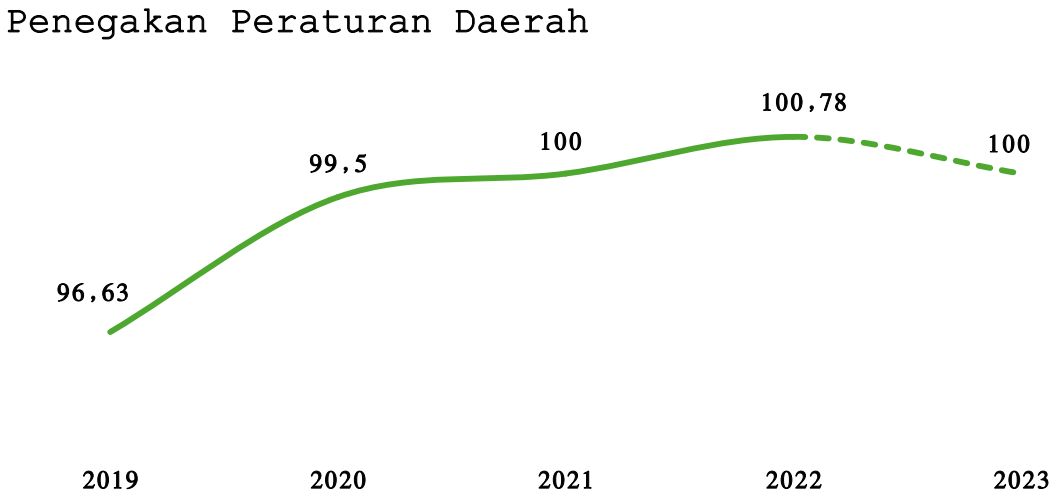
Berdasarkan SK Bupati Sumenep Nomor 188/36/KEP/435.013/2020 tentang Lokasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan, telah ditetapkan kawasan kumuh yang tersebar di 3 kecamatan dan 13 desa/kelurahan. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil menurunkan luasan permukiman kumuh sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2021.

Seiring berakhirnya program KOTAKU, upaya penanganan kawasan kumuh sempat mengalami stagnasi. Baru pada tahun 2024, melalui inisiatif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep, dilakukan rapat koordinasi Pokja PKP bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur dan Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk menyepakati luasan serta kawasan kumuh yang belum tertangani. Kesepakatan ini mengacu pada SE Ditjen Cipta Karya Nomor 49 Tahun 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 600.2/393/105.2/2024 tentang Penetapan Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Pembagian Kawasan Permukiman Kumuh.

Selanjutnya, melalui aplikasi SIKAWANKU milik Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, pada 7 Februari 2025 diterbitkan Berita Acara Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2024 beserta penetapan kawasan baru sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen. Berdasarkan hasil tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini sedang memproses penerbitan SK Kumuh Tahun 2025 sebagai dasar hukum terbaru dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di daerah.

E. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang bertujuan untuk untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dengan menciptakan lingkungan damai, harmonis, dan tertib. Upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dilakukan dengan melaksanakan penegakan hukum, pengaturan perilaku masyarakat, perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat secara umum, pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi norma-nomra sosial dan hukum. Perlindungan terhadap masyarakat juga dilaksanakan dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan masyarakat seperti kejahatan, bencana alam, dan konflik sosial. Pemerintah perlu memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat seperti melakukan penegakan peraturan daerah. Berikut merupakan persentase penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sumenep.



Gambar II-41 Capaian Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

Sumber: *Data diolah, 2024*

Grafik di atas menyajikan perkembangan persentase penegakan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari 2019 sampai 2023. Secara keseluruhan, persentase penegakan perda mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase penegakan perda mencapai 96,63% yang kemudian meningkat menjadi 99,5% pada tahun 2020. Sejak itu, capaian persentase penegakan perda konsisten di angka 100%. Angka pelanggaran hukum masih cenderung tinggi

karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, peran penegak hukum dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masih belum maksimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pedoman yang memuat ketentuan terkait jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh secara minimal. Salah satu pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pelayanan dasar tersebut merupakan urusan yang mencakup pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Berikut merupakan capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Sumenep.

Tabel II-36 Realisasi Pelaksanaan Penerapan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No	Indikator	2023	2024
1	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	69.34%	100%
2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0.13%	99,78%
3	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	96,34%

Sumber: BPBD Kabupaten Sumenep, 2025

Tabel di atas menunjukkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2023. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa capaian setiap indikatornya belum memperoleh hasil yang sesuai dengan target yaitu 100%. Capaian persentase pelayanan informasi rawan bencana adalah 69,34%. Kemudian, persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 0,13%. Setelah itu, hasil yang baik diperoleh indikator penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 100% yang artinya berhasil memenuhi target. Melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, terdapat tambahan SPM tentang posyandu dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial, posyandu mengampu tentang informasi kesiapsiagaan bencana dan keamanan lingkungan,

seperti Edukasi penanggulangan kebakaran, banjir, dan bencana lainnya dan Simulasi evakuasi dan keselamatan anak.

F. SOSIAL

Bidang sosial merupakan fondasi utama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Optimalisasi pelayanan di bidang sosial dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan komunitas secara keseluruhan sehingga dapat menciptakan kondisi hidup yang lebih baik bagi masyarakat, yaitu sehat, terdidik, dan sejahtera. Sebagai urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Daerah memenuhi urusan sosial dengan melaksanakan pelayanan sosial, penanggulangan masalah sosial, dan urusan wajib yang ada dalam bidang sosial lainnya. Salah satu permasalahan sosial yang perlu ditangani adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada urusan Sosial, terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator yang ada diluar SPM yang dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

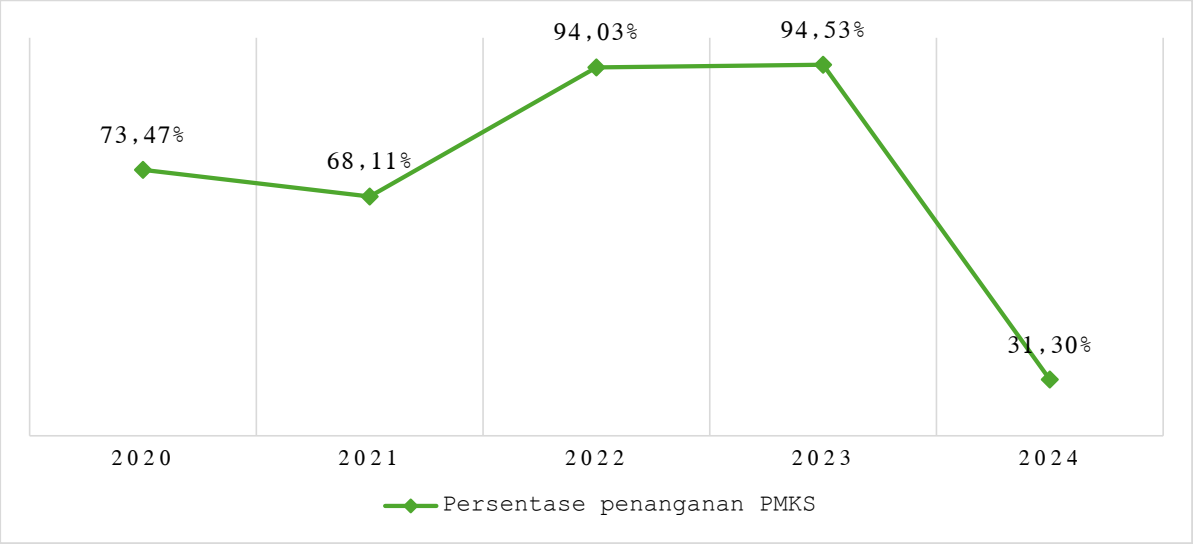
Tabel II-37 Standar Pelayanna Minimal (SPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2024

No	Indikator SPM	Capaian (%)	
		2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	62,05	69,64
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	100	19,20

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sumenep, 2025

Dari beberapa SPM urusan Sosial di Kabupaten Sumenep diatas, pada urusan sosial ini terdapat tambahan SPM yang mengatur tentang posyandu. Melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Sosial, posyandu mengampu tentang perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, seperti Pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan sosial,

Layanan konseling keluarga, dan Informasi akses fasilitas sosial untuk lansia dan disabilitas. Selain terdapat SPM pada Urusan Sosial, terdapat capaian kinerja urusan sosial yang berkaitan dengan penanganan PPKS, yang seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar II-42 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sumenep, 2025

Pada urusan sosial, terdapat indikator yang diampu mengenai Persentase penanganan PMKS. Persentase penanganan PMKS tahun 2020-2024 memiliki tren yang fluktuatif. Penurunan terjadi ditahun 2021 menjadi sebesar 68,11% yang sebelumnya memiliki capaian sebesar 73,47% ditahun 2020. Namun Persentase penanganan PMKS ditahun 2022-2023 mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar 94,53% tahun 2023, yang menandakan bahwa PMKS di Kabupaten Sumenep telah banyak ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun, ditahun 2024, capaian Persentase penanganan PMKS menurun secara signifikan menjadi sebesar 31,30%. Penurunan penanganan PMKS dapat disebabkan oleh Jumlah PMKS mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mengalami penurunan, terdapat beberapa potensi yang ditimbulkan, seperti potensi Penanganan PMKS setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun jumlah PMKS mengalami penurunan.

2.1.5.4.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. TENAGA KERJA

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep bukan hanya menjadi bagian dari urusan wajib, tetapi juga menjadi pilar fundamental dalam menggerakkan geliat ekonomi daerah serta membangun manusia yang memiliki daya saing. Secara teknis urusan tenaga kerja diampu oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep yang kinerja dapat direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

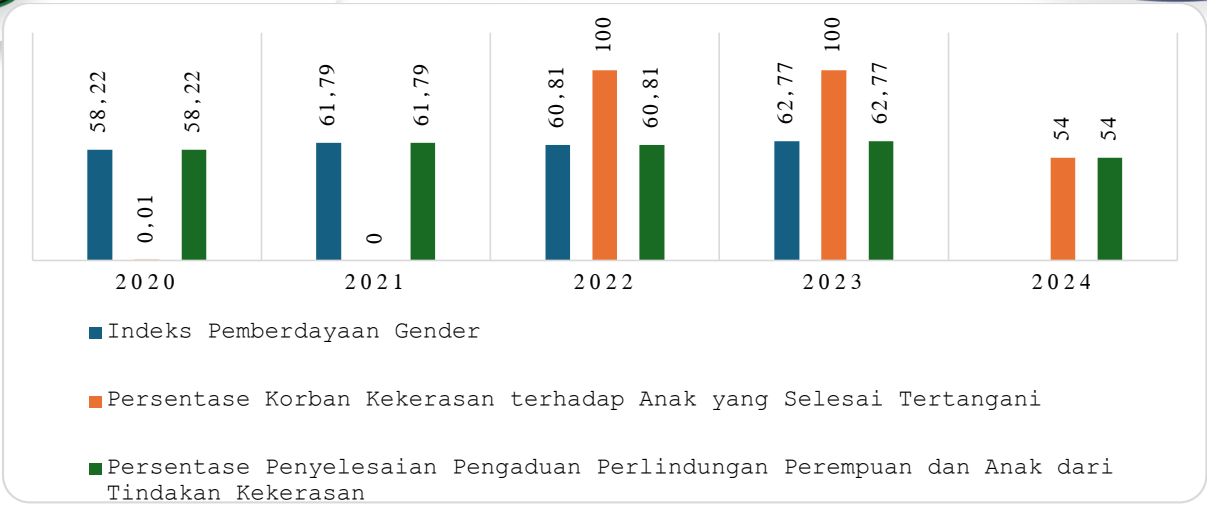
Tabel II-38 Kinerja UrusanTenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Meningkatnya Kesempatan Berusaha	%	-	2,70	54,65	55,95	55,95
2	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	65,64	58,41	11,65	50,08	n/a
3	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	Orang	23.189	26.710	14.533	15.484	n/a
4	Jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan	Unit	425	425	495	594	n/a
5	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*	Jumlah	5	1	4	1	n/a

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2024

B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan non dasar yang menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai generasi penerus yang berkualitas. Kinerja penyelenggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar II-43 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumenep
Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sumenep, 2025

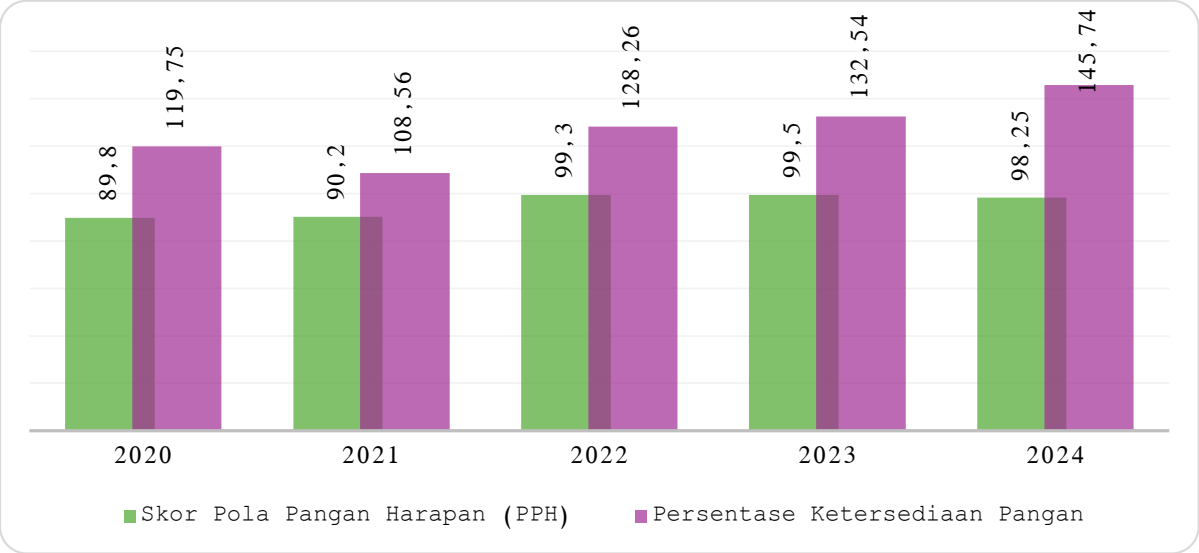
Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren positif dalam beberapa aspek. Indeks Pemberdayaan Gender mengalami peningkatan dari 58,22 di tahun 2020 menjadi 62,77 di tahun 2024, mencerminkan semakin luasnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. ekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan, meskipun tidak tinggi untuk persentase penurunannya akan tetapi apabila dilihat dari tahun sebelumnya terdapat peningkatan yang cukup baik

Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang berhasil diselesaikan meningkat signifikan menjadi 100% dalam dua tahun terakhir, menandakan efektivitas sistem perlindungan anak. Selain itu, penyelesaian pengaduan terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan juga mengalami peningkatan, mencapai 62,77%, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi penyelesaian kasus. Kesimpulannya, Kabupaten Sumenep telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, tetapi tetap perlu penguatan kebijakan dan koordinasi agar capaian ini semakin optimal dan berkelanjutan.

C. PANGAN

Urusan Pangan di Kabupaten Sumenep memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Kesejahteraan masyarakat Sumenep dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sangat bergantung pada kebijakan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Dengan memastikan penyelenggaraan urusan Pangan yang

efektif, Kabupaten Sumenep dapat membentuk fondasi yang kuat untuk mendukung ketahanan energi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mengamankan kebutuhan pangan dan air dengan membangun sistem pertanian yang mandiri dan efisien. Kinerja urusan pangan di Kabupaten Sumenep direpresentasikan oleh capaian berikut:

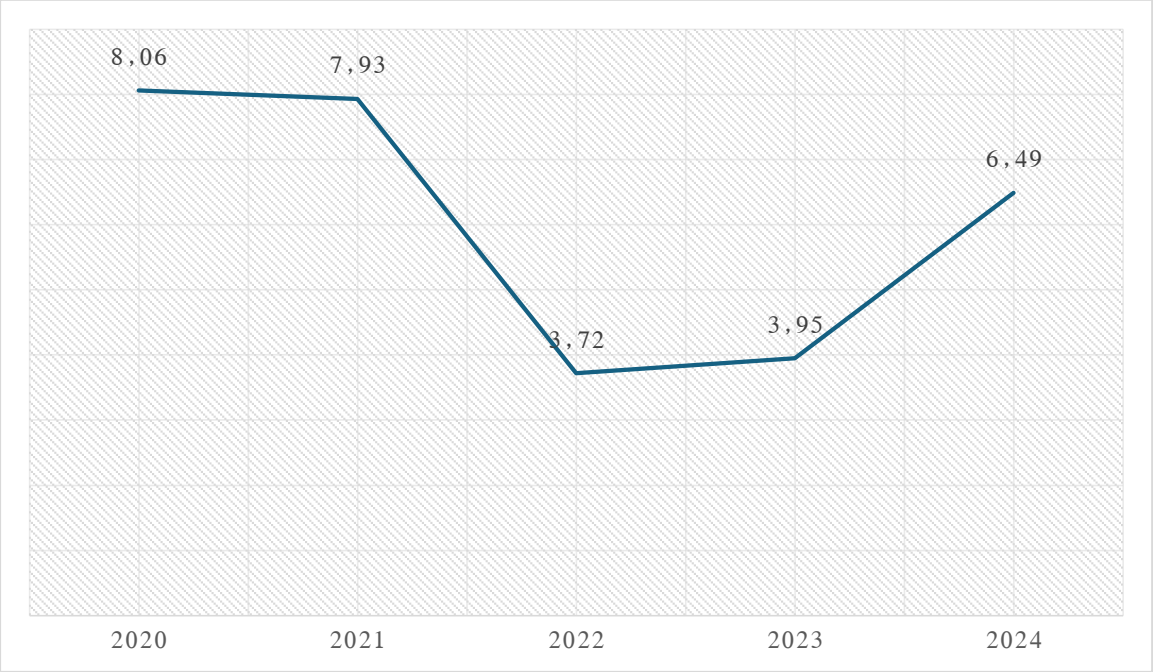


Gambar II-44 Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, 2025

Berdasarkan grafik di atas, kinerja urusan pangan di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami kenaikan dari 89,8 pada tahun 2020 menjadi 98,25 pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu signifikan, tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Sumenep menuju komposisi gizi yang lebih seimbang. Sementara itu, persentase ketersediaan pangan di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan yang lebih mencolok, dari 119,75% pada tahun 2020 menjadi 145,74% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan pangan di Kabupaten Sumenep semakin terjamin, yang didukung oleh peningkatan produksi pertanian dan efisiensi distribusi pangan. Secara keseluruhan, Kabupaten Sumenep menunjukkan progres positif dalam ketahanan pangan, dengan peningkatan ketersediaan pangan yang signifikan serta perbaikan dalam pola konsumsi pangan masyarakat. Namun, untuk mencapai tingkat ketahanan pangan yang optimal, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan serta memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya adalah indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU),* sebagai tolok ukur utama ke arah pemenuhan kebutuhan energi pangan masyarakat. Menurut Inmendagri No. 2/2025, PoU merupakan bagian dari Indeks Ketahanan Pangan yang wajib dicantumkan dalam RPJMD. Berikut merupakan capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024.



Gambar II-45 Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, 2025

Selama periode 2020–2024, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren yang cukup fluktuatif namun cenderung membaik dibandingkan kondisi awal. Pada tahun 2020, PoU tercatat sebesar 8,06%, kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 7,93%.

Selanjutnya perbaikan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana PoU turun drastis hingga mencapai 3,72%, mencerminkan peningkatan ketahanan pangan dan akses masyarakat terhadap sumber pangan yang lebih baik. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan menjadi 3,95%, meskipun masih dalam kategori relatif rendah.

Di tahun 2024, PoU kembali meningkat menjadi 6,49%, yang menunjukkan adanya tantangan baru dalam menjaga konsistensi akses pangan yang layak bagi masyarakat. Kenaikan ini bisa terjadi kaaren banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, serta adanya anomali iklim akhir-akhir ini yang terjadi di Sumenep.

D. PERTANAHAN

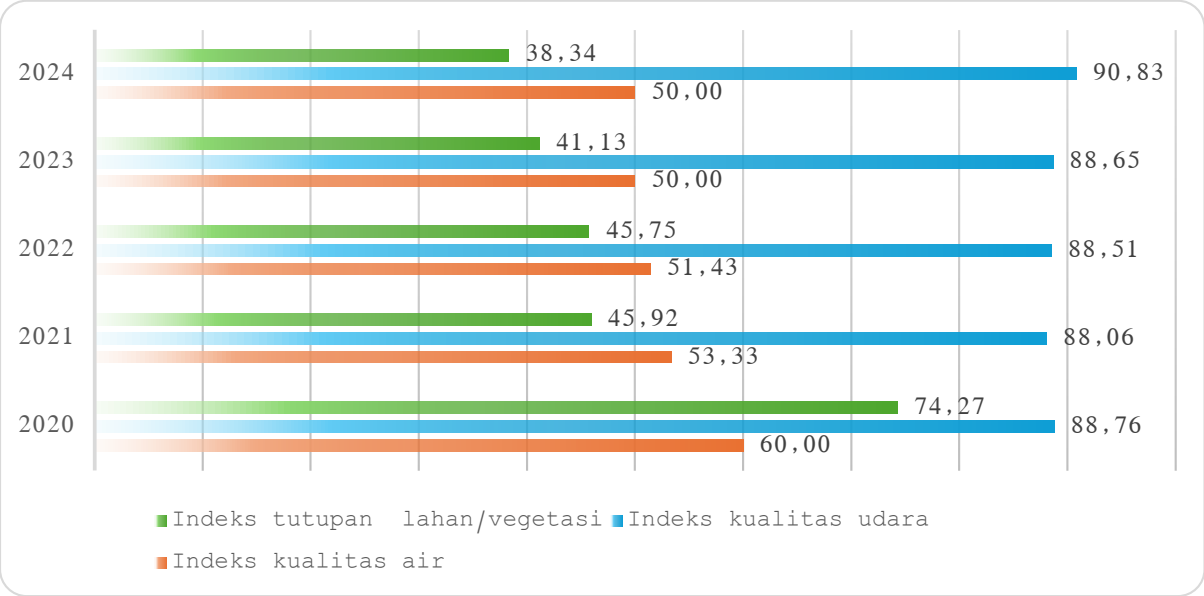
Urusan pertanahan di Kabupaten Sumenep menjadi perhatian utama bukan hanya karena kewajiban hukumnya, tetapi juga karena perannya sebagai sektor utama dalam mencegah konflik agraria. Pentingnya manajemen tanah di Kabupaten Sumenep mencakup keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial-ekonomi di daerah ini. Dengan mengelola tanah secara cerdas, termasuk dalam perencanaan tata ruang dan pemberian hak kepemilikan yang jelas, Kabupaten Sumenep dapat mengurangi potensi konflik agraria yang dapat menghambat pembangunan dan mengancam perdamaian sosial.

Manajemen konflik horizontal terkait dengan penggunaan lahan menjadi hal yang sangat penting di Kabupaten Sumenep, terutama mengingat latar belakang budaya masyarakat Madura yang kental. Budaya dan tradisi gotong-royong serta kebersamaan yang kuat di kalangan masyarakat Madura memberikan dasar yang unik untuk pengelolaan lahan. Namun, dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi yang cepat, persaingan dalam penggunaan lahan dapat menyebabkan konflik antarwarga lokal. Pendekatan ini mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, mengadakan dialog terbuka antara pihak-pihak yang terlibat, dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini dapat membentuk dasar yang kokoh untuk penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Dengan memahami dan menghormati nilai-nilai budaya Madura, manajemen konflik horizontal dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh masyarakat lokal. Hal ini menjadikan pemanfaatan lahan sebagai peluang untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Kinerja keberhasilan salah satunya diukur melalui capaian indikator Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum **yang dalam tahun 2023 & 2024 telah mencapai 100%.** Data ini menunjukkan komitmen Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan alokasi tanah untuk mendukung pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat.

E. LINGKUNGAN HIDUP

Keberlanjutan lingkungan merupakan dasar utama bagi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dalam hal ini, pengelolaan lingkungan hidup berperan krusial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan, serta merancang tata ruang yang ramah lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan antara kebutuhan manusia, perkembangan ekonomi, dan pelestarian alam, dengan visi menjadikan Kabupaten Sumenep sebagai model pembangunan yang berkelanjutan dan berpandangan ke depan. Berikut ini adalah tabel yang menampilkan kinerja Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 berdasarkan indikator-indikator tersebut:



Gambar II-46 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, 2025

Berdasarkan data di atas, ketiga indikator tersebut merupakan komposit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menunjukkan tren yang bervariasi dalam lima tahun terakhir. Indeks kualitas udara relatif stabil dengan nilai di atas 88, dan bahkan meningkat pada tahun 2024 mencapai 90,83, yang mengindikasikan kondisi udara di Kabupaten Sumenep yang tetap terjaga. Sementara itu, indeks kualitas air mengalami penurunan dari 60,00 pada tahun 2020 menjadi 50,00 sejak tahun 2023 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas sumber daya air di Kabupaten Sumenep. Tantangan dalam menjaga kualitas sumber daya air tersebut antara lain yaitu Layanan SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) dan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) belum menjangkau luas. Banyak rumah tangga masih menggunakan septik-tank tidak standar atau buang langsung ke lingkungan, Penyusutan mangrove di beberapa titik pesisir mengurangi fungsi filter alami air dan penahan intrusi, dan Potensi pencemaran dari aktivitas pelayaran, pelabuhan, dan migas lepas pantai (Kangean, Pagerungan) menambah risiko pencemaran perairan laut dan pesisir.

Di sisi lain, indeks tutupan lahan/vegetasi mengalami tren penurunan yang cukup signifikan, dari 74,27 pada tahun 2020 menjadi hanya 38,34 pada tahun 2024 yang mengindikasikan adanya alih fungsi lahan atau berkurangnya area hijau yang dapat berdampak pada keseimbangan ekosistem dan ketahanan lingkungan. Lebih lanjut, penurunan luas wilayah pantai mangrove di Kabupaten Sumenep menjadi permasalahan kritis. Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dengan menyediakan habitat untuk berbagai spesies dan berfungsi sebagai benteng alami melawan abrasi. Penurunan luas wilayah mangrove dapat menyebabkan hilangnya fungsi perlindungan dan keanekaragaman hayati yang vital bagi lingkungan pesisir. Langkah untuk melakukan pengendalian kualitas lingkungan tersebut sejatinya selain akan bermuara pada upaya meningkatkan produktivitas dan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Sumenep.

F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki peran sentral dalam pembangunan daerah, mengingat pentingnya sebagai pondasi untuk pelaksanaan kebijakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Administrasi kependudukan adalah basis utama untuk menyediakan data dasar tentang jumlah penduduk, struktur usia, dan distribusi populasi, yang menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah. Pencatatan sipil, sebagai bagian integral dari urusan ini, menciptakan identitas resmi bagi setiap warga negara, serta mempermudah akses mereka ke layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Dengan memiliki data kependudukan yang akurat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efisien, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Sumenep direpresentasikan oleh capaian berikut:

Tabel II-39 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023

1	IKM Pelayanan Kependudukan	Nilai	85	83,69	86,72	87	86,13
2	Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	70	76,65	76,1	84,5	89,5
3	Persentase Penduduk Ber e-KTP	%	89	89,17	91,4	91,9	92,93
4	Persentase Penduduk Ber-KK	%	100	100	100	100	
5	Persentase Penduduk Berakte Kematian	%	14	20	40	82	n/a

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Sumenep masih menghadapi sejumlah masalah yang menjadi tantangan saat menjalankan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat tidak menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan dasar, yang merupakan salah satu masalah utama. Secara umum, memiliki akta kelahiran tidak ideal, dan ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang paling menonjol adalah kaum lanjut usia, yang tidak memiliki dokumen tersebut dan kadang-kadang enggan untuk mengurusnya. Untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data kependudukan di Kabupaten Sumenep, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan harus diatasi. Permasalahan tersebut sejatinya dapat diatasi dengan adanya Inovasi-inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan sebagaimana misalnya hadirnya layanan berbasis digital seperti perijinan online, layanan administrasi kependudukan dan sistem pembayaran non tunai yang berpotensi mengungkit pada kepuasan masyarakat pada pelayanan publik namun masih tetap terkendala oleh belum meratanya jaringan internet di wilayah kepulauan, sehingga di datangi kesulitan dalam perekamannya.

G. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Secara umum, program KB telah maju, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Keberhasilan program dalam jangka panjang akan bergantung pada pendekatan yang responsif terhadap dinamika sosial, didukung oleh edukasi yang baik dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Tingkat capaian kinerja program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digambarkan melalui indikator kinerja berikut:

Tabel II-40 Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	TFR	nilai	1,52	2,23	2,23	2,13	2,14

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Rasio akseptor KB aktif	Rasio	67,57	69,69	76,1	72,7	72,8
3	Jumlah Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga	Jumlah	12.169	10.040	10.041	6.121	10,365
4	Rata-rata Anak dalam Satu Keluarga	Jumlah	1 s/d 2	1 s/d 2	1 s/d 2	1 s/d 2	1 s/d 2,5
5	Jumlah Tenaga Lapangan KB	Jumlah	26	24	24	22	20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Kenaikan Total Fertility Rate (TFR) dari 1,52 pada tahun 2019 menjadi 2,23 pada tahun 2020 dan 2021 memicu kebutuhan untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut dan merumuskan strategi yang dapat mengatasinya. Capain tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 2,14. Analisis tren keikutsertaan dalam program ini menegaskan perlunya pendekatan inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi. Terdapat penurunan signifikan dalam rasio akseptor KB aktif, dari angka yang cukup tinggi sebesar 70,87% pada tahun 2019 menjadi 55,48% pada tahun 2022. Namun, peningkatan yang drastis terjadi pada tahun 2023 dimana rasio akseptor KB aktif mencapai 72,8%. Dengan demikian, pemerintah perlu mengoptimalkan strategi yang ada sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan minat dan keikutsertaan masyarakat dalam program KB.

H. PERHUBUNGAN

Selama lima tahun terakhir, sektor transportasi, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi sosial, telah menghadapi sejumlah masalah. Pengamatan menyeluruh terhadap berbagai indikator kinerja membantu kita memahami masalah yang dihadapi dan menemukan solusi yang tepat untuk masa depan. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah sangat bergantung pada urusan perhubungannya. Hal ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas transportasi umum untuk masyarakat. Urusan perhubungan juga membahas ketersediaan fasilitas transportasi umum dan bagaimana masyarakat dapat mengaksesnya. Ini adalah capaian indikator kinerja urusan perhubungan:

Tabel II-41 Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sumenep 2019-2023

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi

			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	N/A	0,889	0,881	0,898	0,8444
2	Rasio Konektivitas	Rasio	N/A	44,45	51,08	59,47	N/A

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Indeks infrastruktur perhubungan menunjukkan seberapa tinggi tingkat ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan yang terbangun, diantaranya sarana pengaman jalan seperti rambu dan marka jalan. Berdasarkan tabel di atas Indeks infrastruktur perhubungan Kabupaten Sumenep mengalami capaian peningkatan, meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan skor indeks 0,8444, dibandingkan capaian pada tahun 2023 dengan skor indeks 0,898.

Kemudian rasio konektivitas merupakan ukuran untuk mengetahui seberapa baik koneksi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa konektivitas di Kabupaten Sumenep hingga tahun 2023 mengalami kemajuan. Hal ini salah satunya dipengaruhi dengan pembangunan maupun rehabilitasi sarana transportasi utamanya dermaga/tambat labuh yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah demi meningkatkan layanan transportasi antar pulau.

Kabupaten Sumenep sendiri masih memiliki permasalahan perhubungan dalam aspek kualitas dan kuantitas angkutan kepulauan untuk mendukung konektivitas, lalu kualitas angkutan umum dan fasilitas penunjangnya, keselamatan dan ketertiban lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, dan prasarana perhubungan darat. Dibutuhkan skala prioritas untuk infrastruktur kepulauan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Pada Tahun 2024 menurut data hanya sekitar 60% rute pelayaran antar-pulau yang berjalan secara rutin. Beberapa rute seperti Sumenep-Kangean, Sumenep-Sapeken, dan Sumenep-Raas masih kerap mengalami keterlambatan atau bahkan pembatalan pelayaran akibat cuaca buruk, minimnya armada, atau kerusakan kapal. Dari 12 armada kapal rakyat yang disiapkan, hanya 7 yang beroperasi secara layak, sisanya sering dalam kondisi perawatan karena usia kapal yang sudah tua, yakni di atas 15 tahun.

I. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep merupakan perangkat daerah pengampu urusan komunikasi dan informatika dengan peran strategis dalam mengintegrasikan layanan publik. Hal ini menjadi penting mengingat kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, sehingga digitalisasi dan keterhubungan informasi diperlukan untuk memastikan masyarakat, baik di daratan maupun di pulau-pulau, dapat mengakses layanan publik secara

merata, efisien, dan berkualitas. Kinerja urusan komunikasi dan informatika dalam lima tahun terakhir direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

Tabel II-42 Kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Sumenep 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0,2	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	50	100	100	100
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100	62,4	93,42	92	90

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, 2025

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam perwujudan digitalisasi layanan publik. Konektivitas antar OPD telah mencapai 100% sejak 2021, sementara layanan publik *daring* sempat terganggu pada tahun 2021 namun kembali stabil 100%. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam penyebaran informasi publik, untuk mengatasi kesenjangan digital —khususnya di wilayah daratan dan kepulauan—Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperluas akses publik melalui program Wi-Fi gratis. Hingga awal 2024, sudah terdapat sekitar 20 titik Wi-Fi publik, termasuk di beberapa pulau seperti Sapeken, Arjasa, dan Kalianget. Meski kebijakan ini mencerminkan upaya positif untuk memperkuat inklusi digital, beberapa laporan menyebutkan layanan internet Diskominfo kadang masih mengalami gangguan, meski sudah menyerap anggaran cukup besar sekitar Rp 36 miliar. Dapat disimpulkan, Kabupaten Sumenep telah berupaya optimal dalam memanfaatkan teknologi untuk pemerataan layanan, namun diperlukan upaya berkelanjutan dalam optimalisasi perbaikan infrastruktur dan stabilitas jaringan, terutama di area kepulauan, sehingga digitalisasi pemerintahan berjalan lebih efektif dan merata.

J. PENANAMAN MODAL

Penyelengggaraan urusan penanaman modal secara teknis diampu oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep yang memegang peran strategis dalam mendorong optimalisasi pelayanan

di bidang investasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, transparansi perizinan, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap tren dan capaian urusan penanaman modal menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Tabel II-43 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor	Orang	5.754	7.026	6.440	14.211	15.565
2	Jumlah nilai investasi	Rp	2.388.008. 761.967	1.139.512. 157.412	1.777.132. 906.066	2.101.692. 051.534	2.745.743. 557.715
3	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	125,89	47,72	155,96	118,26	130,64
4	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	25,88	-52,28	55,95	18,26	30,64

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, 2025

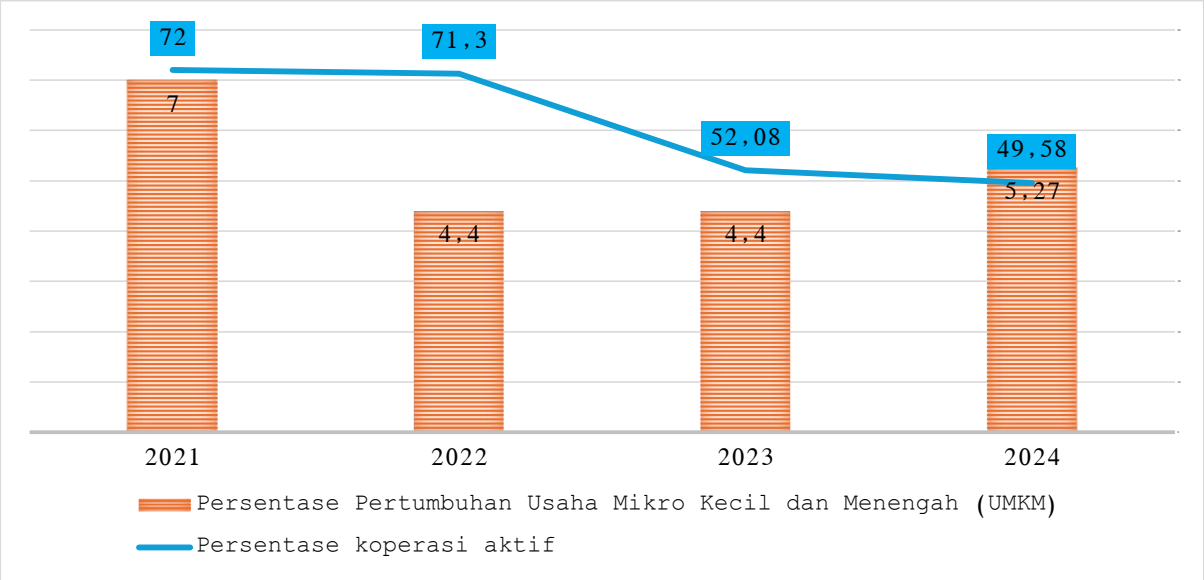
Capaian kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Sumenep menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Jumlah investor mengalami peningkatan dari 5.754 menjadi 15.565 dalam lima tahun terakhir, menandakan semakin besarnya minat investasi di daerah ini. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai investasi yang mencapai Rp2,7 triliun pada tahun terakhir, dengan persentase peningkatan investasi dalam negeri yang mencapai 130,64%. Meskipun demikian, fluktuasi pertumbuhan investasi masih menjadi tantangan di Kabupaten Sumenep, terutama akibat kurangnya sarana promosi dan dominasi investasi oleh PMDN atau UMKM, sehingga perlu adanya diversifikasi sumber investasi.

Meskipun masih terdapat kendala, potensi pengembangan investasi di Kabupaten Sumenep tetap besar. Ketersediaan bahan baku yang melimpah serta

sektor-sektor yang belum dieksplorasi, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan, menjadi peluang utama untuk mendorong investasi lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan promosi investasi, kemudahan perizinan, serta sinergi antar perangkat daerah guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Sebagai bagian dari pelayanan dasar wajib non-dasar, sektor ini berkontribusi dalam menciptakan peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat perekonomian daerah. Secara teknis, penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep yang kinerjanya dalam lima tahun terakhir direpresentasikan oleh capaian berikut:



Gambar II-47 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, 2025

Berdasarkan grafik di atas, dalam lima tahun terakhir capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sumenep mengalami tren fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren penurunan yang signifikan, sektor koperasi di Kabupaten Sumenep masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya. Dari 1.565 koperasi yang terdaftar, hanya

774 yang masih beroperasi, sementara 791 lainnya tidak aktif. Tren penurunan persentase koperasi aktif ini menunjukkan bahwa daya saing koperasi masih lemah, seiring dengan rendahnya minat masyarakat untuk mendirikan koperasi baru. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kualitas manajemen koperasi yang masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek tata kelola, inovasi, maupun strategi pemasaran.

Selain itu, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga masih relatif lambat, didorong oleh daya saing produk yang masih rendah di pasar. Pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumenep berpotensi mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan adanya penyesuaian klasifikasi usaha berdasarkan jumlah modal yang dikelola. Penyesuaian ini memungkinkan lebih banyak pelaku usaha masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil, sehingga memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai bentuk dukungan, seperti pembiayaan, pendampingan, dan insentif pemerintah. Dengan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal, diharapkan UMKM dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan daya saing produk, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tantangan dalam penguatan kapasitas manajemen dan akses pasar tetap perlu mendapat perhatian agar lonjakan jumlah usaha juga diiringi dengan peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha.

L. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini wajib diselenggarakan oleh semua daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan kepemudaan dan olahraga diwadahi dalam bentuk dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan Kabupaten atau Kota. Sesuai yang ada dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman nomenklatur Perangkat daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Kabupen Sumenep merupakan salah satu daerah yang memiliki urusan kepemudaan dan olahraga di dalamnya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep dengan capaian kinerja dalam lima tahun terakhir direpresentasikan oleh indikator berikut:

Tabel II-44 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

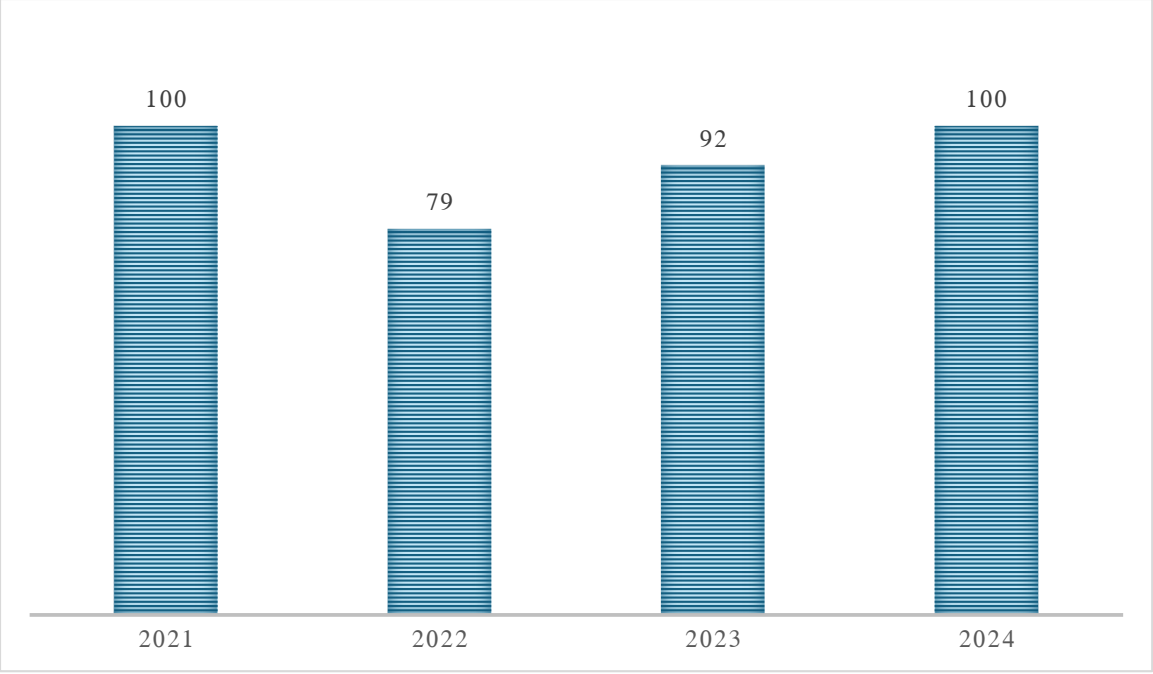
No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga berprestasi	%	28	29	29	50	166
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,9	0,19	0,23	0,02	0,04
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3,18	1,56	17,17	1,11	1,16

Sumber: Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep, 2025

Capaian kinerja bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sumenep menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Prestasi atlet di berbagai cabang olahraga mengalami peningkatan luar biasa, dari 28% pada tahun 2020 menjadi 166% pada tahun 2024, menunjukkan perkembangan yang pesat dalam pembinaan dan pencapaian atlet daerah. Namun, di sisi lain, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih sangat rendah dan cenderung fluktuatif, dengan angka tertinggi hanya mencapai 1,9% pada tahun 2020 dan turun drastis hingga 0,04% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan akses atau minat pemuda dalam mengembangkan kemandirian ekonomi. Demikian pula, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan mengalami ketidakstabilan. Setelah sempat meningkat tajam menjadi 17,17% pada 2022, angka ini kembali menurun menjadi hanya 1,16% pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada dorongan atau program tertentu yang mendorong partisipasi, keberlanjutan keterlibatan pemuda masih menjadi tantangan. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan, meskipun sektor olahraga menunjukkan pencapaian positif, pemberdayaan pemuda dalam aspek ekonomi dan sosial masih memerlukan strategi lebih efektif agar mampu mendorong partisipasi pemuda meningkat secara berkelanjutan.

M. STATISTIK

Data statistik ada;ah data berupa angka terkait karakterisitik atau cirik khusus suatu populasi yang diperoleh denagn cara pengumpulan, pengolahan, dan analisis. Ketersediaan data statistik berperan penting dalam perencanaan pembangunana karena memuat data dan informasti statistik yang cepat, rinci, temapt, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai produsen data yaitu instansi yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus mampu menyediakan data dan informasi statistik. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi penyelenggaraan statistik. Selain itu, Pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas statistik dengan melaksanakan *quality governance, quality management*, dan *corporate infrastructure* sehingga dapat menghasilkan data yang relevan, akurat, aktual, koheren, dapat diakses, dan, interoperabilitas.



Gambar II-48 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, 2025

Ketersediaan data statistik sektoral Kabupaten Sumenep pada periode 2021–2024 memperlihatkan pola fluktuatif yang akhirnya kembali mencapai kondisi ideal. Tahun 2021 dimulai dengan capaian sempurna sebesar 100 persen, namun terjadi penurunan signifikan di 2022 menjadi 79 persen yang menunjukkan adanya kendala dalam konsistensi pengumpulan dan pengelolaan data lintas sektor. Meski demikian,

perbaikan mulai terlihat pada 2023 dengan kenaikan ke 92 persen, hingga akhirnya 2024 kembali menyentuh angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan langkah korektif melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, penguatan sistem informasi, serta optimalisasi peran kelembagaan statistik, sehingga ketersediaan data kembali stabil dan dapat mendukung perencanaan pembangunan berbasis evidence.

N. PERSANDIAN

Penerapan *e-governance* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membuat urusan persandian menjadi krusial karena berkaitan dengan upaya pengamanan data pemerintah. Urusan persandian mencakup upaya pengamanan persandian, pengelolaan persandian, dan pengawasan persandian yang ditujukan untuk melindungi data pemerintah dari segala ancaman dan gangguan. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan persandian dengan melakukan peninjauan dan evaluasi kebijakan, prosedur, dan infrastruktur terkait urusan persandian. Berikut merupakan

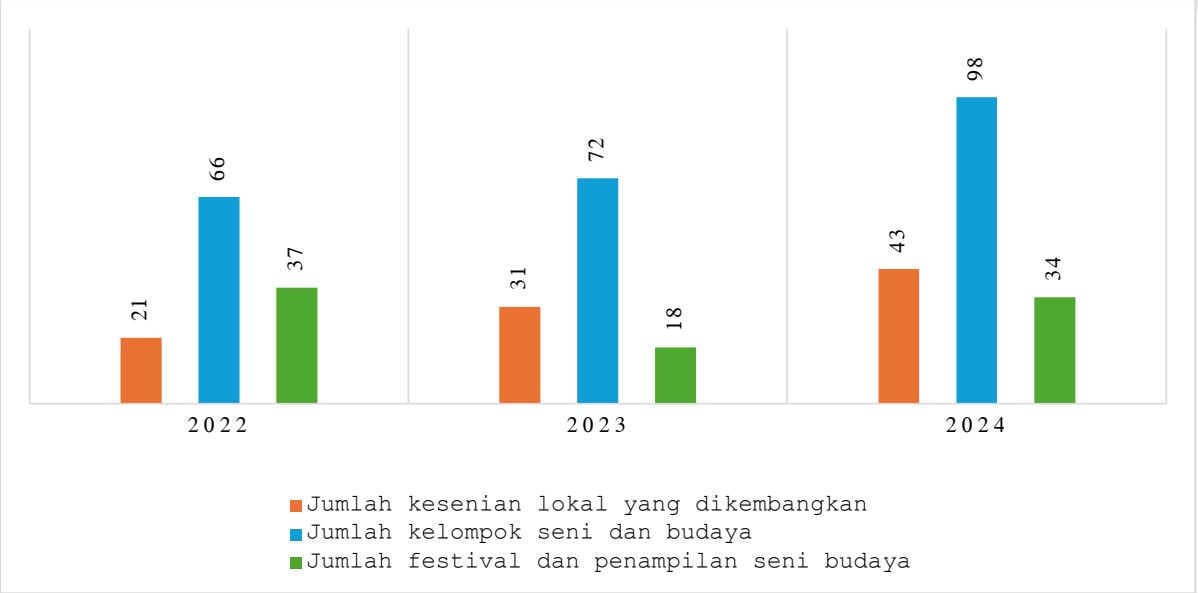
Tabel II-45 Persentase Informasi Daerah yang Diamankan dan Diarsipkan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Infromasi daerah yang diamankan dan diarsipkan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, 2025

O. KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan kebudayaan meliputi seluruh aspek budaya dan juga cagar budaya yang ada disuatu daerah. Penyelenggaran urusan kebudayaan di Kabupaten Sumenep secara teknis diampu oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep yang memiliki beberapa indikator kinerja dalam urusan kebudayaan. Di era moderenisasi ini, kebudayaan daerah mulai ikut tergerus dengan zaman. Oleh karena itu, urusan kebudayaan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan kebudayaan dalam tiga tahun terakhir:



Gambar II-49 Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024

Sumber: Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep, 2025

Pengembangan kesenian dan budaya di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir,. Pada tahun 2022, terdapat 21 kesenian lokal yang dikembangkan dan melonjak menjadi 43 pada 2024. Sementara itu, jumlah kelompok seni dan budaya bertambah dari 66 kelompok pada 2022 menjadi 98 pada 2024, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan komunitas seni yang semakin aktif. Namun, jumlah festival dan penampilan seni budaya justru mengalami penurunan dari 37 acara pada 2022 menjadi 18 pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 34 pada 2024.

Meskipun mengalami perkembangan, sektor kesenian dan budaya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya narasumber yang memahami dan menguasai kesenian tradisional, sehingga regenerasi seni budaya menjadi terhambat. Selain itu, masih banyak grup kesenian yang tersebar di berbagai daerah namun belum terdaftar secara resmi, menyebabkan keterbatasan akses terhadap bantuan dan dukungan. Dukungan terhadap festival kebudayaan juga masih dirasa kurang, baik dari segi penyelenggaraan maupun akomodasi pelaksanaan, yang sering kali menjadi kendala utama dalam memperluas jangkauan serta meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan pendataan kelompok seni, mendukung kegiatan budaya, serta memperkuat peran para narasumber dalam melestarikan kesenian tradisional.

P. PERPUSTAKAAN

Perpustakaan merupakaan fasilitas penunjang Pendidikan yang menyediakan koleksi buku, jurnal, majalah, dan materi lainnya untuk dibaca, dipinjam, dan diakses oleh masyarakat. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi dan pengetahuan yang medukung Pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Tabel II-46 Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	76,90	83,16	83.16	84,11	84,32
Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum daerah	18.249	10.328	36.720	2.985	7.964
Jumlah Koleksi Buku/Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan jenjang	76.271	84.173	84.173	81.799	84.823
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat					78,90

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, 2024

Q. KEARSIPAN

Kearsipan merupakan proses pengelolaan dan penyimpanan dokumen-dokumen penting yang dimiliki individu, organisasi, atau lembaga. Arsip memuat naskah yang dibuat sebagai bukti autentik terkait kinerja suatu organisasi yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang direncanakan, dilaksankan, dan dievaluasi. Hasil informasi tersebut direkam dalam sebuah arsip. Informasi tersebut sangat penting untuk kebutuhan masa depan terutama dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan menjadi urusan penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah perlu mengoptimalkan pelayanan kearsipan yang mencakup pencatatan, pengklasifikasian, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan dokumen sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Tabel II-47 *Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023*

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase arsip yang dikelola	100,41	100	100	100	100

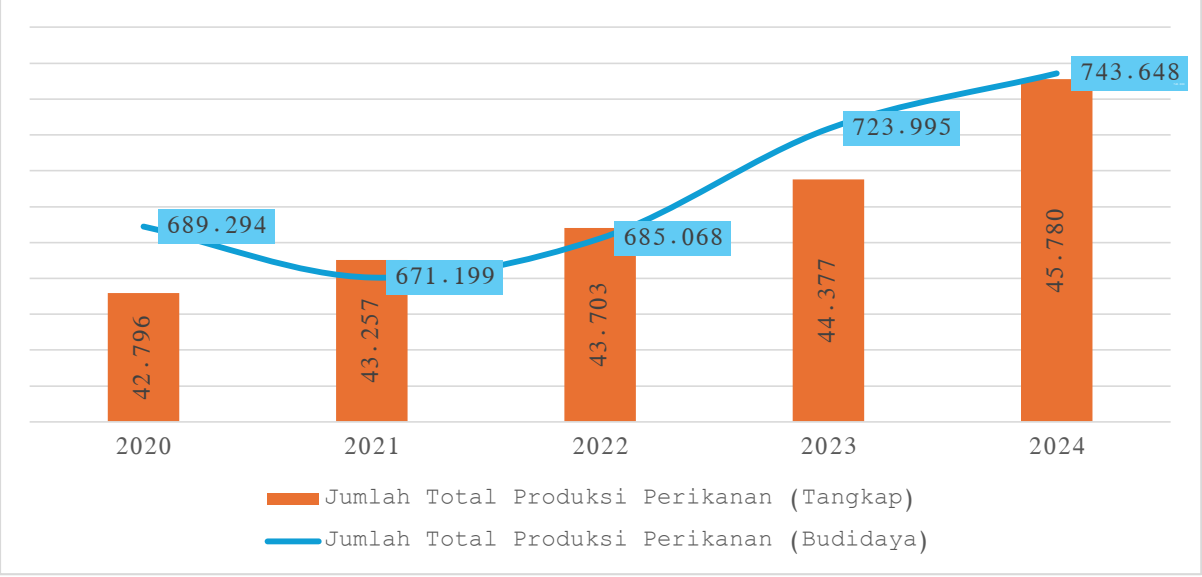
No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase Petugas Pengelola Arsip yang ditingkatkan kompetensinya	221,94	230	150	100	100
3	Nilai pengawasan arsip internal	n/a	39,4	40,4	43,67	47,16

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep

2.1.5.4.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan perikanan dan kelautan di Kabupaten Sumenep sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan di daerah pesisir seperti Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep memiliki potensi maritim yang sangat besar dengan luas mencapai lebih dari 50.000 km2, yang memberikan landasan yang kuat bagi industri perikanan. Dalam konteks ini, pengelolaan urusan perikanan dan kelautan tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi strategis untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, mendukung mata pencaharian masyarakat, serta memperkokoh identitas dan kearifan lokal yang terkait erat dengan kehidupan pesisir di Kabupaten Sumenep. Pada urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumenep, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian pada urusan ini, yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar II-50 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2024

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, 2025

Jumlah total produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024, memiliki tren yang meningkat. Total produksi perikanan tangkap ditahun 2020

adalah sebesar 42,796 yang kemudian di setiap tahun mengalami peningkatan, hingga ditahun 2024 menjadi sebesar 45,780. Meskipun mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa permasalahan didalamnya salah satunya terkait dengan Minimnya sumber daya manusia pelaku perikanan yang handal dikarenakan masih rendahnya pendidikan yang dimiliki. Sehingga pengelolaan atau produksi dari perikanan kurang maksimal dikarenakan hambatan dari adanya sumber daya manusia yang memiliki jumlah serta keahlian yang kurang. Namun, walaupun masih terdapat permasalahan, terdapat juga potensi yang meningkatkan produktivitas perikanan, yaitu Jumlah nelayan yang mencapai 33.945 orang dengan jumlah perahu sebanyak 8.677 unit dengan berbagai ukuran dan jenis alat tangkap yang dapat meningkatkan produktivitas perikanan tangkap. Indikator kedua terkait Jumlah produksi perikanan budidaya yang dimana tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 671,199, namun mulai tahun 2022-2024 kembali mengalami peningkatan, dengan capaian tertinggi ditahun 2024 adalah sebesar 743,648. Pada indikator ini terdapat permasalahan yang dihadapi, diantaranya permasalahan seperti Tingginya harga pakan dan rendahnya nilai jual komoditas perikanan budidaya tidak mampu mengangkat perekonomian pembudidaya, Rendahnya kualitas dan kuantitas alat penangkapan ikan yang ada sehingga belum mampu bersaing dengan daerah lain, dan Banyaknya permodalan yang dikuasasi oleh tengkulak akibat rendahnya akses permodalan formal bagi pelaku perikanan.

B. PARIWISATA

Pesona bahari yang memikat dan kekayaan budaya yang luar biasa, Kabupaten Sumenep menawarkan pengalaman wisata yang unik dan beragam. Sumenep menjadi destinasi menarik bagi wisatawan yang ingin mengeksplorasi keindahan alam dan keberagaman budaya Indonesia, karena memiliki pantai yang indah dan warisan budaya yang kuat, seperti keraton dan seni tradisional. Pengembangan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan lokal, menjadikan Sumenep sebagai destinasi yang menarik, melestarikan warisan alam dan budaya, dan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Pada urusan pariwisata, terdapat beberapa indikator capaian yang merepresentasikan urusan pariwisata di Kabupaten Sumenep, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-48 Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2023

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	168.883	248.158	1.057.455	1.388.922	1.700.959
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	-88,72%	47,03%	326,11%	31,35%	22,47%
3	Tingkat hunian akomodasi	%	-86,10%	100%	9,62%	26,84%	29,60%
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,39%	0,066%	0,3%	0,21%	0,34%
5	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	%	0,69	0,70	0,71	0,75	0,79
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	1	0	0	0	1
7	Persentase Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	N/a	N/a	N/a	N/a	1

Sumber: Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep, 2025

Sesuai dengan tabel diatas, dapat dilihat indikator pada urusan pariwisata tahun 2020-2024 yang memiliki empat indikator capaian. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020-2024 di Kabupaten Sumenep memiliki peningkatan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Capaian ditahun 2020 adalah sebesar 168,883 yang kemudian disetiap tahun mengalami peningkatan hingga ditahun 2024 menjadi sebesar 1,700,959. Peningkatan terjadi dikarenakan sangat banyaknya potensi wisata Kab Sumenep yang bagus untuk dipromosikan, seperti wisata alam pantai gili iyang yang terkenal disebut sebagai “Pulau Oksigen”, wisata sejarah seperti keraton Sumenep, dan lain sebagainya.

Untuk persentase pertumbuhan ekonomi kreatif di Sumenep yang menunjukkan peningkatan jumlah individu, kelompok, atau badan usaha yang bergerak di sektor

ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu, dibandingkan dengan jumlah pada periode sebelumnya, baru dihitung tahun 2024 dengn capaian 1%.

C. PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Kabupaten Sumenep memiliki potensi agraris yang sangat besar. Pertanian adalah pilar utama pembangunan Sumenep karena sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian dan perikanan sebagai sumber pendapatan mereka. Produksi pertanian di Kabupaten Sumenep dapat ditingkatkan, memberikan kontribusi besar pada ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang bergantung pada pertanian sebagai sumber kehidupan utamanya. Ini dapat dicapai melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian, penerapan teknologi modern, dan pemberdayaan petani lokal. Sehingga, untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakatnya di masa depan, terdapat beberapa capaian indikator pada urusan Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan di Kabupaten Sumenep, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-49 Kinerja Urusan Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produktivitas Hasil Pertanian Per Hektar						
	1. Tanaman Pangan (ton/ha) :						
	Padi	(Ton/Ha)	5,83	5,90	5,90	5,90	5,92*
	jagung (pipilan kering)	(Ton/Ha)	3,00	3,10	3,11	3,14	3,17*
	kedelai	(Ton/Ha)	1,39	1,39	1,42	1,45	1,48*
	ubi kayu	(Ton/Ha)	1,35	1,41	1,42	1,42	1,44*
	2. Hortikultura (kw/ha) :						
	Bawang Merah	(Ton)	71.929,11	66.512,79	67.632,98	64.239,03	67.413,71
	Cabe Besar	(Ton)	8.494,02	5.901,59	6.705,02	3.505,87	6.823,20
	Cabe Kecil	(Ton)	7.971,83	5.380,86	5.371,31	5.353,60	5.599,00
	3. Perkebunan (ton/ha/tahun) :						
	- Kelapa	(Ton/Ha)	1,24	1,24	1,24	1,27	1,27*
	- Cabe Jamu	(Ton/Ha)	4,76	4,77	4,77	4,77	4,77*
	- Jambu Mete	(Ton/Ha)	0,61	0,61	0,61	0,65	0,65*
	- Siwalan	(Ton/Ha)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17*
	- Tembakau	(Ton/Ha)	0,70	0,70	0,68	0,70	0,71*
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus	%	-3,02	-10,66	1,97	- 10,26	1,65

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	penyakit hewan menular						

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, 2025

Produktivitas pertanian pada tanaman pangan di Kabupaten Sumenep ditahun 2020-2024 memiliki capaian yang memiliki kecenderungan meningkat, artinya, produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sumenep setiap tahun mengalami produktivitas yang cukup baik. Sementara produktivitas untuk holtikultura cenderung mengalami tren yang fluktuatif cenderung menurun di tahun 2020-2024. Tren yang fluktuatif, salah satunya diakibatkan oleh iklim yang kadang tidak menentu, sehingga menyebabkan musim tanam yang mundur, serta adanya serangan hama penyakit tanaman, yang membuat produktivitas menjadi menurun. Produktivitas untuk perkebunan di Kabupaten Sumenep juga mengalami peningkatan di tahun 2020-2024, meskipun ditahun tertentu terdapat capaian yang cenderung stagnan, tapi secara keseluruhan, produktivitas perkebunan mengalami peningkatan. Meskipun memiliki capaian yang mengalami peningkatan, masih terdapat pemasalahan pada produktivitas perkebunan di Kabupaten Sumenep, salah satunya terkait pengaruh iklim yang tidak menentu dan fluktuasi harga yang naik turun, serta tanaman banyak yang sudah tua yang berakibat harus adanya perrgantian atau regenerasi didalamnya. Indikator kedua pada urusan pertanian, perkebunan, dan peternakan adalah terkait Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular ditahun 2020-2024 yang mengalami tren fluktuatif. Capaian ditahun 2020 adalah sebesar -3,20% yang kemudian mengalami penurunan ditahun 2021 menjadi -10,66% dan kemudian mengalami peningkatan ditahun 2022 menjadi 1,97%, ditahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar -10,26% dan ditahun 2024, mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,65%. Tren fluktuatif pada indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular disebabkan oleh adanya adanya kasus penyakit yang muncul secara endemik, dimana penyakit tersebut tidak dapat diperkirakan kemunculannya, sehingga mempengaruhi capaian indikator. Maka tindakan preventif dari permasalahan tersebut adalah perlunya peran aktif peternak untuk mencegah penyebaran penyakit ternak melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait maupun dari stakeholder terkait.

D. PERDAGANGAN

Kabupaten Sumenep menggarisbawahi komitmen dalam mengelola urusan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kabupaten Sumenep bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perdagangan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal dan menarik investasi yang berkelanjutan. Langkah-langkah strategis termasuk peningkatan infrastruktur perdagangan, fasilitasi untuk UMKM, pengembangan pasar lokal, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha di sektor perdagangan. RPJMD ini juga mengutamakan penguatan regulasi perdagangan yang berkeadilan serta mempromosikan potensi perdagangan lokal sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi berbasis lokal yang berkelanjutan. Pada urusan Perdagangan terdapat sedikitnya 3 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

Tabel II-50 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perdagangan Tahun 2019-2023

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Juta Rupiah	4.246.067,30	3.997.138,47	4.389.686,74	4.886.325,51	5.354.144,02
2	Pendapatan Perkapita	Rupiah	30.569.000	29.123.985,57	31.177.329,37	35.324.205,11	37.370.046,73
3	Pengeluaran Perkapita	Rupiah / Jiwa	9.082.000	8.888.000	9.000.000	9.388.000	9.807.000
4	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdaaganga n Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	Persen	12,85	12,2	12,44	12,14	12,5

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Motor Terhadap Total PDRB						
5	Persentase Fluktuasi Harga Bapokti	Persen	-	-	-	9,54	11,7

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukan dengan tingkat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai oleh masyarakat dijakdikan ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita- cita pembangunan ekonomi. Berdasarkan pada data yang tersaji di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan masa pandemi. kondisi Kabupaten Sumenep yang tersaji dalam grafik diatas dari mulai tahun 2019 sebesar 30.569.000 rupiah. Berbeda dengan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 29.123.985,57 rupiah dikarenakan faktor pandemi saat itu dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 31.177.329,37 rupiah. Pada tahun 2022 sebesar 35.324.205,11 rupiah meningkat menjadi 37.30.046,73 rupiah di tahun 2023. Ini membuktikan bahwasannya pendapatan perkapita merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah dan perekonomian wilayah tersebut juga terus bergerak maju.

Pada tahun 2019 pengeluaran perkapita sebesar 8.888.000 rupiah lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 8.888.000 rupiah. Menuju tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 naik kembali menjadi 9.000.000 rupiah berikut dengan tahun 2022 meningkat kembali menjadi 9.388.000 rupiah. Pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan sebesar 9.807.000 rupiah. Pengeluaran perkapita menunjukkan daya beli masyarakat yang terus mengalami peningkatan dan naiknya penyerapan tenaga kerja serta menurunnya tingkat pengangguran itu sendiri. Kontribusi PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap Total PDRB fluktuatif sekali jika kita lihat dari sajian grafik diatas. Pada tahun 2019 menunjukkan kontribusi sebesar 12,85 % yang mana merupakan

perolehan kontribusi terbesar selama periode 2019-2023. Pada tahun 2020 menurun menjadi 12,20 %, kontribusi sebesar 12,44 % pada tahun 2021. Kembali menurun menjadi 12,14 % pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 12,50%.

E. PERINDUSTRIAN

Kabupaten Sumenep memiliki potensi yang signifikan dalam sektor perindustrian. Dikenal dengan keberagaman industri kecil dan menengah (IKM), Sumenep menggambarkan panorama industri yang berkembang dengan beragam sektor seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan tradisional, serta produksi tekstil dan batik. Kehadiran IKM ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang penting bagi daerah, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal melalui produk-produk yang unik dan bernilai tambah tinggi. Selain itu, Sumenep terus mendorong inovasi dan peningkatan kualitas dalam industri lokal untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, menciptakan peluang kerja baru serta memberdayakan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Berikut ini gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan dalam bidang Perindustrian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja:

Tabel II-51 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perindustrian Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Terhadap Total PDRB	Persen	9,15	6,16	6,23	6,10	6,35
2	Presentase Pertumbuhan Sektor PDRB Industri Pengolahan	Persen	6,06	-1,49	5,55	7,89	6,42

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap Total PDRB secara garis besar mengalami fluktuatif atau naik turun. Pada tahun 2023 sebesar 6,35 % lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar 6,10 % dan Tahun 2021 sebesar 6,23 %. Kemudian tabel di atas menggambarkan bahwa adanya peningkatan terhadap pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Sumenep. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada Tahun 2023 sebesar 6,42 % lebih rendah jika dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar 7,89

%. Meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 5,55 % dan pada Tahun 2020 sebesar -1,49%.

2.1.5.4.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

A. ADMINSITRASI PEMERINTAH

Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan da/atau pejabat pemerintaha. Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang NOmor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut merupakan capaian Pemerintahan Kabupaten Sumenep atas indikator-indikator yang terdapat dalam aspek administrasi pemerintahan.

Tabel II-52 Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai SKM Unit- Unit Layanan Kecamatan	78	82,23	82,23	82,24	83,76
2	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
3	Peringkat LPPD	10	10	59	91	Belum rilis
4	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	n/a	n/a	135	115	n/a
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	n/a	29,2	43,9	59,15
6	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	60,01	62,3	62,45	70,15

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, 2023

Tabel di atas menyajikan capaian kinerja urusan administrasi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Secara keseluruhan, hampir seluruh indikator mengalami peningkatan capaian. Adapun indikator yang mengalami penurunan adalah indeks kepuasan layanan keprotokalan yang pada tahun 2021 mencapai 135 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian 115. Sementara itu, nilai SAKIP secara konsisten mendapatkan predikat “B” dalam lima tahun terakhir.

B. PERENCANAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, perencanaan pembangunan merupakan proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat,

pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi beberapa prinsip yang terdiri dari transparansi, responsivitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partispasi, keadilan, dan wawasan lingkungan. Berikut merupakan capaian urusan perencanaan Kabupaten Sumenep.

Tabel II-53 Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

No	Uraian	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B

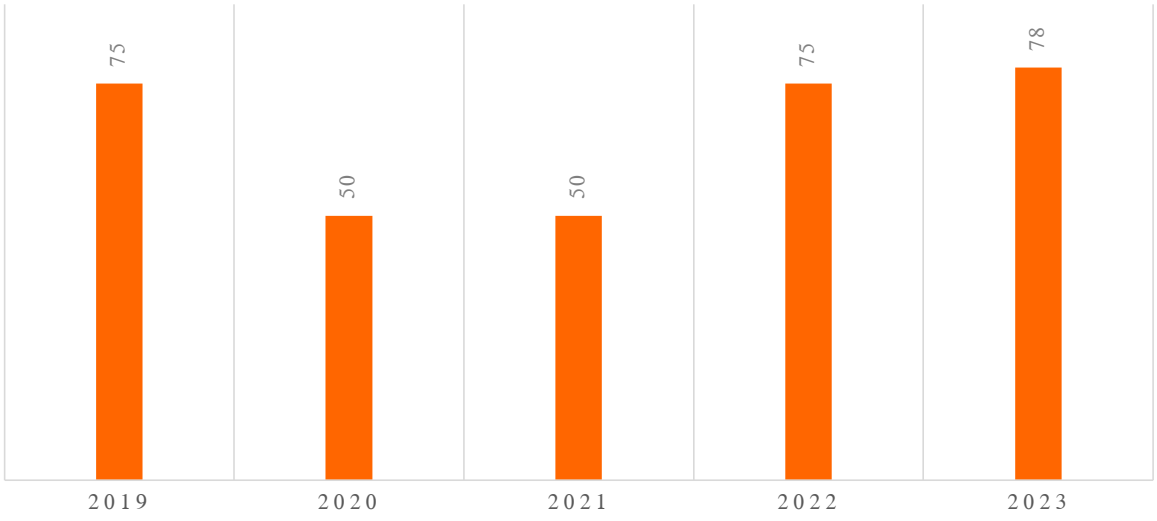
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep

Tabel di atas menyajikan capaian indikator urusan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumenep selama sepuluh tahun dari 2019 sampai 2023. Secara keseluruhan, perkembangan aspek perencanaan pembagunan stagnan dimana nilai sakip mencapai predikat "B" dalam lima tahun terakhir. Dalam pelaksanannya, implementasi SAKIP masih memiliki permasalahan yang mencakup kurangnya pemahaman secara menyeluruh terkait substansi SAKIP dan adanya perubahan regulasi pelaksanaan yang dapat mengganggu penerapan kegiatan di daerah. Kemudian, terdapat data yang belum optimal sehingga menghambat proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain itu, pelaksanaan perencanaan mengalami kendala karena rendahnya partisipasi masyarakat dan pesimisnya persepsi masyarakat. Lalu, sistem penyusunan data perencanaan yang bersifat manual dan tidak terintegrasi dengan berbagai *stakeholder* menunjukkan dibutuhkannya upaya peningkatan sistem pengelolaan data.

C. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian adalah kegiatan ilmiah terkait pengolahan informasi dan data mengenai identifikasi permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran

suatu hipotesis atau asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, pengembangan adalah kegiatan pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan funfsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang ada atau menghasilkan teknologi baru untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua aspek tersebut memiliki peran yang sentral dalam memaksimalkan tata kelola pemerintahan. Melalui penelitian, Pemerintah dapat melakukan pengumpulan informasi yang komprehensif terkait berbagai aspek pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Informasi yang dihasilkan dari penelitian yang berkualitas bersifat akurat sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Sementara itu, pengembangan dapat mendorong peningkatan inovasi dan keberlanjutan di berbagai sektor. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam proses pembuatan kebijakan berimplikasi pada dihasilkannya kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamis yang terjadi pada sektor pemerintahan. Berkaitan dengan relasi antara pemerintah dan masyarakat, urusan penelitian dan pengembangan dapat menjadi jembatan karena mengedepankan keterlibatan atau pastisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan sehingga dapat meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan di antara kedua belah pihak. Berikut merupakan capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Sumenep.



Gambar II-51 Persentase Hasil Penelitian yang Menjadi Bahan Kebijakan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun,2023

Tabel di atas menyajikan persentase hasil peneltian yang dijadikan sebagai bahan kebijakan di Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari 2019 sampai 2023. Secara keseluruhan, persentase hasil penelitian yang dijasikan sebagai bahan kebijakan mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, persentase hasil penelitian yang dijasikan sebagai bahan kebijakan adalah 75% yang kemudian menurun secara drastis pada tahun 2020 dan 2021 dengan capaian 50%. Persentase tersebut mengalami peningkatan sehingga kembali menjadi 75% pada tahun 2022. Peningkatan persentase Kembali terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 78%.

D. KEUANGAN

Urusan keuangan memiliki peranan yang sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik. Optimalisasi pelayanan di bidang keuangan dilaksanakan dengan mengelola sumber daya keuangan secara transparan, akuntabel, dan efektif sehingga pengalokasian dana sesuai dengan prioritas pembangunan. Pengelolaan keuangan yang efektif berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Berikut merupakan capaian urusan keuangan Kabupaten Sumenep.

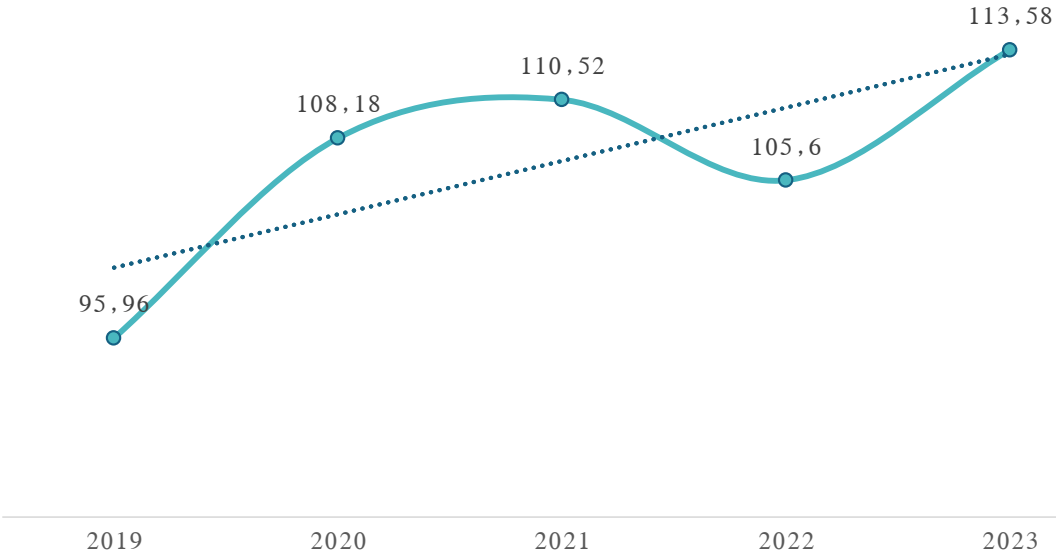
Tabel II-54 Capaian Nilai Opini BPK Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

No	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Opini dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep

Tabel di atas menyajikan capaian nilai opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari 2019 sampai 2023. Secara keseluruhan, capaian nilai opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Sumenep mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep telah memenuhi beberapa langkah yang terdiri dari melakukan rekonsiliasi setiap bulan pada seluruh Perangkat Daerah dan BLUD, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan koordinasi dengan Bidang Aset untuk menyesuaikan permasalahan Aset Tetap, melakukan kerjasama dengan kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan BLUD, memanfaatkan aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset, serta melakukan sinergi dengan seluruh Perangkat Daerah terutama Inspektorat untuk menyelesaikan audit dari tahun

sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik. Tidak hanya Opini BPK, pertumbuhan PAD Kabupaten Sumenep turut memberikan hasil yang positif. Berikut merupakan capaian pertumbuhan PAD Kabupaten Sumenep.



Gambar II-52 Persentase Pertumbuhan PAD Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2023

Grafik di atas menyajikan persentase pertumbuhan PAD Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari 2019 sampai 2023. Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari 2019 sampai 2023. Secara keseluruhan, mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, pertumbuhan PAD Kabupaten Sumenep adalah 96,96% yang kemudian mengalami peningkatan sehingga mencapai 110,52% pada tahun 2021. Persentase pertumbuhan PAD mengalmi penurunan pada tahun 2022 dengan capaian 105,6%. Peningkatan Kembali terjadi pada tahun 2023 dimana pertumbuhan PAD mencapai 113,58%.

E. KEPEGAWAIAN

Urusan kepegawaian merupakan landasan yang penting bagi birokrasi karena menentukan kelancaran dan kualitas layanan publik. Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya dalam memberikan pelayanan publik harus dikembangkan profesionalitas dan kompetensinya agar mampu melaksanakan pelayanan publik yang prima sehingga dapat meningkatka kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur. Urusan kepegawaian mencakup beberapa aspek yang terdiri dari perekrutan, penempatan, pengembangan, dan manajemen aparatur yang dimana

upaya-upaya tersebut ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berikut merupakan capaian urusan kepegawaian Kabupaten Sumenep.

Tabel II-55 Kinerja Unsur Kepegawaian Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

No.	Indikator		Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	0,26	0,16	0,10	0,27	0,12
2.	Persentase pejabat struktural yang telah diklatpim sesuai jenjangnya	11,02	0,62	3,74	44,52	53
3.	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	100	84,47	87,41	105,26	95
4.	Persentase ASN yang mendapat penilaian prestasi kerja minimal baik	93.5	95	94,39	83,18	95
5.	Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	97,36	97.94	93,3	90,16	91
6	Indeks Profesionalisme ASN	n/a	n/a	n/a	43,46	83,16

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, Tahun 2020

Tabel di atas menyajikan capaian kinerja urusan kepegawaian Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari 2019 sampai 2023. Secara keseluruhan, mayoritas indikator mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Adapun indikator yang mengalami peningkatan adalah persentase pejabata struktural yang telah diklatpim sesuai jenjangnya dan indeks profesionalisme ASN. Pada tahun 2019 persentase pejabata struktural yang telah diklatpim sesuai jenjangnya adalah 11,02% yang kemudian mengalami peningkatan secara drastis sehingga mencapai 53% pada tahun 2023. Kemudian, pada tahun 2022, indeks profesionalisme ASN adalah 43,46%. Capaian indeks profesionalisme ASN mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 sehingga mencapai 83,16%.

Dari segi bidang pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberdayakan aparatur daerah dalam rangka meningkatkan capaian kinerja. Aparatur sebagai bagian dari organisasi perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menjadi lebih terampil dalam melaksanakan pekerjannya. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi medium untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional, membentuk kepribadian yang baik, dan

menumbuhkan nilai-nilai intergritas para aparatur daerah. Di Kabupaten Sumenep, upaya peningkatan kompetensi aparatur dilaksanakan dengan pendekatan formal yaitu pendidikan dan pelatihan jabatan yang mengarah pada sikap dan pengabdian aparatur yang berorientasi pada kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanan tugas dan kewajiban yang diembannya dengan semangat kerja sama dan tanggng jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

F. INSPEKTORAT

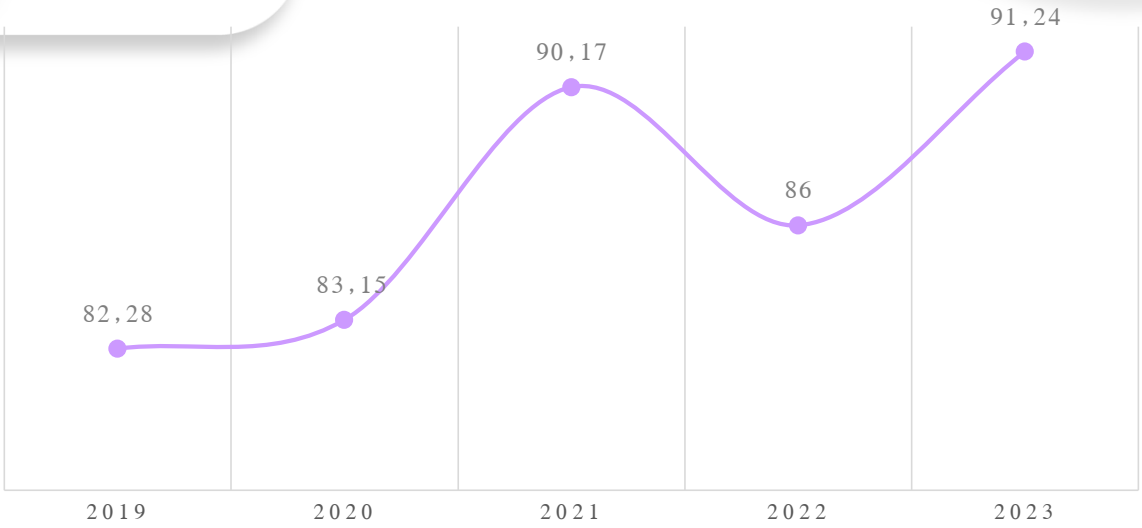
Urusan pengawasan memiliki peran yang penting dalam suatu organisasi atau system gunag memastikan setiap kegiatan, prosedur, atau kebijakan sesuai dengan strander atau peraturan yang berlaku. Pada sektor pemerintahan, pengawasan berfunsgi untuk menjaga akuntablitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan pengawasan di Kabupaten Sumenep.

Tabel II-56 Capaian Level APIP Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

No	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Level APIP Kabupaten Sumenep Menjadi Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumenep tahun 2023

Tabel di atas menyajikan capaian level Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari 2019 sampai 2023. Secara keseluruhan, capaian APIP Kabupaten Sumenep berada pada “Level 3”. Capaian tersebut menandakan bahwa lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep mampu melaksanakan penilaian terkait efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Terkait keuangan, berikut merupakan persentase tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Sumenep.



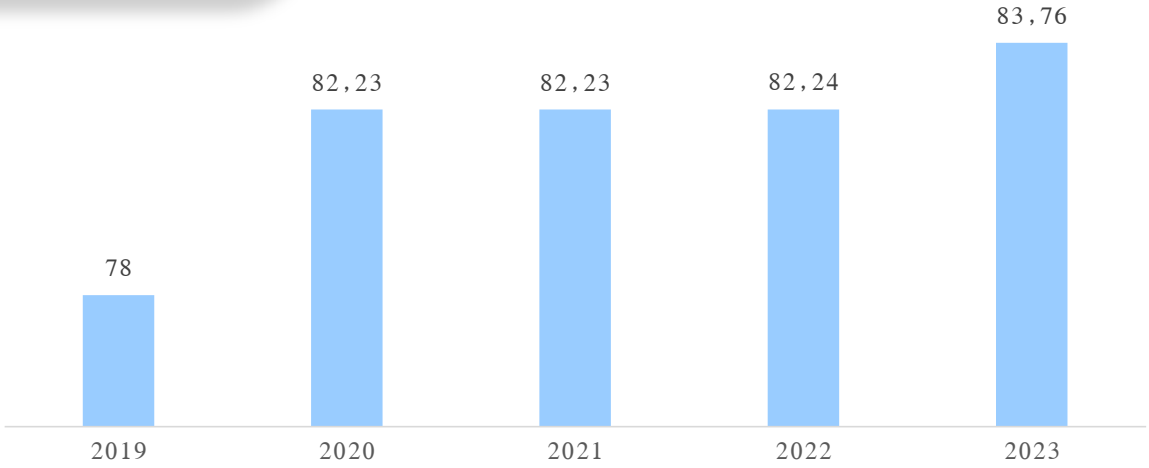
Gambar II-53 Persentase Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019-2023

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumenep, 2023

Grafik di atas menunjukkan capaian persentase tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari 2019 sampai 2023. Secara keseluruhan, persentase tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, persentase tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK mencapai 82,28% yang kemudian terus meningkat sehingga mencapai 90,17 pada tahun 2021. Kemudian, capaian persentase mengalami penutunan pada tahun 2022 menjadi 86%. Peningkatan persentase kembali terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 91,24%.

G. KECAMATAN

Kecamatan sebgagai perangkat daerah dan penyelenggaran urusan pemerintah memiliki kedudukan yang strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, kecamatan bertugas untuk untuk menjalankan sebagian kewenangan kepala daerah yang dilimpahkan. Pelimpahan wewenang dilakukan untuk menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan optimal karena kecamatan merupakan perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kinerja kecamatan dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berikut merupakan capaian IKM Kabupaten Sumenep.



Gambar II-54 Nilai SKM Unit-Unit Layanan Kecamatan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

Sumber: Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, 2023

Tabel di atas menyajikan perkembangan capaian IKM Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari 2019 sampai 2023. Secara keseluruhan, IKM Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, capaian IKM adalah 78 yang kemudian mengalami peningkatan sehingga mencapai 82,23 pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian, IKM mengalami penurunan dengan capaian 82,24 pada tahun 2022. Satu tahun setelahnya, peningkatan Kembali terjadi dimana IKM mencapai 83,76 yang merupakan capaian tertinggi sepanjang periode 2019 sampai 2023

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merujuk pada pengelolaan dan administrasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini mencakup pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, serta alokasi dari pemerintah pusat. Keuangan daerah juga mencakup pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program di tingkat lokal, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya. Sehingga, pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan baik dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota diawali dengan memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Selanjutnya, gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengacu pada batasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercantum dalam:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep perlu mencermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, analisis terkait kondisi dan proyeksi keuangan daerah menjadi esensial untuk memperoleh gambaran yang akurat terkait kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan serta mengatasi permasalahan strategis dengan tepat. Melakukan analisis keuangan daerah yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan masa lalu merujuk pada evaluasi dan analisis hasil keuangan yang telah dikelola di Kabupaten Sumenep dalam rentang tahun 2020 - 2024 yang mencakup pencapaian dan kesehatan keuangan daerah pada masa lalu, termasuk pendapatan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, serta bagaimana pengelolaan keuangan tersebut memengaruhi kondisi keuangan keseluruhan.

2.2.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

Keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah, dimana kinerja pelaksanaan keuangan daerah realisasinya diwujudkan dalam APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas perkiraan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiyaaan daerah yang berdasarkan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian

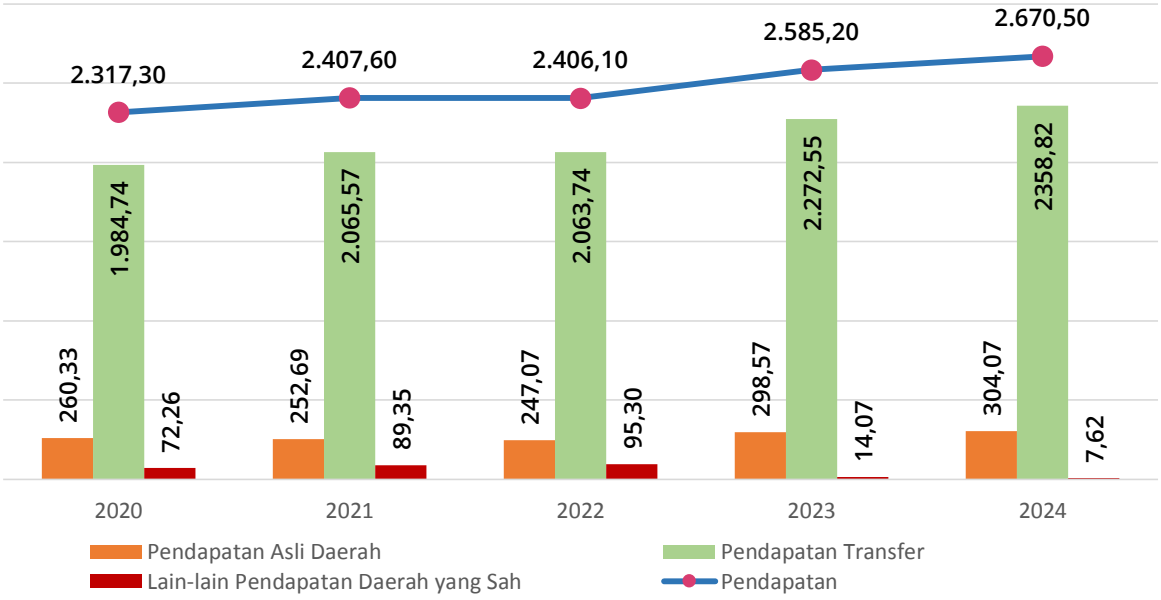
objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer;
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep meliputi perkembangan pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1.2 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah Kabupaten Sumenep meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep saat ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep saat ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun nilai realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 2.670.522.371.039,65 yang merupakan nilai pendapatan tertinggi yang dimiliki Kabupaten Sumenep jika dibandingkan dengan nilai pendapatan pada 4 tahun sebelumnya (2020 - 2023). Berikut merupakan perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 (Dalam Milyar Rupiah):



Gambar II-55 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025

Peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat selalu diupayakan untuk terus meningkat melalui peningkatan pada pendapatan daerah. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pendapatan Kabupaten Sumenep cukup fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir sebesar 3,64%. Penurunan pendapatan terjadi pada tahun 2022 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -0,06%. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 2.585,20 Milyar dan pada tahun 2024 juga meningkat menjadi 2.670,50. Penyebab berkurangnya pendapatan pada tahun 2022 di Kabupaten Sumenep disebabkan oleh menurunya angka pendapatan transfer yaitu sebesar -0,09% pada tahun 2022.

Pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 namun menurun pada tahun 2023 sebesar -85,24%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada 5 tahun terakhir cukup fluktiatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,38% dan angka tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp 304.075.441.817,65. Melihat pada realisasi komponen pendapatan daerah Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya kecenderungan tren yang fluktuatif. Secara umum PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan pada

tahun 2022. Secara lebih terperinci pertumbuhan pada masing-masing komponen pendapatan Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

Tabel II-57 Petumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2024

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	3,90%	-0,06%	7,44%	3,30%	3,64%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	-2,93%	-2,22%	20,84%	1,84%	4,38%
1.2	Pendapatan Transfer	4,07%	-0,09%	10,12%	3,80%	4,47%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3,08%	0,01%	9,30%	4,61%	4,25%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	18,16%	-1,26%	20,38%	-5,46%	7,95%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23,64%	6,66%	-85,24%	-45,78%	-25,18%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui beberapa sumber, diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebesar 260,33 milyar yang kemudian mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 304,08 milyar.

Angka pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang menggambarkan perubahan persentase suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu yang pada umumnya dalam satu tahun. Meskipun demikian, angka pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 menurun sebesar -0,06% dan kembali meningkat sebesar 7,44% pada tahun 2023 dan meningkat sebesar 3,30% pada tahun 2024. Apabila dilihat berdasarkan komponennya maka rata-rata pertumbuhan pendapatan menunjukkan nilai positif. Rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pada transfer antar daerah sebesar 7,95%.

Berikutnya, komponen dalam pendapatan daerah adalah pendapatan transfer. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar

Daerah. Dimana Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Sumenep bersumber dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah serta Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah Kabupaten Sumenep bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan transfer Kabupaten Sumenep memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,47%. Selain itu transfer pemerintah pusat memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,25% dan pendapatan terbesar pada transfer pemerintah pusat Kabupaten Sumenep berasal dari dana perimbangan.

Selanjutnya komponen Pendapatan Daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dimana realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 bersumber dari Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak terdapat realisasi pada Dana Darurat. Dana hibah menunjukan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dana hibah sebesar Rp. 72.263.600.285,00 dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 7.626.711.109,00. Secara keseluruhan Dana Hibah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 155,13%. Secara keseluruan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II-58 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024

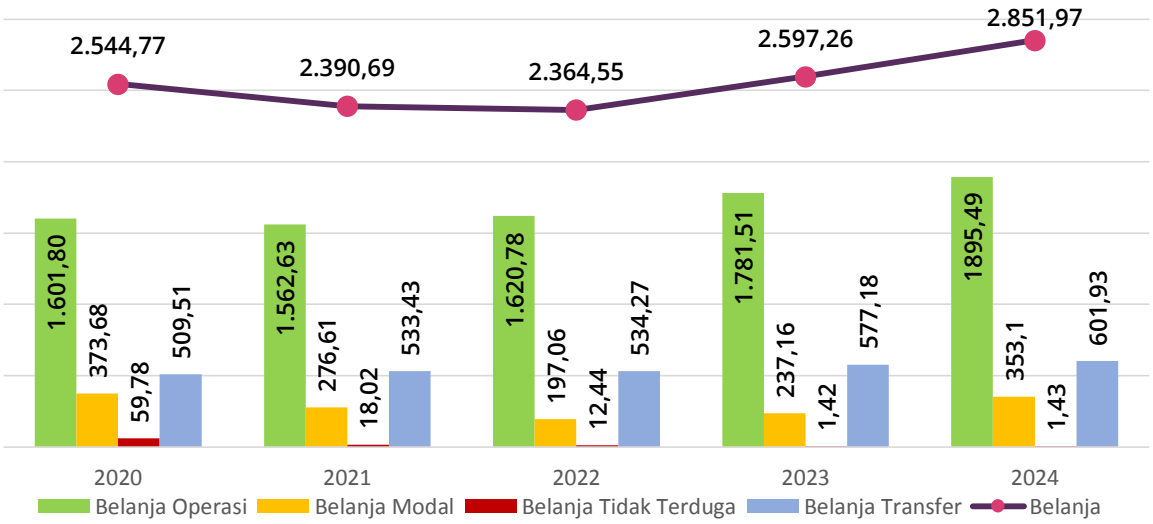
No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**2,317,331,681,482.57**	**2,407,606,540,913.55**	**2,406,116,363,646.98**	**2,585,188,972,667.12**	**2,670,522,371,039.65**	**3.64%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**260,329,014,333.57**	**252,690,773,879.35**	**247,070,353,452.98**	**298,570,634,143.12**	**304,075,441,817.65**	**4.38%**
1.1.1.	Pajak daerah	32,365,904,163.00	38,701,802,074.80	47,205,426,759.25	47,892,151,015.27	53,588,069,906.48	13.72%
1.1.2.	Retribusi daerah	18,117,339,176.00	10,087,793,492.00	9,528,945,161.00	12,527,936,745.53	223,458,422,113.27	416.32%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	15,822,662,838.22	16,547,828,081.15	16,021,468,294.79	15,357,366,398.77	13,742,861,230.09	-3.31%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	194,023,108,156.35	187,353,350,231.40	174,314,513,237.94	222,793,179,983.55	13,286,088,567.81	-19.16%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1,984,739,066,864.00**	**2,065,566,060,377.14**	**2,063,744,424,921.00**	**2,272,552,604,425.00**	**2,358,820,218,113.00**	**4.47%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1,854,194,960,701.00**	**1,911,309,552,262.00**	**1,911,425,007,140.00**	**2,089,196,389,025.00**	**2,185,484,215,113.00**	**4.25%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,487,090,215,701.00	1,564,471,304,262.00	1,564,712,040,140.00	1,729,575,460,025.00	1,815,274,172,113.00	5.18%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	102,687,153,173.00	150,463,582,500.00	171,165,244,103.00	139,785,929,055.00	119,116,410,000.00	6.79%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,090,899,516,000.00	1,081,877,188,000.00	1,075,630,805,347.00	1,131,019,530,783.00	1,191,281,864,380.00	2.27%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	293,503,546,528.00	332,130,533,762.00	317,915,990,690.00	458,770,000,187.00	504,875,897,733.00	15.81%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	7,013,035,000.00	0.00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	367,104,745,000.00	346,838,248,000.00	346,712,967,000.00	359,620,929,000.00	363,197,008,000.00	-0.21%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**130,544,106,163.00**	**154,256,508,115.14**	**152,319,417,781.00**	**183,356,215,400.00**	**173,336,003,000.00**	**7.95%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	105,903,820,563.00	139,338,809,758.00	137,561,379,781.00	167,207,105,900.00	157,395,004,000.00	11.49%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	24,640,285,600.00	14,917,698,357.14	14,758,038,000.00	16,149,109,500.00	15,940,999,000.00	-8.10%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**72,263,600,285.00**	**89,349,706,657.06**	**95,301,585,273.00**	**14,065,734,099.00**	**7,626,711,109.00**	**-25.18%**
1.3.1	Hibah	72,263,600,285.00	2,892,353,910.00	26,285,564,250.00	14,065,734,099.00	7,626,711,109.00	155.13%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan	-	86,457,352,747.06	69,016,021,023.00	-	-	-30.04%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025

2.2.1.3 BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang keuangan daerah, Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakatan bahwa Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang di maksud adalah urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan non wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang pemerintahan. Prioritas pendanaan dalam Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendanaan Belanja Daerah yang dipergunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja *(performance budget)* yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Realisasi belanja Daerah Kabupaten Sumenep selama kurun waktu 5 tahun (2020 - 2024) mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,13%. Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:



Gambar II-56 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025

Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.544.767.758.853,27, dan menurun pada tahun 2021 hingga mencapai angka Rp. 2.390.690.707.126,47 dan menurun pada tahun 2022 menyentuh angka Rp. 2.364.552.041.997,17. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.597.264.241.457,00, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 2.851.976.570.211,57. Meskipun tren belanja termasuk dalam kategori fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, penurunan secara berturut-turut terjadi pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Peningkatan belanja daerah pada setiap tahun paling banyak disumbang oleh adanya peningkatan Belanja Operasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,40%. Pos belanja lainnya seperti Belanja Modal memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,63%, Belanja Tidak Terduga dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -39,24%, dan Belanja Transfer sebesar 3,16%. Berikut rincian persentase pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep beberapa tahun terakhir:

Tabel II-59 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**	**-6.05%**	**-1.09%**	**9.84%**	**9.81%**	**3.13%**
2.1	**Belanja Operasi**	**-2.45%**	**3.72%**	**9.92%**	**6.40%**	**4.40%**
2.1.1	Belanja Pegawai	5.55%	2.17%	-3.00%	7.64%	3.09%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	-5.78%	9.19%	25.27%	3.00%	7.92%
2.1.3	Belanja Bunga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00%	0.00%	0.00%	72.16%	18.04%
2.1.5	Belanja Hibah	-32.04%	1.80%	41.12%	13.21%	6.02%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	23.73%	-50.94%	-19.07%	-38.41%	-21.17%
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.2	**Belanja Modal**	**-25.98%**	**-28.76%**	**20.35%**	**48.89%**	**3.63%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	167.28%	-90.19%	20.18%	225.28%	80.64%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-22.00%	-5.05%	21.96%	35.86%	7.69%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-34.55%	-27.27%	26.83%	102.18%	16.80%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-32.06%	-33.06%	11.09%	13.50%	-10.13%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	63.03%	10.37%	65.06%	-11.38%	31.77%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**-69.86%**	**0.00%**	**-88.61%**	**1.50%**	**-39.24%**
2.4	**Belanja Transfer**	**4.70%**	**0.16%**	**8.03%**	**4.29%**	**4.29%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	64.73%	7.60%	58.12%	6.74%	34.30%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	4.46%	0.11%	7.70%	4.26%	4.13%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 202*5*

Belanja Operasi Kabupaten Sumenep dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,40% memiliki tren realisasi yang fluktuatif. Pada tahun 2020 nilai Belanja Operasi sebesar Rp. 1.601.799.317.912,67, yang kemudian mengalami penurunan -2,45% pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1.562.627.809.391,68. Pada tahun 2022 nilai Belanja Operasi meningkat 3,72% menjadi sebesar Rp. 1.620.783.224.700,58 dan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan 9.92% menjadi sebesar Rp. 1.781.509.676.442,00. Pada tahun 2024 nilai Belanja Operasi meningkat 6,640% menjadi sebesar Rp. 1.895.496.818.806,97, yang merupakan nilai terbesar pada komponen Belanja Operasi dalam kurung waktu 2020 hingga 2024.

Terdapat 5 jenis belanja pada Belanja Operasi Kabupaten Sumenep, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah serta Belanja Bantuan Sosial. Dari kelima jenis belanja operasi di Kabupaten Sumenep nilai rata-rata pertumbuhan paling tinggi berada pada Belanja Subsidi sebesar 18,04%. Di sisi lain, jika melihat pada nilai realisasinya maka Belanja hibah memiliki tren fluktuasi yang cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan di tahun 2021 pertumbuhannya menyentuh angka -32,04%.

Sedangkan pada Belanja Modal terdapat realisasi pada masing-masing jenis belanja di setiap tahunnya terkecuali pada Belanja aset lainnya yang tidak terdapat realisasi pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Belanja Modal Tanah merupakan jenis Belanja Modal dengan rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu 80,64%, kemudian diikuti Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,80%. Tidak jauh berbeda dengan realisasi Belanja Operasi, masing-masing jenis Belanja Modal juga menunjukan tren fluktuasi yang cukup tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan 3,63%. Fluktuasi nilai total Belanja Modal ditunjukkan dengan capainnya pada tahun 2020 yang menunjukan angka realisasi sebesar Rp. 373.682.754.885,44. Namun mengalami penurunan secara berturut-turut Pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai angka Rp. 197.059.169.131,59 di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 Belanja Modal kembali mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 237.156.786.533,00, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 hingga mencapai Rp. 353.105.432.354,60.

Belanja Tak Terduga menunjukan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -39,24%. Hal tersebut dikarenalam adannya realisasi yang menurun secara signifikan dari sebesar Rp. 59.783.764.768,45 di tahun 2020 dan menjadi Rp. 1.438.458.850,00. Sedangkan Belanja Transfer merupakan jenis Belanja Daerah yang berasal dari Belanja Bagi Hasil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 34,30% dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dengan rata-rata pertumubuhan sebesar 4,13%. Secara keseluruhan nilai realisasi dan rata-rata pertumbuhan belanja daerah serta masing-masing komponennya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel II-60 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	**BELANJA**	**2,544,767,758,853.27**	**2,390,690,707,126.47**	**2,364,552,041,997.17**	**2,597,264,241,457.00**	**2,851,976,570,211.57**	**3.13%**
2.1	**Belanja Operasi**	**1,601,799,317,912.67**	**1,562,627,809,391.68**	**1,620,783,224,700.58**	**1,781,509,676,442.00**	**1,895,496,818,806.97**	**4.40%**
2.1.1	Belanja Pegawai	880,008,271,077.35	928,875,780,834.86	949,023,686,656.00	920,527,630,299.00	990,862,445,039.00	3.09%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	515,291,304,535.32	485,504,058,724.78	530,108,801,404.07	664,048,845,789.00	683,971,100,727.97	7.92%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	2,223,523,266.00	3,828,024,871.00	18.04%
2.1.5	Belanja Hibah	192,302,292,300.00	130,681,168,795.66	133,032,888,635.89	187,735,604,288.00	212,539,742,238.00	6.02%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14,197,450,000.00	17,566,801,036.38	8,617,848,004.62	6,974,072,800.00	4,295,505,931.00	-21.17%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-		-	-	-	
2.2	**Belanja Modal**	**373,682,754,885.44**	**276,613,588,440.79**	**197,059,169,131.59**	**237,156,786,533.00**	**353,105,432,354.60**	**3.63%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	7,672,817,756.00	20,507,959,745.00	2,011,296,640.00	2,417,117,050.00	7,862,474,000.00	80.64%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78,074,383,743.10	60,894,244,152.38	57,821,545,587.70	70,521,348,525.00	95,811,072,726.00	7.69%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121,549,874,169.45	79,549,145,995.68	57,853,492,088.87	73,376,055,202.00	148,354,731,036.03	16.80%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	163,635,683,936.89	111,178,874,558.98	74,424,676,997.02	82,674,854,181.00	93,839,091,711.57	0.00%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,749,995,280.00	4,483,363,988.75	4,948,157,818.00	8,167,411,575.00	7,238,062,881.00	31.77%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	0.00%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**59,783,764,768.45**	**18,021,265,024.00**	**12,437,756,558.00**	**1,417,263,048.00**	**1,438,458,850.00**	**-39.24%**
2.4	**Belanja Transfer**	**509,501,921,286.71**	**533,428,044,270.00**	**534,271,891,607.00**	**577,180,515,434.00**	**601,935,860,200.00**	**4.29%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2,004,732,906.71	3,302,334,000.00	3,553,313,000.00	5,618,663,220.00	5,997,109,000.00	34.30%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	507,497,188,380.00	530,125,710,270.00	530,718,578,607.00	571,561,852,214.00	595,938,751,200.00	4.13%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, *2025*

2.2.1.4 PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis yang dilakukan pada

pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka equilibrium yakni Rp. 0,-.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran, lebih lanjut APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sumenep dalam periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan nilai yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp742.374.231.933,34 yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun

terakhir. Angka ini sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dengan jumlah Rp667.167.452.762,34 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp206.779.171,00. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan penerimaan pembiayaan, yakni Rp440.087.641.235,64 pada tahun 2021 dan Rp400.069.287.119,72 pada tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya nilai SiLPA yang diterima. Pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan kembali meningkat menjadi Rp453.917.292.585,41 yang disertai dengan adanya pencairan dana cadangan sebesar Rp37.600.000.000,00. Tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan lebih lanjut dengan nilai penerimaan pembiayaan mencapai Rp476.245.508.105,10 yang didominasi oleh SiLPA sebesar Rp410.917.771.655,16.

Di sisi lain, Pengeluaran Pembiayaan juga mengalami fluktuasi selama periode yang sama. Pada tahun 2020, pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp75.000.000.000,00 yang seluruhnya digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah. Nilai pengeluaran ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp45.000.000.000,00 dan terus menurun pada tahun 2022 dengan nilai Rp25.000.000.000,00. Namun, pada tahun 2023, pengeluaran pembiayaan mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp30.300.000.000,00 yang sebagian besar digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.300.000.000,00. Tren ini terus meningkat pada tahun 2024 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp35.000.000.000,00, yang mencakup Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebesar Rp25.000.000.000,00. Secara keseluruhan, meskipun penerimaan pembiayaan menunjukkan angka yang lebih besar, pengeluarannya cenderung terkendali dan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun mulai mengalami peningkatan di tahun terakhir. Secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sumenep disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-61 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**742,374,231,933.34**	**440,087,641,235.64**	**400,069,287,119.72**	**453,917,292,585.41**	**476,245,508,105.10**	**-7.86%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	667,167,452,762.34	439,938,154,562.64	399,997,727,119.72	416,217,543,138.41	410,917,771,655.16	-10.09%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	50,000,000,000.00	-	-	37,600,000,000.00	65,096,093,898.94	-6.72%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	206,779,171.00	149,486,673.00	71,560,000.00	99,749,447.00	231,642,551.00	22.95%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0.00%
	Penerimaan Kembali Investasi Daerah	25,000,000,000.00	-	-	-	-	-25.00%
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**75,000,000,000.00**	**45,000,000,000.00**	**25,000,000,000.00**	**30,300,000,000.00**	**35,000,000,000.00**	**-11.93%**
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	0.00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	75,000,000,000.00	20,000,000,000.00	-	5,300,000,000.00	10,000,000,000.00	-21.16%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0.00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0.00%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan *dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025*

2.2.2 NERACA DAERAH

Analisis terhadap penyelenggaraan keuangan daerah Kabupaten Sumenep salah satunya dilaksanakan pada Neraca Daerah. Neraca Daerah merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi bagian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penyusunan Neraca Daerah berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah. Neraca Daerah terdiri atas:

1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas

Komponen neraca daerah yang pertama adalah Aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Komponen selanjutnya adalah Kewajiban, kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan komponen terakhir adalah Ekuitas yang merupakan gambaran kekayaan bersih pemerintah. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Untuk mengetahui posisi aset, kewajiban dan ekuitas Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024:

Tabel II-62 Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2020– 2024

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**						
1.1.	**ASET LANCAR**	**554,758,697,375.96**	**504,025,936,551.83**	**500,665,483,780.76**	**494,139,792,661.66**	**356,843,311.377.23**	**-9.73%**
1.1.1.	Kas	440,060,654,562.64	400,169,710,955.24	416,217,543,138.41	411,162,821,477.16	259,791,858,933.18	-5.39%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1.3.	Piutang Pendapatan	99,501,485,505.41	100,616,357,767.03	86,328,998,734.09	97,149,243,199.36	105,458,386,366.89	2.00%
1.1.4.	Penyisihan Piutang	-30,112,302,919.79	-34,419,186,866.74	-38,671,111,436.44	-42,511,749,626.64	-47,545,559,033.35	12.11%
1.1.5.	Belanja Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1.6.	Persediaan	43,827,573,995.37	37,021,454,696.30	36,071,481,919.70	27,516,877,611.78	38,616,025,110.51	-0.37%
1.1.7	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	635,000,000.00	636,000,000.00	716,971,425.00	821,000,000.00	0.00	-18.15%
1.1.8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	846,286,232.33	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	-49.95%
1.1.9	Piutang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	522,600,000.00	0.00%
1.2.	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**283,281,396,397.02**	**306,465,671,935.85**	**309,031,210,857.51**	**315,532,863,907.65**	**329,868,954,197.89**	**3.92%**
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	283,281,396,397.02	306,465,671,935.85	309,031,210,857.51	315,532,863,907.65	329,868,954,197.89	3.92%
1.3.	**ASET TETAP**	**2,889,006,425,369.24**	**2,787,024,414,569.89**	**2,814,080,281,582.01**	**3,049,565,008,002.77**	**3,169,162,862,497.13**	**2.43%**
1.3.1.	Tanah	523,457,555,546.32	543,603,149,431.32	599,293,605,629.32	601,711,720,023.32	600,431,327,000.15	3.57%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	752,281,050,578.44	835,754,416,798.77	896,136,923,657.14	969,927,113,386.34	1,069,630,475,664.34	9.21%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1,022,605,717,292.23	1,076,231,213,998.29	1,158,848,654,165.60	1,185,327,212,188.25	1,375,569,747,906.00	7.81%
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,539,650,250,211.08	2,662,395,082,639.86	2,743,241,291,197.42	2,827,025,479,703.50	3,004,175,696,964.00	4.30%
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	31,162,624,931.92	30,714,866,457.92	31,454,811,597.00	34,208,527,340.00	38,295,734,574.00	5.42%

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	24,036,841,772.55	43,634,308,088.16	24,819,660,562.61	44,026,961,081.33	13,149,460,248.03	11.42%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-2,004,187,614,963.30	-2,405,308,622,844.43	-2,639,714,665,227.08	-2,612,662,005,719.97	-2,932,089,579,859.39	10.24%
1.4.	**DANA CADANGAN**	**0.00**	**25,000,000,000.00**	**50,715,430,567.49**	**39,500,755,488.70**	**0.00**	**-4.81%**
1.4.1.	Dana Cadangan	0.00	25,000,000,000.00	50,715,430,567.49	39,500,755,488.70	0.00	-4.81%
1.5.	**ASET LAINNYA**	**46,013,389,665.78**	**23,928,802,354.58**	**36,928,722,786.78**	**43,668,130,403.80**	**37,244,138,836.20**	**2.47%**
1.5.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00%
1.5.3.	Kemitraan pada Pihak Ketiga	26,254,889,279.30	10,423,194,279.30	7,583,078,779.30	7,583,078,779.30	7,583,078,779.30	-21.89%
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	9,700,191,532.00	9,804,401,968.00	10,446,706,318.00	9,068,127,582.00	9,224,992,507.00	-0.96%
1.5.5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-8,200,945,725.60	-8,826,876,189.20	-9,433,772,015.60	-8,270,928,647.20	-8,662,997,139.80	1.73%
1.5.6.	Aset Lain-lain	18,246,354,580.08	12,515,182,296.48	28,319,809,705.08	35,274,952,689.70	38,227,787,926.76	32.46%
1.5.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	-12,747,104,237.06	-12,747,104,237.06	0.00%
1.5.8.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0.00	0.00	0.00	9,794,269,000.00	3,605,481,000.00	-15.80%
1.6.	**PROPERTI INVESTASI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,468,688,521.17**	**0.00%**
1.6.1	Properti Investasi Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	15,642,749,023.17	0.00%
1.6.2.	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,978,530.00	0.00%

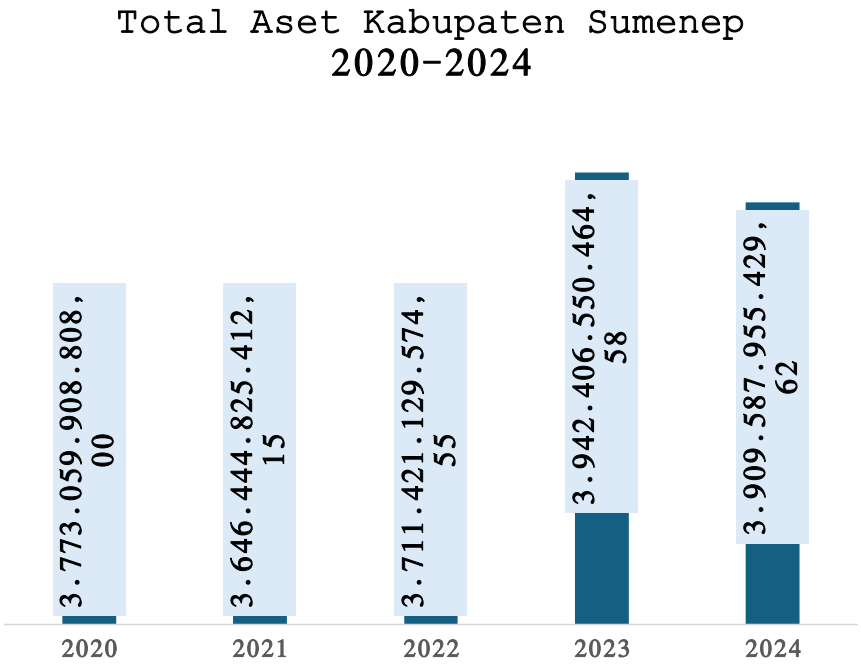
No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.6.3.	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0.00	0.00	0.00	0.00	-675,039,032.00	0.00%
	JUMLAH ASET	**3,773,059,908,808.00**	**3,646,444,825,412.15**	**3,711,421,129,574.55**	**3,942,406,550,464.58**	**3,909,587,955,429.62**	**0.95%**
2	**KEWAJIBAN**						
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**36,206,502,065.16**	**29,544,101,741.75**	**38,841,659,000.18**	**66,443,304,584.19**	**52,457,270,325.09**	**15.77%**
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0.00	127,365,702.00	299,223,944.00	245,049,822.00	0.00	4.21%
2.1.2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.3.	Utang Retensi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.4.	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.5.	Utang Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.6.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	2650397143.00	8,328,115,133.00	17,557,163,809.00	21,461,039,315.00	0.00	56.26%
2.1.7.	Pendapatan Diterima Dimuka	3,018,494,411.23	2,832,429,038.58	457,624,999.88	355,333,333.32	373,666,666.43	-26.80%
2.1.8.	Utang Belanja	30,537,610,510.93	18,256,191,868.17	20,527,646,247.30	44,381,882,113.87	40,097,227,428.66	19.69%
2.1.9.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	11,986,376,230.00	-11.04%
2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2.2.	Utang Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	**36,206,502,065.16**	**29,544,101,741.75**	**38,841,659,000.18**	**66,443,304,584.19**	**52,457,270,325.09**	**15.77%**

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
3	**EKUITAS**						
3.1.	**EKUITAS**	**3,736,853,406,742.84**	**3,616,900,723,670.40**	**3,672,579,470,574.37**	**3,875,963,245,880.39**	**3,857,130,685,104.53**	**0.85%**
3.1.1.	Ekuitas	3,736,853,406,742.84	3,616,900,723,670.40	3,672,579,470,574.37	3,875,963,245,880.39	3,857,130,685,104.53	0.85%
	JUMLAH EKUITAS	**3,736,853,406,742.84**	**3,616,900,723,670.40**	**3,672,579,470,574.37**	**3,875,963,245,880.39**	**3,857,130,685,104.53**	**0.85%**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3,773,059,908,808.00**	**3,646,444,825,412.15**	**3,711,421,129,574.55**	**3,942,406,550,464.58**	**3,909,587,955,429.62**	**0.95%**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Sumenep Tahun 2020 - 2024

2.2.2.1 ASET

Komponen pertama dari Neraca Daerah adalah Aset. Berdasarkan tabel Neraca Daerah Kabupaten Sumenep 2020-2024 diatas. Aset yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep berbentuk Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Total aset Kabupaten Sumenep pada dua tahun (2020-2021) menunjukan adanya penurunan, dari Rp. 3,773,059,908,808.00 di tahun 2020 menjadi Rp. 3.646.444.825.412,15 di tahun 2021. Akan tetapi pada dua tahun terakhir (2022 - 2023), total aset Kabupaten Sumenep dapat kembali meningkat menjadi Rp. 3,711,421,129,574.55 di tahun 2022 dan Rp. 3,942,406,550,464.58 di tahun 2023. Sementara ditahun 2024 sedikit mengalami penurunan menjadi Rp. 3,909,587,955,429.62. Sehingga secara keseluruhan nilai total aset Kabupaten Sumenep lima tahun terakhir tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0.95%.



Gambar II-57 Total Aset Kabupaten Sumenep 2020-2024

Sumber: LKPD Kabupaten Sumenep 2020-2024

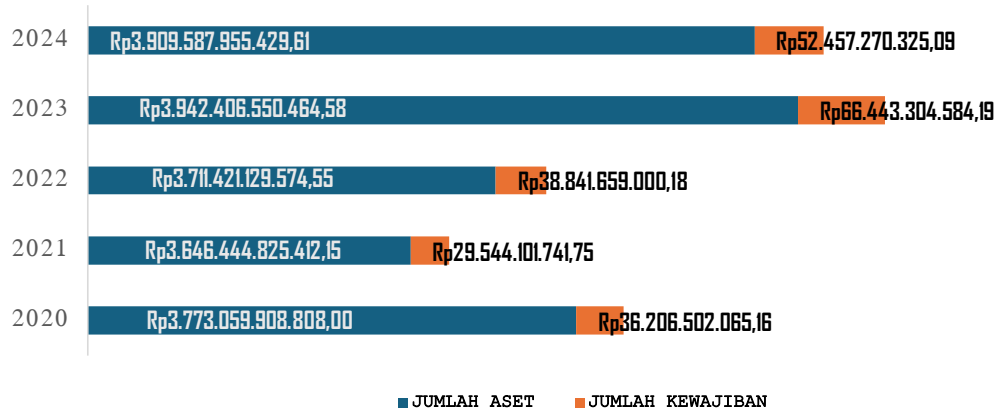
Jika dilihat berdasarkan komponennya, penurunan nilai aset Kabupaten Sumenep dikarenakan adanya tren yang menurun pada aset lancar dan dana Cadangan Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir. Aset Lancar menurun dari Rp. 554,758,697,375.96 di tahun 2020 menjadi Rp. 356,843,311,377.23 di tahun 2024. Kondisi penurunan ini dipengaruhi oleh nilai Kas dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Sumenep

yang terus menurun dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan pada Dana Cadangan, memiliki jumlah Rp. 0 ditahun 2020 dan kemudian ditahun 2024 kembali memiliki jumlah sebesar Rp. 0. Komponen aset yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah Investasi Jangka Panjang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.92% dan Aset Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2.47%. Sedangkan jika dilihat berdasarkan nilainya, aset terbesar adalah Aset Tetap yang mencapai 81% dadi keseluruhan total aset. Komponen Aset Tetap yang memiliki nilai paling tinggi adalah Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

2.2.2.2 KEWAJIBAN

Komponen kedua dari Neraca Daerah adalah Kewajiban. Kewajiban menggambarkan nilai hutang yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep. Kewajiban pada Neraca Daerah terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kabupaten Sumenep tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Jangka Pendek Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir menunjukan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15.77%.

Sumber Kewajiban Jangka Pendek Kabupaten Sumenep yang paling tinggi bersumber dari Utang Belanja, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Diterima Dimuka. Apabila dilihat pada total nilainya, jumlah kewajiban yang dimiliki Kabupaten Sumenep masih jauh dibandingkan nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Yakni berkisar pada angka 1%-2%.



Gambar II-58 Perbandingan Nilai Aset dan Kewajiban Kabupaten Sumenep 2020-2024

Sumber: LKPD Kab. Sumenep 2020-2024, diolah

2.2.2.3 EKUITAS

Setelah diketahui besaran aset (kekayaan) dan kewajiban (hutang) yang dimiliki Kabupaten Sumenep maka selanjutnya dapat diketahui ekuitas dana yang menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir menunjukan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada rata-rata pertumbuhan sebesar 0.85%. Yakni dari Rp. 3,736,853,406,742.84 di tahun 2020 menjadi Rp. 3,857,130,685,104.53 di tahun 2024. Hal ini sesuai dengan tren yang muncul pada aset dan kewajiban sebagai komponen perhitungan ekuitas yang juga menunjukan tren yang fluktuatif. Bila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tercatat sebesar 0.95% atau memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan asetnya.

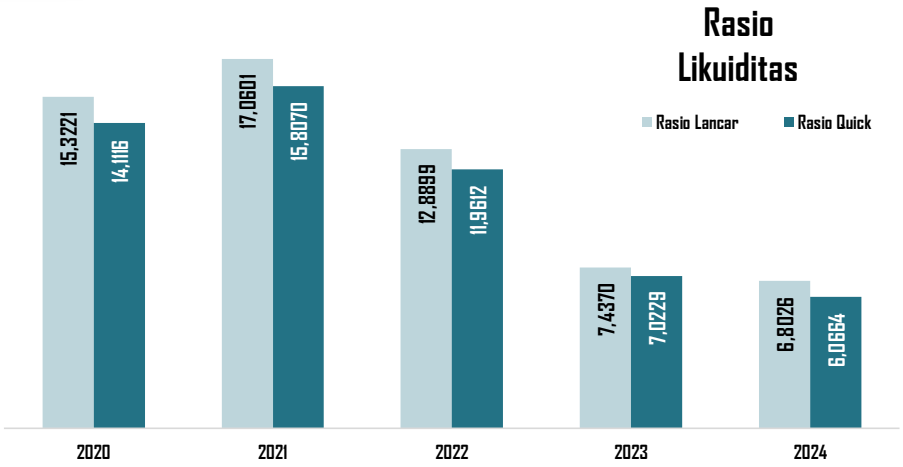
Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang disajikan dalam neraca di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

2.2.2.3.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar. Sedangkan rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*, yaitu nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan. Berikut merupakan rumus perhitungan beserta hasil perhitungan pada rasio lancar dan rasio *quick*:

a) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

(b) Rasio *quick* = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek



Gambar II-59 Rasio Likuiditas Kabupaten Sumenep 2020-2024

Sumber: LKPD Kab. Sumenep 2020-2024, diolah

Kedua jenis Rasio Likuiditas Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024 yakni Rasio *Quick* dan Rasio Lancar menunjukan tren yang sama pada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan nilai persediaan yang merupakan komponen pembeda dalam perhitungan kedua jenis rasio tersebut menunjukan nilai yang tidak terlalu besar. Yakni hanya berkisar 5%-8% dari total nilai aset lancar. Sehingga nilai rasio yang menunjukan besaran kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya baik dengan aset lancar maupun dengan aset lancar yang lebih *liquid* menunjukan angka yang selaras.

Jika dilihat berdasarkan tren nilainya, Rasio *Quick* dan Rasio Lancar Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir menunjukan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Dari kemampuan rasio lancar memenuhi kewajiban jangka pendek sebanyak 15 kali dalam setahun di 2020 kemudian meningkat menjadi 17 kali di tahun 2021. Akan tetapi pada tiga tahun terakhir (2022 -2024), nilai rasio lancar menurun cukup signifikan menjadi 12.9 kali hingga menjadi 7 kali. Begitu juga dengan rasio *quick* yang pada dua tahun pertama menunjukan peningkatan nilai dari 14 kali di tahun 2020 menjadi 15.8 kali di tahun 2021. Yang kemudian pada tiga tahun terakhir nilai rasio *quick* juga menurun pada angka 11.9 kali dan 6 kali.

Semakin tinggi nilai rasio lancar dan rasio *quick* menunjukan kemampuan membayar hutang (kewajiban) jangka pendek menggunakan aset lancar dan aset lancar yang lebih *liquid* (aset lancar – persediaan) semakin baik. Pada dua tahun pertama, kewajiban jangka pendek yang dimiliki Kabupaten Sumenep terus

menurun. Yakni dari Rp. 36,206,502,065.16 di tahun 2020 menjadi Rp. 29,544,101,741.75 di tahun 2021. Meskipun nilai aset lancar pada dua tahun pertama juga menunjukan penurunan, akan tetapi nilai penurunnya lebih kecil yakni -35% serta nilai aset dibanding kewajiban jangka pendeknya masih sangat jauh.

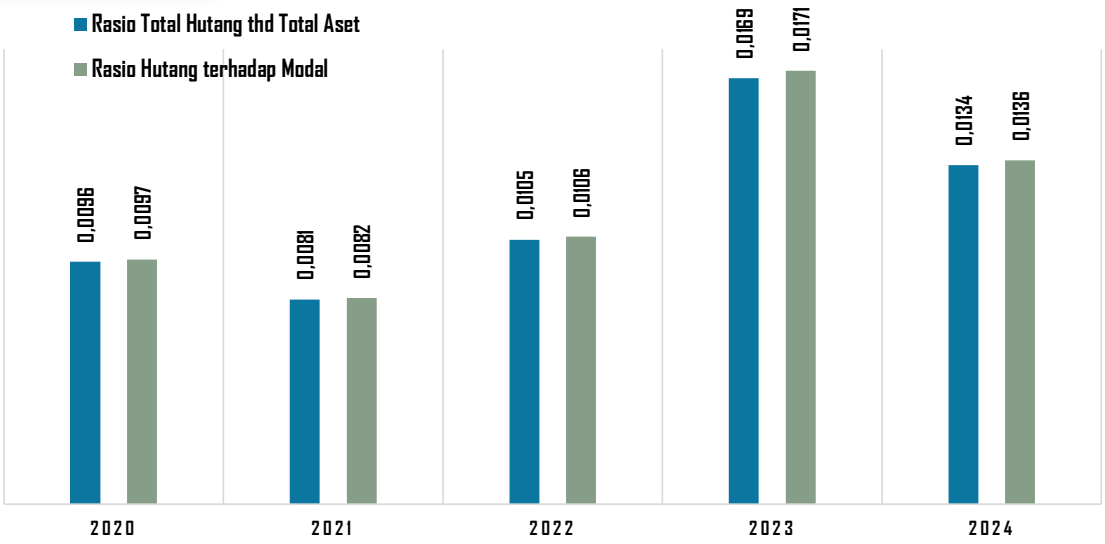
Adapun pada tiga tahun terakhir (2022-2024), kewajiban jangka pendek yang dimiliki Kabupaten Sumenep meningkat 31.47% di tahun 2022 dan terus meningkat sebesar 71.06% di tahun 2023 hingga nilainya hampir sama dengan hutang di tahun 2019, dan ditahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar -21,05%. Sedangkan kondisi tersebut diiringi dengan nilai aset lancar Kabupaten Sumenep yang terus mengalami penurunan sebesar -0.67% di tahun 2022 dan -27.78% di tahun 2024. Sehingga dengan nilai hutang yang sama tinggi dengan tahun 2020 akan tetapi dengan nilai aset lancar yang menurun maka kemampuan membayar hutang jangka pendeknya juga menurun. Meskipun demikian, kemampuan membayar hutang jangka pendek Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir masih dalam kategori baik karena aset lancar dan aset lancar yang lebih *liquid* -nya masih mampu membayar kewajiban jangka pendek lebih dari 1 kali dalam setahun.

2.2.2.3.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset, serta Rasio Hutang terhadap Modal yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Berikut merupakan rumus perhitungan beserta hasil perhitungan pada Rasio Total Hutang terhadap Total Aset dan Rasio Hutang terhadap Modal.

(a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

(b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas



Gambar II-60 Rasio Solvabilitas Kabupaten Sumenep 2020-2024

Sumber: LKPD Kab. Sumenep 2020-2024, diolah

Hutang yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir hanya bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek. Sehingga nilai hutang yang diperhitungkan dalam rasio solvabilitas pada pembahasan ini dengan hutang yang diperhitungkan dalam rasio likuidias pada pembahasan sebelumnya menunjukan nilai yang sama. Akan tetapi yang membedakan adalah, rasio solvabilitas tidak hanya membandingkan nilai hutang terhadap aset lancar melainkan membandingkan nilai total hutang terhadap total keseluruhan aset dan total kekayaan bersih (ekuitas/modal).

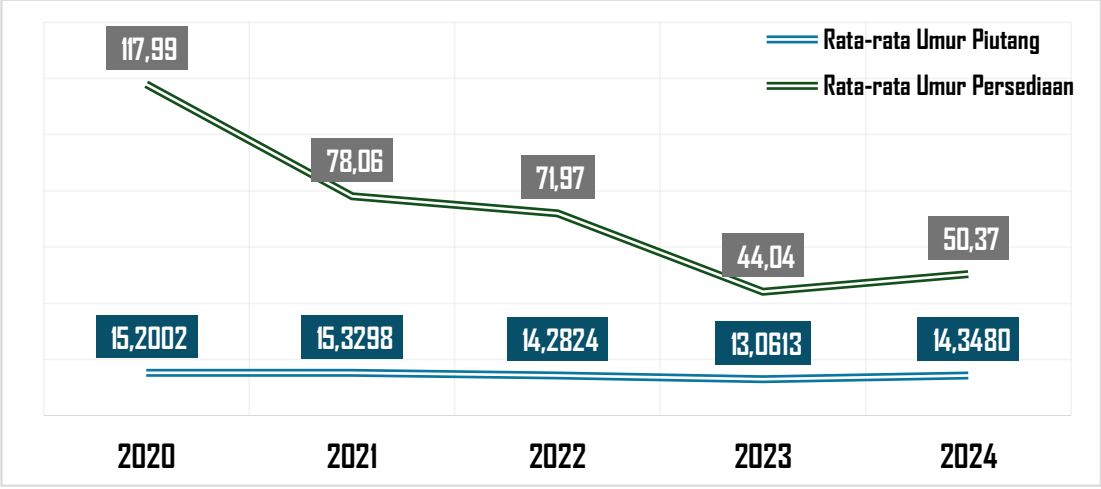
Modal atau Ekuitas yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah adalah nilai yang muncul atas selisih antara nilai aset dengan hutang (kewajiban). Adapun kewajiban yang dimiliki Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir hanya berkisar 1%-2% dibandingkan total nilai asetnya. Sehingga Ekuitas yang dimiliki Kabupaten Sumenep juga menunjukan nilai yang tidak jauh beda dari nilai seluruh asetnya. Oleh karenanya angka yang muncul pada kedua jenis rasio solvabilitas menunjukan angka yang selaras pada setiap tahunnya.

Jika dilihat berdasarkan tren nilainya rasio solvabilitas Kabupaten Sumenep 5 tahun terakhir menunjukan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Semakin rendah angka rasio hutang terhadap total aset maka dapat diartikan semakin kecil pula pengaruh hutang terhadap pembiayaanya. Begitu juga dengan rasio hutang terhadap modal, semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan

bahwa daerah tersebut semakin mandiri, yaitu tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain.Secara keseluruhan nilai rasio solvabilitas Kabupaten Sumenep berada pada angka kurang dari 2% dengan capaian paling baik pada tahun 2021 dimana pengaruh hutang terhadap aset dan modalnya sebesar 0.8%.

2.2.2.3.3 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Sedangkan rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun. Hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif. Berikut merupakan rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan Kabupaten Sumenep 2020-2024:



Gambar II-61 Rasio Aktivitas Kabupaten Sumenep 2020-2024

Sumber: LKPD Kab. Sumenep 2020-2024, diolah

1. **Rata-rata Umur Piutang**

Rata-rata umur piutang, adalah rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Rumus perhitungan rata-rata umur piutang yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang*

Keterangan :

- Perputaran piutang = pendapatan daerah / rata-rata piutang pendapatan daerah.
- Rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2

Rata-rata umur piutang Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir berkisar pada 13 hari hingga 15 hari. Pada tiga tahun pertama, lama waktu untuk melunasi piutang terlihat mengalami kenaikan lalu ditahun 2022 mengalami penurunan dari 15 hari menjadi 14 hari. Kondisi ini dikarenakan adanya peningkatan pada rata-rata piutang dalam 1 tahun serta Pendapatan Daerah yang sedikit mengalami penurunan ditahun 2022. Akan tetapi pada 2 tahun terakhir (2023-2024), seiring dengan menurunnya rata-rata piutang dan meningkatnya nilai Pendapatan Daerah maka lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi piutang kembali menurun menjadi lebih cepat pada 14 hari menjadi 13 hari, namun ditahun 2024 sedikit mengalami peningkatan kembali menjadi 14 hari. Kondisi ini menjadi progress yang positif dengan semakin singkatnya waktu piutang tertagih, meskipun ditahun 2024 mengalami sedikit peningkatan.

2. ***Rata-rata Umur Persediaan***

Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Rumus perhitungan rata-rata umur persediaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan*

** Keterangan :*

- Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun : rata-rata nilai persediaan.
- Rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2

Rata-rata umur persediaan Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir terlihat terus menurun. Yakni dari lama waktu 118 hari (sekitar 3 bulan 3 minggu) di tahun 2020 dan menurun signfikan menjadi sebesar 78 hari (sekitar 2 bulan 18 hari) di tahun 2021 kemudian menurun pada tiga tahun berikutnya hingga pada tahun 2023 Rata-rata umur persediaan Kabupaten Sumenep menjadi 44 hari atau sekitar 1 bulan 2 minggu. Namun, ditahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 50 hari atau sebesar 1 bulan 20 hari. Semakin kecil nilai Rata-rata umur persediaan mengindikasikan semakin rendahnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan persediaan yang tertanam untuk memberikan pelayanan publik. Adapun nilai persediaan yang dimiliki Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebesar Rp. 43,827,573,95.37 yang kemudian menunjukan tren menurun hingga pada tahun 2023 menjadi Rp. 27,516,877,611.78. Sedangkan Nilai Persediaan yang Digunakan dalam Satu Tahun menunjukan tren yang meningkat dari Rp. 125,562,811,456.07 di tahun 2020 menjadi Rp. 263,495,166,503.36 di tahun 2023.

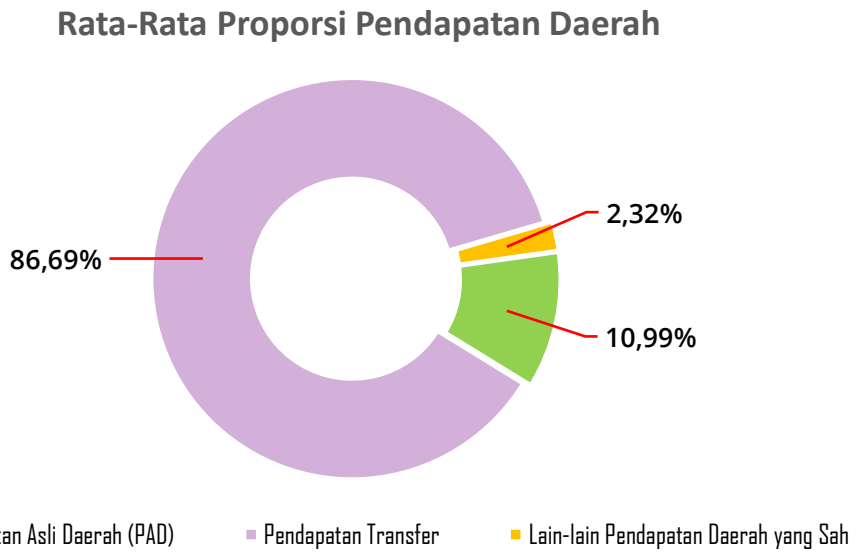
2.2.3 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja *(performance budget)* yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

2.2.3.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

2.2.3.1.1 PROPORSI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 86,69%. Sedangkan sisanya sebesar 10,99% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar 2,32% berasal dari Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perbandingan proporsi secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar II-62 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025 *(Diolah)*

Secara lebih rinci proporsi masing-masing komponen pembentuk PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II-63 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Proporsi (%)					Rata-rata Proporsi (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**11.23%**	**10.50%**	**10.27%**	**11.55%**	**11.39%**	**10.99%**
1.1.1.	Pajak daerah	1.40%	1.61%	1.96%	1.85%	2.01%	1.77%
1.1.2.	Retribusi daerah	0.78%	0.42%	0.40%	0.48%	8.37%	2.09%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0.68%	0.69%	0.67%	0.59%	0.51%	0.63%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	8.37%	7.78%	7.24%	8.62%	0.50%	6.50%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**85.65%**	**85.79%**	**85.77%**	**87.91%**	**88.33%**	**86.69%**

No.	Uraian	Proporsi (%)					Rata-rata Proporsi (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**80.01%**	**79.39%**	**79.44%**	**80.81%**	**81.84%**	**80.30%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	64.17%	64.98%	65.03%	66.90%	67.97%	65.81%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	4.43%	6.25%	7.11%	5.41%	4.46%	5.53%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	47.08%	44.94%	44.70%	43.75%	44.61%	45.01%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	12.67%	13.80%	13.21%	17.75%	18.91%	15.27%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.05%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	15.84%	14.41%	14.41%	13.91%	13.60%	14.43%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**5.63%**	**6.41%**	**6.33%**	**7.09%**	**6.49%**	**6.39%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	4.57%	5.79%	5.72%	6.47%	5.89%	5.69%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.06%	0.62%	0.61%	0.62%	0.60%	0.70%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**3.12%**	**3.71%**	**3.96%**	**0.54%**	**0.29%**	**2.32%**
1.3.1	Hibah	3.12%	0.12%	1.09%	0.54%	0.29%	1.03%
1.3.2	Dana darurat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan	0.00%	3.59%	2.87%	0.00%	0.00%	1.29%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025 (Diolah)

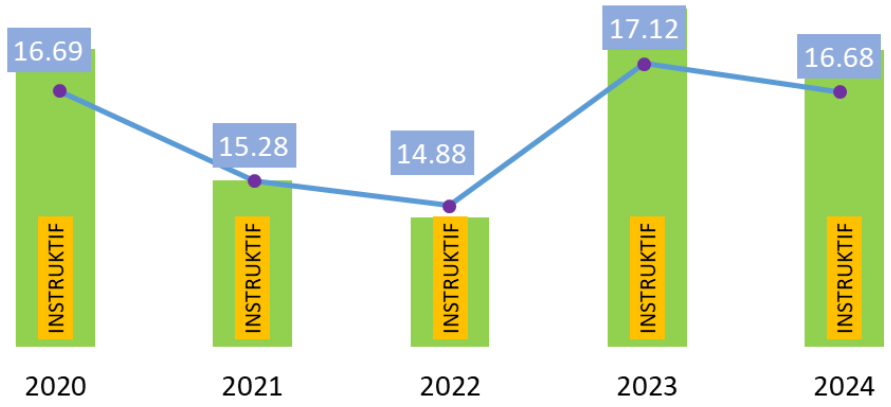
Melihat lebih rinci pada proporsi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep maka dana perimbangan merupakan komponen dengan proporsi paling tinggi baik terhadap Pendapatan Transfer maupun terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Dalam kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024), Dana perimbangan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan sebesar 65,81%. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa Kabupaten Sumenep masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai pendapatan terbesar untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana bagi hasil. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang fluktuatif, tetapi menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2020 yang memiliki proporsi sebesar 11,23% menjadi 11,39% pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Sumenep telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah.

Pada sisi pendapatan daerah, analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio

Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Analisis Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

A. RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut disajikan data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 - 2024) dan kriteria dari rasio tersebut:



Gambar II-63 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 202*5 (Diolah)*

Tabel II-64 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Tinggi	75 - 100	Delegatif

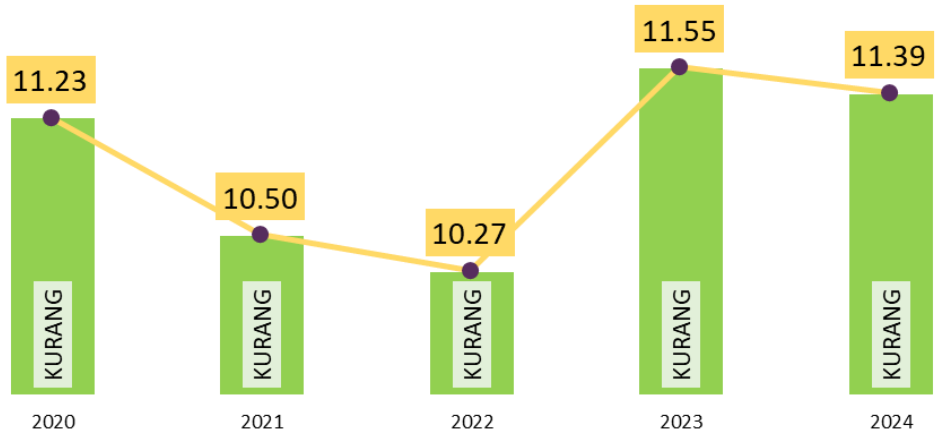
Berdasarkan grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berada pada range angka 14,88% - 17,12%. Jika angka tersebut disandingkan dengan tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka menunjukkan kemampuan keuangan Kabupaten Sumenep dalam membiayai rumah tangganya selama 5 tahun (2020 - 2024) masih sangat rendah serta memiliki pola hubungan yang instruktif karena berada pada range persentase kemandirian < 25% (peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah/ daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Hal ini menggambarkan kemampuan Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 yang sangat rendah dan instruktif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sumenep masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Dana Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan tingginya proporsi Pendapatan Transfer yang mendominasi besaran sumber pendapatan Sumenep yakni dengan rata-rata proporsi sebesar 86,69%.

Melihat tren nilai Kemandirian Daerah Kabupaten Sumenep yang menunjukkan adanya fluktuatif pada setiap tahunnya, maka hal ini mengindikasikan terus berkurangnya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Pendapatan Transfer dalam hal pengelolaan keuangan daerah, serta mengindikasikan adanya upaya peningkatan PAD di daerah. Hal ini sesuai dengan tren yang muncul pada realisasi PAD Kabupaten Sumenep, dimana terdapat tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,99%, terutama pada tahun 2024 dimana kemampuan keuangan Kabupaten sumenep meningkat.

B. RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal

menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Berikut tersaji data Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) beserta kriterianya:



Gambar II-64 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep 202*5 (Diolah)*

Tabel II-65 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

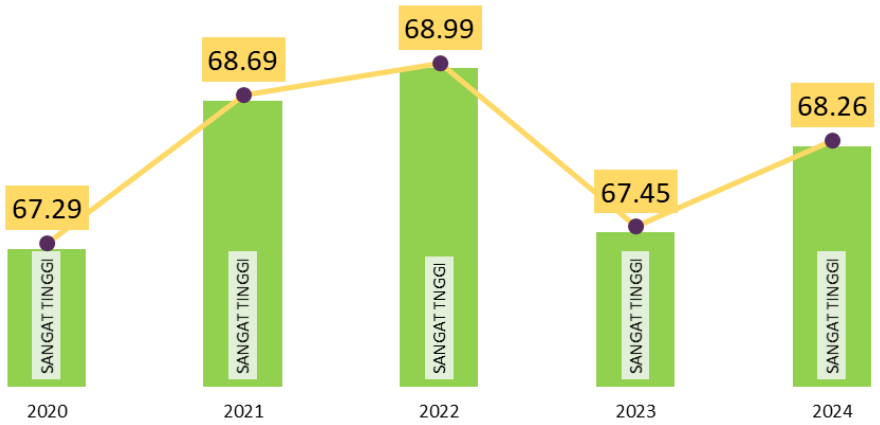
Sejalan dengan nilai yang muncul pada Rasio Kemandirian Daerah, nilai yang muncul pada Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sumenep pada 5 tahun terakhir (2020 - 2024) berada pada range angka 10,27% - 11,55% yang menunjukan tingkat

desentralisasi fiskal kurang karena berada pada range persentase PAD terhadap Pendapatan sebesar 10,01% - 20,00%.

Pada tahun 2020 kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumenep dalam memaksimalkan PAD terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya masih kurang. Akan tetapi, hingga tahun 2024 menunjukan adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun masih dalam kategori kurang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan PAD menjadi sebesar 11,39% pada tahun 2024. Kedepannya diperlukan konsistensi usaha peningkatan PAD secara lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kontibusinya dalam menjalankan fungsi desentralisasi yang lebih baik dalam sisi keuangan daerah.

C. RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Berikut tersaji data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) beserta kriterianya:



Gambar II-65 Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 202*5 (Diolah)*

Tabel II-66 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

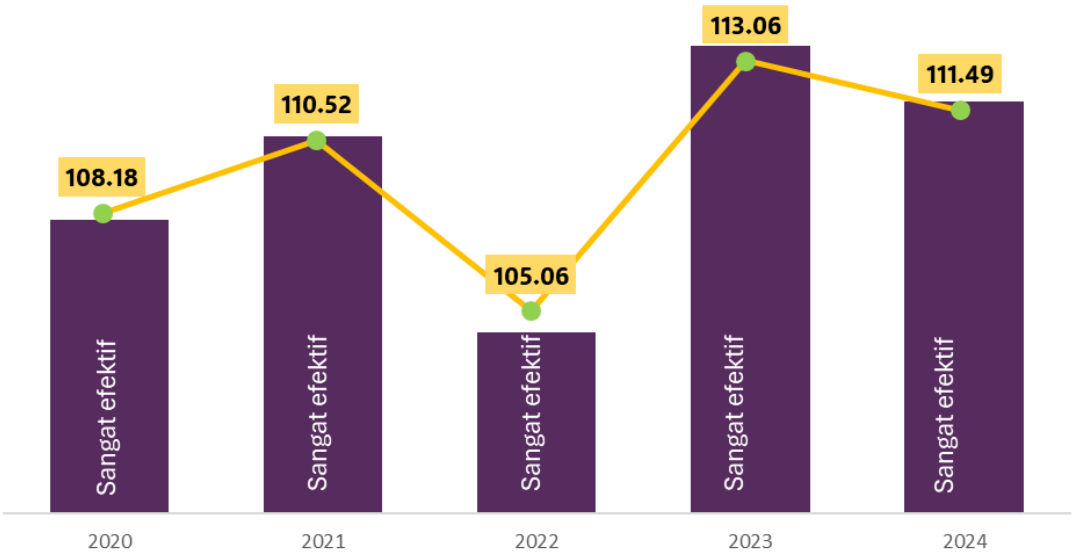
Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Secara garis besar nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep menunjukan tren yang fluktuatif dengan adanya peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Yakni dengan kondisi pada tahun pertama sebesar 67,29%, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 68,69%. Pada tahun 2022 nilai ketergantungan daerah kembali meningkat pada angka 68,99% dan mengalami penurunan menjadi 67,45% pada tahhun 2023. Namun pada tahun 2024 nilai ketergantungan daerah kembali meningkat menjadi 68,26%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep yang muncul pada range antara 67,29% - 68,99% dan masih menunjukan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi karena berada pada persentase lebih dari 50% (> 50%). Sehingga diperlukan konsistensi optimalisasi PAD serta usaha pengurangan ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun provinsi agar kedepannya rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat perlahan berubah menjadi "tinggi" ataupun "cukup".

D. RASIO EFEKTIVITAS

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Berikut tersaji data Rasio Efektivitas Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) beserta kriterianya:



Gambar II-66 Rasio Efektivitas Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025 (Diolah)

Tabel II-67 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

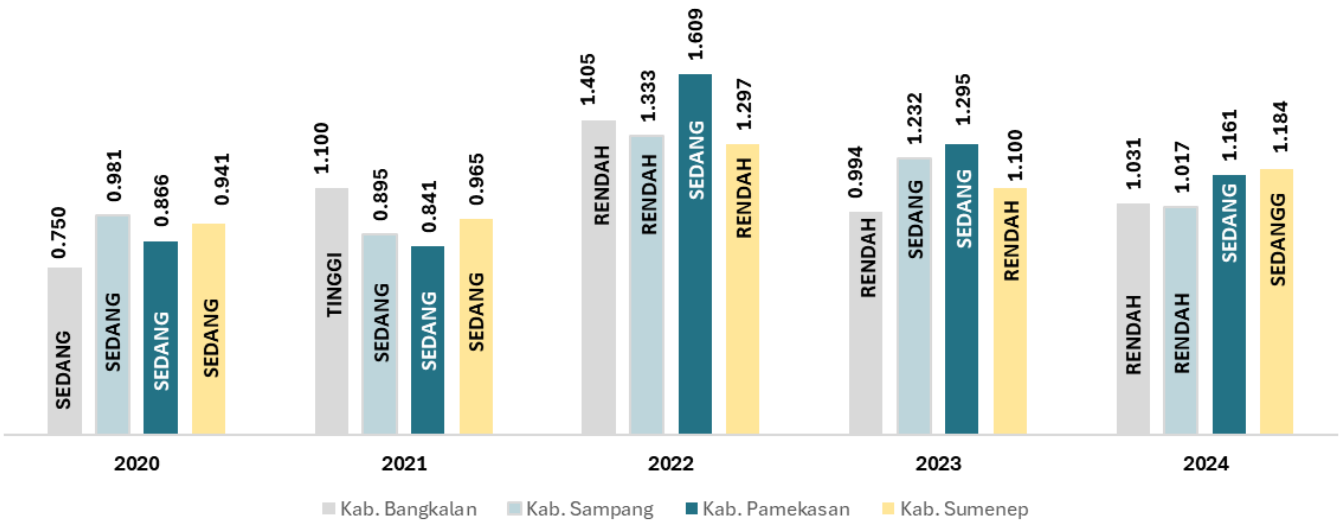
Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria

Kriteria	
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Sumenep pada tahun 2020-2024 menunjukan nilai >100%, sehingga pelaksanaan PAD pada tahun tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 atau sebesar 113,06%. Perkembangan yang progresif terlihat pada nilai efektivitas yang muncul pada tahun 2022 dan 2023. Dimana pada tahun 2022 dengan angka sebesar 105,06% kemudian meningkat menjadi 113,06% pada tahun 2023. Sehingga dapat diartikan bahwa PAD yang dimiliki Kabupaten Sumenep dapat direalisasikan dengan sangat efektif karena telah menunjukan nilai yang berada di atas 100%.

E. INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/ atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tersaji data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sumenep dan daerah sekitarnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024):



Gambar II-67 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 202*5 (Diolah)*

Tabel II-68 Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan PMK Nomor 84/PMK.07/2023

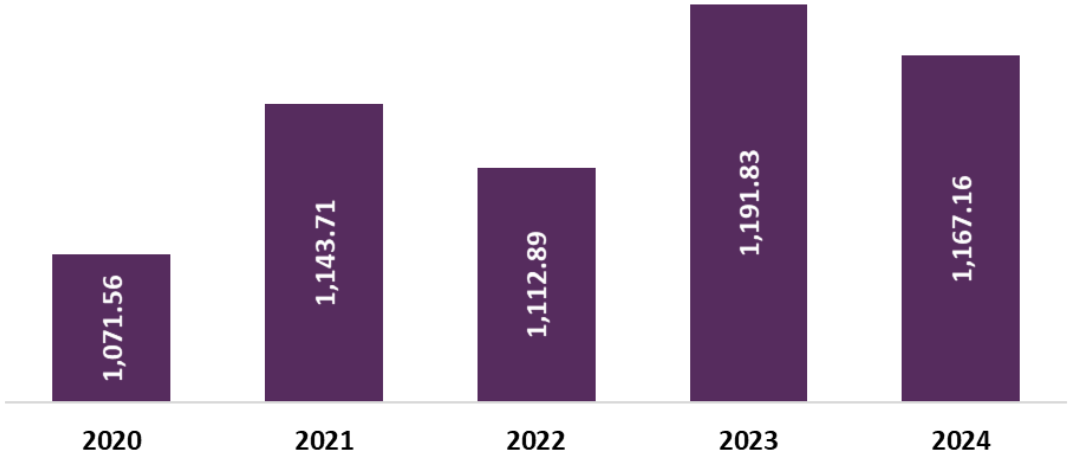
Nilai IKFD	Kriteria
IKFD < 0,947	Sangat rendah
0,947 ≤ IKFD < 1,203	Rendah
1,203 ≤ IKFD < 1,459	Sedang
1,459 ≤ IKFD < 1,715	Tinggi
1,715 < IKFD	Sangat tinggi

Berdasarkan data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Sumenep dan tiga kabupaten lainnya yaitu Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, terlihat bahwa nilai IKFD Kabupaten Sumenep cenderung fluktuatif sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, IKFD Kabupaten Sumenep tercatat sebesar 0,941 yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,965 pada tahun 2021 dengan kategori yang sama. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang cukup signifikan dengan nilai 1,297 yang berada dalam kategori rendah. Setelah itu, IKFD kembali turun menjadi 1,100 pada tahun 2023 dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2024 menjadi 1,184, meskipun tetap berada dalam kategori rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Sumenep pernah mencapai kategori sedang pada tahun 2020 dan 2021, tetapi ketidakstabilan nilai IKFD menjadi tantangan yang perlu diatasi agar kapasitas fiskal daerah lebih kuat dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, yaitu Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, terlihat bahwa Kabupaten Sumenep memiliki capaian IKFD yang relatif lebih rendah. Kabupaten Bangkalan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 0,750 di tahun 2020 menjadi 1,405 di tahun 2022, meskipun kemudian mengalami penurunan menjadi 0,994 pada tahun 2023 dan sedikit meningkat ke angka 1,031 pada tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Sampang mengalami peningkatan pesat dari 0,981 di tahun 2020 menjadi 1,333 pada tahun 2022, kemudian menurun hingga 1,017 di tahun 2024. Kabupaten Pamekasan juga menunjukkan peningkatan stabil dari 0,866 di tahun 2020 menjadi 1,609 pada tahun 2022, tetapi menurun ke angka 1,161 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa kabupaten mengalami penurunan nilai IKFD, Kabupaten Sumenep masih perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya agar dapat bersaing dan memperbaiki kategori IKFD dari rendah menjadi sedang atau bahkan lebih tinggi di masa mendatang.

F. RASIO RUANG FISKAL

Rasio Ruang Fiskal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapasitas fiskal suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya setelah mengurangi beban kewajiban tertentu seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Indikator ini sangat penting untuk melihat seberapa besar ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mendanai program-program pembangunan serta kebijakan-kebijakan strategis yang telah direncanakan. Rasio ruang fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan keterbatasan fiskal yang dapat menghambat optimalisasi pembangunan di wilayah tersebut.



Gambar II-68 Rasio Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, *2025 (Diolah)*

Berdasarkan data Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024, terlihat adanya kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2020, Rasio Ruang Fiskal tercatat sebesar 1.071,56. Pada tahun 2021, rasio ini meningkat menjadi 1.143,71, namun, pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 1.112,89. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan tertinggi selama lima tahun dengan rasio sebesar 1.191,83, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 1.167,16. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan kapasitas fiskal Kabupaten Sumenep dalam mengalokasikan anggaran untuk mendanai pembangunan secara optimal. Hal ini perlu diantisipasi dengan strategi yang tepat agar kapasitas fiskal daerah dapat terus ditingkatkan.

2.2.3.1.2 PROPORSI BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja *(performance budget)* yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja terbagi ke dalam 4 komponen belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II-69 Rasio Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Proporsi (%)					Rata-rata Proporsi (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
2.1	**Belanja Operasi**	**62,94%**	**65,36%**	**68,55%**	**68,59%**	**66,46%**	**66,38%**
2.1.1	Belanja Pegawai	34,58%	38,85%	40,14%	35,44%	34,74%	36,75%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20,25%	20,31%	22,42%	25,57%	23,98%	22,51%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,13%	0,04%
2.1.5	Belanja Hibah	7,56%	5,47%	5,63%	7,23%	7,45%	6,67%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,56%	0,73%	0,36%	0,27%	0,15%	0,42%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	**Belanja Modal**	**14,68%**	**11,57%**	**8,33%**	**9,13%**	**12,38%**	**11,22%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,30%	0,86%	0,09%	0,09%	0,28%	0,32%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,07%	2,55%	2,45%	2,72%	3,36%	2,83%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,78%	3,33%	2,45%	2,83%	5,20%	3,72%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,43%	4,65%	3,15%	3,18%	3,29%	4,14%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,11%	0,19%	0,21%	0,31%	0,25%	0,21%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**2,35%**	**0,75%**	**0,53%**	**0,05%**	**0,05%**	**0,75%**
2.4	**Belanja Transfer**	**20,02%**	**22,31%**	**22,60%**	**22,22%**	**21,11%**	**21,65%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,08%	0,14%	0,15%	0,22%	0,21%	0,16%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	19,94%	22,17%	22,44%	22,01%	20,90%	21,49%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Sumenep, 2025 (Data Diolah)*

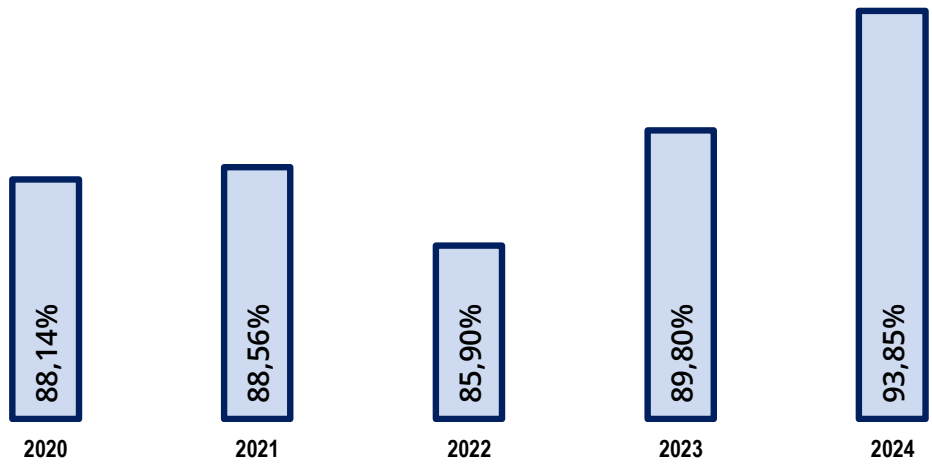
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi realisasi belanja Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Proporsi realisasi Belanja Operasi Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 tercatat memiliki rata-rata diatas 66,38%. Komponen realisasi belanja dengan rata-rata terbesar berada pada belanja pegawai (Belanja Operasi) yaitu sebesar 36,75% dari total belanja daerah, artinya realisasi belanja pegawai yang bersifat rutin dan kurang berkaitan langsung dengan pembangunan masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (secara umum) yang memiliki keterkaitan lebih dekat dengan pembangunan.

Di antara 4 komponen belanja daerah Kabupaten Sumenep, Proporsi Belanja Operasi memiliki nilai rata-rata realisasi paling besar. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, proporsi realisasi belanja operasi terbesar tercatat pada tahun 2023 yang mencapai 68,59%. Sedangkan, proporsi realisasi Belanja Modal Kabupaten Sumenep pada tahun

2020 hingga 2024 tercatat memiliki nilai rata-rata 11,22%. Proporsi realisasi Belanja modal memiliki nilai paling besar berada pada tahun 2020 yang mencapai 14,68%. Sedangkan komponen belanja dengan proporsi rata-rata realisasi terendah berada pada belanja Belanja Modal Aset Lainnya yang merupakan komponen Belanja Modal. Secara keseluruhan, pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sumenep pada masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio yaitu sebagai berikut:

A. CAPAIAN REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah menggambarkan ketercapaian realisasi belanja daerah berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai rasio menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hasil perhitungan rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir (2020-2024) secara lebih jelas adalah sebagai berikut:



Gambar II-69 Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025 (Data Diolah)

Sesuai dengan grafik di atas, pada tahun 2024 nilai rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Sumenep mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 93,85%. Nilai rasio pada tahun 2024 ini merupakan puncak dari capaiannya selama 5 tahun terakhir yang cenderung fluktuatif. Meskipun rasio tersebut

mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 85,90% atau sebesar 3,9%, namun kondisi tersebut menggambarkan bahwa realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumenep selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 - 2024) telah menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2023.

B. REALISASI DAN PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR.

Analisis ini memberikan gambaran mengenai proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total pengeluaran daerah. Semakin tinggi angka proporsinya maka menunjukan semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk operasional pemenuhan kebutuhan aparatur dalam pengeluaran daerah. Adapun yang di maksud dengan pengeluaran daerah adalah nilai pada Belanja Daerah ditambah dengan nilai Pengeluaran Pembiayaan.

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024 menunjukan tren yang meningkat. Yakni dari Rp. 1,024,019,991,431.45 di tahun 2020 menjadi Rp. 1,207,069,803,321.00 di tahun 2024 atau tumbuh sebesar 4.23%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, dimana Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep meningkat 8.48% dari tahun 2023. Pada tahun 2024 tersebut, peningkatan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep paling banyak dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa komponen belanja pemenuhan kebutuhan aparatur seperti Belanja Honorarium PNS yang meningkat 174.46% dari tahun 2023, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS yang meningkat 50,10% dari tahun 2023, Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) yang meningkat 35.86% dari tahun 2023 serta Belanja Tambahan Penghasilan yang meningkat 15,38% dari tahun 2023.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan proporsinya, maka Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan merupakan dua jenis belanja yang paling dominan pada Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, Belanja Gaji dan Tunjangan mencapai proporsi 73% dari keseluruhan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep. Dominasi Belanja Gaji dan Tunjangan kemudian perlahan menurun hingga pada tahun 2024, posisi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar 52% dari keseluruhan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep.

Sedangkan pada Belanja Tambahan Penghasilan, pada tahun 2020 berada pada proporsi 8% terhadap total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep yang kemudian pada lima tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 Belanja Tambahan Penghasilan mencapai proporsi sebesar 22% dari total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep. Sehingga pada tahun 2024 tersebut, sebesar 74% Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep berbentuk Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan.

Berikut merupakan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 – 2024:

Tabel II-70 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	751,445,199,597.80	597,971,271,325.76	609,228,968,122.00	599,991,316,255.00	625,487,761,087.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	84,106,264,289.00	239,620,440,643.00	239,622,736,986.00	227,790,153,951.00	262,832,019,708.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	9,360,000,000.00	28,287,503,874.00	27,904,633,644.00	28,890,788,975.00	29,331,963,967.00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah ASN	1,590,514,355.30	1,527,755,267.00	1,611,016,837.00	936,960,936.00	0.00
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Non ASN	0.00	0.00	296,000,445.00	335,948,942.00	163,772,805.00
7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ASN	1,145,367,236.25	233,209,129.00	216,731,642.00	255,855,661.00	0.00
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Non ASN	0.00	0.00	12,146,250.00	24,137,170.00	16,965,000.00
9	Belanja Honorarium PNS**)	8,230,275,500.00	5,991,502,491.00	5,607,418,186.00	1,985,850,000.00	5,450,361,533.00
10	Belanja Honorarium Non-PNS	2,980,050,000.00	13,540,321,000.00	10,181,458,500.00	11,979,027,500.00	11,290,606,500.00
11	Belanja Uang Lembur**)	571,201,000.00	424,665,000.00	835,320,925.00	517,595,000.00	546,590,500.00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		-			126,930,000.00
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	1,719,552,617.00	9,460,958,767.00	5,866,680,844.00	4,844,427,990.00	7,271,475,905.00
14	Belanja premi asuransi kesehatan	50,401,076,300.00	56,087,301,840.00	52,133,434,008.00	86,136,523,003.00	94,202,215,815.00
15	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	12,236,286,428.00	13,020,289,648.00	15,066,232,091.00	17,083,547,469.00	15,884,839,026.00

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
16	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	1,189,562,692.00	412,250,000.00	5,361,562,055.00	1,224,308,500.00	1,202,226,700.00
17	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1,007,565,350.00	2,282,448,942.00	1,474,306,125.00	202,556,155.00	103,898,832.00
18	Belanja perjalanan dinas**)	53,610,455,392.00	44,660,356,513.00	60,916,260,855.00	59,977,780,364.00	57,347,103,217.00
19	Belanja perjalanan pindah tugas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Belanja Pemulangan Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	44,426,620,674.10	60,894,244,152.38	57,821,545,587.70	70,521,348,525.00	95,811,072,726.00
TOTAL		**1,024,019,991,431.45**	**1,074,414,518,592.14**	**1,094,156,453,102.70**	**1,112,698,126,396.00**	**1,207,069,803,321.00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumenep, 2025

Adapun jika dibandingkan dengan total pengeluaran daerah (Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan), proporsi belanja yang diperuntukan pada pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024 berada pada angka 39% hingga 46%. Yakni sebesar 39.09% pada tahun 2020 kemudian mengalami fluktuasi hingga mencapai proprosi paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 44.79%. pada tahun 2023 dan 2024, proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sumenep terlihat menurun pada angka 42.35% dan 41.81%. Berikut rincian proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumenep terhadap Total Pengeluaran pada tahun 2020-2024:

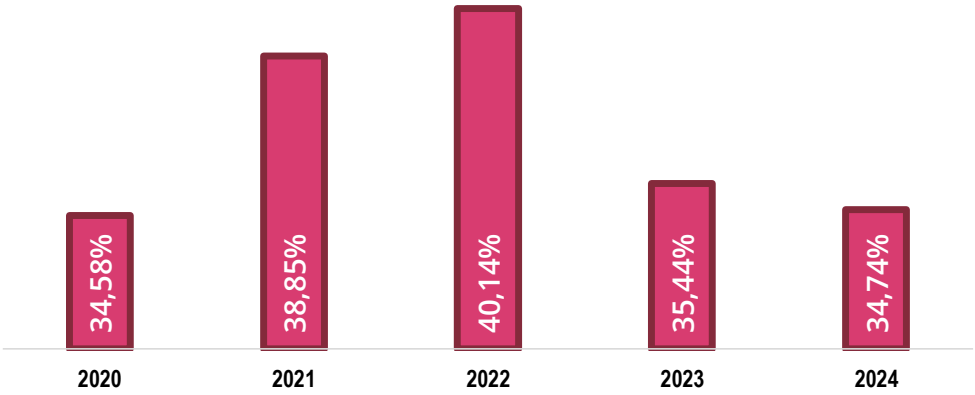
Tabel II-71 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2020	1,024,019,991,431.45	2,619,767,758,853.27	**39.09%**
2	Tahun Anggaran 2021	1,074,414,518,592.14	2,435,690,707,126.47	**44.11%**
3	Tahun Anggaran 2022	1,094,156,453,102.70	2,389,552,041,997.17	**45.79%**
4	Tahun Anggaran 2023	1,112,698,126,396.00	2,627,564,241,457.00	**42.35%**
5	Tahun Anggaran 2024	1,207,069,803,321.00	2,886,976,570,211.57	**41.81%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumenep, 2025

C. PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA

Pada proporsi ini menunjukkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka proporsi belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada grafik di bawah ini:



Gambar II-70 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

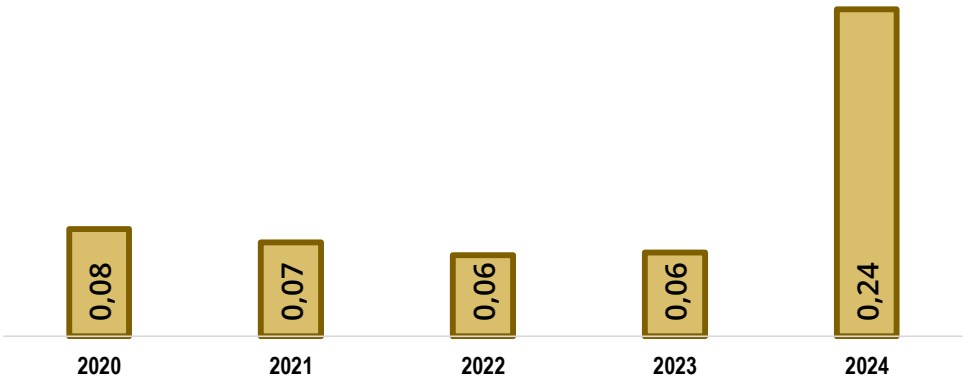
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025 (Data *Diolah)*

Berdasarkan grafik di atas, proporsi belanja pegawai terhadap total realisasi belanja Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 yang cenderung fluktuatif. Proporsi belanja pegawai Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 tercatat sebesar 34,58% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022 hingga mencapai 40,14%. Meskipun ditahun 2021-2022 mengalami peningkatan, rata-rata proporsi belanja pegawai terhadap total belanja tahun 2020 hingga 2024 masih berada dibawah 50%, artinya kondisi tersebut masih relatif baik di mana porsi anggaran tidak didominasi oleh belanja pegawai atau belanja yang bersifat pengeluaran rutin dan tidak berpengaruh terhadap kinerja program pembangunan secara langsung. Sementara tahun 2023-2024 proporsi belanja pegawai terhadap total belanja di Kabupaten Sumenep mengalami penurunan kembali, ditahun 2023 menjadi sebesar 35,44% dan kemudian di 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 34,74%.

D. RASIO BELANJA DAERAH TERHADAP PDRB

Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar belanja pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/ kota) dalam hubungannya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi di suatu daerah. Tujuan dari menghitung rasio ini adalah untuk mengukur tingkat ketergantungan ekonomi

daerah terhadap belanja pemerintah, serta untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam menghadapi pendapatan dan PDRB yang ada. Rasio belanja daerah terhadap PDRB daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada grafik di bawah ini:



Gambar II-71 Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

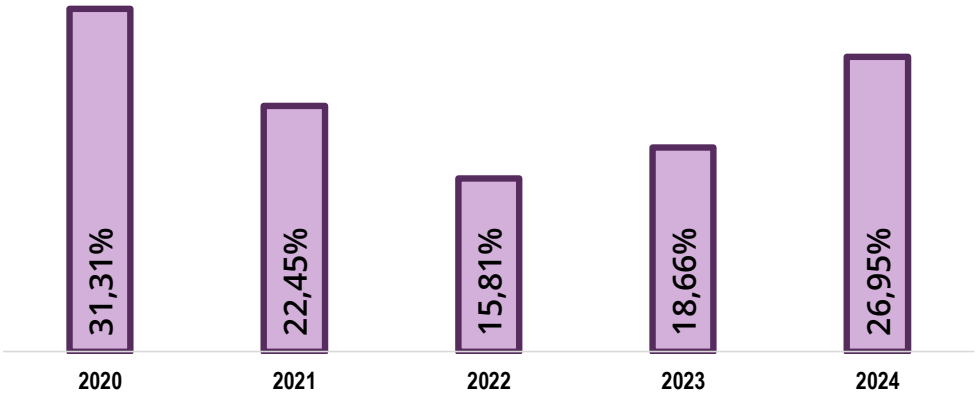
Sumber: Badan Pendapatan, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep,* 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa rasio belanja daerah terhadap PDRB Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir (2020-2024) cukup fluktuatif berada di kisaran angka 0,06 hingga 0,24. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,24 dibandingkan dengan capaian tahun 2020-2023. Capaian ditahun 2020 yang sebesar 0,08% kemudian terus mengalami penurunan hingga ditahun 2022 dan 2023 memiliki nilai yang sama atau stagnan yaitu sebesar 0,06%. Ditahun 2024, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB mengalami peningkatan yang berarti belanja pemerintah daerah sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi di Kabupaten Sumenep.

E. PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP DANA TRANSFER UMUM

Proporsi Belanja Modal merupakan gambaran seberapa besar anggaran suatu daerah digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah dan panjang, mengingat belanja modal yang secara umum diperuntukkan bagi pembangunan fisik terutama infrastruktur akan menjadi pengungkit *(leverage)* di berbagai sektor pembangunan

lain. Infrastruktur memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan daerah, terutama daerah di kawasan Jawa Timur seperti Kabupaten Sumenep. Adapun proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar II-72 Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum

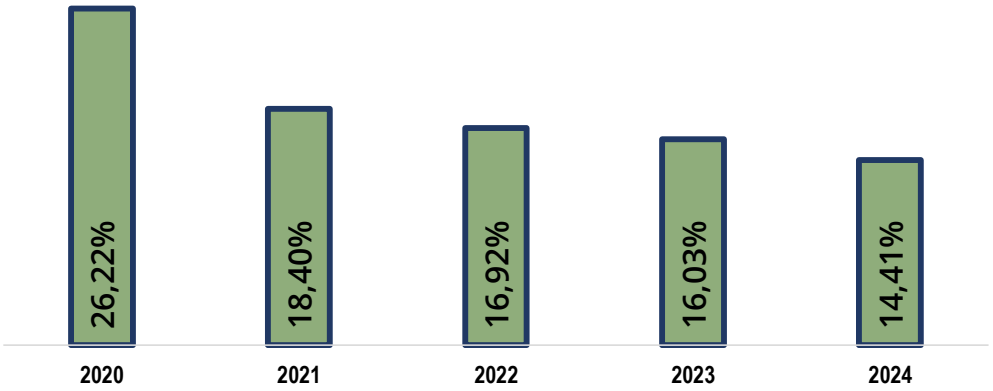
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2025 (Data Diolah)

Proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Sumenep memiliki capaian sebesar 31,31%. Namun, ditahun 2021 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi sebesar 22,45% dan terus mengalami panurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 15,81%. Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan pada proporsi belanja modal Kabupaten Sumenep menjadi sebesar 18,66%. Serta ditahun 2024, proporsi belanja modal terhadap dana transfer umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 26,95%. Maka ditahun 2024, belanja modal di Kabupaten Sumenep diperuntukkan untuk pembangunan fisik terutama infrastruktur.

F. PROPORSI SILPA TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP BELANJA DAERAH

Proporsi SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan

anggarannya. Proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar II-73 Proporsi SiLPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan *Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep,* 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan pada grafik di atas, tren proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024 masuk dalam kategori yang menurun. Pada tahun 2020 angka SiLPA Kabupaten Sumenep memiliki capaian tertinggi sebesar 26,22% dan kemudian pada tahun 2021 hingga tahun 2024 secara berturut-turut mengalami penurunan. Capaian terendah terjadi pada tahun 2024 dengan angka sebesar 14,41%. Dengan demikian maka Penurunan SiLPA bisa menandakan bahwa pengelolaan anggaran publik menjadi lebih efisien. Artinya, pemerintah daerah atau instansi terkait mampu menggunakan anggaran mereka secara lebih tepat waktu dan efektif, tanpa terlalu banyak sisa anggaran yang tidak digunakan pada akhir periode anggaran.

G. PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran dan

belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal. Realisasi dan rata-rata pertumbuhan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II-72 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2024	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	**Total Belanja Wajib dan Mengikat**	**1,389,510,192,364.06**	**1,462,303,825,104.86**	**1,483,295,578,263.00**	**1,497,708,145,733.00**	**1,592,798,305,239.00**	**3.50%**
1	Belanja Pegawai	880,008,271,077.35	928,875,780,834.86	949,023,686,656.00	920,527,630,299.00	990,862,445,039.00	3.09%
2	Belanja Bagi Hasil	2,004,732,906.71	3,302,334,000.00	3,553,313,000.00	5,618,663,220.00	5,997,109,000.00	34.30%
3	Belanja Bantuan Keuangan	507,497,188,380.00	530,125,710,270.00	530,718,578,607.00	571,561,852,214.00	595,938,751,200.00	4.13%
B	**Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**	**75,000,000,000.00**	**45,000,000,000.00**	**25,000,000,000.00**	**30,300,000,000.00**	**35,000,000,000.00**	**-11.93%**
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00%
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	75,000,000,000.00	20,000,000,000.00	-	5,300,000,000.00	10,000,000,000.00	21.16%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0.00%
4	Pemberian Pinjaman						0.00%
5	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	0.00%
	TOTAL (A+B)	**1,464,510,192,364.06**	**1,507,303,825,104.86**	**1,508,295,578,263.00**	**1,528,008,145,733.00**	**1,627,798,305,239.00**	**2.71%**

Sumber: LKPD Kabupaten Sumenep 2020-2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas, Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Sumenep bersumber dari beberapa komponen Belanja Daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta dari beberapa komponen Pengeluaran Pembiayaan. Adapun komponen Belanja Daerah Kabupaten Sumenep yang termasuk dalam Pengeluaran Wajib dan Mengikat adalah Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan terdapat pengeluaran wajib dan mengikat berupa Pembentukan Dana Cadangan serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Belanja Wajib Mengikat serta Prioritas yang dimiliki Kabupaten Sumenep pada lima tahun terakhir (2020-2024) terlihat mengalami peningkatan. Yakni dari Rp. 1,464,510,192,364.06 di tahun 2020 kemudian menjadi Rp. 1,627,798,305,239.00 di tahun 2024 atau tumbuh sebesar 2.71%. Kondisi ini dipengaruhi dengan adanya peningkatan pada komponen pengeluaran yang wajib dan mengikat yakni belanja pegawai, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan dimana masing-masing jenis belanja tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3.09%, 34.30% serta 4.13% dalam kurun waktu 2020-2024.

Sedangkan jika dilihat dari proporsinya, komponen Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas yang dimiliki Kabupaten Sumenep paling banyak bersumber dari Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Keuangan yang mencapai 61% dan 37% di tahun 2024. Sedangkan komponen paling kecil ada Belanja Bagi Hasil yang hanya mencapai proporsi 0.37% dari total Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas yang dimiliki Kabupaten Sumenep pada tahun 2024.

Lebih lanjut, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep dimasa mendatang, maka dibutuhkan proyeksi anggaran yang merupakan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi belanja yang wajib dan mengikat adalah perkiraan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada data historis yang merupakan belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sumenep seperti yang telah dibahas sebelumnya, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Berikut disajikan data hasil proyeksi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 hingga 2030.

Tabel II-73 Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029

No	Uraian	2024	Rata-rata Pertumbuhan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Total Belanja Wajib dan Mengikat**	**1,592,798,305,239.00**	**3.50%**	**1,757,938,289,767.00**	**1,535,087,626,121.25**	**1,548,429,185,232.22**	**1,546,939,293,421.81**	**1,553,966,803,409.09**	**1,535,327,825,106.78**
1	Belanja Pegawai	990,862,445,039.00	3.09%	1,206,041,075,337.00	990,596,911,691.25	983,440,414,173.91	968,862,445,039.00	963,692,550,388.00	943,135,784,138.85
2	Belanja Bagi Hasil	5,997,109,000.00	34.30%	9,840,000,000.00	9,840,000,000.00	10,811,507,254.62	11,120,784,248.61	11,830,061,242.59	12,184,963,079.87
3	Belanja Bantuan Keuangan	595,938,751,200.00	4.13%	542,057,214,430.00	534,650,714,430.00	554,177,263,803.69	566,956,064,134.20	578,444,191,778.50	580,007,077,888.06
B	**Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**	**35,000,000,000.00**	**-11.93%**	**-**	**45,000,000,000.00**	**30,000,000,000.00**	**45,000,000,000.00**	**30,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**
1	Pembentukan Dana Cadangan	25,000,000,000.00	0.00%	-	40,000,000,000.00	25,000,000,000.00	40,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10,000,000,000.00	21.16%	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	0.00%	-	-	-	-	-	
4	Pemberian Pinjaman		0.00%	-					
5	Pembayaran Pokok Utang	-	0.00%	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A+B)	**1,627,798,305,239.00**	**2.71%**	**1,757,938,289,767.00**	**1,490,087,626,121.25**	**1,518,429,185,232.22**	**1,501,939,293,421.81**	**1,523,966,803,409.09**	**1,530,327,825,106.78**

Sumber: LKPD Kabupaten Sumenep 2020-2024, diolah

2.2.3.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini dilaksanakan melalui analisis pada sumber penutup deficit rill, analisis pada realisasi SiLPA, analisis pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan serta analisis pada proyeksi pembiayaan daerah. Secara lebih rinci pembahasan pada masing-masing analisis pembiayaan tersebut akan dijelaskan pada poin-poin berikut:

2.2.3.2.1 ANALISIS SUMBER PENUTUP DEFISIT RILL

Deficit rill merupakan nilai yang muncul atas selisih antara Pendapatan Daerah dengan Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan). Sedangkan yang dimaksud oleh penutup deficit rill merupakan anggaran-anggaran yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Sehingga analisis pada sumber penutup deficit rill merupakan analisis yang dilaksanakan dengan membandingkan nilai defisit rill yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan dengan penutup defisit rill anggaran pada tahun tersebut. Sehingga analisis ini akan memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah serta proporsi masing-masing penutup defisit rill terhadap defisit rill yang di miliki Kabupaten Sumenep dalam setiap tahunnya. Secara lebih jelas, berikut tabel defisit rill dan penutup defisit rill Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir (2020-2024) beserta komponennya:

Tabel II-74 Defisit Riil Anggaran dan Penutup Defisit Ril Anggaran Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,317,331,681,482.57	2,407,606,540,913.55	2,406,116,363,646.98	2,585,188,972,667.12	2,670,522,371,039.65
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2,544,767,758,853.27	2,390,690,707,126.47	2,364,552,041,997.17	2,597,264,241,457.00	2,851,976,570,211.57
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	75,000,000,000.00	45,000,000,000.00	25,000,000,000.00	30,300,000,000.00	35,000,000,000.00
A	**Defisit riil**	**(302,436,077,370.70)**	**(28,084,166,212.92)**	**16,564,321,649.81**	**(42,375,268,789.88)**	**(216,454,199,171.92)**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	667,167,452,762.34	439,938,154,562.64	399,997,727,119.72	416,217,543,138.41	410,917,771,655.16
5	Pencairan Dana Cadangan	50,000,000,000.00	-	-	37,600,000,000.00	65,096,093,898.94
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	206,779,171.00	149,486,673.00	71,560,000.00	99,749,447.00	231,642,551.00
9	Penerimaan Kembali Investasi Daerah	25,000,000,000.00	-	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**742,374,231,933.34**	**440,087,641,235.64**	**400,069,287,119.72**	**453,917,292,585.41**	**476,245,508,105.10**
A-B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**439,938,154,562.64**	**412,003,475,022.72**	**416,633,608,769.53**	**411,542,023,795.53**	**259,791,308,933.18**

Sumber: LKPD Kabupaten Sumenep 20*20-2024*

Deficit rill Kabupaten Sumenep telihat menunjukan nilai yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir (2020-2024). Pada kurun waktu lima tahun tersebut, keuangan daerah Kabupaten Sumenep lebih sering menghasilkan defisit dari pada surplus. Pada tahun 2022, Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep dapat menunjukan nilai yang lebih tinggi dibanding pengeluaran daerah (Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan). Sehingga pada 2022 tidak terdapat deficit riil pada keuangan Kabupaten Sumenep melainkan terdapat Surplus sebesar Rp. 16,564,321,649.81. Sedangkan pada tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024 nilai Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumenep menunjukan nilai yang lebih besar dari Pendapatan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep, sehingga mengasilkan nilai deficit rill sebesar -Rp. 302,436,077,370.70, -Rp. 28,084,166,212.92, -Rp. 42,375,268,789.88 dan -Rp. 216,454,199,171.92. Peningkatan defisit rill yang cukup progresif pada tahun 2024 terjadi karena adanya peningkatan Belanja Daerah yang mencapai 9.81% sedangkan peningkatan Pendapatan Daerah hanya sebesar 3.30%.

Melihat pada data pengeluaran pembiayaan yang digunakan sebagai penutup deficit rill, menunjukan bahwa nilai pengeluaran pembiayaan tersebut masih lebih tinggi dibanding nilai deficit rill yang ada pada setiap tahunnya. Sehingga pada setiap tahunnya pengeluaran pembiayaan dapat meng-*cover* deficit rill dan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Kondisi penutup deficit rill Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024 didominasi oleh adanya SiLPA serta Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Investasi Daerah di beberapa tahun. Adapin jika dibandingkan dengan nilai Defisit Riil, proporsi masing-masing sumber penutup deficit rill tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II-75 Komposisi Penutup Defisit Rill Kabupaten Sumenep 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-220.60%	-1566.50%	2414.82%	-982.22%	-189.84%
2	Pencairan Dana Cadangan	-16.53%	0.00%	0.00%	-88.73%	-30.07%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-0.07%	-0.53%	0.43%	-0.24%	-0.11%
6	Penerimaan Kembali Investasi Daerah	-8.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Sumber: LKPD Kabupaten Sumenep 2020-2024, diolah

2.2.3.2.2 ANALISIS REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Sehingga analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Untuk memberikan gambaran tentang komposisi SiLPA Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari pelampauan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, serta sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Sedangkan untuk kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan tidak terdapat pada pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA tersebut harus diuraikan kembali pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan.

Berikut disajikan data terkait dengan sumber perolehan SiLPA Kabupaten Sumenep selama tahun 2020 hingga 2024:

Tabel II-76 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sumenep 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	**439,938,154,562.64**		**412,003,475,022.72**		**416,633,608,769.53**		**411,542,023,795.53**		**259,791,308,933.18**	
1	Pelampauan penerimaan PAD	19,681,979,132.94	4.47%	24,051,602,008.35	5.84%	11,888,469,861.98	2.85%	34,479,081,044.12	8.28%	31,329,659,252.09	12.06%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	23,564,937,236.00	5.36%	67,633,807,439.14	16.42%	39,526,569,424.00	9.49%	84,188,625,904.00	20.21%	39,513,932,696.72	15.21%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	4,035,600,285.00	0.92%	11,318,489,045.06	2.75%	- 24,249,024,727.00	-5.82%	- 3,342,201,001.00	-0.80%	2,848,624,891.00	-1.10%
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	25,328,575,371.00	5.76%	149,486,672.64	0.04%	71,559,999.72	0.02%	99,749,447.41	0.02%	2,830,116,252.94	1.09%
5	Sisa penghematan belanja atau	342,327,062,537.70	77.81%	308,850,089,857.53	74.96%	388,171,034,210.83	93.17%	295,116,768,401.00	70.83%	186,741,225,622.43	71.88%

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
	akibat lainnya										
6	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25,000,000,000.00	5.68%	0.00	0.00%	1,225,000,000.00	0.29%	1,000,000,000.00	0.24%	2,225,000,000.00	0.86%
7	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
8	Kegiatan lanjutan	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumenep, 2025

2.2.3.2.3 ANALISIS SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan tabel sebagai berikut.

Tabel II-77 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	440,060,654,562.64	400,169,710,955.24	416,217,543,138.41	411,162,821,477.16	257,207,623,847.17
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**440,060,654,562.64**	**400,169,710,955.24**	**416,217,543,138.41**	**411,162,821,477.16**	**257,207,623,847.17**

Sumber: LKPD Kabupaten Sumenep 2020-2024 dan BPKAD Kabupaten Sumenep 2025

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukan tren yang menurun. Pada tahun 2020 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep berada pada angka Rp. 440,060,654,562.64 dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya hingga menjadi Rp. 400,169,710,955.24. Pada tahun 2022 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep sedikit meningkat pada angka Rp. 416,217,543,138.41 kemudian kembali menuurn pada tahun 2023 hingga menjadi Rp. 411,162,821,477.16. adapun pada tahun 2024 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka Rp. 257,207,623,847.17. Kondisi ini sesuai dengan tren yang ada pada saldo kas neraca Kabupaten Sumenep yang terus menurun. Serta tidak adanya komponen pengurang dalam

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dikarenakan tidak adanya kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan yang dilaksanakan Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir.

2.2.3.2.4 ANALISIS PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Melihat pada nilai saldo kas neraca daerah berdasarkan data historis, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan proyeksi guna mengetahui perkiraan sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 hingga 2030. Proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran dihitung berdasarkan hasil proyeksi saldo kas neraca daerah dikurangi dengan hasil proyeksi kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikandan nilai kegiatan lanjutan.

Sehubungan dengan tidak adanya kewajiban yang dimiliki, serta kegiatan lanjutan yang akan dijalankan, maka nilai sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 hingga 2030 hanya diperoleh dari hasil proyeksi saldo kas neraca daerah. Nilai sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Sumenep diperkirakan dalam setiap tahun (pada tahun 2025 hingga 2030) terus menurun dari Rp. 212,488,393,504.65 ditahun 2025 hingga menjadi Rp. 130,713,604,071.82 di tahun 2030. Untuk mengetahui hasil proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 hingga 2030 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-78 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Sumenep 2025-2030

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Petumbuhan	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	257,207,623,847.17	-10.09%	212,488,393,504.65	166,244,808,559.52	139,032,625,395.70	126,370,630,768.68	138,546,347,699.92	130,713,604,071.82
	Dikurangi:								
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**257,207,623,847.17**	**-10.09%**	**212,488,393,504.65**	**166,244,808,559.52**	**139,032,625,395.70**	**126,370,630,768.68**	**138,546,347,699.92**	**130,713,604,071.82**

Sumber: LKPD Kabupaten Sumenep 2020-2024 dan BPKAD Kabupaten Sumenep 2025, diolah

2.2.3.3 KERANGKA PENDANAAN

2.2.4.1 PROYEKSI DAN ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Proyeksi Keuangan Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah) menggambarkan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 hingga 2030, serta tingkat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam beberapa tahun mendatang (tahun 2025 hingga 2030). Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep dilaksanakan pada masing-masing komponen Pendapatan Daerah yang secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada belanja derah secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan pada Pembiayaan Daerah terdapat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Pendapatan Daerah diproyeksikan pada tahun 2025 akan mencapai Rp. 2,557,788,284,500.00. Nilai ini merupakan Pendapatan Daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 (Rp. 2,670,522,371,039.65). Akan tetapi, penurunan nilai ada pada Pendapatan Trasnfer (-5.06%), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan akan meningkat (4.71%). Pada lima tahun berikutnya diperkirakan PAD Kabupaten Sumenep akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 417,152,092,767.39 di tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.56%. Sedangkan pada Pendapatan Transfer 2025-2030 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih kecil yakni sebesar -3.97%. Kondisi ini diperkirakan karena adanya perlambatan pertumbuhan serta penurunan nilai pada beberapa komponen Pendapatan Transfer di tahun 2025-2026. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pos pendapatan yang awalnya berada pada pos Pendapatan Transfer menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah, serta disebabkan oleh adanya perubahan pada kondisi APBN yang berdampak pada transfer pemerintah pusat kepada daerah.

Adapun perkiraan tren meningkat pada PAD Kabupaten Sumenep yang cukup signifikan didorong oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang secara tidak langsung memberikan kewajiban sekaligus legitimasi hukum bagi daerah untuk terus

melakukan peningkatan pendapatan dari sector pajak daerah dan retribusi daerah. Yakni melalui adanya sumber pajak baru berupa potensi Opsen, restrukturisasi pajak konsumsi, serta penyederhanaan jenis retribusi.

Proyeksi pada Belanja Daerah Kabupaten Sumenep juga dilaksanakan berdasarkan pada analisis data historis serta regulasi alokasi Belanja yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Nilai Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai Rp. 2,817,579,593,433.18 dan mengalami penurunan pada lima tahun berikutnya (2026-2030) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3.29% hingga menjadi Rp. 2,320,149,641,872.35. Hal ini diproyeksikan dengan mempertimbangan adanya perlambatan pertumbuhan dan penurunan nilai Pendapatan Transfer yang berdampak pada menurunya proyeksi pendapatan daerah (-2.61%) selama kurun waktu 2025-2030. Serta ditambah dengan adanya pengeluaran pembiayaan yang perlu dilaksanakan seperti Penyertaan Modal Daerah serta Pembentukan Dana Cadangan.

Adapun pada Belanja Operasi khususnya Belanja Pegawai, diproyeksikan akan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -4.55% pada tahun 2025-2030. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa alokasi Belanja Pegawai (diluar Tunjangan Guru) tidak lebih dari 30%. Sedangkan pada Belanja Modal, diproyeksikan akan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -0.11%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan nilai beberapa komponen belanja modal di tahun 2026 menyesuaikan dengan besaran proyeksi pendapatan. Sedangkan pada tahun 2027-2030 diproyeksikan Belanja Modal dapat mengalami peningkatan. Proyeksi meningkat pada Belanja Modal di tahun 2027-2030 ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang HKPD bahwa daerah perlu mengalokasikan minimal 40% anggaran untuk infrastruktur. Adapun pada Belanja Tak Terduga dialokasikan sebagai antisipasi/ penanggulangan terjadinya bencana, seperti bencana alam dan bencana sosial, serta pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/ daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

Secara keseluruhan, Belanja Daerah diproyeksikan akan mengalami kecenderungan menurun nilainya jika dibanding realisasi 2024, hal ini disebabkan oleh adanya

penyesuaian dengan terjadinya penurunan nilai pendapatan yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep kedepannya. Dimana dengan adanya efisiensi dari pemerintah pusat yang menyebabkan Pendapatan Transfer mengalami penurunan cukup signifikan. Sehingga pada sisi Belanja juga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak mengalami defisit yang terlalu tinggi.

Adapun pada komponen Pembiayaan Daerah, proyeksi difokuskan pada nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Diperkirakan pada tahun 2025-2030, SiLPA pada pengelolaan keuangan Kabupaten Sumenep dapat cenderung mengalami penurunan dari angka Rp. 259,791,308,933.18 di tahun 2025 hingga menjadi Rp. 139,242,560,502.43 di tahun 2030. Lebih lanjut proyeksi Penerimaan Pembiayaan juga dilakukan pada pos Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan pada tahun 2028-2029 sebagai anggaran yang direncanakan untuk membiayai Pemilu pada tahun 2029 serta persiapan Pemilu pada tahun 2028.

Sumber dana cadangan yang di cairkan pada tahun 2028-2029 diperoleh dari adanya proyeksi Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2026-2029 sebesar Rp. 40.000.000.000,00 di tahun 2026 & tahun 2028 Rp. 25.000.000.000,00 di tahun 2027 & tahun 2029. Pada Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan juga akan terdapat Penyertaan Modal kepada BUMD di Kabupaten Sumenep yang di anggarkan pada angka Rp. 5.000.000.000,00 setiap tahunnya selama kurun waktu 2026-2030. Secara lebih jelas, proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Sumenep 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-79 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2030

No	Uraian	Tahun							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**2,670,522,371,039.65**	**2,557,788,284,500.00**	**2,022,722,005,714.00**	**2,109,773,455,564.53**	**2,129,324,378,913.53**	**2,150,752,848,429.53**	**2,185,907,081,369.92**	**-2.61%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**304,075,441,817.65**	**318,384,097,017.00**	**334,303,301,868.00**	**351,018,466,962.00**	**368,569,390,311.00**	**386,997,859,827.00**	**417,152,092,767.39**	**5.56%**
1.1.1.	Pajak daerah	53,588,069,906.48	87,578,384,181.00	96,186,452,100.00	104,788,549,500.00	112,412,195,047.00	120,309,544,600.00	134,960,401,301.48	9.05%
1.1.2.	Retribusi daerah	223,458,422,113.27	205,872,135,236.00	217,841,063,386.00	225,390,528,611.00	234,425,690,906.00	244,589,879,266.00	259,941,541,720.89	4.78%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	13,742,861,230.09	14,300,000,000.00	14,829,316,718.00	15,276,256,189.00	15,734,092,846.00	16,203,128,324.00	16,659,702,335.19	3.10%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	13,286,088,567.81	10,633,577,600.00	5,446,469,664.00	5,563,132,662.00	5,997,411,512.00	5,895,307,637.00	5,590,447,409.83	-9.14%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2,358,820,218,113.00**	**2,239,404,187,483.00**	**1,688,418,703,846.00**	**1,758,754,988,602.53**	**1,760,754,988,602.53**	**1,763,754,988,602.53**	**1,768,754,988,602.53**	**-3.97%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**2,185,484,215,113.00**	**2,133,259,292,838.00**	**1,622,361,266,000.00**	**1,689,342,154,957.53**	**1,689,342,154,957.53**	**1,689,342,154,957.53**	**1,689,342,154,957.53**	**-3.96%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,815,274,172,113.00	1,775,457,774,838.00	1,286,770,820,000.00	1,334,870,331,957.53	1,334,870,331,957.53	1,334,870,331,957.53	1,334,870,331,957.53	-4.76%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	119,116,410,000.00	103,935,974,000.00	116,992,234,000.00	125,123,019,705.33	125,123,019,705.33	125,123,019,705.33	125,123,019,705.33	3.90%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,191,281,864,380.00	1,167,749,069,000.00	1,169,778,586,000.00	1,209,747,312,252.20	1,209,747,312,252.20	1,209,747,312,252.20	1,209,747,312,252.20	0.72%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	504,875,897,733.00	503,772,731,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	7,013,035,000.00	7,013,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	363,197,008,000.00	350,788,483,000.00	335,590,446,000.00	354,471,823,000.00	354,471,823,000.00	354,471,823,000.00	354,471,823,000.00	0.26%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**173,336,003,000.00**	**106,144,894,645.00**	**66,057,437,846.00**	**69,412,833,645.00**	**71,412,833,645.00**	**74,412,833,645.00**	**79,412,833,645.00**	**-3.78%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	157,395,004,000.00	93,412,833,645.00	66,057,437,846.00	69,412,833,645.00	71,412,833,645.00	74,412,833,645.00	79,412,833,645.00	-2.08%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	15,940,999,000.00	12,732,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**7,626,711,109.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
1.3.1	Hibah	7,626,711,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.2	Dana darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

No	Uraian	Tahun							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	**BELANJA**	**2,851,976,570,211.57**	**2,817,579,593,433.18**	**2,191,278,180,090.53**	**2,246,853,665,172.09**	**2,272,155,660,718.26**	**2,329,658,507,493.53**	**2,320,149,641,872.35**	**-3.29%**
2.1	**Belanja Operasi**	**1,895,496,818,806.97**	**2,009,340,930,982.89**	**1,569,467,466,526.89**	**1,591,659,985,402.30**	**1,580,981,966,593.58**	**1,606,750,685,019.70**	**1,585,208,109,991.66**	**-4.17%**
2.1.1	Belanja Pegawai	990,862,445,039.00	1,206,041,075,337.00	990,596,911,691.25	983,440,414,173.91	968,862,445,039.00	963,692,550,388.00	943,135,784,138.85	-4.55%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	683,971,100,727.97	669,823,776,082.00	503,599,464,079.72	517,259,573,438.80	523,756,809,277.31	538,022,707,866.70	540,012,821,406.04	-3.55%
2.1.3	Belanja Bunga	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	3,828,024,871.00	4,500,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	212,539,742,238.00	125,649,607,563.89	72,807,090,755.92	88,186,825,256.74	85,547,065,239.39	102,107,305,222.09	99,071,236,716.09	-1.51%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,295,505,931.00	3,326,472,000.00	464,000,000.00	773,172,532.86	815,647,037.88	928,121,542.91	988,267,730.68	1.27%
2.2	**Belanja Modal**	**353,105,432,354.60**	**251,341,448,020.29**	**72,319,999,133.64**	**85,204,908,711.48**	**108,096,845,741.87**	**127,633,569,452.73**	**137,749,490,912.76**	**-0.11%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	7,862,474,000.00	9,607,800,000.00	1,000,000,000.00	1,400,365,192.14	1,793,058,746.29	1,985,752,300.43	2,010,781,328.03	-1.90%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95,811,072,726.00	64,490,336,428.02	26,706,506,003.07	29,364,711,882.20	35,174,760,116.05	43,684,808,349.89	49,125,624,725.63	1.56%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148,354,731,036.03	79,883,667,649.00	21,898,863,486.17	26,941,860,134.80	35,868,579,582.30	41,795,299,029.79	45,119,158,000.68	1.61%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	93,839,091,711.57	89,774,624,243.27	22,349,096,444.40	27,111,308,874.20	34,854,971,168.15	39,733,420,142.57	41,025,422,746.85	-1.60%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,238,062,881.00	7,585,019,700.00	365,533,200.00	386,662,628.13	405,476,129.10	434,289,630.06	468,504,111.56	-13.91%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1,438,458,850.00**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00%**
2.4	**Belanja Transfer**	**601,935,860,200.00**	**551,897,214,430.00**	**544,490,714,430.00**	**564,988,771,058.31**	**578,076,848,382.81**	**590,274,253,021.09**	**592,192,040,967.93**	**1.43%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	5,997,109,000.00	9,840,000,000.00	9,840,000,000.00	10,811,507,254.62	11,120,784,248.61	11,830,061,242.59	12,184,963,079.87	4.42%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	595,938,751,200.00	542,057,214,430.00	534,650,714,430.00	554,177,263,803.69	566,956,064,134.20	578,444,191,778.50	580,007,077,888.06	1.38%
3	**PEMBIAYAAN**								
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**476,245,508,105.10**	**259,791,308,933.18**	**213,556,174,376.53**	**167,080,209,607.56**	**187,831,281,804.73**	**208,905,659,064.00**	**139,242,560,502.43**	**-9.85%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	410,917,771,655.16	259,791,308,933.18	213,556,174,376.53	167,080,209,607.56	139,731,281,804.73	127,005,659,064.00	139,242,560,502.43	-11.09%

No	Uraian	Tahun							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Anggaran Sebelumnya (SiLPA)								
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	65,096,093,898.94	0.00	0.00	0.00	48,100,000,000.00	81,900,000,000.00	0.00	-5.95%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	231,642,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**35,000,000,000.00**	**0.00**	**45,000,000,000.00**	**30,000,000,000.00**	**40,000,000,000.00**	**30,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**-20.00%**
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	25,000,000,000.00	0.00	40,000,000,000.00	25,000,000,000.00	40,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00	-30.00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

Untuk dapat melaksanakan dan mencapai target/ proyeksi keuangan daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) yang telah diperkirakan pada pembahasan sebelumnya, berikut merupakan arah kebijakan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun kedepan:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

- Melaksanakan Ekstensifikasi pajak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Ekstensifikasi.
- Melaksanakan Intensifikasi pajak dengan tanpa menambah beban bagi masyarakat.
- Menyusun Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Melakukan validasi data potensi dan sumber-sumber pajak terutama dengan adanya potensi dan sumber pajak baru seperti potensi Opsen dan penyederhanaan jenis retribusi, sehingga dapat diketahui potensi dan sumber riil pajak daerah sebelum melaksanakan stategi-strategi peningkatan pajak.
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi, memberikan insentif pajak dan retribusi yang lebih terukur, serta memberi penghargaan pada pengelola pajak dan retribusi yang dapat mencapai target.
- Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, LSM, pelaku usaha dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah
- Melakukan sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah diringi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan melalui digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran.
- Peningkatan pelaksanaan program-program unggulan serta pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) dan aset daerah yang bernilai ekonomi tinggi dan berpotensi menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

- Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dengan memperkuat permodalan Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dan perbaikan kinerja Perusahaan Milik Daerah/ BUMD.
- Meningkatkan komitmen seluruh *stakeholder* dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya melalui pajak dan retribusi.
- Melakukan monitoring rutin dan evaluasi pemungutan pajak dan retribusi serta menerapkan *reward and punishment* melalui penyempurnaan *law enforcement* terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- Pengoptimalan sumber PAD yang tidak membebani masyarakat yakni melalui Lain-lain PAD yang sah yang meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

- Melaksanakan alokasi Belanja Daera sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah antara lain alokasi Belanja Pegawai maksimal 30% (diluar Tunjangan Guru) dan mendorong alokasi belanja infrastruktur minimal 40% dari total Belanja Daerah.
- Pengelolaan Belanja Daerah diprioritaskan untuk membiayai program-program yang bersifat strategis sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang telah di rencanakan dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029 (*money follow program priority).*
- Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan disusun berdasarkan standar harga, ASB (Analisis Standar Belanja), tolak ukur kinerja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Melaksanakan alokasi Belanja terhadap pemenuhan *mandatory spending* seperti pada urusan pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), serta alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

- Tunjangan pegawai diberikan dengan berbasis kinerja dan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan disiplin kerja.
- Belanja Bagi Hasil dialokasikan minimal 10% dari total penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dengan mensinergikan fokus pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.
- Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

- Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*.
- Mendorong nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menurun sebagai salah satu tolok ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, enganggaran dan pelaksanaan keuangan daerah.
- Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pendapatan dan Belanja Daerah dioptimalkan untuk menutup defisit anggaran Belanja Daerah.
- Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/ masyarakat/ *Non-Governmental Organization.*

2.2.4.2 PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan menggambarkan nilai Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep, setelah diketahuinya besaran proyeksi total penerimaan daerah serta pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat. Untuk dapat mengetahui nilai Kapasitas Rill yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun kedepan (2025-2030) maka dapat dihitung melalui nilai Pendapatan Daerah ditambah dengan beberapa komponen Pengeluaran Pembiayaan seperti Pembentukan Dana Cadangan dan SiLPA, yang kemudian dikurangi dengan nilai pengeluaran daerah yang

bersifat wajib dan mengikat seperti Belanja Pegawai dan komponen-komponen pada Pengeluaran Pembiayaan. Melalui perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai kapasitas riil yang dimiliki Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp. 1,611,538,518,096.18 yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2026 menjadi Rp. 1,200,681,268,399.28 yang disebabkan oleh adanya penurunan Pendapatan Transfer serta penurunan SiLPA. Adapun pada tahun 2027 nilai kapasitas riil yang dimiliki Kabupaten Sumenep dapat kembali meningkat dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2030 menjadi Rp. 1,377,013,857,733.50. Peningkatan kapasitas Riil Kabupaten Sumenep tahun 2027-2030 disebabkan oleh adanya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep serta penurunan pada Belanja Pegawai Kabupaten Sumenep.

Secara lebih jelas, kapasitas rill Kabupaten Sumenep pada kurun waktu 5 tahun kedepan di masing-masing tahun mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II-80 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 – 2029

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Daerah	2,557,788,284,500.00	2,022,722,005,714.00	2,109,773,455,564.53	2,129,324,378,913.53	2,150,752,848,429.53	2,185,907,081,369.92
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0.00	0.00	0.00	48,100,000,000.00	81,900,000,000.00	0.00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	259,791,308,933.18	213,556,174,376.53	167,080,209,607.56	139,731,281,804.73	127,005,659,064.00	139,242,560,502.43
	Total Penerimaan	2,817,579,593,433.18	2,236,278,180,090.53	2,276,853,665,172.09	2,317,155,660,718.26	2,359,658,507,493.53	2,325,149,641,872.35
	Dikurangi:						
1	Belanja Pegawai	1,206,041,075,337.00	990,596,911,691.25	983,440,414,173.91	968,862,445,039.00	963,692,550,388.00	943,135,784,138.85
2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	45,000,000,000.00	30,000,000,000.00	45,000,000,000.00	30,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1,611,538,518,096.18**	**1,200,681,268,399.28**	**1,263,413,250,998.18**	**1,303,293,215,679.26**	**1,365,965,957,105.53**	**1,377,013,857,733.50**

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan merupakan pondasi dalam melakukan telaah pembangunan di daerah, sehingga sangat penting adanya pemetaan permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan dalam hal ini ditelusuri melalui evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya dan memperhatikan kondisi di masyarakat atas permasalahan yang berkembang. Permasalahan yang telah ditelusuri yang berpengaruh terhadap kondisi pembangunan kedepan. Berikut ini merupakan permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Sumenep sebagaimana telah dilakukan evaluasi kinerja pada BAB 2 dan telah memperhatikan Permasalahan yang berkembang.

1. Angka kemiskinan masih relatif tinggi

   Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep memiliki latar belakang pengaruh dari kawasan dan letak geografinya. Wilayah Kabupaten Sumenep yang tersebar dalam 126 pulau memiliki konsekuensi terhadap biaya pembangunan dan pelayanan publik yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan daerah yang berada hanya dalam satu kepulauan dan tidak menyebar. Tingginya angka kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja untuk penangannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari pendidikan, kesehatan, kebebasan meraih dan menukarkan komoditas. Kemiskinan masih terjadi karena sebagian besar rumah tangga miskin bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan informal dengan produktivitas rendah serta tanpa perlindungan sosial. Di wilayah kepulauan, keterbatasan akses terhadap transportasi, energi, air bersih, kesehatan, dan pendidikan menyebabkan biaya hidup tinggi dan peluang ekonomi terbatas. UMKM dan pelaku usaha mikro di daerah miskin juga menghadapi kendala modal, akses kredit, serta jaringan pemasaran, sehingga sulit meningkatkan skala usaha dan nilai tambah. Selain itu, intervensi pengentasan kemiskinan terhambat oleh belum terintegrasinya data kelembagaan dan rendahnya kapasitas pemerintah desa/OPD. Kelompok rentan seperti perempuan, kepala rumah tangga tunggal, lansia, dan penyandang disabilitas pun masih kurang mendapat perhatian melalui

program pemberdayaan yang sensitif gender. Dengan memenuhi jaminan atas hak-hak yang diperlukan oleh masyarakat maka kesempatan pengembangan diri oleh masyarakat dapat terbuka dengan lebar dan masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya serta terbebas dari angka kemiskinan.

2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai pemberi layanan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan pada setiap daerah termasuk Kabupaten Sumenep memiliki standart pelayanan minimal. Akan tetapi sampai saat ini permasalahan terkait kualitas pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Faskes pertama (Puskesmas, pondok bersalin desa dan pondok kesehatan desa) berbeda dengan yang didapat di Rumah Sakit sedangkan jumlah Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Sumenep tidak dapat menampung semua pasien sehingga sering terjadi overload dan kekurangan alat medis. Hal ini lah yang mempengaruhi pelayanan terhadap pasien tidak dapat dimaksimalkan. Tidak hanya itu saja, ketersedian sarana dan prasarana kesehatan di kepualauan membutuhkan perhatian khusus serta sarana penunjang medis dan tenaga medis menjadi permasalahan tersendiri untuk kualitas pelayanan kesehatan di kepualauan.

Kualitas sarana prasarana kesehatan termasuk dalam penilaian kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan apabila sarana dan prasarana kesehatan kurang maka kualitas pelayanan kesehatan untuk pasien juga tidak dapat dimaksimalkan. Kondisi Kabupaten Sumenep yang berkepulauan membuat adanya ketimpangan kualitas sarana prasarana dan pengadaannya dalam bidang kesehatan. Apabila permasalahan terkait fasilitas sarana prasarana kesehatan tidak dapat tertangani dengan baik maka masyarakat yang tinggal di Kecamatan dengan jumlah fasilitas

kesehatan yang tidak memenuhi standart akan kesulitan untuk mendapat pelayanan yang baik.

3. Akses dan kualitas pelayanan pendidikan masih belum merata

Permasalah yang timbul akibat struktur geografi daerah tidak hanya terkait dengan kesehatan saja. Akan tetapi terkait pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan juga menjadi salah satu masalah yang mendasar yang ada di Kabupaten Sumenep. Pendidikan di wilayah kepulauan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah sekolah, sarana prasarana, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Kondisi geografis dan biaya transportasi tinggi membuat angka partisipasi sekolah di kepulauan lebih rendah dibandingkan daratan. Banyak sekolah di daerah tertinggal juga kekurangan fasilitas praktik dan belum menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja lokal, sehingga lulusan SMK sulit terserap industri. Digitalisasi pendidikan berjalan lambat akibat keterbatasan akses internet, perangkat TIK, dan kompetensi digital guru. Selain itu, pelatihan berbasis keterampilan teknis masih minim dan kerja sama antara sekolah, BLK, dan dunia usaha belum optimal. Di sisi lain, banyak perempuan di wilayah kepulauan terhambat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi, budaya, dan akses, yang memperkuat siklus kemiskinan dan mengurangi peran mereka dalam ekonomi produktif. Untuk fasilitas dan kualitas pengajar yang ada di Kabupaten Sumenep berbeda satu dengan yang lain, baik yang ada dikawasan daratan maupun di kawasan kepulauan. Keterbatasan karena kewilayahan ini menjadi salah satu kekurangan dan permasalahan yang mendasar pada Kabupaten Sumenep. Perbedaan kualitas pendidikan hingga pelayanan dan tenaga pendidik yang ada tidak dapat terelakkan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumenep dituntut untuk melakukan pemerataan infrastruktur pada daratan dan kepulauan sehingga akses distribusi pendidikan dan kesehatan dapat menjangkau kedalam kepualauan-kepulauan kecil yang ada di Kecamatan Sumenep.

4. Daya saing tenaga kerja lokal yang masih rendah

Kabupaten Sumenep memiliki jumlah usia produktif yang cukup memadai, akan tetapi kemampuan dan keahlian kerja masyarakat usia produktif tersebut perlu dijadikan pokok perhatian. Sebagian besar tenaga kerja masih memiliki keterampilan teknis terbatas dan belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui, sehingga sulit bersaing di pasar kerja formal maupun industri luar daerah. Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) juga masih rendah dari segi instruktur, fasilitas, dan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan sektor unggulan seperti perikanan, pertanian modern, dan pariwisata. Kurikulum pendidikan dan pelatihan belum berbasis kebutuhan dunia kerja (demand driven), serta minim kolaborasi antara sekolah kejuruan, perguruan tinggi, dan industri, menyebabkan kesenjangan kompetensi terus terjadi. Banyak perusahaan akhirnya lebih memilih tenaga kerja dari luar daerah karena dianggap lebih siap dan berpengalaman. Selain itu, transformasi digital belum diikuti peningkatan literasi teknologi pekerja; sebagian besar tenaga kerja baru menguasai teknologi dasar, seperti aplikasi bisnis, pemasaran digital, atau sistem otomasi sederhana. Agar nantinya dapat bersaing dengan tenaga kerja luar daerah, upaya tersebut dapat dilakukan dengan membuat program pelatihan keahlian/. Dengan adanya program tersebut maka diharapkan kabupaten Sumenep dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja ahli lokal, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal

5. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi wisata alam yang melimpah. Akan tetapi potensi pariwisata ini belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Salah satu permasalahannya adalah terkait dengan kerjasama sektor pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Minimnya penyediaan sarana prasarana pada lokasi wisata dan akomodasi diwilayah wisata menjadi salah satu kekurangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep. Apabila kedepannya pemerintah Kabupaten Sumenep dapat bekerjasama dengan pihak swasta

untuk menyediakan akomodasi dan raeana prasarana di lokasi wisata maka perawatan tempat wisata dapat terjamin dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Apabila jumlah kunjungan wisatawan bertambah makan akan menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata.

6. Tingkat keberdayaan desa masih rendah (Belum sluruh desa mendapatkan status desa mandiri)

Membangun wilayah tertinggal dalam suatu daerah dapat meningkatkan status indeks desa membangun (IDM). Dalam pengukuran IDM, desa dapat diklasifikasikan ke dalam lima status, yaitu Desa sangat tertinggal, Desa tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Kabupaten Sumenep telah mengupayakan pembangunan desa-desa sehingga tidak adanya wilayah yang masih tertinggal, hasilnya sejak 2021-2023 status IDM desa di Kabupaten Sumenep rata-rata sudah mencapai Desa Berkembang hingga Desa Mandiri. Hasil baik ini perlu dipertahankan bahkan dikembangkan lagi oleh Pemerintah Sumenep dengan tetap mendorong pemerintah desa agar tetap melakukan pengembangan dan pengawasan pada sektor ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan lingkungan/ekologi yang merupakan komponen dari IDM. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan mewujudkan Masyarakat desa yang mandiri dari segala aspek. Seperti yang diketahui bahwa karena kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari kepulauan kecil pemerataan pembangunan dan kondisi wilayah satu dengan yang lainnya cenderung berbeda. Wilayah atau kecamatan yang ada di Tengah daratan dan menjadi pusat kota pembangunannya lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang ada dikepulauan. Oleh karena itu pembangunan wilayah yang tertinggal di Kabupaten Sumenep perlu ditingkatkan.

7. Kurangnya infrastruktur Konektivitas untuk mendukung pemerataan ekonomi

Pemerataan ekonomi dilakukan dengan tujuan menciptakan kesetaraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang ada. pemerataan ekonomi dapat dicapai dengan adanya konektivitas yang baik antar wilayah. konektivitas yang baik berarti alur distribusi, dan informasi juga baik. pemerintah bertanggung jawab dalam membuat, menjaga, mengembangkan dan mengawasi konektivitas antar wilayah agar terbentuknya pemerataan ekonomi. Saat ini konektivitas untuk mendukung pemerataan ekonomi di Kabupaten Sumenep tidak maksimal, sehingga terdapat celah untuk melakukan pembangunan untuk mendukung konektivitas antara wilayah Kabupaten Sumenep dengan Kabupaten lain di kepulauan Maduran dan juga antara Kabupaten Sumenep dengan daerah lain di luar kepulauan Madura. Jarak tempuh jalur darat dari Kota terdekat di Pulau Madura yakni Kota Surabaya mencapai 4 hingga 6 jam perjalanan ke Kabupaten Sumenep yang terletak diujung Pulau Madura. Apabila dibandingkan dengan daerah lain jarak tempuh dalam kurun waktu 4 hingga 6 jam dapat dilalui menggunakan tol jarak 300km dapat ditempuh dengan waktu 4-6 jam. Saat ini perjalanan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Sumenep dengan jarak 170 km ditempuh dengan waktu 4-6 jam sedangkan jarak Kota Surabaya ke Kabupaten Probolinggo dengan jarak 160km ditempuh dengan waktu 2 jam via tol. Dengan perbedaan selisih waktu tempuh tersebut maka terdapat gap dalam pemerataan ekonomi yang ada di Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu konektivitas antar wilayah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Semakin mudah daerah tersebut dapat diakses maka pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan cepat.

8. Kurang optimalnya produktivitas sektor petanian untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha, pertanian, kehutanan dan perikanan ditahun 2022 menyumbangkan angka 15.190.494,3 juta rupiah. Dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB di

Kabupaten Sumenep, hal ini menandakan bahwa sektor pertanian termasuk sektor yang dominan. Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam upaya peningkatan ini tentunya terdapat kendala yang menghambat seperti jumlah penduduk yang terus meningkat, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur yang terbatas, tidak cukupnya benih/bibit unggul bermutu, konversi lahan pertanian produktif menjadi penggunaan non-pertanian yang tidak terkendali, ketergantungan konsumsi beras, kompetisi pemanfaatan air, dan status kepemilikan lahan. Selain itu sarana prasarana pertanian yang cenderung tradisional juga memberikan dampak tidak maksimalnya produktivitas dalam sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Sektor pertanian dan perikanan di Sumenep masih didominasi metode tradisional dengan keterbatasan teknologi, fasilitas pengolahan, pembiayaan, serta infrastruktur logistik, sehingga nilai tambah produk rendah, distribusi lambat, dan rantai produksi–pengolahan–pemasaran belum berjalan sinergis. Bantuan dari pemerintah daerah memberikan andil yang cukup besar apabila pengentasan permasalahan tersebut dapat diatasi.

9. Kurang berkembangnya industri sebagai sektor potensial penyerapan tenaga kerja

Industri berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja pada suatu wilayah. Dengan mengembangkan industri yang ada dapat memperbesar penyerapan tenaga kerja pada suatu wilayah. Perekonomian Sumenep masih didominasi sektor primer dengan produktivitas rendah, minimnya industrialisasi dan investasi, terbatasnya tenaga kerja terampil, serta rendahnya pendidikan dan kompetensi yang menyebabkan ketimpangan kesempatan kerja dan rendahnya pemanfaatan potensi sektor jasa dan industri lokal. Peran pemerintah dalam pengembangan industri yaitu sebagai regulator, diharapkan dapat membentuk aturan-aturan yang dapat membantu pengembangan industri dan menarik investor untuk berinvestasi serta membangun industri di daerahnya. Keterbatasan mata pencaharian

yang ada di Kabupaten Sumenep membuat Masyarakat cenderung melakukan urbanisasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan atau bahkan mendirikan usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk menjaga populasi yang ada di Kabupaten Sumenep diperlukanya sektor-sektor baru seperti sektor industri untuk memberikan ruang kepada Masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan menyediakan lapangan pekerjaan.

10. Kurangnya Daya tarik daerah untuk meningkatkan investasi

Kabupaten Sumenep memiliki berbagai daya tarik yang dapat dikembangkan dengan investasi. Sumenep terkenal dengan wisata yang beragam, mulai dari gili, pantai, bukit, hutan mangrove hingga desa wisata dan merupakan wilayah penghasil rumput laut terbesar di Jatim. Dengan banyaknya daya tarik suatu wilayah, akan muncul potensi investasi yang akan datang. Namun daya tarik investasi masih rendah, sehingga potensi investasi tidak termanfaatkan dengan baik. Infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, energi, dan logistik di wilayah kepulauan masih terbatas, menyebabkan biaya distribusi tinggi dan menurunkan daya saing serta minat investasi di luar daratan utama. Pelaku usaha juga menghadapi kendala perizinan akibat tumpang tindih regulasi dan proses administrasi yang lama, sementara penerapan sistem OSS belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha lokal yang masih memerlukan pendampingan. Selain itu, pemerintah daerah belum memiliki platform dan data investasi terpadu yang menyediakan informasi potensi, lahan siap investasi, dan fasilitas insentif, sehingga promosi investasi masih bersifat umum dan kurang terarah. Lemahnya kolaborasi antara perusahaan besar dengan UMKM, koperasi, dan usaha mikro juga membuat efek berganda (multiplier effect) investasi belum optimal, dengan penyerapan tenaga kerja lokal dan transfer pengetahuan yang masih rendah. Untuk itu diperlukan kerja sama antara Pemerintah Sumenep, Pemerintah Desa, hingga pihak swasta agar investasi pada daya tarik wilayah sumenep dapat meningkat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan terkait pemanfaatan daya Tarik daerah adalah akses atau jarak tempuh yang dirasa cukup jauh dan memerlukan waktu lama kerena

akses untuk menuju ke Kabupaten Sumenep hanya dapat dilalui dengan satu jalur saja. Selain itu Tingkat keamanan di wilayah Kabupaten Sumenep juga menjadi pertimbangan bagi para investor untuk tertarik dan memberikan investasi di Kabupaten Sumenep.

11. Pembangunan Infrastruktur belum merata khususnya antara daratan dan kepulauan

Ketersediaan infrastrukur di Kabupaten Sumenep antara Kecamatan yang ada didaratan dan Kecamatan yang berada di kepulauan memiliki ketimpangan. Masyarakat yang berada dan tinggal di kepulauan cenderung tidak dapat merasakan infrastruktur seperti yang ada di daratan dan pusat Kabupaten. Selain itu, infrastruktur pendistribusi air bersih juga hanya ada dikawasan perkotaan dan tidak sampai pada wilayah kepulauan. Keberadaan dua infrastruktur tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal dikepulauan. Untuk menikmati fasiltasi infrastruktur yang lengkap maka masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk kedaratan. Selain itu kondisi jalan, penerangan, transportasi antar kota juga memiliki keterbatasan di kepualauan.

Wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep masih menghadapi keterbatasan transportasi, energi, digitalisasi, dan infrastruktur dasar sehingga menghambat mobilitas, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Selain itu kepualauan yang ada di Kabupaten Sumenep merupakan gugusan pulau-pulau kecil sehingga transportasi untuk kegiatan sehari-hari membutuhkan transportasi laut yang baik dan memenuhi standart keamanan. Memberikan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh semua kalangan merupakan tugas pemerintah daerah untuk memenuhinya, sehingga pemerintahan daerah perlu untuk membenahi dan meratakan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah daratan dan kepulauan.

12. Tingginya Risiko Bencana

Kondisi atau letak geografis wilayah Kabupaten Sumenep memiliki persentase risiko bencana yang sedang. Hal ini dapat dilihat dari indeks risiko bencana Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 sebesar 128,07. Pada tahun 2023, bencana yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 176 dan intensitas bencana tertinggi hujan deras dan angin kencang serta kebakaran. Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempertimbangkan risiko bencana dan pemetaan daerah dengan potensi bencana, yang mana data risiko dan pemetaan lokasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk menentukan pembangunan di daerah yang minim dengan risiko bencana. Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat meminimalisir kerugian maupun korban jiwa ketika terjadi bencana.

13. Kurangnya penegakan peraturan dan kesadaran hukum dalam mencegah kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan tidak dapat terelakan apabila dihubungkan dengan pembangunan yang ada di daerah untuk meningkatkan perekonomian, pembangunan infrastruktur dan perluasan industri. Akan tetapi kerusakan lingkungan dapat diminimalisir apabila terdapat regulasi yang mengatur tentang tatanan ruang wilayah. Saat ini kejadian yang sering terjadi adalah ketika regulasi telah diterapkan akan tetapi hukum bersifat runcing kebawah maka banyak pelanggaran yang dinormalisasi oleh pihak pemerintah daerah dan tidak diperbaiki, hal ini lah yang menyebabkan kerusakan lingkungan tiap tahun mengalami penambahan yang signifikan.

14. Kurangnya pengendalian kualitas lingkungan hidup untuk ekonomi berkelanjutan

Salah satu dampak dari aktifitas ekonomi adalah kerusakan lingkungan, oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan aspek penataan kota yang ramah lingkungan, ketersediaan tenaga dan fasilitas kebersihan yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan pembersihan lingkungan nantinya. Tidak dapat dipungkiri, faktor

kebersihan menjadi nilai tambah pada sektor pariwisata dan investasi. Melihat capaian IKLH Kabupaten Sumenep yang dalam 9 tahun terakhir cukup fluaktuatif dan mengalami penurunan dari tahun 2019-2023 hal ini menandakan bahwa kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir ini, yang paling menonjol penurunannya ada pada kualitas air sedangkan kualitas udara dan lahan sempat terjadi penurunan dan kenaikan pada 5 tahun tersebut. Akan tetapi kualitas air konsisten menurun, hal ini dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan menjadi salah satu pengaruh dari aktifitas ekonomi.

15. Belum optimalnya pemanfaatan TI dalam pembangunan

Pembangunan digitalisasi merupakan salah satu cara yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah indonesia dalam membangun sistem yang terintegrasi, efektif dan efisien. Akses dan pemanfaatan teknologi digital di wilayah kepulauan masih menghadapi banyak kendala. Banyak desa dan pulau belum memiliki jaringan internet yang stabil, sehingga layanan daring, pasar digital, dan pendidikan jarak jauh sulit dijalankan. UMKM, petani, nelayan, serta tenaga kerja informal umumnya belum memiliki keterampilan digital dasar seperti pemasaran digital, e-commerce, dan penggunaan platform pembayaran, yang menghambat akses pasar dan efisiensi usaha. Selain itu, belum tersedia platform lokal yang terintegrasi untuk mendukung rantai pasok pertanian, perikanan, logistik, maupun pariwisata. Biaya awal investasi teknologi masih tinggi dan belum ditunjang insentif daerah yang memadai untuk digitalisasi UMKM dan layanan publik. Di sisi lain, koordinasi lintas OPD, kapasitas SDM pemerintah, serta ketersediaan data dan platform terpadu masih lemah, sehingga digitalisasi di daerah belum berjalan sinergis dan berkelanjutan. Kabupaten sumenep dapat memulai pembangunan digitalisasi pada sektor-sektor prioritas tersebut, dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak pada sektor terkait dan para ahli dalam menyusun rencana, melakukan implementasi serta melakukan pengawasan sehingga terwujudnya sistem digitalisasi yang bermanfaat untuk banyak pihak. Akan tetapi dengan Adaya keterbatasan

infrastruktur yang mendukung masuknya era digitalisasi ke dalam sistem yang dikembangkan pemerintahan maka pembangunan digitalisasi pada sektor pemerintahan memerlukan pengkajian ulang. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh kekurangan infrastruktur akan tetapi juga disebabkan oleh sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dalam bidang teknologi memilki keterbatasan jumlah pada sektor pemerintahan. Permasalahan yang ada ini menyebabkan pelayanan yang diberikan dan telah terdigitalisasi tidak dapat digunakan secara maksimal dan masih adanya masyarakat yang buta akan teknologi tidak dapat mengakses pelayanan yang telah terdigitalisasi.

2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.2.1 ISU GLOBAL

Integrasi perencanaan daerah dengan isu-isu global menjadi aspek krusial dalam merancang perencanaan jangka panjang, mencakup tantangan seperti perubahan iklim hingga bonus demografi. Dengan mempertimbangkan dinamika global, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 dapat dirancang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap perubahan global. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan daerah tidak terisolasi, melainkan sejalan dengan tren dan kebutuhan yang lebih luas. Namun, di samping berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan, terdapat pula tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dan strategi penanganan yang tepat.

1. Pertumbuhan Kelas Menengah

Peningkatan kelas menengah global merujuk pada pertumbuhan populasi orang yang memiliki pendapatan menengah, yang sering ditandai dengan peningkatan standar hidup, akses ke pendidikan, dan konsumsi barang serta jasa yang lebih tinggi. Fenomena ini banyak terjadi di negara berkembang, terutama di Asia dan Amerika Latin. Menurut laporan Brookings Institution, pada tahun 2020, populasi kelas menengah global diperkirakan mencapai sekitar 3,8 miliar orang, dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 5,3 miliar pada tahun 2030. Sebagian

besar pertumbuhan ini diharapkan terjadi di Asia, terutama di China, India dan Indonesia.

Pertumbuhan kelas menengah dan atas yang pesat telah menjadi perhatian utama karena dampak transformatifnya terhadap masyarakat dan perekonomian. Dengan lebih dari 90 persen penduduk masuk dalam kategori-kategori ini, hal ini menandakan adanya perubahan signifikan dalam distribusi pendapatan. Konsentrasi kekayaan dan daya beli dapat mendorong perubahan perilaku konsumen, mengubah dinamika pasar, dan memengaruhi tren investasi. Pertumbuhan kelas menengah dan atas menimbulkan beberapa dampak yang memengaruhi perencanaan. Untuk menghindari terjebak dalam perangkap pendapatan menengah, daerah-daerah yang sebelumnya bergantung pada satu sektor manufaktur perlu melakukan transisi ke industri yang lebih berkembang seperti industri berteknologi tinggi berbasis digital.

Fenomena ini menimbulkan masalah sosial seperti potensi ketimpangan pendapatan, kualitas sumber daya manusia yang tidak kompeten, hingga keterbatasan sumber daya. Kondisi ini memaksa penduduk untuk mencari peluang di luar daerahnya mengingat terbatasnya peluang yang ada. Arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumenep harus mempertimbangkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

2. Persaingan Sumber Daya Alam

Meningkatnya persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam, didukung oleh meningkatnya kekuatan ekonomi di Asia, memberikan tantangan penting bagi perencanaan jangka panjang Kabupaten Sumenep. Ketika permintaan meningkat, pengamanan sumber daya penting seperti energi, mineral, dan produk pertanian menjadi hal yang krusial. Hal ini memerlukan alokasi sumber daya yang cermat dan kebijakan berkelanjutan untuk memastikan akses yang adil dan memitigasi potensi ketegangan antarpihak masyarakat yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya.

Mengintegrasikan permasalahan ini ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumenep perlu dilakukan guna mencegah eksploitasi berlebihan dan penipisan sumber daya primer. Selain itu, hal ini juga meningkatkan ketahanan terhadap potensi gangguan pada rantai pasokan, serta mendorong inovasi dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan isu yang semakin mendesak di tingkat global, dengan dampak yang dirasakan di berbagai sektor kehidupan. Pada tahun 2024, perubahan iklim terus menjadi ancaman utama, dengan dampak yang semakinnyata dan luas. Menurut laporan World Economic Forum, perubahan iklim menempati posisi dominan dalam daftar risiko global, terutama karena peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, seperti banjir, kekeringan, dan badai (UNDP, World Economic Forum).

Salah satu aspek kritis dari perubahan iklim adalah peningkatan suhu global. Data menunjukkan bahwa suhu rata-rata global terus meningkat, dengan tahun tahun terakhir mencatat rekor suhu tertinggi. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan bahwa untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri, emisi gas rumah kaca global perlu dikurangi secara drastis (unfoundation.org). Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ekosistem laut dan darat mengalami perubahan signifikan, dengan pemutihan karang dan migrasi spesies sebagai akibat dari suhu air yang lebih hangat dan perubahan pola cuaca.

Selain itu, perubahan iklim memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, karena komunitas yang paling rentan seringkali yang paling sedikit berkontribusi pada emisi global menanggung dampak terbesar. Tindakan global yang signifikan diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim. Pada Konferensi COP28, komunitas internasional berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk pembentukan *Loss and Damage Fund* untuk mendukung negara-negara yang paling terpengaruh oleh dampak perubahan iklim. Namun, meskipun ada kemajuan, banyak yang masih harus dilakukan untuk memastikan bahwa dunia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target iklim global (unfoundation.org).

Langkah-langkah seperti transisi ke energi terbarukan, konservasi energi, dan peningkatan efisiensi energi adalah beberapa upaya yang perlu dipercepat. Komitmen negara-negara dalam memenuhi target pengurangan emisi mereka dan dukungan finansial untuk negara-negara berkembang juga krusial dalam upaya

global untuk mengatasi perubahan iklim. Secara keseluruhan, mengatasi perubahan iklim tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga memberikan dampak nyata yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sumenep.

4. Tata Kelola Keuangan Global

Tata kelola keuangan global merupakan isu yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan jangka panjang mengingat pengaruhnya yang besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pergeseran dalam kebijakan fiskal, seperti reformasi pajak dan strategi belanja pemerintah, mempunyai implikasi langsung terhadap kondisi fiskal suatu daerah. Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi keuangan, perencanaan pemerintah harus beradaptasi untuk memastikan bahwa kerangka kebijakan dapat mengimbangi inovasi seperti blockchain, mata uang kripto, dan perbankan digital. Kegagalan untuk memasukkan perubahan-perubahan ini ke dalam perencanaan jangka panjang dapat menyebabkan inefisiensi, kerentanan, dan potensi risiko sistemik di sektor keuangan. Secara keseluruhan, mengintegrasikan tata kelola keuangan global ke dalam perencanaan jangka menengah Kabupaten Sumenep dapat berkontribusi pada ketahanan ekonomi dalam lanskap keuangan yang terus berkembang.

5. Kesehatan Global

Isu kesehatan global merupakan tantangan multidimensional yang mencakup berbagai aspek mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, hingga masalah terkait akses terhadap layanan kesehatan. Pandemi seperti COVID-19 telah menunjukkan betapa krusialnya sistem kesehatan yang kuat dan siap dalam menangani situasi darurat. Negara-negara yang memiliki infrastruktur kesehatan yang baik cenderung lebih mampu menahan dampak dari pandemi, sementara negara dengan sistem kesehatan yang lemah mengalami tekanan yang luar biasa, termasuk kelebihan beban di rumah sakit, kekurangan tenaga medis, dan distribusi obat-obatan yang tidak merata.

Dampak kesehatan global terhadap suatu negara tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi dan sosial. Wabah penyakit dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mengurangi output ekonomi. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak negara mengalami

penurunan drastis dalam pertumbuhan ekonomi akibat pembatasan aktivitas dan lockdown. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh krisis kesehatan juga dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan bahkan gejolak politik.

Di sisi lain, isu kesehatan global juga dapat menjadi katalisator bagi perbaikan sistem kesehatan di banyak negara. Krisis kesehatan seringkali mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya lebih banyak pada sektor kesehatan, meningkatkan pelatihan bagi tenaga medis, serta memperkuat infrastruktur kesehatan. Selain itu, kemajuan dalam teknologi medis dan kolaborasi internasional juga memainkan peran penting dalam menangani isu kesehatan global. Dalam jangka panjang, penanganan isu kesehatan global memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua sektor masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pendidikan kesehatan yang efektif, akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan dasar, dan kerjasama internasional yang erat adalah beberapa langkah penting yang harus diambil. Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi besar, ada peluang untuk membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan tangguh, yang tidak hanya siap menghadapi krisis saat ini tetapi juga krisis kesehatan yang mungkin muncul di masa depan.

6. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi global berdampak signifikan terhadap negara-negara, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, kota-kota besar menjadi pusat kegiatan ekonomi dan inovasi. Urbanisasi dapat meningkatkan produktivitas dan menyediakan lapangan kerja. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan, kemiskinan perkotaan, dan tekanan pada infrastruktur kota seperti perumahan, transportasi, dan layanan dasar. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 2050, diperkirakan 68% populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan, naik dari 55% pada tahun 2018. Ini menunjukkan tren urbanisasi yang terus berlanjut dan meningkatnya kebutuhan akan perencanaan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

Negara-negara yang mampu mengelola urbanisasi dengan baik dapat menikmati manfaat dari urbanisasi, seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat dan

peningkatan kualitas hidup. Namun, negara yang tidak siap menghadapi lonjakan populasi kota bisa menghadapi masalah serius, seperti kemiskinan, kejahatan, dan degradasi lingkungan. Di sisi sosial, urbanisasi membawa tantangan dalam hal integrasi sosial dan kohesi masyarakat. Perbedaan antara kelompok sosial-ekonomi dapat memperburuk ketidaksetaraan dan ketidakstabilan sosial. Selain itu, urbanisasi dapat menyebabkan perubahan budaya dan nilai, yang kadang-kadang menimbulkan konflik antar generasi. Tren urbanisasi global menekankan pentingnya memasukkan isu urbanisasi ke dalam perencanaan jangka panjang.

Perencanaan kabupaten/kota yang efektif sangat penting untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi, memastikan perumahan, infrastruktur, dan layanan yang memadai. Hal ini juga penting untuk pembangunan berkelanjutan, karena kabupaten/kota yang terencana dengan baik dapat mengurangi dampak lingkungan dan mendorong penggunaan sumber daya yang efisien. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat inovasi, pendidikan, dan ekonomi, yang merupakan komponen penting dalam pembangunan jangka panjang. Secara keseluruhan, mengintegrasikan tantangan urbanisasi global dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Sumenep sangat esensial untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk.

7. Konstelasi Perdagangan Global

Konstelasi perdagangan global memiliki dampak besar pada perekonomian negara. Negara-negara yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional biasanya menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena akses ke pasar yang lebih luas, teknologi canggih, dan investasi asing. Ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi tertentu. Namun, ketergantungan pada perdagangan global juga membawa risiko. Negara-negara dapat menjadi rentan terhadap fluktuasi pasar global, perubahan kebijakan perdagangan, dan krisis ekonomi di negara mitra dagang. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China menunjukkan bagaimana perselisihan perdagangan dapat mempengaruhi ekonomi global, termasuk negara-negara yang bergantung pada rantai pasokan internasional.

Selain itu, ketidaksetaraan dalam perdagangan global dapat memperburuk ketidakadilan ekonomi. Negara-negara maju sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan dapat mendikte aturan perdagangan, sementara negara berkembang bisa menghadapi hambatan akses ke pasar global. Masalah seperti tarif tinggi, subsidi domestik, dan proteksionisme dapat menghalangi akses pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memasukkan pertimbangan perdagangan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan inovasi bagi para pelaku usaha untuk melakukan ekspor dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan jangka panjang perlu memuat strategi untuk mengelola komoditas yang dimiliki oleh suatu daerah secara maksimal. Selain itu, kemitraan perdagangan antardaerah memainkan peran penting dalam mengamplifikasi nilai tambah perekonomian daerah, sehingga memerlukan perencanaan kerja sama yang memadai. Secara keseluruhan, mempertimbangkan tantangan perdagangan global ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumenep sangat esensial mengingat komoditas ekspor sumber daya alam yang dimiliki sangat melimpah.

8. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi global, khususnya dalam bidang Artificial Intelligence (AI), telah menjadi pendorong utama perubahan di berbagai sektor. AI, yang mencakup mesin dan sistem cerdas yang dapat belajar dan melakukan tugas secara otomatis, telah merombak cara kita bekerja, berbisnis, dan berkomunikasi. Teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai industri. Di sektor manufaktur, AI digunakan untuk otomasi proses produksi, yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk. Di sektor kesehatan, AI membantu dalam diagnosis penyakit, analisis data medis, dan personalisasi perawatan, yang semuanya dapat meningkatkan hasil kesehatan pasien. Dalam sektor jasa keuangan, AI digunakan untuk analisis risiko, deteksi penipuan, dan penawaran layanan yang dipersonalisasi.

Namun, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan tantangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah dampaknya terhadap tenaga kerja. Otomasi yang

didorong oleh AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama pekerjaan rutin dan repetitif. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran di beberapa sektor jika pekerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan baru yang muncul. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai privasi data, keamanan siber, dan etika dalam penggunaan AI, termasuk potensi bias dalam algoritma AI yang dapat menyebabkan ketidakadilan.

Menurut laporan McKinsey, adopsi AI dapat menambah nilai ekonomi global hingga $13 triliun pada tahun 2030. Namun, sekitar 14% tenaga kerja global, atau sekitar 375 juta pekerja, mungkin perlu beralih ke jenis pekerjaan yang berbeda akibat otomasi. Negara-negara yang berinvestasi dalam teknologi dan pendidikan yang relevan dapat meraih manfaat ekonomi yang signifikan dari AI. Negara-negara tersebut dapat memimpin dalam inovasi teknologi dan mendapatkan keunggulan kompetitif global. Sebaliknya, negara yang tidak beradaptasi mungkin tertinggal, menghadapi ketidaksetaraan ekonomi, dan kehilangan lapangan kerja.

Adapun alasan utama dari tantangan ini agar angkatan kerja secara proaktif mampu menghadapi perubahan yang berfokus pada keterampilan yang melek teknologi. Selain itu, perencanaan pembangunan jangka panjang juga perlu menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru untuk menciptakan peluang kerja di industri-industri baru dan berkembang. Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumenep sangatlah penting untuk memastikan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan demikian, perencanaan jangka panjang dapat mengakomodir potensi dampak sosial dari perpindahan pekerjaan serta memberikan dukungan bagi individu terdampak di Kabupaten Sumenep.

9. Demografi Global

Isu demografi global merujuk pada perubahan dalam struktur populasi dunia, termasuk pertumbuhan populasi, penuaan populasi, urbanisasi, dan migrasi. Faktor-faktor ini memiliki implikasi luas bagi ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Pertumbuhan populasi yang cepat di beberapa negara, terutama di Afrika dan Asia, dapat memberikan tantangan dan peluang. Di satu sisi, populasi muda yang besar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan

tenaga kerja dan pasar konsumen. Namun, jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan layanan publik yang memadai, ini bisa menyebabkan pengangguran tinggi, kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial.

Penuaan populasi merupakan isu besar di banyak negara maju seperti Jepang dan beberapa negara di Eropa. Dengan meningkatnya harapan hidup dan menurunnya tingkat kelahiran, proporsi penduduk usia lanjut meningkat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal peningkatan biaya perawatan kesehatan, pensiun, dan kebutuhan layanan sosial. Negara-negara dengan populasi yang menua juga menghadapi penurunan angkatan kerja, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Urbanisasi cepat merupakan tren penting lainnya, di mana semakin banyak orang pindah ke kota-kota. Sementara urbanisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi, itu juga menekan infrastruktur perkotaan, perumahan, dan layanan dasar seperti air dan listrik. Ketidakmampuan untuk mengelola pertumbuhan kota dapat menyebabkan kemacetan, polusi, dan peningkatan ketidaksetaraan.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi dunia diperkirakan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050, dengan sebagian besar pertumbuhan terjadi di negara-negara berkembang. Sementara itu, jumlah orang berusia 60 tahun ke atas diproyeksikan akan berlipat ganda pada tahun 2050, mencapai lebih dari 2 miliar orang. Adapun masalah yang akan timbul jika isu ini tidak direncanakan dengan baik adalah adanya tekanan pada layanan kesehatan dan sistem dukungan sosial, yang berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas hidup lansia dan peningkatan beban ekonomi pada masyarakat. Tanpa perencanaan yang responsif, mempertahankan angkatan kerja yang produktif dan memastikan kesetaraan antargenerasi di Kabupaten Sumenep dapat menjadi tantangan yang besar. Ketidakseimbangan dalam kebutuhan dan sumber daya antargenerasi juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial serta membuat suatu daerah tidak menarik untuk ditempati. Oleh karena itu, mengintegrasikan demografi global ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumenep dapat berkontribusi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang inklusif sekaligus secara efektif menjawab kebutuhan yang ditimbulkan oleh populasi yang menua.

10. Geopolitik dan Geoekonomi

Keamanan geopolitik di tahun 2024 tetap menjadi isu yang sangat penting, dengan beberapa perkembangan signifikan yang memengaruhi stabilitas global. Salah satu fokus utama adalah konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina dan perang Israel dan Palestina. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada keamanan di Eropa tetapi juga pada ekonomi global, terutama melalui gangguan pasokan energi dan pangan. Rusia adalah salah satu produsen energi utama dunia, dan sanksi terhadap negara ini telah memicu lonjakan harga energi di pasar global (World Economic Forum).

Selain itu, ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus meningkat, dengan kedua negara terlibat dalam persaingan strategis yang mencakup berbagai bidang, termasuk teknologi, militer, dan perdagangan. Misalnya, kebijakan Amerika Serikat yang membatasi ekspor teknologi canggih ke China bertujuan untuk mengurangi kemampuan China dalam mengembangkan teknologi militer canggih. Ini menciptakan situasi di mana dunia menghadapi risiko "decoupling" ekonomi antara dua kekuatan ekonomi terbesar (World Economic Forum).

Tantangan lain adalah ketidakstabilan di Timur Tengah, terutama setelah konflik yang melibatkan Israel dan Palestina, serta ketegangan di negara-negara seperti Iran dan Suriah. Konflik-konflik ini memiliki potensi untuk menyebar dan mempengaruhi stabilitas regional lebih luas, termasuk dampaknya pada pasar energi global. Dalam konteks yang lebih luas, dunia juga melihat peningkatan pengaruh dari negara-negara "swing states" seperti India, Brasil, dan Arab Saudi, yang mengambil peran lebih aktif dalam diplomasi internasional dan terkadang mengambil posisi yang berbeda dari kekuatan utama seperti AS, Uni Eropa, dan China. Ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional dan menambah kompleksitas pada pengelolaan isu-isu global (World Economic Forum).

Secara keseluruhan, keamanan geopolitik di tahun 2024 ditandai oleh multipolaritas yang meningkat, ketegangan yang terus-menerus antara kekuatan besar, dan tantangan regional yang dapat memiliki implikasi global. Upaya diplomatik dan kerjasama internasional menjadi semakin penting untuk mengelola risiko ini dan menjaga stabilitas global. Dinamika kondisi geopolitik dan geoekonomi ini secara strategis dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Sumenep sebagai peluang pertumbuhan ekonomi dan kerja sama. Hal ini mempertimbangkan

sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep yang mampu berekspansi hingga luar negeri. Dengan memasukkan aspek geopolitik dan geoekonomi ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, arah kebijakan secara proaktif dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya lintas batas, meningkatkan hubungan perdagangan antarwilayah, dan strategi peningkatan kualitas SDM guna menjamin produktivitas ekonomi dan perdagangan Kabupaten Sumenep.

2.3.2.2 ISU NASIONAL

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana pembangunan merupakan dasar dalam menentukan arah perkembangan pembangunan, sehingga sistem pemerintahan Indonesia berkewajiban menyusun dan melaksanakan perencanaan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perencanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. RPJMN adalah dokumen strategis yang merumuskan prioritas, tujuan, dan target pembangunan Indonesia selama periode lima tahun. RPJMN dibuat oleh pemerintah Indonesia dan mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya.

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia a.kan menjadi negara dengan pendapatan p€r kapita s€tara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdautrat dan b€rperan penting di dunia Intemasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJPN Tahun 202$-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025 2045. Untuk itu di dqhm RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Tabel II-81 List Permasalahan Pembangunan Daerah

Transformasi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2045
Transformasi Sosial	• Penuntasan Pemenuhan Pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial • Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif
Transformasi Ekonomi	• Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan • Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja • Penerapa.n ekonomi hijau • Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, • Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa.
Transformasi Tatakelola	• Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi • Penyempurnaan fondasi penataan regulasi • Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi • Peningkatan kualitas ASN berbasis merit • Kebijakan pembangunan berbasis bukti • Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan • Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Penguatan kapasitas masyarakat sipil.
Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia	• Pembaruan substansi huhum • Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila • Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan Nasional • Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai,

Transformasi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2045
	• Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif • Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, • Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi • Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	• Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat • Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana • Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup • Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan • Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK
Pembangunan wilayah dan Sarana Prasarana	• Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi • Pembangunan island grtd (dimulai di sumatera) dan national grid (dimulai antara sumatera-jawa) • Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital

Transformasi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2045
	• Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi lbu kota nusantara (IKN) • Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid)
Kesinambungan Pembangunan	• Reformasi tata kelola Iiskal, • Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah

Selanjutnya sesuai dengan aturan p€rundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Elersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setora negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.



Gambar II-74 Visi Misi Presiden 2025 – 2029

Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan pada kewilayahan, dimana pembagunan kewilayahan berfokus pada pengembangan suatu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, serta kebutuhan wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Adapun Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Adapun Isu pembangunan kewilayahan Pulau Jawa sebagai berikut:

1. Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.

2. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot density 5:10.000, bandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000).
3. Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.
4. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.
5. Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.
6. Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).
7. Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.
8. Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.

Selain isu pembangunan, berikut merupakan potensi pembangunan kewilayahan Pulau Jawa:

1. Pertanian dan ketahanan pangan: Jawa berkontribusi 54,22 persen dalam produksi beras nasional, berkontribusi sekitar 36 persen dalam produksi tebu nasional, berkontribusi sekitar 51,86 persen dalam produksi jagung nasional, serta berkontribusi sekitar 21 persen dalam produksi perikanan nasional.
2. Potensi ketahanan energi:
   - Cadangan gas bumi 5.846,8 TSCF, dan minyak bumi 1.582,32 MMSTB
   - Potensi clean energy berupa energi surya (640,3 GWp), hidro (2 GW), panas bumi (7,9 GW), bioenergi (9,4 GW), bayu (39,05 GW), dan arus laut (0,4 GW).

3. Industri pengolahan: lebih dari 52 persen industri pengolahan di Indonesia terdapat di Pulau Jawa, yang telah membentuk rantai nilai dan pasokan industri yang cukup lengkap.
4. SDM terampil: terdapat ratusan perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan ribuan lulusan tenaga kerja berkualitas.
5. Perkotaan: sebanyak 56 persen penduduk Pulau Jawa tinggal di perkotaan, yang dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui penciptaan demand & supply, serta penyediaan labor/talent pool.
6. Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan (nasional dan tol) dan jalur kereta api, serta memiliki beberapa pelabuhan dan bandara utama.
7. Jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 99,95 persen dari area wilayah permukiman di Pulau Jawa.
8. Sistem Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia berkontribusi terhadap 70 persen produksi energi listrik di Indonesia.

Jawa Timur dalam pembangunan kewilayahan diarahkan pada kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas Unggulan, Kawasan swasembada pangan, air dan energi , kawasan afirmasi dan kawasan konservasi / rawan bencana.



Gambar II-75 Arah Pembangunan Wilayah Jawa Timur

Adapun Kabupaten Sumenep diarahkan sebagai Kawasan Afirmasi Madura (Dl) dan Kepulauan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan Sumenep (A5) serta Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Sumenep. Dengan prioritas intervensi sebagai berikut:

Indikasi Intervensi Kawasan Afirmasi Madura (Dl) dan Kepulauan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan Sumenep(A5):

1. Penyediaan infrastruktur layanan dasar serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan
2. Peningkatan ketahanan bencana
3. Preservasi Jalan Lintas Selatan Madura dan Jalan Lintas Utara Madura
4. Pengembangan jaringan/daerah irigasi baru di WS Madura
5. Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value Unggulan (Perikanan dan peternakan)
6. Repacement fasilitas Pelabuhan Sapudi
7. Peningkatan fasilitas Pelabuhan Keramaian (Pulau Masalembu)
8. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sumenep

9. Pengembangan SPAM Perkotaan Sumenep
10. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen z, dan Milenial di kawasan perkotaan Sumenep (PHTC)
11. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strock, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep (PIITC)
12. Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi

Indikasi Intervensi Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Sumenep:

- Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan perikanan Pasongsongan
- Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
- Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya
- Peningkatan kualitas, Mutu, dan daya saing hasil Perikanan
- Peningkatan Kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan
- Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk Perikanan
- Pengembangan Kawasan Sentra produksi dan/ Industri garam di Sumenep

Selain pada RPJMN 2025-2029, terdapat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Dimana dalam peraturan presiden ini dipetakan terkati dengan potensi pembangunan wilayah jawa timur termasuk Sumenep. Kawasan pendukung Madura dan Kepulauan dengan segala potensi sumber daya yang ada memungkinkan percepatan pembangunan kawasan khusus sektor agropolitan, minapolitan, dan pariwisata. Beberapa program dan kegiatan prioritas pengembangan kawasan dicanangkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada guna penguatan daya saing kawasan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Berikut merupakan program / proyek strategis yang ditetapkan untuk sumenep:

Tabel II-82 Proyek Kawasan Kabupaten Sumenep

Pembangunan Kawasan	Proyek	Nilai Investasi (Milyar)
Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila	Reaktivasi Jalur KA Kamal Sumenep	3.375,00
Kawasan Madura dan Kepulauan Sebagai Pendukung Kawasan Gerbangkertosusila	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raya Sumenep - Pamekasan	238,10
	Pengadaan Kapal Perintis	150,00
	Pembangunan Bandara Kangean	241,66
	Pengadaan Kapal Cepat antar Pulau	50,00
	Pengembangan Pelabuhan Kangean	210,00
	Pengembangan Pelabuhan Pagerungan	170,00
	Pengembangan Pelabuhan Masalembu	170,00
	Pengembangan Pelabuhan Raas	170,00
	Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Kalianget	150,00
	Pembangunan SPAM Regional Lintas Madura Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep	750,00
	Pengembangan Industri Garam Sumenep	173,00

2.3.2.3 TELAAH RTRW PROVINSI JAWA TIMUR Tahun 2023 – 2043

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043 adalah *"Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan, serta pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil"*. Arah tujuan ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan investasi, mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah daratan maupun kepulauan, serta menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan.

Namun, pencapaian tujuan tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan. Perbedaan tingkat perkembangan wilayah, tekanan alih fungsi lahan, ketimpangan infrastruktur antara daratan dan kepulauan, serta kerentanan bencana dan degradasi lingkungan menjadi faktor penting yang perlu diatasi. Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan sejumlah **isu strategis penataan ruang Provinsi Jawa Timur** yang menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan ruang antara lain :

1. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang, perumahan, serta layanan dasar di wilayah perkotaan.
2. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara kawasan daratan dan kepulauan Madura, serta antara wilayah utara–selatan dan barat–timur.
3. Alih fungsi dan degradasi lahan pertanian produktif, yang mengancam ketahanan pangan akibat tekanan pembangunan industri, permukiman, dan infrastruktur.
4. Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, khususnya di kawasan kepulauan yang masih tertinggal dibanding wilayah daratan.
5. Kerentanan bencana dan perubahan iklim, termasuk banjir, longsor, kekeringan, serta potensi kenaikan muka air laut yang berdampak pada wilayah pesisir.
6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti eksploitasi tambang, migas, dan perikanan yang harus diimbangi dengan keberlanjutan ekosistem.
7. Pengembangan kawasan strategis nasional dan regional, termasuk jaringan jalan tol, bandara, pelabuhan, serta kawasan industri yang perlu disinergikan dengan tata ruang provinsi.
8. Kesenjangan kualitas SDM dan pemerataan ekonomi, yang menuntut peningkatan pendidikan, kesehatan, serta daya saing tenaga kerja.
9. Transformasi ekonomi berbasis digital, energi, dan industri hijau, yang mendorong kebutuhan penataan ruang adaptif serta infrastruktur pendukung

Salah satu strategi utama dalam RTRW Jawa Timur adalah pengintegrasian koridor pertumbuhan daratan dengan WP-3-K (Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Dalam konteks ini, Kabupaten Sumenep memiliki peran vital karena ditetapkan sebagai sentra kegiatan usaha penggaraman. Potensi lahan garam rakyat yang sangat luas, terutama di Kecamatan Kalianget, Pragaan, dan Gapura, menjadikan Sumenep sebagai basis penting produksi garam nasional. Dengan pengembangan industri hilir garam serta integrasi dengan sektor perikanan dan maritim, Sumenep diarahkan menjadi pusat produksi kelautan yang bernilai tambah tinggi, sekaligus mendukung kemandirian pangan dan industri di Jawa Timur.

Selain garam, strategi kelautan juga menempatkan Sumenep sebagai sentra perikanan tangkap dan budidaya. Penguatan infrastruktur pelabuhan perikanan, cold storage, serta fasilitas distribusi di wilayah kepulauan diarahkan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah, dan mengurangi ketergantungan pada daerah lain.

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Jawa Timur mengatur sistem jaringan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah. Arahan ini berlaku menyeluruh, termasuk untuk Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari wilayah kepulauan Madura.

1. **Sistem Jaringan Pusat Permukiman**
   - Jawa Timur memiliki hierarki PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi).
   - Kota Sumenep diarahkan sebagai PKW untuk wilayah kepulauan, berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan kesehatan bagi daratan Sumenep maupun kepulauan.
   - Beberapa kota kecil di kepulauan (seperti Arjasa di Kangean dan Sapeken) difungsikan sebagai PKLp, mendukung pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi lokal.
2. **Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**
   - Transportasi darat: penguatan akses jalan provinsi dan kabupaten untuk menghubungkan pusat-pusat produksi garam, perikanan, dan pertanian dengan pelabuhan dan bandara.
   - Transportasi laut: Pelabuhan Kalianget sebagai simpul utama logistik kepulauan, ditunjang pelabuhan rakyat dan dermaga di Kangean, Sapeken, dan Masalembu.
   - Transportasi udara: Bandara Trunojoyo ditetapkan sebagai pintu masuk penting ke wilayah Madura dan kepulauan, dengan rencana pengembangan rute penerbangan ke Surabaya, Bali, hingga Nusa Tenggara.
   - Energi dan telekomunikasi: pembangunan jaringan listrik kepulauan dan perluasan jaringan telekomunikasi berbasis digital untuk mendukung transformasi ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian, struktur ruang Sumenep diarahkan agar konektivitas antar-pulau semakin kuat, meminimalisasi keterisolasian, serta mendukung pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis kelautan.

B. Rencana Pola Ruang

Pola ruang Jawa Timur terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan arahan rinci bagi Sumenep:

1. **Kawasan Lindung**
    - Kawasan pesisir dan mangrove: konservasi ekosistem mangrove di sepanjang pesisir selatan dan kepulauan untuk perlindungan pantai dan habitat biota laut.
    - Terumbu karang dan ekosistem laut: perlindungan kawasan perairan di sekitar Sapeken, Masalembu, dan Gili-Gili untuk menjaga biodiversitas laut.
    - Daerah rawan bencana: pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan tsunami, abrasi, dan kenaikan muka laut.
    - Kawasan resapan air dan sempadan sungai: perlindungan daerah aliran sungai (DAS) kecil di Sumenep yang menopang sistem pertanian dan permukiman.
2. **Kawasan Budidaya**
    - Kawasan pertanian pangan: perlindungan sawah produktif di daratan Sumenep untuk mendukung ketahanan pangan.
    - Kawasan perikanan dan kelautan: pengembangan sentra perikanan tangkap dan budidaya di kepulauan, termasuk fasilitas pengolahan dan distribusi hasil laut.
    - Kawasan penggaraman: pengembangan kawasan garam rakyat di Pragaan, Gapura, dan Kalianget, dengan penekanan pada industrialisasi hilir garam (refinery, farmasi, industri kimia).
    - Kawasan pariwisata: pengembangan destinasi unggulan berbasis bahari seperti Gili Iyang (wisata kesehatan oksigen), Gili Labak (wisata bahari), dan Kepulauan Kangean (ekowisata dan budaya).
    - Kawasan perkotaan: Kota Sumenep diarahkan sebagai pusat pelayanan wilayah, dengan penguatan tata ruang perkotaan yang ramah lingkungan dan berbasis transportasi publik.

Dengan pola ruang ini, Kabupaten Sumenep diarahkan untuk menjadi wilayah kepulauan yang produktif, berdaya saing, sekaligus berkelanjutan. Orientasi tersebut tidak lepas dari karakter geografis Sumenep yang memiliki lebih dari 120 pulau kecil yang tersebar di Laut Jawa dan Selat Madura, dengan potensi besar di sektor kelautan, perikanan, serta pariwisata bahari.

Dari sisi produktivitas, pengembangan kawasan budidaya difokuskan pada industri penggaraman, perikanan tangkap, perikanan budidaya laut, serta pertanian lahan kering yang mendominasi wilayah. Sumenep bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu sentra garam nasional, sehingga penguatan kawasan penggaraman modern dengan pendekatan

hilirisasi industri menjadi arah strategis yang penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Dalam kerangka daya saing, pola ruang provinsi menempatkan Sumenep sebagai bagian dari koridor maritim Pantura–Madura–Kepulauan, yang akan diperkuat melalui jaringan pelabuhan (seperti Pelabuhan Kalianget), bandara (Trunojoyo), dan sistem distribusi logistik antarpulau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keterisolasian, memperluas akses pasar, serta menjadikan Sumenep sebagai simpul perdagangan dan perikanan yang berfungsi melayani skala regional hingga nasional.

C. Kawasan Strategis

Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, kawasan strategis provinsi (KSP) ditetapkan berdasarkan kriteria kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, serta pertahanan dan keamanan. KSP dimaksudkan untuk mengonsentrasikan program pembangunan yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem wilayah.

Bagi Kabupaten Sumenep, arahan yang menonjol adalah dalam KSP Perwujudan Kawasan Ekonomi Unggulan, khususnya melalui Sistem Agropolitan Kepulauan Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Dalam sistem ini, Sumenep ditempatkan sebagai pusat pengembangan industri garam nasional. Penetapan ini tidak terlepas dari fakta bahwa Sumenep memiliki garis pantai yang panjang, kondisi iklim yang mendukung, serta tradisi produksi garam rakyat yang telah berlangsung turun-temurun. Dengan arahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi Sumenep dalam KSP Jawa Timur adalah sebagai motor penggerak ekonomi berbasis kelautan dan kepulauan, dengan sektor garam sebagai lokomotif utama, yang kemudian diperkuat melalui integrasi dengan sektor perikanan, pariwisata bahari, dan layanan pelabuhan

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur 2023–2043, Kabupaten Sumenep diarahkan sebagai wilayah kepulauan strategis dengan peran sentral dalam mendukung ketahanan pangan, memperkuat ekonomi maritim, dan mengembangkan pariwisata bahari. Posisi ini menempatkan Sumenep sebagai pusat pertumbuhan berbasis kelautan yang mengintegrasikan industri garam, perikanan, dan wisata kepulauan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga ekosistem pesisir dan pulau kecil. Dengan demikian, Sumenep diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan kawasan timur Jawa Timur dan Madura, serta penopang utama ekonomi biru provinsi.

2.3.2.4 TELAAH RPJPD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025-2045

Harapan pembangunan Kabupaten Sumenep dalam 20 tahun kedepan dituangkan dalam Visi pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan jangka panjang dirumuskan dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan pada periode sebelumnya untuk melihat kondisi masa lampau dan kondisi saat ini, serta mempertimbangkan unsur kemungkinan yang akan terjadi pada 20 tahun kedepan yang diperoleh melalui telaah-telaah pada dokumen maupun publikasi hasil penelitian yang tentunya sedikit banyak akan memiliki pengaruh pada pembangunan di kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 20 tahun kedepan.

Mempertimbangkan kondisi saat ini yang dirasa masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk ikut andil dalam pembangunan regional secara khusus di Provinsi Jawa Timur dan pada pembangunan Nasional secara umumnya, maka dirumuskan Visi pembangunan sebagai berikut:



Gambar II-76 Visi Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2045

Misi pembangunan jangka panjang merupakan jabaran atas visi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena hal tersebut dalam rangka perumusan misi pembangunan, tidak dapat terlepas dari point-point penting yang termuat dalam sasaran

visi pembangunan. Berdasarkan pada sasaran visi yang telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut.



Gambar II-77 Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 - 2045

MISI 1: SDM berdaya saing global dan Sejahtera

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing global dan sejahtera merujuk pada kondisi di mana individu-individu dalam suatu masyarakat memiliki kualitas dan keterampilan yang tinggi sehingga mampu bersaing secara efektif di pasar global. SDM yang sejahtera tidak hanya mengacu pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, kesehatan, dan kesempatan yang adil dalam masyarakat. Untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing global dan sejahtera, beberapa hal penting perlu diperhatikan. Antara lain Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan, Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan, Meningkatkan Daya Beli, Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Meningkatkan Daya Saing Pemuda.

MISI 2: Daya saing ekonomi sektor unggulan berbasis inovasi, riset, dan teknologi

Daya saing ekonomi sektor unggulan berbasis inovasi, riset, dan teknologi mengacu pada kemampuan suatu sektor ekonomi dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi dengan memanfaatkan inovasi, riset, dan teknologi terkini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing dalam pasar global.

MISI 3: Tata kelola pemerintah yang efektif dan adaptif

Transformasi tata kelola yang menjadi penunjang pembangunan daerah, Tata kelola pemerintah yang efektif dan adaptif mengacu pada kemampuan pemerintah dalam mengelola urusan publik dengan baik, termasuk dalam merespon perubahan lingkungan secara cepat dan tepat. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

MISI 4: Penguatan stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dan fiskal daerah

Penguatan stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dan fiskal daerah mengacu pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan teratur dalam masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah yang stabil dan berkelanjutan. Stabilitas ketentraman dan ketertiban umum serta fiskal di daerah dapat menunjang perekonomian daerah, sehingga penting untuk menguatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dan fiskal daerah.

MISI 5: Ketahanan sosial budaya dan ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi mencakup kemampuan suatu masyarakat untuk menjaga keberlanjutan budaya, nilai-nilai sosial dan ekosistem alamnya dalam menghadapi tekanan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan. Ketahanan sosial budaya berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan religi Masyarakat sedangkan ekologi berkaitan dengan ketahanan terhadap lingkungan, energi air dan pangan dimana dari waktu ke waktu terus mengalami degradasi.

MISI 6: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas mengacu pada upaya untuk menyediakan infrastruktur, layanan, dan kesempatan yang sama baik di daerah perkotaan maupun pedesaan sehingga semua wilayah dapat menikmati pembangunan secara adil dan berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan yang merata ditandai dengan konektivitas yang lancer, baik barang maupun jasa, dengan wilayah yang kompleks dan

terdiri dari daratan dan kepulauan, penting bagi Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan pemerataan Pembangunan.

MISI 7: Pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan mempertimbangkan lingkungan

Pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan memperhatikan lingkungan mencakup pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan saat ini tetapi juga keberlanjutan lingkungan, termasuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Pemenuhan infrastruktur sebagai penunjang kehidupan Masyarakat terdiri dari infrastruktur fisik yang saat ini di prioritaskan pada aksesibilitas digital.

Dalam RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2045 telah di petakan arah kebijakan periodesasi, sehingga pada Rancangan Tekokratik RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029 telah terpetakan arah kebijakan periodesasi sebagai berikut:



Gambar II-76 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2045

Adapun Linearitas Arah Kebijakan dalam Periodesasi pembangunan 2025 – 2029 antara nasional, provinsi dan kabupaten sumenep sebagai berikut:

Tabel II-83 Linearitas Arah Kebijakan Periode 2025 – 2029 Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep

Kode	Arah Kebijakan Nasional 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Jatim 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Sumenep 2025-2029
N1	Pemenuhan Pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	JT1	Transformasi Sosial dititikberatkan pada **pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan** sesuai kondisi wilayah, **peningkatan kualitas pengajaran, produktivitas, daya saing, dan keahlian, serta pemenuhan sistem perlindungan sosial** yang terintegrasi dan berbasis satu data.	SU1	Percepatan Penuntasan Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial sebagai landasarn penguatan Daya Saing SDM
N2	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	JT2	Transformasi Ekonomi difokuskan pada **hilirisasi sumber daya alam unggulan** termasuk sektor Agro, **peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, penguatan sektor ekonomi yang berbasis riset dan inovasi**, pemerataan akses digital, pengembangan sarana prasarana pariwisata, serta pembangunan	SU2	Penguatan Landasan Transformasi sektor ekonomi melalui Pemanfaatan Riset dan pengembangan Inovasi, serta Kualitas Tenaga Kerja

Kode	Arah Kebijakan Nasional 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Jatim 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Sumenep 2025-2029
			perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.		
N3	Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, Peningkatan Integritas Partai Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil	JT3	Transformasi Tata Kelola difokuskan pada **penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya** dan **penyederhanaan regulasi** yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik.	SU3	Akselerasi Transformasi Tata Kelola berorientasi layanan publik melalui penguatan kualitas Kelembagaan, SDM dan Regulasi
N4	Memperkuat Supermasi Hukum dan Stabiblitas, serta Membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi sebagai Landasan Transformasi dan Pembangunan	JT4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, difokuskan pada **penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat** (Trantibumlinmas) untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif pada masyarakat Jawa Timur. **Peningkatan**	SU4	Memperkuat Stabilitas Daerah melalui kepatuhan hukum dan memperluas Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Kode	Arah Kebijakan Nasional 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Jatim 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Sumenep 2025-2029
			peran, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan demokrasi dan infrastruktur politik melalui kerjasama antar stakeholder dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.		
		JT7	Pembiayaan pembangunan, dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah		
N5	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Landasan dan Modal Dasar Pembangunan	JT5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada **optimalisasi nilai agama, budaya dan peran keluarga** dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; **peningkatan ketangguhan** manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan, **peningkatan kapasitas**	SU5	Penguatan nilai sosial, budaya, kesetaraan gender, Ketahanan pangan, pengendalian pencemaran lingkungan dan mitigasi bencana

Kode	Arah Kebijakan Nasional 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Jatim 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Sumenep 2025-2029
			kelembagaan dan instrumen pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup, serta **penguatan keterjangkauan pangan**		
				SU8	penguatan karakter budaya lokal dan penyiapan Generasi yang berwawasan Global
		JT6	Pembangunan wilayah, pada tahap ini difokuskan untuk **perwujudan pusat-pusat pertumbuhan wilayah** melalui penyediaan dan **optimalisasi sarana prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan** untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.	SU6	Meningkatkan Penyediaan sarana dan prasarana Konektivitas antar wilayah
				SU7	Pemenuhan dan Perluasan Infrastruktur penunjang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan Berkelanjutan

Adapun selain dipetakan araah kebijakan periodesasi, telah di tetapkan sasaran pokok pada masing-masing Misi Pembangunan sebagai arah dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut merupakan Sasaran Pokok misi pembangunan Kabupaten Sumenep:



Gambar II-77 Sasaran Pokok Misi RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2045

Adapun indikasi dari sasaran visi dan sasaran Pokok Misi Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel II-84 Indikator Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sumenep 2025 – 2045

Sasaran Visi	Indikator	Target				
		2025	2029	2034	2039	2045
SDM Produktif dan Berdaya Saing	IPM	70	73	77	79	80 - 85
Pemerataan Pembangunan	Pertumbuhan Ekonomi	4,34	5,2	6	6,6	6-7
	Tingkat Kemiskinan	16,98 - 15,42	13	9	5	1,28 - 0,38
	Indeks Gini	0,29	0,265	0,243	0,223	0,2
	Indeks Infrastruktur	83	84,7	86,2	87,7	89,2

Sasaran Visi	Indikator	Target				
		2025	2029	2034	2039	2045
Tata Kelola Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78,3	80	81,25	82,5	84
Lingkungan Hidup Berkualitas	IKLH	64,1	64,9	65,9	66,9	74,28
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	10	30	50	60	80
Daya Tarik Ekonomi Wilayah Madura	ICOR	6,9	6	5	4	2,5

Tabel II-85 Indikator Sasaran Pokok Misi RPJPD Kabupaten Sumenep 2025 – 2045

Sasaran Pokok	Indikator	Target				
		2025	2029	2034	2039	2045
Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan	Nilai Literasi Membaca	46,08 - 48,08	60 - 65	70,75	85 - 90	90,14 - 92,14
	Nilai Numerasi	13,79 - 15,79	20 - 25	40-45	65 - 70	74,21 - 76,21
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	5,98	6,9	6	6,05	6,07
	Harapan Lama Sekolah	13,64 - 13,82	14 - 14,3	14,4 - 14,7	14,8 - 15	15,09 - 16,11
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang	6,23	6,5	67	7	7,53 - 11,65

Sasaran Pokok	Indikator	Target				
		2025	2029	2034	2039	2045
	Berkualifikasi Pendidikan Tinggi					
Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,01	76	77	78	79,08
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	77,71	60	55	30	12,53
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,19	10	7	5	4,57
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91	94	96	98	100
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	94	96	98	100
Meningkatkan Daya Beli	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,57 – 1,37	1,3 - 1,2	1,2 - 1,1	1,1 - 1	0,96 – 0,61
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	74,38	76	77	78	80,65
	Pengeluaran perkapita Disesuaikan	Rp. 9.800.000 – Rp. 10.000.000	Rp. 11.000.000 - Rp. 13.000.000	Rp. 14.000.000 - Rp. 16.000.000	R. 17.000.000 - Rp. 19.000.000	Rp. 20.000.000 – Rp. 25.000.000
	Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita ADHK)	39.824.967,23	46.714.573,92	55.464.573,92	64.214.573,92	72.964.573,92

Sasaran Pokok	Indikator	Target				
		2025	2029	2034	2039	2045
	Tingkat Inflasi (%)	6-5	5-4,5	4,5-3	3-2,5	2-3
Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif	% Penduduk Miskin	16,98 - 15,42	12	8	4	1,28 – 0,38
	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	14,52	30	50	70	84,15
	Persentase Penyandang Disabilitas yang bekerja	20	30	40	55	70
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	67	75	80	90	100
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	10	20	30	40	50
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	88,75	90	92	95	99
Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	60	64	69	75	80
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi	Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB)	21,37 – 23,24	23,3	23,4	23,46	23,46 - 24,80
	Rasio PDRB sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	37 - 38	38,5	39	39,5	40
	Rasio PDRB sektor Industri Pengolahan	6,42 – 6,62	6,64	6,66	6,7	6,70 – 7,82
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,78 – 1,18	1,2	1,24	1,28	1,28 – 1,86

Sasaran Pokok	Indikator	Target				
		2025	2029	2034	2039	2045
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	386				754
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	15,5	17	19	22	26,1
	Persentase Desa Mandiri (%)	50	60	70	80	90
Meningkatkan Daya Saing Usaha	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	5	15	25	35	50
	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	14,19	17	20	25	28,43
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)	9,73	10	12	13,5	15
	Rasio Kewirausahaan Daerah	10	15	20	25	30
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,88	3	3,5	4,5	5,74
Meningkatkan Kemajuan	Indeks Inovasi Daerah	43 – 44	50	55	65	70 - 80
IPTEK	Indeks Pembangunan TIK	6,1	6,5	6,8	7,2	7,8
Investasi Meningkat	Realisasi Investasi (Millyar)	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	ICOR (%)	4,59	4,7	4,8	4,9	5,13
Meningkatkan Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas	Indeks Reformasi Hukum	40	45	50	55	60
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,83	3,9	4,2	4,5	5
	Indeks Profesionalitas	70	73	77	80	85

Sasaran Pokok	Indikator	Target				
		2025	2029	2034	2039	2045
	Aparatur SIpil Negara					
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Adaptif	Indeks Pelayanan Publik	4,58	4,6	4,7	4,8	5
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	% Penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	90	93	95	97	100
	Wilayah rawan gangguan keamanan	30%	25%	20%	10%	5%
	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu	70%	75%	80%	85%	95%
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,1	1,13	1,15	1,17	1,2
PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi	Kontribui PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi	1,9 – 2 %	2,4	2,9	3,5	4 – 5 %
Pelestarian Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,6 - 57,61	60	64	67	70,49 - 70,94
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,28 - 78,35	80	82	84	85,52 - 86,34
Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,562 – 0,561	0,425	0,4	0,3	0,26 – 0,25
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,29 - 72,3	73	75	76	77,5 - 77,53
Ketahanan Energi, Air dan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	82,04	80,77	81,77	82,77	83,77
	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1.430	1.700	2.300	3.000	3.740

Sasaran Pokok	Indikator	Target				
		2025	2029	2034	2039	2045
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	3,56	3	2	1	0,31
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	2,1	10	20	35	49,85
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	1	4	9	14	20
Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,1	64,9	65,9	66,9	74,28
	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	26,69	29,62	33,4	36,59	39,79
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	30,55	50	60	80	100
Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	117,36	115	110	105	99,95 - 85
Konektivitas Wilayah Meningkat	Indeks Konektivitas	1	1,5	2	2,5	3
Kualitas Infrastruktur Meningkat	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	65	85	85,5	86	86,5
	Area Blank Spot (wilayah)	20	15	10	5	0

2.3.2.5 TELAAH RTRW KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023 – 2043

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 – 2043 adalah **"Mewujudkan Kabupaten Sumenep sebagai Pusat Pariwisata dan Industri yang didukung oleh Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Kawasan Agropolitan".** Perwujudan tujuan

merupakan upaya Perwujudan tujuan penataan ruang untuk menjadikan Kabupaten Sumenep sebagai pusat pariwisata dan industri yang didukung oleh pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor unggulan.

Penataan ruang Kabupaten Sumenep dirancang dengan mempertimbangkan potensi serta tantangan yang ada, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai. Berdasarkan hal tersebut, berbagai isu strategis dirumuskan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang, mendorong pertumbuhan ekonomi, melestarikan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, di antaranya:

1. Sumenep merupakan Kabupaten yang dikenal dengan Icon Keris
2. Pertambahan jumlah penduduk yang mendukung banyaknya SDM namun tidak diikuti dengan distribusi penduduk yang belum merata dan kualitas SDM yang belum memadai.
3. Jaringan jalan senagai penghubung konektivitas antar wilayah masih banyak jaringan jalan yang rusak dan kurang terawatt
4. Adanya rencana jalan lingkar utara dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah
5. Adanya proyek strategis nasional yang meliputi pembangunan bandara trunojoyo, pegembangan Pelabuhan dan Pelabuhan penyebrangan, serta bandara kangean dan revitalisasi jaringan Kereta Api
6. Terdapat potensi minyak dan gas bumi yang dapat membantu PAD wilayah Kabupaten Sumenep
7. Masih belum meratanya jaringan listrik khususnya di wilayah kepualauan
8. Peningkatan kebutuhan telepon selular akan diimbangi dengan penyedia jaringan. Sehingga perlu penambahan BTS (Base Transceiver Station). Pertambahan ini jika tidak diatur akan menimbulkan permasalahan dalam penggunaan pola ruang kawasan.
9. Masih perlu ditingkatkannya manajemem pengelolaan sistem transportasi yang dapat mengintegrasikan antara optimalisasi sarana moda angkutan dan sarana pendukungnya

10. Potensi sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Sumenep berupa 65 Daerah Aliran Sungai dan 28 embung.
11. Penurunan muka air tanah yang relatif cepat terutama di musim kemarau akibat pengambilan air tanah dengan sistem pompa dalam jumlah yang relatif banyak.
12. Penurunan kualitas air akibat pola pertanian yang intensif dalam penggunaan pupuk kimia sehingga meninggalkan residu pada tanah, yang akhirnya terakumulasi pada cadangan air tanah dibawahnya.
13. Pengelolaan limbah skala kota seperti IPAL yang masih belum ada
14. Masih ada warga yang menjadikan lingkungan sekitar seperti sungai dan laut sebagai pembuangan sampah dan sanitasi
15. Banyaknya potensi wisata yang menyebar di wilayah kabupaten Sumenep
16. Menjamurnya usaha tambak yang akan berdampak pada kualitas lingkungan

Kawasan strategis adalah wilayah yang memiliki potensi pengembangan secara fungsional dan dapat menjadi aset bagi Kabupaten Sumenep. Penetapan kawasan ini didasarkan pada fungsi utama wilayah sebagai kawasan strategis di tingkat kabupaten. Kawasan strategis yang telah ditetapkan secara nasional perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten melalui arahan kawasan strategis kabupaten. Di Kabupaten Sumenep, kawasan strategis yang telah ditetapkan mencakup:

Tabel II-86 Tujuan dan arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Sumenep

Tahap Pembangunan II (2025-2029)

NO	KAWASAN STRATEGIS	NILAI STRATEGIS	TUJUAN PENGEMBANGAN	ARAH PENGEMBANGAN
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi				
1	Kawasan Agropolitan di Kecamatan Rubaru	Pusat produksi dan distribusi hasil pertanian, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis	Mewujudkan Kawasan Agropolitan sebagai pusat Agropolitan berbasis pertanian yang didukung sarana dan prasaran penunjang.	Pengembangan sektor pertanian yang didukung pariwisata dan perdagangan dan jasa sebagai penunjang;
2	Kawasan Ekonomi Khusus Pergaraman Kalianget	Pusat industri garam nasional yang mendukung ketahanan pangan dan kemandirian sektor pergaraman. Keunggulannya terletak pada sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang mendorong pengembangan industri berbasis garam	Terciptanya pertumbuhan ekonomi di kawasan pergaraman Kalianget dan mewujudkan kawasan industri garam modern yang berdaya saing melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.	Pengembangan sektor pergaraman yang akan didukung dengan adanya rencana industri soda ash dan didukung dengan kawasan kota tua Kalianget sebagai penunjang.

NO	KAWASAN STRATEGIS	NILAI STRATEGIS	TUJUAN PENGEMBANGAN	ARAH PENGEMBANGAN
3	Kawasan Minapolitan Atopasa	Pusat pengembangan perikanan terpadu yang mendukung ketahanan pangan, peningkatan ekonomi lokal, dan kesejahteraan nelayan	Mewujudkan Kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya yang didukung sarana dan prasaran penunjang.	Pengembangan sektor perikanan budidaya yang didukug pariwisata dan perdagangan dan jasa sebagai penunjang
4	Kawasan Perkotaan Mandiri di Kecamatan Batuan	Pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan infrastruktur perkotaan	Mewujudkan Kota Mandiri sebagai pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan	Pengembangan sektor perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan permukiman
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya				
1	Asta/Makam panembahan Blingi Sepudi dan Sekitarnya	Revitalisasi kawasan ini memperkuat daya tarik wisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya	Mewujudkan menjadikan Asta/Makam Panembahan Blingi sebagai destinasi wisata religi sebagai penanda Masuknya Kerajaan Islam di Kabupaten Sumenep.	Pengembangan sektor pariwisata, perdagangan Dan jasa, dan permukiman;
2	Benteng Kalimo'ok dan Sekitarnya		Menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata dengan daya tarik Bangunannya sebagai salah satu cagar budaya.	Pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, dan Permukiman;
3	Kawasan Kota Tua Kalianget dan Sekitarnya		Mempertahankan kawasan Kota Tua Kalianget yang Pada awalnya merupakan pusat kegiatan dari Kabupaten Sumenep Sebagai Kawasan Cagar Budaya.	Pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, Dan permukiman;
4	Klenteng Piao Sian Ling Kong dan Sekitarnya		Menjadikan destinasi wisata cagar budaya.	Pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, Dan permukiman;
5	Komplek Asta Tinggi dan Sekitarnya		Menjadikan Komplek astatinggi sebagai destinasi wisata religi Dimana Komplek Asta Tinggi ini merupaka makam Para Raja Sumenep.	Pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, dan Permukiman;
6	Komplek Keraton Sumenep dan Sekitarnya		Menjadikan kawasan Komplek Keraton Sumenep Sebagai pusat pariwisata budaya yang terdapat berbagai jenis, Benda, dan struktur bangunan cagar budaya yang dapat menjadi Salah satu destinasi wisata	Pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, Dan permukiman
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup				
1	Kawasan kosistem Esensial (KEE) berupa perlindungan satwa endemik berupa kakaktua kecil jambu kuning di Pulau Masakambing Kecamatan Masalembu.	Kawasan lindung dengan keanekaragaman sumber daya alam	Perlindungan satwa Edemik kakak tua kecil jambu kuning masalembu adalah mewujudkan pusat Perlindungan kakak tua kecil jambul kuning yang hampir punah.	Perlindungan satwa Edemik kakaktua kecil jambu kuning masalembu adalah pengembangan Koservasi kawasan dan pariwisata.

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumenep, 2023

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Sumenep, disusun rencana pembangunan yang mencakup struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis sebagai fokus pengembangan. Dalam penyusunannya, terdapat keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2025–2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep 2023–2043, khususnya pada periode kedua. Keselarasan kedua dokumen tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan sejalan dengan visi jangka panjang daerah, sehingga mampu menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut disajikan sinkronisasi program prioritas RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 dengan RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2023–2043 pada periodisasi kedua.

Tabel II-87 Sinkronisasi Program Prioritas RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029 dan RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2024–2044

PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKASI PROGRAM RTRW PERIODISASI KEDUA TAHUN 2025 - 2029
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
Program Pengelolaan Pendidikan	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
Program Penempatan Tenaga Kerja	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	
Program perlindungan hak anak (PHA)	
Program Perlindungan Khusus Anak	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	
Program perlindungan dan jaminan sosial	
Program rehabilitasi sosial	
Program penyelenggaraan jalan	Perwujudan Sistem jaringan jalan

PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKASI PROGRAM RTRW PERIODISASI KEDUA TAHUN 2025 - 2029
Program Pengelolaan Pelayaran	Perwujudan Sistem jaringan transportasi laut
	Perwujudan Sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan
Program Kawasan Permukiman	Perwujudan Kawasan Permukiman
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Perwujudan Kawasan Pertanian
	Pembangunan dan pengembangan Agropolitan Madura dan Kepulauan;
	Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan
	Perwujudan Kawasan Hortikultura
	Perwujudan Kawasan Perkebunan
Program pelayanan penanaman modal	
Program pengelolaan perikanan tangkap	Perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap
Program pengelolaan perikanan budidaya	Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perwujudan Kawasan Perikanan
	Perwujudan Kawasan Pergaraman
	Pembangunan dan pengembangan Kawasan ekonomi Khusus Pergaraman Kalianget
	Pembangunan dan pengembangan Minapolitan Madura dan Kepulauan.
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
Program pemasaran pariwisata	Perwujudan Kawasan Pariwisata
Program Pengembangan Kebudayaan	Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Perwujudan Kawasan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
Program Penataan Desa	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan
Program Peningkatan kerjasama Desa	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan
Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Program Pelayanan Penanaman Modal	

PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKASI PROGRAM RTRW PERIODISASI KEDUA TAHUN 2025 - 2029
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Program Pengelolaan Penerbangan	Perwujudan system Bandar Udara Umum dan Bandar Udara khusus
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman
	Perwujudan Kawasan Lindung
	Perwujudan Kawasan Budidaya
	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
Program Kawasan Permukiman	Perwujudan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Program Pengelolaan Persampahan	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Program penanggulangan bencana	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Sumber : Diolah Bappeda Kabupaten Sumenep, 2025

Pengembangan jaringan jalan, sistem sumber daya air dan drainase, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, pengendalian lingkungan dan kebencanaan, serta pengembangan kawasan pariwisata merupakan program RPJMD Kabupaten Sumenep 2025–2029 yang sudah memiliki rujukan ruang dalam RTRW periode kedua. Kejelasan koridor, kawasan, atau lokus dalam RTRW membuat program tersebut dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur.

Namun, tidak semua program RPJMD dapat dipetakan ke RTRW. Program non-spasial, seperti pengembangan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penguatan kelembagaan, serta program parsial di bidang layanan dan ekonomi, belum menegaskan lokusnya secara eksplisit. Hal ini sejalan dengan fungsi RTRW yang berfokus pada struktur ruang, pola pemanfaatan lahan, dan arah pembangunan infrastruktur jangka panjang, sedangkan RPJMD memiliki mandat yang lebih luas untuk mengarahkan pembangunan lintas sektor dalam horizon lima tahun. Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa program prioritas RPJMD berbasis spasial telah terakomodasi dalam RTRW, sehingga menjadi landasan penting bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumenep periode 2025–2029.

2.3.2.6 TELAAH KLHS RPJMD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 – 2029

Untuk memastikan bahwa Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan, diperlukan kajian mendalam terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam menilai dampak kebijakan pembangunan terhadap lingkungan serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

Hasil penelaahan terhadap KLHS ini menjadi dasar dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2025-2029. Dengan demikian, kebijakan yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029, telah dirumuskan sejumlah isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah, yaitu:

1. Persentase penduduk miskin yang masih tinggI
2. Peningkatan akses dan sarana prasarana kesehatan termasuk akses air bersih dan sanitasi layak
3. Peningkatan akses, SDM, dan sarana prasarana pendidikan
4. Peningkatan kapasitas resiliensi terhadap bencana, Ketahanan Pangan, dan perubahan iklim
5. Peningkatan Upaya Pengendalian Penduduk serta Kesetaraan Gender
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Pelayanan Publik

Sebagai upaya untuk menjaring isu pembangunan berkelanjutan yang memiliki daya ungkit tinggi pada dinamika Kabupaten Sumenep, Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 juga menyaratkan, Isu Strategis yang ditarik oleh KLHS RPJMD sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep atau muatan KLHS yang meliputi variabel Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, Kinerja layanan jasa ekosistem, Intensitas

dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan, Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam, Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, "Tingkat dan Status jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok, masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat, Risiko terhadap Kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta Ancaman terhadap perlindungan terhadap Kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. Hingga pada akhirnya melahirkan sedikitnya 5 Isu Paling Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar II-78 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Sumenep

2.3.2.7 ISU STRATEGIS KABUPATEN SUMENEP

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, Telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu global, telaah isu dan mandat nasional, telaah isu dan mandat regional Provinsi Jawa Timur, dan Telaah Dokumen Perencanaan Daerah Terkait yaitu telaah RPJPD 2025-2045, telaah RTRW Kabupaten, dan telaah Telaah KLHS RPJMD Kabupaten tahun 2025-2029. Berikut Adapun Isu Strategis Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan yang masih tinggi
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Penguatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat
4. Investasi Daerah Masih Belum Optimal
5. Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
6. Penguatan Mitigasi dan Penanganan Bencana
7. Stabilitas Lingkungan Berbasis Nilai Lokal
8. Kualitas Pelayanan Publik yang Menjangkau Seluruh Masyarakat

Tabel II-88 LInearitas Isu Strategis Kabuaten Sumenep

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS SUMENEP
		ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU REGIONAL	
Angka kemiskinan masih relatif tinggi	Persentase penduduk miskin yang masih tinggi	Kesejahteraan Masyarakat	Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantongkantong kemiskinan tinggi.	Penanggulangan kemiskinan	Angka Kemiskinan yang Masih Tinggi
			Kawasan Afirmasi Madura (Dl) dan Kepulauan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan Sumenep(A5)		
Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan pemerataan saranaprasarana kesehatan yang berkualitas	Sumber Daya Mannusia yang Berkualitas dan Perlindungan Sosial Adaptif-Integratif	Kesehatan Global	Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Akses dan kualitas pelayanan pendidikan masih belum merata			Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan Industri		
Daya saing tenaga kerja lokal yang masih rendah					
Kurangnya Daya tarik daerah untuk meningkatkan investasi	Kemiskinan dan Sumber Penghidupan yang Layak	Konstelasi Perdagangan Global	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Investasi Daerah Masih Belum Optimal
Kurang berkembangnya industri sebagai sektor potensial penyerapan tenaga kerja		Urbanisasi Global			
Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		Geopolitik dan Geoekonomi	Kawasan Madura dan Kepulauan Sebagai Pendukung Kawasan Gerbangkertosusila		

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS SUMENEP
		ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU REGIONAL	
Tingkat keberdayaan desa masih rendah (Belum sluruh desa mendapatkan status desa mandiri)					
Kurang optimalnya produktivitas sektor petanian untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan Kelas Menengah	Potensi Pertanian dan ketahanan pangan, ketahanan energi dan Industri pengolahan	Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penguatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat
			Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Sumenep		
Pembangunan Infrastruktur belum merata khususnya antara daratan dan kepulauan	Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Ekonomi yang Berkualitas	Kesejahteraan Masyarakat	Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan	Pemertaan pembangunan Penunjang Kluster Ekonomi	Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
Kurangnya infrastruktur Konektivitas untuk mendukung pemerataan ekonomi		Demografi pada Kebutuhan Pemukiman	Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		
Tingginya Risiko Bencana			Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana		Penguatan Mitigasi dan Penanganan Bencana
Kurangnya pengendalian kualitas lingkungan hidup untuk ekonomi berkelanjutan	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan	Persaingan Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim	Penguatan Lingkungan yang Berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Stabilitas Lingkungan Berbasis Nilai Lokal
Belum optimalnya pemanfaatan TI dalam pembangunan	Tata Kelola yang Adaptif, Melayani, dan Akuntabel	Tata Kelola Keuangan Global	Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Kualitas Pelayanan Publik yang Menjangkau Seluruh Masyarakat
		Perkembangan Teknologi			

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 VISI

Visi adalah gambaran atau cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai di masa depan. Visi memberikan arah dan tujuan yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Perumusan Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029 pada dasarnya merupakan periode kedua kepemimpinan kepala daerah periode 2021- 2026. Pada periode ke 2 ini, kepala daerah berkomitmen untuk melanjutkan dan memperbaiki kebijakan pada periode pertama dengan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penentuan kedua fokus pembangunan Berpedoman pada arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Sumenep tahun 2025-2045, dengan mengikuti perkembangan pemerintahan yang dinamis. Visi Kabupaten Sumenep 2025-2029 adalah sebagai berikut :

SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA

SUMENEP UNGGUL

Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Di sisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarkat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.

SUMENEP MANDIRI

Mandiri bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses

pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.

SUMENEP SEJAHTERA

Sejahtera mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.



Gambar III- 1 Keselarasan Visi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sedangkan **Jawa Timur Maju**, merupakan komitmen sekaligus semangat (spirit) yang menegaskan bahwa pada tahapan 2025–2029, melanjutkan perjuangan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai center of gravity yang strategis dan berkembang pesat. **Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan**, bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, keunggulan inovasi, dan Pembangunan yang berkelanjutan. **Menuju,** mengandung pengertian upaya untuk mencapai tujuan -tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur. Sejalan dengan Visi Nasional dan Provinsi, Visi Kabupaten Sumenep yaitu **Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera** telah memiliki keselarasan, sehingga pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah dapat selaras dan sejalan untuk menuju Indonesia Emas 2045.

3.1.2 MISI

Misi adalah langkah-langkah atau tindakan konkret yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan bagaimana suatu organisasi atau individu akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi. Adapun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sumenep yang Unggul, Mandiri dan Sejahtera berikut merupakan Misi Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029



Gambar III- 2 Visi-Misi Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029

MISI 1 MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDAYA SAING BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KETENAGA KERJAAN

Pada misi 1 berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Konstruksi pendidikan dalam konteks ini bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan maksimal dan jaminan mutu pendidikan. Komitmen peningkatan mutu pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama untuk memajukan pembangunan khsususnya di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Peningkatan pendidikan

dalam misi melalui program peningkatan kompetensi pendidik, kesejahteraan guru, gutu ngaji dan guru madrasah diniyah serta sarana dan prasarana dan stimulus program beasiswa berprestasi bagi siswa dan tenaga pendidik baik dilingkungan sekolah umum maupun diniyah. Kesehatan sebagai salah satu hak dasar rakyat yang dilindungi undang-undang saat ini terus dibangun dan ditingkatkan.

Pembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pandangan diatas bisa terwujud bila diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sisi yang lain ikhtiar peningkatan status akreditasi BLUD puskesmas dan membangun Rumah Sakit baru sesuai kebutuhan. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep tergolong rendah di jawa timur, namun kesejahteraan masih tergolong rendah. Oleh karena itu kualitas Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan daya saing SDM.

MISI 2 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN DARI HULU KE HILIR

Konteks ini dalam rangka memperkuat kemjauan ekonomi masyarakat lokal dengan menggerakan sektor unggulan daerah (desa/kecamatan); yaitu sektor pertanian pangan, dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti peningkatan/pembangunan irigasi atau sumber mata air dengan kelengkapan peralatan yang didukung sarana produksi, bibit unggul, pupuk berimbang serta alat produksi modern yang ramah lingkungan. Sektor pertanian ini dapat ditingkatkan lagi dengan mencobakan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan efisiensi produksi yang dikerjakan dengan pola budidaya terpadu serta pengembangan sistem budidaya produksi dari hulu-hilir yang terkendali dalam tata organisasi yang terpadu dan terkendali dengan baik untuk mencapai nilai tambah yang optimal, meningkatnya swasembada beras, swasembada pangan menuju ketahanan pangan; Bidang peternakan, usaha untuk menguatkan populasi ternak yang ada di Sumenep yang kian hari semakin sedikit. Oleh sebab itu penting dilakukan terobosan yang efektif dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholders melalui system peternakan yang modern yaitu insemenasi bibit ternak. Demikian pula

sektor kelautan dan perikanan, melalui konsep budaya bahari dengan melibatkan masyarakat secara holistik dan pengembangan yang terintegrasi dengan pusat pelelangan ikan, cold storage dari hulu ke hilir. Sumenep banyak potensi pariwisata yang harus dimaksimalkan sehingga berdampak pada penguatan sektor ekonomi masyarakat. Konsepnya adalah pemerintah daerah bersama masyarakat serta melibatkan swasta dalam pengembangan pariwisata di Sumenep tanpa mencerabut nilai-nilai local wisdom. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke Sumenep.

MISI 3 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT

Proses pembangunan wajib didukung oleh semangat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan peningkatan implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sisi laiinya adalah keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, dan peningkatan implementasi open government secara terpadu pada seluruh instansi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa

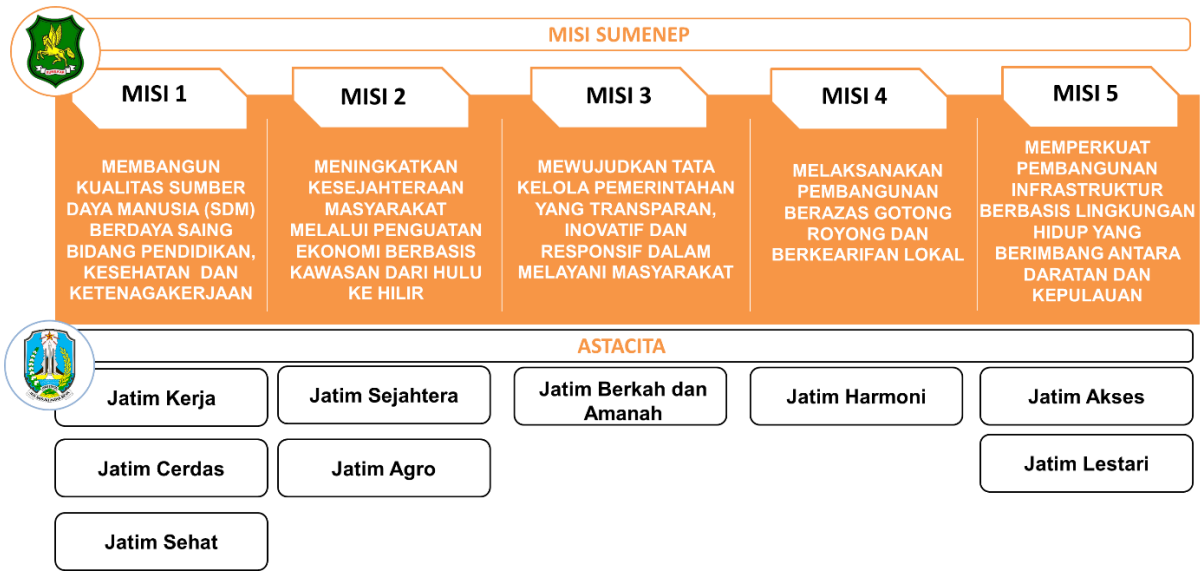
MISI 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERAZAS GOTONG ROYONG DAN BERKEARIFN LOKAL

Masalah sosial senantiasa hadir di berbagai negara, dengan kompleksitas masalah sosial seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, kenakalan remaja dan seks bebas, kekurangan gizi dan penyakit menular. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh

komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Pengentasan maslah sosial tidak semata-mata menjadi kewajiban negara (pemerintah daerah), namun semangat gotong royong yang merupakan watak, karakter dan kepribadian masyarakat kita yang harus diperkuat.

MISI 5 MEMPERKUAT PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR BERBASIS LINGKUNGNAN HIDUP YANG BERIMBANG ANTARA DARATAN DAN KEPULAUAN

Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan untuk wilayah kepulauan, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas dengan pembangunan di wilayah daratan. Oleh sebab itu, penting dilakukan percepatan pembangunan jalan-jalan strategis, irigasi untuk menambah produktivitas hasil pertanian dan perdagangan hasil bumi serta sarana telekomunikasi dan listrik 24 jam.



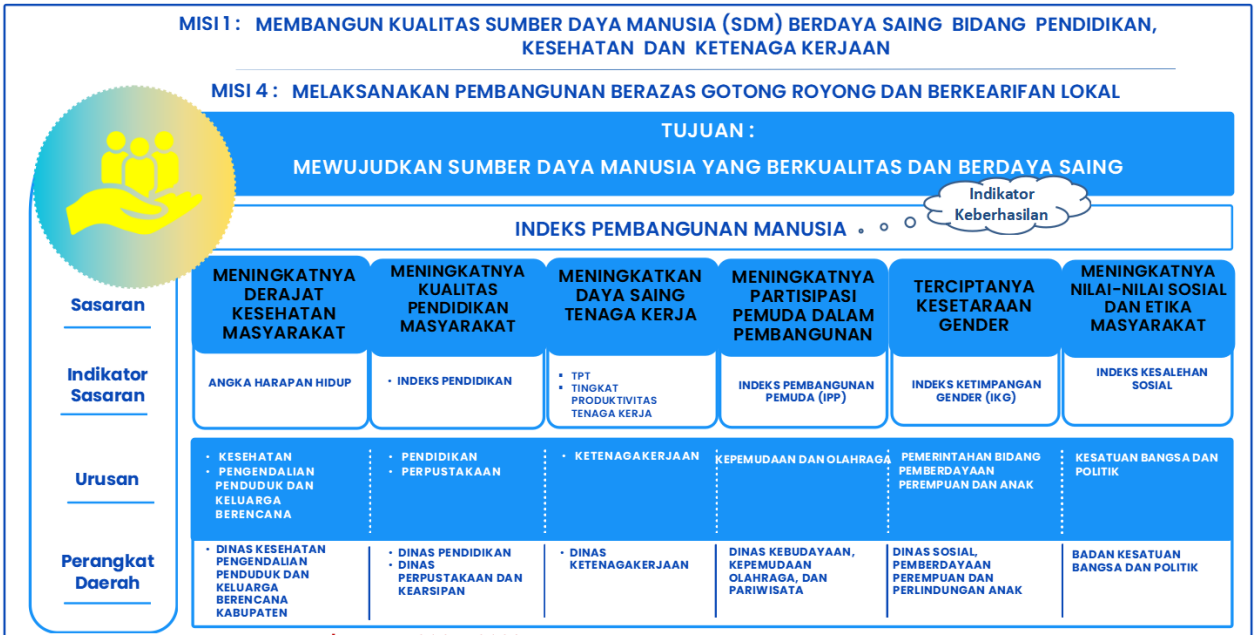
Gambar III- 3 Keselarasan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep

3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

3.1.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 dan 4

Misi 1 terkait Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan dan Misi 4 terkait Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifn Lokal pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing. Adapun sasaran pada Misi 1 dan Misi 4 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
3. Meningaktnya Daya Saing Tenaga Kerja
4. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
5. Terciptanya Kesetaraan Gender
6. Meningkatnya RNilai-Nilai Sosial dan Etika Masyarakat



Gambar III- 4 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 1

3.1.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan pada Misi 2 terkait Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir adalah Menurunkan Kemiskinan dan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing ekonomi Daerah. Sasaran pada tujuan menurunkan kemiskinan adalah:

1. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
2. Meningkatnya Akses Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin



Gambar III- 5 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2 Terkait Kemiskinan

Sedangkan sasaran pada tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing ekonomi Daerah:

1. Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Dalam Perekonomian Daerah
3. Meningkatnya Kapasitas Industri Dan Perdagangan
4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata
5. Meningkatnya Daya Saing Desa



Gambar III- 6 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2 Terkait Ekonomi

2.1.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan pada Misi 3 terkait Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat adalah Birokrasi Yang Bersih, Efektif Dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Dan Pelayanan Publik. Sasaran pada tujuan misi 3 antara lain:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Akuntabel dan berbasis digital
2. Terciptanya budaya birokrasi profesional dan Melayani

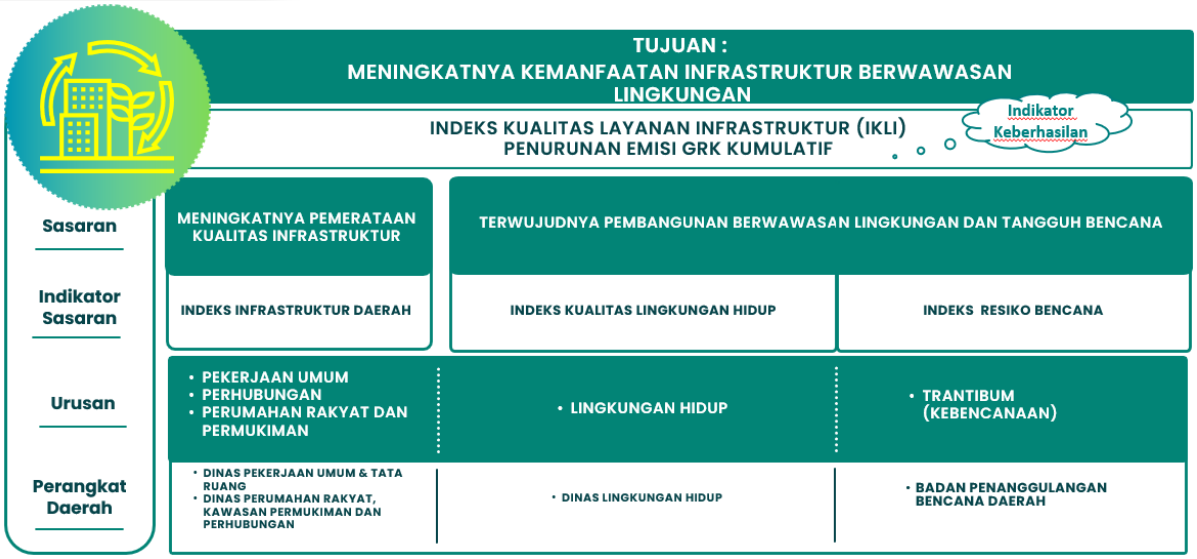


Gambar III- 7 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 3

2.1.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi 5

Tujuan pada misi 5 terkait dengan Memperkuat Pembangunan Infrastuktur Berbasis Lingkungnan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan adalah terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan. Adapun sasaran pada misi 5 adalah:

1. Meningkatnya Pemerataan Kualitas infrastruktur
2. Terwujudnya Pembangunan Berawawasan Lingkungan Dan Tangguh Bencana



Gambar III- 8 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 5

Tabel III- 1 Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Sumenep

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1 Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan **Misi 4 Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifn Lokal**	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,78	70	71,01	71,41	71,8	72,2	72,69
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,65	74,01	74,27	74,52	74,78	75,03	75,28
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,581	0,583	0,585	0,588	0,592	0,596	0,6
		Meningaktnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,69	1,57	1,49	1,41	1,35	1,31	1,29
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	37,45	39,4	40,9	42,4	43,9	45,4	46,9
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,33	60	62	64	66	68	70

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Terciptanya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,549	0,582	0,551	0,535	0,519	0,503	0,487
		Meningkatnya Nilai-Nilai Sosial dan Etika Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	85,91	86	86,5	86,75	88,92	89	89,5
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir	Menurunnya Kemiskinan		% Penduduk Miskin	17,78	17,7	16,44	15,72	15,18	14,27	12,47
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77
			Rasio Gini	0,308	0,300	0,295	0,288	0,278	0,268	0,258
		Meningkatnya Akses Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin	Indeks Kebutuhan Dasar	48,14	48,20	48,30	48,40	48,60	48,80	48,90
	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	3,77	4	4,13	4,2	4,3	4,4	4,5

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Inceremtal Capital Output Ratio (ICOR)	7,03	4,6	4,95	4,95	4,94	4,94	4,93
		Meningkatnya Kontribusi Sektor pertanian, perikanan dan Kehutanan dalam perekonomian Daerah	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan	0,24	0,53	0,83	1,03	1,23	1,34	1,42
		Meningkatnya kapasitas industri dan perdagangan	Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	3.042,55	3.242,55	3.442,55	3.642,55	3.842,55	4.042,55	4.242,55
			Nilai PDRB sektor Perdagangan	5.783,78	6.133,78	6.483,78	6.833,78	7.183,78	7.533,78	7.883,78
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	0,34	0,54	0,57	0,6	0,63	0,66	0,69
		Meningkatnya Daya Saing Desa	Indeks Desa	-	76,10	77,50	78,50	79,50	79,60	79,65

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif Dan Berdaya Saing		Indeks Reformasi Birokrasi	78,08	78,3	79	80	81	82	83
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Akuntabel dan Berbasis Digital	*Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PEMDI)	3,73	3,8	1,62	1,72	1,82	1,92	2,02
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	64,901	65	65,8	66,93	67,3	67,8	68
			SAKIP	BB (70,15)	BB (77)	A (80,1)	A (85)	A (89)	AA (92)	AA (94)
			Nilai Maturitas SPIP	3,16	3,16	3,17	3,175	3,18	3,185	3,9
		Terciptanya budaya birokrasi profesional dan Melayani	Indeks Sistem Merit	0,64	0,75	0,78	0,80	0,81	0,83	0,84
			IKM	84,72	85,85	86,98	88,11	89,24	90,37	91,50
			Indeks Pelayanan Publik	3,42	3,42	3,6	3,75	3,8	3,82	3,85

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Memperkuat Pembangunan Infrastuktur Berbasis Lingkungnan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan	Meningkatnya Kemanfaatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan		Indeks Kuaitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	82,4	82,7	83	83,4	83,7	84	84,5
		Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Kualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	0,72	0,76	0,767	0,775	0,782	0,789	0,796
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	44.308,70	45.194,88	46.098,78	47.020,75	47.961,17	48.920,39	49.898,8
		Terwujudnya Pembangunan Berawawasan Lingkungan Dan Tangguh Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,98	72,69	72,77	72,85	72,93	73,01	73,09
			Indeks Risiko Bencana	137,43	117,36	116,57	115,78	114,99	114,2	111,94

** Indeks SPBE akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintahan Digital mulai tahun 2026, sehingga target disesuaikan*

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Rumusan Strategi RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 berdasarkan masing-masing sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas Masyarakat melalui peningkatan modal manusia yang mampu bersaing dalam dunia tenaga kerja
2. Menguatkan harmonisasi sosial dengan mendorong pembangunan sosial yang inklusif dan kolaboratif
3. Perluasan perlindungan sosial yang adaptif dengan ketepatan data sasaran
4. Mendorong Pertumbuhan ekonomi tinggi dengan menciptakan lingkungan investasi yang berkualitas dan peningkatan produktivitas ekonomi dari hulu sampai ke hilir
5. Memantapkan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada hasil dengan peningkatan sistem manajemen pemerintah yang adapatif dan transparan serta layanan publik yang responsif
6. Meningkatkan konektivitas jalan, transportasi dan telekomunikasi, antar wilayah dan perluasan akses terhadap energi
7. Peningkatan ekosistem lingkungan hidup yang berkualitas melalui peningkatan ketahanan air dan bencana

3.2.2 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD

Pentahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan ini akan menjadi panduan awal dalam menyusun kebijakan per tahunnya. Memperhatikan arah kebijakan pada tiap misi dan arah kebijakan pada RPJMN maka ditetapkan penahapan pembangunan, sebagai berikut Berikut pentahapan Pembangunan Kabupaten Sumenep pada periode RPJMD2026 - 2030

2026	2027	2028	2029	2030
MEMANTAPKAN STABILISASI KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING SDM, EKONOMI DAERAH SERTA MENGUATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN MERATA	MENDORONG SUMBERDAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKUALITAS	PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF YANG BERDAMPAK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	MENGUATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI MELALUI PENINGKATAN NILAI TAMBAH, SERTA SDM YANG UNGGUL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MERATA	MEWUJUDKAN KABUPATEN SUMENEP YANG MANDIRI DAN ADIL YANG BERLANDASKAN EKONOMI MAJU DAN MERATANYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tahun 2026 : **Memantapkan Stabilisasi Kemandirian Dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah Serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Adil dan Merata**

Arah Kebijakan Utama : Tahun 2026 menjadi fase strategis dalam rangkaian tahapan pembangunan Kabupaten Sumenep, di mana fokus diarahkan pada upaya memantapkan stabilisasi dan keberlanjutan transformasi daerah. Tema pembangunan tahun ini menekankan pada penguatan pondasi kemandirian daerah, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan produktif, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep memprioritaskan pembangunan SDM melalui perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan

penguatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja lokal. Di sisi ekonomi, pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta UMKM akan terus diperkuat melalui inovasi, digitalisasi, dan peningkatan infrastruktur penunjang.

Selaras dengan itu, stabilisasi fiskal dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel akan terus diperkuat untuk mendukung efektivitas pelayanan publik. Penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat juga menjadi langkah nyata untuk menguatkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Tahun 2027 : **Mendorong Sumberdaya Manusia Yang Produktif Dan Berdaya Saing Untuk Pembangunan Ekonomi Yang Berkualitas**

Arah Kebijakan Utama : Tema pembangunan ini mencerminkan lanjutan dari tahapan sebelumnya yaitu fondasi, untuk memanfaatkan momentum pembangunan sebelumnya dengan menempatkan pengembangan SDM sebagai pusat strategi pembangunan yang terpadu.

Dalam konteks ini, penguatan kapasitas dan produktivitas SDM difokuskan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kejuruan berbasis kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan karakter, inovasi, dan kewirausahaan masyarakat. Dukungan terhadap kelompok usia produktif dan generasi muda juga diperluas, guna menyiapkan tenaga kerja yang

adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, dengan menekankan pada sektor-sektor unggulan lokal seperti pertanian modern, kelautan, industri kreatif, serta pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Pemanfaatan teknologi digital dan penguatan jejaring usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berkomitmen terhadap peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan ketimpangan wilayah, serta penguatan tata kelola pembangunan yang partisipatif dan berbasis data.

Tahun 2028	:	**Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Yang Berdampak Kesejahteraan Masyarakat**
Arah Kebijakan Utama	:	percepatan ekonomi dilakukan melalui optimalisasi potensi unggulan daerah, peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM, serta memperkuat keterhubungan antarwilayah melalui infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Dukungan terhadap investasi yang ramah lingkungan dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan juga menjadi motor penggerak pertumbuhan. Aspek inklusivitas ditegaskan melalui penguatan peran masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan,

dan perlindungan sosial, serta penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menekankan pentingnya digitalisasi ekonomi desa dan pengembangan kawasan-kawasan potensial secara terpadu.

Di sisi lain, tata kelola pembangunan terus diperkuat melalui transparansi, akuntabilitas, dan sinergi lintas sektor, guna memastikan efektivitas program dan kebijakan. Pendekatan berbasis data dan perencanaan partisipatif menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan yang berorientasi pada hasil.

Tahun 2029	:	**Menguatkan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Melalui Peningkatan Nilai Tambah, Serta Sdm Yang Unggul Dan Kesejahteraan Sosial Yang Merata**
Arah Kebijakan Utama	:	fase penguatan dan konsolidasi pembangunan Kabupaten Sumenep menuju capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Melalui tema pembangunan tahun ini, pemerintah daerah menekankan pentingnya strategi pembangunan yang mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, penguatan sumber daya manusia yang unggul, serta pemerataan kesejahteraan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Arah pembangunan difokuskan pada hilirisasi sektor-sektor strategis daerah, seperti pertanian, kelautan-perikanan, industri pengolahan lokal, pariwisata, dan UMKM, guna menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan memperluas kesempatan kerja. Dukungan terhadap inovasi, teknologi tepat guna, dan penguatan

ekosistem kewirausahaan menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi daerah menuju produktivitas yang tinggi.

Pada saat yang sama, pembangunan SDM diarahkan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat, cerdas, berdaya saing, serta adaptif terhadap perubahan global. Program pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan kerja, serta penguatan kapasitas generasi muda dan perempuan menjadi prioritas utama dalam menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Dalam dimensi sosial, penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan komunitas, pembangunan berbasis desa, serta penguatan kelembagaan sosial menjadi strategi utama dalam menciptakan pemerataan pembangunan.

Tahun 2030	:	**Mewujudkan Kabupaten Sumenep Yang Mandiri Dan Adil Yang Berlandaskan Ekonomi Maju Dan Meratanya Kesejahteraan Masyarakat**
Arah Kebijakan Utama	:	Tahun 2030 menjadi momentum strategis sekaligus penutup tahapan pembangunan jangka menengah dan Kabupaten Sumenep. Dengan mengusung tema besar "Mewujudkan Kabupaten Sumenep yang Mandiri dan Adil yang Berlandaskan Ekonomi Maju dan Meratanya Kesejahteraan Masyarakat", arah pembangunan

difokuskan pada konsolidasi akhir dan penguatan capaian-capaian pembangunan sebelumnya untuk memastikan transformasi struktural daerah berjalan secara utuh dan berkelanjutan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas, dengan penekanan pada perluasan pasar, peningkatan investasi, dan penguatan industri berbasis potensi lokal yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan.

Pemerataan kesejahteraan terus ditingkatkan melalui penguatan pelayanan dasar, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengurangan ketimpangan wilayah.

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan juga terus dijaga melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, serta karakter masyarakat yang adaptif, inovatif, dan berintegritas. Pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berbasis data menjadi penggerak utama untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang responsif dan berkeadilan.

Dengan demikian, tahun 2030 menjadi titik kulminasi dari perjalanan pembangunan Kabupaten Sumenep menuju daerah yang maju secara ekonomi, adil dalam distribusi kesejahteraan, serta mandiri dalam menentukan arah pembangunan masa depan, sejalan dengan visi besar pembangunan nasional

3.2.3 LOKUS PEMBANGUNAN WILAYAH

Penentuan lokus pembangunan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, terutama keselarasan spasial dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep. Selain itu, penetapan lokus pembangunan juga disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Sumenep dapat berjalan secara terarah, merata, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan memperhatikan potensi dan karakteristik setiap wilayah, perencanaan ini diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Penentuan lokus pembangunan wilayah dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 tidak hanya mempertimbangkan aspek spasial, tetapi juga selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dimensi utama yang menjadi landasan dalam menentukan lokus ini mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, pemberantasan kemiskinan, peningkatan ekonomi dan pariwisata, pemerataan serta peningkatan kualitas infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Setiap wilayah dianalisis berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pencapaian dimensi-dimensi tersebut, sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam proses penetapannya, digunakan mekanisme skoring untuk menilai tingkat urgensi dan potensi setiap wilayah dalam memenuhi indikator pembangunan. Pendekatan skoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan mampu memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Dengan adanya analisis berbasis skoring, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sumenep dapat lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh wilayah.

Berikut ini adalah skoring penentuan lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Sumenep :

Tabel III- 2 Skoring penentuan lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Penilaian										Total	Kriteria
		Dimensi Infrastruktur & Lingkungan		Dimensi Kemiskinan		Dimensi SDM		Dimensi Sosial & Ekonomi		Dimensi Reformasi Birokrasi			
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai		
1	Pragaan	1	0.25	1	0.25	1	0.15	1	0.25	3	0.3	1.2	Lokus Pendukung
2	Bluto	3	0.75	3	0.75	2	0.3	3	0.75	3	0.3	2.85	Lokus Utama
3	Saronggi	2	0.5	2	0.5	2	0.3	2	0.5	3	0.3	2.1	Lokus Menengah
4	Giligenting	1	0.25	1	0.25	2	0.3	1	0.25	3	0.3	1.35	Lokus Pendukung
5	Talango	2	0.5	2	0.5	2	0.3	2	0.5	3	0.3	2.1	Lokus Menengah
6	Kalianget	3	0.75	3	0.75	2	0.3	3	0.75	3	0.3	2.85	Lokus Utama
7	Kota Sumenep	3	0.75	3	0.75	2	0.3	3	0.75	3	0.3	2.85	Lokus Utama
8	Batuan	3	0.75	3	0.75	2	0.3	3	0.75	3	0.3	2.85	Lokus Utama
9	Lenteng Ganding	1	0.25	1	0.25	1	0.15	1	0.25	3	0.3	1.2	Lokus Pendukung
10	Ganding	2	0.5	2	0.5	1	0.15	2	0.5	3	0.3	1.95	Lokus Menengah
11	Guluk-guluk	1	0.25	1	0.25	1	0.15	1	0.25	3	0.3	1.2	Lokus Pendukung
12	Pasongsongan	2	0.5	2	0.5	2	0.3	2	0.5	3	0.3	2.1	Lokus Menengah
13	Ambunten	2	0.5	2	0.5	2	0.3	2	0.5	3	0.3	2.1	Lokus Menengah
14	Rubaru	3	0.75	3	0.75	2	0.3	3	0.75	3	0.3	2.85	Lokus Utama
15	Dasuk	2	0.5	2	0.5	1	0.15	2	0.5	3	0.3	1.95	Lokus Menengah
16	Manding	1	0.25	1	0.25	1	0.15	1	0.25	3	0.3	1.2	Lokus Pendukung
17	Batuputih	2	0.5	2	0.5	1	0.15	2	0.5	3	0.3	1.95	Lokus Menengah
18	Gapura	1	0.25	1	0.25	1	0.15	1	0.25	3	0.3	1.2	Lokus Pendukung
19	Batang Batang	2	0.5	2	0.5	2	0.3	2	0.5	3	0.3	2.1	Lokus Menengah
20	Dungkek	2	0.5	2	0.5	1	0.15	2	0.5	3	0.3	1.95	Lokus Menengah
21	Nonggunong	2	0.5	2	0.5	1	0.15	2	0.5	3	0.3	1.95	Lokus Menengah
22	Gayam	2	0.5	2	0.5	1	0.15	2	0.5	3	0.3	1.95	Lokus Menengah
23	Raas	2	0.5	2	0.5	1	0.15	2	0.5	3	0.3	1.95	Lokus Menengah
24	Sapeken	1	0.25	1	0.25	2	0.3	1	0.25	3	0.3	1.35	Lokus Pendukung
25	Arjasa	3	0.75	3	0.75	1	0.15	3	0.75	3	0.3	2.7	Lokus Utama
26	Kangayan	2	0.5	2	0.5	1	0.15	2	0.5	3	0.3	1.95	Lokus Menengah
27	Masalembu	3	0.75	3	0.75	1	0.15	3	0.75	3	0.3	2.7	Lokus Utama

Keterangan :

2,35 – 3,00 Lokus Utama.
1,68 – 2,34 Lokus Menengah
1,00 – 1,67 Lokus Pendukung

Berdasarkan hasil analisis skoring yang mempertimbangkan berbagai dimensi strategis, seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,

pengentasan kemiskinan, penguatan sektor ekonomi dan pariwisata, pemerataan serta peningkatan infrastruktur, serta reformasi birokrasi, telah ditetapkan pemetaan lokus pembangunan di Kabupaten Sumenep. Hasil analisis ini menghasilkan tiga kategori lokus pembangunan yang didasarkan pada tingkat urgensi dan potensi kontribusi masing-masing wilayah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Lokus utama mencakup 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Bluto, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan, Kecamatan Ganding, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Arjasa, dan Kecamatan Masalembu. **Lokus menengah** terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Saronggi, Kecamatan Talango, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gayam, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Raas, dan Kecamatan Kangayan, serta **Lokus pendukung** mencakup 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Pragaan, Kecamatan Giligenting, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Manding, Kecamatan Gapura, dan Kecamatan Sepeken.

Perbedaan dalam kategori lokus ini lebih menekankan pada prioritas pengembangan berdasarkan tingkat urgensi dan permasalahan wilayah, bukan berarti mengesampingkan daerah pendukung. Setiap wilayah tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep, dengan strategi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing kecamatan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.



Gambar III- 9 Lokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Sumenep

1. Lokus Utama

Wilayah yang termasuk dalam lokus utama pembangunan daerah diantaranya Kecamatan Bluto, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan, Kecamatan Ganding, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Arjasa, dan Kecamatan Masalembu memiliki potensi dan permasalahan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang lebih krusial dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan ini difokuskan untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi kecamatan di sekitarnya.

Dengan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari pesisir hingga kepulauan, kawasan ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, industri, serta pariwisata berbasis budaya dan sejarah.

- Pembangunan dan pengembangan Agropolitan Madura dan Kepulauan dengan memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui inovasi pertanian dan rantai nilai agribisnis.
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pergaraman Kalianget akan mengoptimalkan potensi garam lokal dengan mendorong industrialisasi dan hilirisasi, sehingga meningkatkan daya saing produk garam di pasar nasional maupun global.

- Sektor kelautan menjadi salah satu pilar utama dengan adanya Minapolitan Madura dan Kepulauan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya melalui penerapan teknologi serta penguatan akses pasar.
- Pembangunan Kawasan Perkotaan Kota Mandiri Batuan juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan pusat ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi di sektor perdagangan serta jasa.
- Sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya juga menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan ini, seperti pelestarian Asta Panembahan Blingi Sepudi, Benteng Kalimo'ok, serta revitalisasi Kawasan Kota Tua Kalianget yang memiliki nilai historis tinggi. Begitu pula dengan pelestarian Klenteng Piao Sian Ling Kong, Komplek Asta Tinggi, dan Keraton Sumenep yang tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan dan mendorong ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
- Penguatan konektivitas antarwilayah dengan perbaikan akses jalan, pelabuhan, serta transportasi laut guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, khususnya untuk wilayah kepulauan seperti Arjasa dan Masalembu.

Dengan fokus pada lokus utama ini, pengembangan delapan kecamatan tersebut menjadi suatu keharusan karena memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan identitas budaya lokal. Optimalisasi infrastruktur dan konektivitas antarwilayah juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar strategi pembangunan ini berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Sumenep.

2. Lokus Menengah

12 kecamatan yang tergolong dalam lokus menengah antara lain Kecamatan Saronggi, Kecamatan Talango, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gayam, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Raas, dan Kecamatan Kangayan memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep. Namun, beberapa kecamatan masih menghadapi tantangan dalam infrastruktur,

konektivitas, dan aksesibilitas. Oleh karena itu, arah pengembangan kawasan ini difokuskan pada penguatan sektor ekonomi lokal serta peningkatan infrastruktur dan konektivitas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi di kawasan ini diarahkan pada optimalisasi sektor unggulan yang telah berkembang di masing-masing kecamatan, yaitu:

- Penguatan sektor perikanan dan kelautan dengan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, Pengembangan industri pengolahan hasil laut dan Pemberdayaan nelayan melalui akses permodalan, teknologi, dan peningkatan akses pasar, khususnya di Kecamatan Ambunten, Pasongsongan, Dungkek, Raas, dan Kangayan yang memiliki potensi besar sebagai sentra perikanan.
- Optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi sistem irigasi, pemanfaatan pupuk organik, serta penguatan kelembagaan petani di Kecamatan Batuputih, Batang-Batang, Dasuk, dan Talango dengan komoditas unggulan seperti jagung, kelapa, dan tembakau.
- Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM
- Pengembangan potensi pariwisata berbasis alam dan budaya dengan Pengembangan ekowisata bahari di Kecamatan Nonggunong, Dungkek, dan Raas, termasuk wisata selam dan pantai, pelestarian dan pengelolaan wisata budaya di Kecamatan Talango dan Saronggi yang memiliki potensi sejarah dan budaya yang unik, serta peningkatan sarana dan promosi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendukung ekonomi kreatif masyarakat setempat
- Pembangunan dan perbaikan jalan di Kecamatan Gayam, Batuputih, Pasongsongan, dan Batang-Batang guna memperlancar distribusi hasil produksi lokal.
- Pengembangan dan modernisasi pelabuhan dan Pengadaan sarana transportasi laut yang lebih baik untuk meningkatkan akses antara kecamatan di daratan dan kepulauan di Kecamatan Raas, Dungkek, dan Kangayan untuk mempercepat arus barang dan mobilitas masyarakat kepulauan.
- Penyediaan dan peningkatan layanan listrik di kecamatan kepulauan seperti Nonggunong dan Kangayan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat

- Pengembangan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

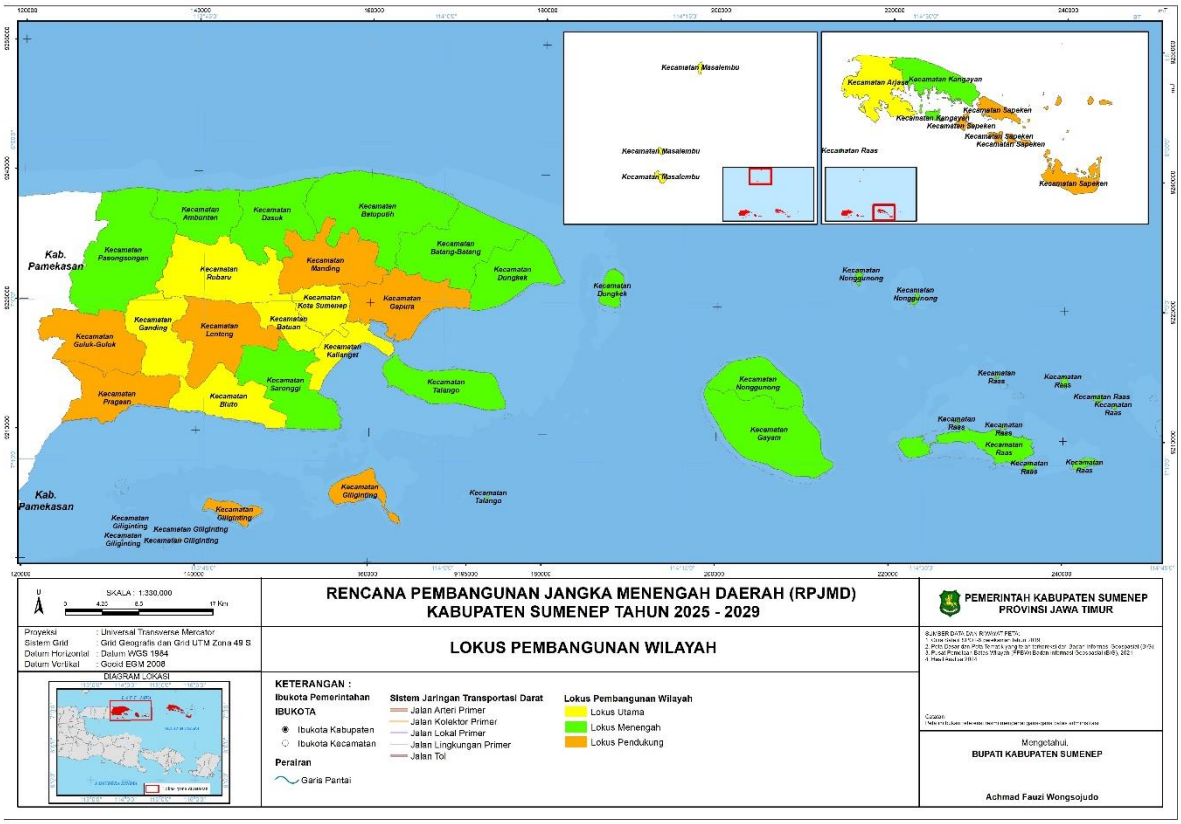
3. Lokus Pendukung (Tidak Ada)

Tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Pragaan, Kecamatan Giligenting, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Manding, Kecamatan Gapura, dan Kecamatan Sepeken, berperan sebagai lokus pendukung dalam pembangunan Kabupaten Sumenep. Wilayah-wilayah ini memiliki peran strategis dalam menopang sektor ekonomi utama, baik sebagai pusat produksi, distribusi, maupun sebagai kawasan penyangga bagi wilayah prioritas. Oleh karena itu, arah pengembangan kawasan ini difokuskan pada penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

- Optimalisasi Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan di Kecamatan Pragaan, Lenteng, Guluk-Guluk, dan Manding memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup besar, terutama dalam produksi tembakau, padi, dan hortikultura
- Penguatan peternakan sapi dan kambing di Kecamatan Guluk-Guluk dan Lenteng untuk mendukung produksi pangan dan industri olahan daging
- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan, seperti dermaga dan fasilitas cold storage, serta Penguatan kelembagaan nelayan serta akses pembiayaan dan teknologi dalam pengelolaan hasil laut untuk meningkatkan daya saing hasil laut di Kecamatan Giligenting dan Sepeken yang memiliki potensi besar dalam perikanan tangkap dan budidaya
- Pemberdayaan serta digitalisasi UMKM berbasis kerajinan tangan, olahan pangan lokal, serta sektor jasa di Kecamatan Manding dan Gapura
- Pengembangan Wisata Berbasis Budaya dan Alam di Kecamatan Giligenting dan Sepeken memiliki potensi wisata bahari dan Kecamatan Guluk-Guluk dan Manding memiliki potensi wisata budaya dan sejarah.
- Peningkatan jalan penghubung antara Kecamatan Pragaan, Lenteng, dan Gapura bertujuan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perdagangan, sementara pembangunan akses jalan ke kawasan pesisir di Kecamatan Giligenting dan Sepeken mendukung sektor perikanan dan pariwisata.

- Modernisasi pelabuhan di Giligenting dan Sepeken akan meningkatkan konektivitas antarwilayah kepulauan dan daratan, didukung oleh peningkatan sarana transportasi laut untuk mempercepat mobilitas masyarakat serta distribusi barang.
- Perluasan jaringan listrik di Sepeken dan Giligenting diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara digitalisasi desa melalui peningkatan akses internet akan mempercepat transformasi ekonomi digital di sektor UMKM, pendidikan, dan layanan publik.

Berikut adalah sebaran pembagian lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Sumenep :



Gambar III- 10 Lokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Sumenep

3.2.4 PROGRAM PRIORITAS

Perumusan prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji – janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan subtansi dasar dari janji – janji Bupati terpilih. Janji –

janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 atau kedalam kebijakan umum maupun strategi. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Adapun program unggulan Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:



Gambar III- 11 Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep

Secara lebih detail terdapat program kerja Bupati dan Wakil Bupati yang diantara nya terdapat program unggulan. Berikut merupakan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029:

Tabel III- 3 Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Sumenep

BIDANG	PROGRAM KERJA	
PENDIDIKAN	Penguatan karakter dan kesejahteraan guru dalam Pendidikan	1) Penguatan pendidikan literasi pada semua jenjang pendidikan dan Masyarakat 2) Penguatan soft skill dan pembentukan karakter bagi siswa dan santri serta para tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan 3) Peningkatan kompetensi guru madrasah diniyah dan tahfidz Al-Qur'an 4) Pendidikan Paket A,B,C yang penyelenggaraannya berbasis pendekatan wilayah

BIDANG	PROGRAM KERJA	
		5) Peningkatan mutu pendidikan berdaya saing dan berbasis nilai-nilai kebudayaan yang berkearifan lokal 6) Pemberian insentif guru dengan syarat tertentu
	Terciptanya sekolah unggul di setiap kecamatan	1) Peningkatan kualitas Infrastruktur dan sarpras pendidikan
	Beasiswa, Uang Pembinaan, Hibah, dan Bansos	2) Pemberian penghargaan pada siswa, santri, dan pendidik (guru) berprestasi dalam bentuk uang pembinaan 3) pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu dengan selektif 4) pemberian bantuan seragam bagi siswa baru SD dan madrasah diniyah 'Ula dalam bentuk uang senilai kebutuhan
	Penguatan Nilai-Nilai Local Wisdom	Suplemen buku/majalah dan media penguatan budaya lokal melalui lembaga pendidikan
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN ASRI	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan lanjutan	1) Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan 24 jam, terutama pada fasilitas kesehatan puskesmas 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan lanjutan di rumah sakit 3) Peningkatan manajemen BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit 4) Pengadaan Perahu Jenazah di Kepulauan berbasis cakupan wilayah 5) Pengadaan Mobil jenazah di kepulauan secara bertahap
	Peningkatan Kapasitas dan Ketersediaan Tenaga Kesehatan	Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan RSUD baik daratan terutama kepulauan

BIDANG	PROGRAM KERJA	
	Lingkungan Asri dan Sehat	1) Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH); 2) Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RTPRA) di wilayah kecamatan
KETENAGAKERJAAN	Peningkatan kesempatan kerja	1) Job fair pemuda/santri; 2) pelatihan berbasis kompetensi; 3) pelatihan bagi calon pekerja migran indonesia (PMI). 4) fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan
EKONOMI KAWASAN	Pengembangan Pertanian, Kelautan dan Peternakan dari hulu ke hilir	1) Peningkatan produksi dan daya saing komoditi unggulan bidang pertanian berbasis riset dan inovasi serta Mendorong pertanian organik 2) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana kawasan perikanan tangkap dan budidaya 3) Mendorong pemanfaatan Cold Storage dari hulu ke hilir 4) Peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pengamanan ekosistem laut/wilayah observasi. 5) Program inseminasi buatan untuk meningkatkan populasi 6) Program bantuan bibit unggul ternak sapi, kambing dan ayam 7) Program Pelayanan Kesehatan Hewan
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM	Penguatan Ekonomi Masyarakat	1) peningkatan manajemen pengelolaan pasar tradisional 2) peningkatan kualitas sarana prasarana pasar tradisional 3) Penguatan sentra industri Kecil 4) Penguatan peran BUMDes dan Koperasi dalam kegiatan perekonomian Desa

BIDANG	PROGRAM KERJA	
	Percepatan Pembangunan Ekonomi berbasis Penguatan Desa (pasar, pertanian, pariwisata dan kopdes)	1) membentuk pasar induk pertanian terintegrasi berbasis kewilayahan dan potensi 2) Penguatan produk unggulan desa sesuai potensi wilayah, sehingga dapat memunculkan one village one product 3) Penguatan sektor pariwisata atau potensi pariwisata melalui penguatan desa 4) Pembentukan koperasi desa berbasis potensi wilayah
INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Mewujudkan Kawasan Wisata Sumenep	1) Peningkatan sarana dan prasarana destinasi pariwisata; 2) Peningkatan kapasitas (SDM) pengelola wisata; 3) Peningkatan branding wisata kabupaten Sumenep 4) penguatan perijinan pengembangan wisata
	Pengembangan ekonomi kreatif	1) Pengembangan industri kecil, kerajinan rumah tangga, inovasi hasil pertanian dan kelautan; 2) Penguatan Kalender Event Pariwisata Tahun 2026 - 2030
MENGUATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	1) Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik 2) Kolaborasi Riset dan Inovasi
	Peningkatan kapasitas Birokrasi	1) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 2) Penyelenggaraan manajemen ASN berbasis prinsip meritokrasi melalui implementasi Manajemen Talenta.
	Penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital	

BIDANG	PROGRAM KERJA	
PENANGANAN MASALAH SOSIAL	Peningkatan penanganan masalah sosial	1) Peningkatan kualitas Rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial 2) Fasilitasi pelayanan masalah sosial dan lainnya melalui Klinik Sosial yang difasilitasi melalui Silapor 112.
	Peningkatan kapasitas SDM perempuan	Keterlibatan perempuan dalam peningkatan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata dan ekonomi kreatif
	Perlindungan terhadap perempuan dan Anak	1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2) Advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak
INFRASTRUKTUR KEPULAUAN	Peningkatan Insfrastruktur kawasan strategis, kepulauan & kantong - kantong kemiskinan	1) Penanganan jaringan jalan poros di kawasan strategis, kepulauan & kantong - kantong kemiskinan; 2) Penyediaaan infrastruktur air minum dan sanitasi di kawasan strategis, kepulauan & kantong - kantong kemiskinan; 3) Penyediaaan infrastruktur sanitasi dan limbah di kawasan strategis, kepulauan & kantong - kantong kemiskinan
	Percepatan Iplementasi energi baru terbarukan untuk Listrik 24 jam dan Telekomunikasi	1) Percepatan penyediaan listrik tenaga surya 24 jam 2) Pembangunan jaringan internet pedesaan dengan mengembangkan Bumdes.
	Penguatan Ekonomi Kepulauan	1) Mengembangkan pulau Kangean sebagai lumbung pangan; (Optimalisasi kelembagaan pangan di Pulau Kangean untuk mendukung ketersediaan pangan) 2) optimalisasi Lahan kering

BIDANG	PROGRAM KERJA	
		menjadi produktif. (Meningkatkan produksi potensi unggulan komoditas pertanian)
PERHUBUNGAN	Peningkatan Moda Transportasi Daratan dan Kepulauan	1) Meningkatkan pelayanan transportasi Daratan dan Kepulauan 2) Pembangunan Terminal Tipe C; 3) Penyediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam rangka konektivitas antar wilayah
	Peningkatan Kapasitas Bandara	Mendorong bandara Trunojoyo sebagai pusat pemeliharaan dan terminal pesawat kecil

Program Prioritas yang telah di identifikasi diatas, dilakukan transformasi kedalam Program Nomenklatur dan Cascading Perencanaan sebagai berikut:

Tabel III- 4 Program Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Misi 1 Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		*Angka Harapan Hidup*		
			Meningkatnya Aksesibilitas layanan kesehatan	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	PD Pengampu Bidang Kesehatan
				Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
			Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis		
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat		
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Persentase Lanjut usia yang mandiri		
				Prevalensi Obesitas > 18 tahun		
				Persentase Hipertensi dalam pengendalian		
				Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		
				Persentase merokok penduduk usia 10 -21 taun		
				Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN		
			Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna		
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		*Indeks Pendidikan*		
			Meningkatnya dedikasi tenaga pendidik	indeks distribusi guru	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	PD Pengampu Bidang Pendidikan
			Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Indikator kinerja :	Program Pengelolaan Pendidikan	
				Angka Partisipasi SD, SMP, PAUD, Kesetaraan		
				APS SD		
				APS SMP		
				APS PAUD		
				APS Kesetaraan		
			Meningkatnya Pengembangan warisan budaya bangsa berupa koleksi dan naskah kuno yang dijaga dan dilestarikan	Persentase Pengembangan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	PD Pengampu Bidang Perpustakaan
		Meningaktnya Daya Saing Tenaga Kerja		*Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*		
			Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD Pengampu Bidang Tenaga Kerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				berbasis kompetensi		
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
			Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	PD Pengampu Bidang Tenaga Kerja
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan		*Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)*		
			Meningkatnya Kualitas Pemuda Yang Unggul dan Berprestasi	Prosentase peningkatan Pemuda Yang Unggul dan Berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	PD Pengampu Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
		Terciptanya Kesetaraan Gender		*Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*		
			Meningkatnya peran perangkat daerah dalam responsif gender	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	persentase Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk TPPO	Program Perlindungan Perempuan	
			Meningkatnya akses pemenuhan hak anak	strata kabupaten layak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
			Meningkatnya peran organisasi / lembaga perlindungan perempuan dan anak	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	
Misi 4 Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifn Lokal		*Meningkatnya Nilai-Nilai Sosial dan Etika Masyarakat*		*Indeks Kesalehan Sosial*		
			Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang meningkat wawasan kebangsaannya	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	PD Pengampu Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Meningkatnya Kulaitas Ormas	Persentase Ormas yang Berperan dalam Pembangunan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya koordinasi dalam deteksi dini	Persentase data dan informasi yang terkumpul / berkualitas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					Penanganan Konflik Sosial	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir	**Menurunnya Kemiskinan**			**% Penduduk Miskin**		
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		*Indeks Daya Beli*		
			Meningkatnya Kapasitas kelembagaan UMKM	Jumlah UMKM Baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Rasio Gini		
		Meningkatnya Akses Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin		*Indeks Kebutuhan Dasar*		
			Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase masyarakat yang terlindungi dari resiko kerentanan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	PD Pengampu Bidang Sosial
			Meningkatnya kapasitas PSKS	Persentase PPKS yang mendapat rehabilitasi	Program Rehabilitasi Sosial	PD Pengampu Bidang Sosial
			Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Layanan Jaringan Trayek Angkutan Laut	Rasio Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	PD Pengampu Bidang Perhubungan
			Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Program Kawasan Permukiman	PD Pengampu Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	1. Tanaman Pangan : - Padi - Jagung - Kedele - Kacang Hijau - Ubi Kayu 2. Hortikultura : - Bawang Merah - Cabe Besar - Cabe Kecil 3. Perkebunan : - Kelapa - Cabe Jamu - Jambu Mete - Siwalan - Tembakau 4. Peternakan - Daging Hewan Ternak - Telur	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	PD Pengampu Bidang Ketahanan Pangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pemenuhan Prasarana Pertanian yang Berkualitas	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Daerah			**Pertumbuhan Ekonomi**		
		Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah		*Inceremtal Capital Output Ratio (ICOR)*		
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Kamtibmas dan Pelanggaran Perda /Perkada yang terselesaikan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	PD Pengampu Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	Program Promosi Penanaman Modal	PD Pengampu Bidang Penanaman Modal
			Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Survey kepuasan masyarakat (SKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	PD Pengampu Bidang Penanaman Modal
		Meningkatnya Kontribusi Sektor pertanian, perikanan dan Kehutanan dalam perekonomian Daerah		*Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan*		
			Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PD Pengampu Bidang Kelautan Dan Perikanan
			Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase pertumbuhan produksi olahan perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	PD Pengampu Bidang Kelautan Dan Perikanan
			Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	1. Tanaman Pangan : - Padi - Jagung - Kedele - Kacang Hijau - Ubi Kayu 2. Hortikultura : - Bawang Merah - Cabe Besar - Cabe Kecil 3. Perkebunan : - Kelapa - Cabe Jamu - Jambu Mete - Siwalan - Tembakau 4. Peternakan - Daging Hewan Ternak - Telur	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	PD Pengampu Bidang Ketahanan Pangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pemenuhan Prasarana Pertanian yang Berkualitas	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Meningkatnya kapasitas industri dan perdagangan		*Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan*		
			Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase pertumbuhan produksi olahan perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan akses pangan masyarakat	Harga Pangan Terkendali	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	PD Pengampu Bidang Urusan Pangan
				Persentase ketersediaan pangan masyarakat		
				Nilai PDRB sektor Perdagangan		
			Meningkatnya Kapasitas kelembagaan UMKM	Jumlah UMKM Baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berkembang Skala usahanya	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	PD Pengampu Bidang Perindustrian
			Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Industri	Persentase Kesesuaian data dan informasi dengan SIINAS	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	PD Pengampu Bidang Perindustrian
			Meningkatnya Skala Usaha terhadap UMKM	Persentase UMKM yg Meningkat skala Produksi	Program Pengembangan Umkm	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Layak	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terstandarisasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PD Pengampu Bidang Perdagangan
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata		*Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD*		
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Prosentase peningkatan pemasaran wisata	Program Pemasaran Pariwisata	PD Pengampu Bidang Pariwisata
			Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang dikembangkan	Program Pengembangan Kebudayaan	PD Pengampu Bidang Kebudayaan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Meningkatnya Kesenian Lokal Yang Dikembangkan	Persentase Kesenian Lokal Yang Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya industri ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Industri Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PD Pengampu Bidang Pariwisata
			Meningkatnya industri ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Industri Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Meningkatnya Daya Saing Desa		*Indeks Desa*		
			Meningkatnya Keterpaduan Penataan Wilayah Desa dengan Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	Program Penataan Desa	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			Meningkatkan tindak lanjut hasil Kerjasama	Persentase MOU kerjasama yang ditindaklanjutin oleh Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			Meningkatnya legalitas kelembagaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang memiliki dasar hukum pembentukan yang sah (SK Kepala Desa atau Perdes)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	**Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif Dan Berdaya Saing**			**Indeks Reformasi Birokrasi**		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Akuntabel dan Berbasis Digital		**Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PEMDI)*		
			Meningkatnya Tingkat Implementasi Arsitektur TIK	Persentase Kualitas Aplikasi Arsitektur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PD Pengampu Bidang Bidang Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Meningkatnya Penguatan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Tahapan Penganggaran , Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	PD Pengampu Bidang BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				SAKIP		
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Kinerja	Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PD Pengampu Bidang PERENCANAAN
				Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD		
				Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD		
			Meningkatnya Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam RKPD		
			Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas (Data yang Valid)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah)	PD Pengampu Bidang SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemkab. Sumenep	Nilai MRI	Program Penyelenggaraan Pengawasan	PD Pengampu Bidang PENGAWASAN
			Meningkatnya Efektivitas Pencegahan Korupsi melalui Penindakan	Nilai SPI		
				Nilai MCSP		
			Meningkatnya Kapabilitas APIP melalui Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP		
			Meningkatnya Kualitas Hasil Evaluasi Internal SAKIP	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP Kabupaten		
				Nilai Maturitas SPIP		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Meningkatnya efektivitas Pencegahan Korupsi melalui Pencegahan	Nilai IEPK	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	PD Pengampu Bidang PENGAWASAN
			Meningkatnya PD / Unit Layanan yg mendapatkan ZI/WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah / Unit Layanan yg mendapatkan Predikat ZI/ WBK/ WBBM		
			Meningkatnya Kapabilitas APIP melalui Pendampingan	Nilai Kapabilitas APIP		
		Terciptanya budaya birokrasi profesional dan Melayani		*Indeks Sistem Merit*		
			Meningkatnya Kuantitas Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	Program Kepegawaian Daerah	PD Pengampu Bidang Kepegawaian
			Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase ASN Yang Penilaian Kinerjanya Baik		
			Meningkatnya Penempatan ASN sesuai dengan Jabatan	Persentase ASN yang sesuai Jabatan		
			Meningkatnya Kualitas Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Persentase Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan Ketentuan		
			Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Informasi Kepegawaian Yang Akurat		
			BAPPEDA Meningkatnya Akurasi Data Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Data Pengembangan Kompetensi Yang Akurat	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD Pengampu Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
			Meningkatnya Pelatihan Manajerial dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan		
				IKM		
			Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Program Pencatatan Sipil	PD Pengampu Bidang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna	Jumlah PKS Pemanfaatan dan Akses Data	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Meningkatnya Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Jumlah PKS Pemanfaatan dan Akses Data		
			Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Program Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya layanan administrasi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Persentase OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah)	PD Pengampu Bidang SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang Berdasarkan Kebutuhan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Pengampu Bidang Penelitian Dan Pengembangan
			Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PD Pengampu Bidang Kewilayahan
				Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Program Pencatatan Sipil	PD Pengampu Bidang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna	Jumlah PKS Pemanfaatan dan Akses Data	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Meningkatnya Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Jumlah PKS Pemanfaatan dan Akses Data		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Program Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya layanan administrasi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Persentase OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah)	PD Pengampu Bidang SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang Berdasarkan Kebutuhan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Pengampu Bidang Penelitian Dan Pengembangan
			Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PD Pengampu Bidang Kewilayahan
Memperkuat Pembangunan Infrastuktur Berbasis Lingkungnan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan	**Meningkatnya Kemanfaatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**			**Indeks Kuaitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**		
		Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Kualitas		*Indeks Infrastruktur Daerah*		
			Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meratanya akses infrastruktur dasar	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpiaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Warga Negara Di Seluruh Kabupaten/ Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Persentase Rumah Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak Dan Aman)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Layanan Jaringan Trayek Angkutan Laut	Rasio Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	PD Pengampu Bidang Perhubungan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Meningkatnya Layanan Pengelolaan Penerbangan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Penerbangan	Program Pengelolaan Penerbangan	PD Pengampu Bidang Perhubungan
			Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Program Kawasan Permukiman	PD Pengampu Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga ahli kualifikasi ahli	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif		
		Terwujudnya Pembangunan Berawawasan Lingkungan Dan Tangguh Bencana		*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	PD Pengampu Bidang Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
			Terbangunnya Infrastruktur Persampahan yang memadai	Persentase Infrstruktur yang terbangun sesuai standar	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air limbah	Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya Layanan Jaringan Trayek Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	PD Pengampu Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Rata-Rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Kabupaten/Kota		
				Indeks Risiko Bencana		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PD Pengampu Bidang Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya kualitas mitigasi bencana	Indeks Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	PD Pengampu Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani secara cepat		
			Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana	Persentase objek terdampak bencana yang berhasil dipulihkan		

3.2.5 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai misi pembangunan pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran

yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Tabel III- 5 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sumenep

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDAYA SAING BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KETENAGA KERJAAN	Meningkatkan Produktivitas Masyarakat melalui peningkatan modal manusia yang mampu bersaing dalam dunia tenaga kerja	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama wilayah kepulauan
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama,
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah
		Membangun kurikulum pendidikan yang mendukung perkembangan literasi numerasi
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Beasiswa pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts,and Mathematics) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi
		Peningkatan kualitas dan penyediaan saranaprasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
		Fasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasa kerja
		Meningkatkan Kerjasama dengan sektor industri
		meningkatkan perlindungan tenaga kerja atas berbagai macam risiko
	Menguatkan harmonisasi sosial dengan mendorong pembangunan sosial yang inklusif dan kolaboratif	Meningkatkan kesempatan kerja pemuda melalui pelatihan berfokus pada kompetensi
		Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi
		Meningkatkan keterlibatan pemuda dalam kegiaatan sosial masyarakat
		Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pekerjaan di sektor formal
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
		Peningkatan keamanan dan penegakan hukum yang konsisten dan adil serta penanganan gangguan Trantibumlinmas

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN DARI HULU KE HILIR	Perluasan perlindungan sosial yang adaptif dengan ketepatan data sasaran	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
		Melaksanakan pengawasan dan pengendalian distribusi bahan pangan penting
		peningkatan pemberdayaan penyandang disabilitas pada sektor ekonomi produktif
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		Pencegahan terhadap praktik pernikahan anak dibawah umur/usia dini
		Kebijakan Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui intervensi pada sektor-sektor berpengaruh (Bahan pokok, dll)
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN DARI HULU KE HILIR	Mendorong Pertumbuhan ekonomi tinggi dengan menciptakan lingkungan investasi yang berkualitas dan peningkatan produktivitas ekonomi dari hulu sampai ke hilir	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional
		Pembangunan infrastruktur pendukung investasi khususnya infrastruktur jalan, logistik dan pergudangan
		Penyiapan Tenaga Kerja yang kompetitif
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan
		Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah
		Hilirisasi SDA agro melalui pengembangan pengolahan agro komoditas unggulan, penerapan close loop model, korporasi petani, dan ekonomi biru
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan sektor agro dan pengembangan pemasaran agro
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global
		pembangunan berbasis kawasan Kab. Sumenep sebagai pusat pengembangan industri berbasis perikanan
		Peningkatan produktivitas BUMD
		Mendorong partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi yang beragam engan memberikan akses perempuan ke pasar, pelatihan, modal usaha, dan infrastruktur pendukung bisnis
		Pengembangan ekonomi syariah antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, industri halal, pariwisata halal dan lain-lain.
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural,
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages
		Peningkatan kualitas kelembagaan dan produktivitas lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatkan digitalisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Memantapkan Reformasi Birokrasi yang berorientasi	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT	pada hasil dengan peningkatan sistem manajemen pemerintah yang adapatif dan transparan serta layanan publik yang responsif	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan berintegritas menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan bebas korupsi
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
		tata Kelola pemerintahan untuk beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi dan meningkatkan efesiensi serta efektivitas pelayanan publik
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)
		Efisiensi Pengelolaan Pajak dan Retribusi
		Penguatan Unit Pengelolaan pendapatan daerah
MEMPERKUAT PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR BERBASIS LINGKUNGNAN HIDUP YANG BERIMBANG ANTARA DARATAN DAN KEPULAUAN	Meningkatkan konektivitas jalan dan telekomunikasi, antar wilayah dan perluasan akses terhadap energi	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa terutama konektivitas wilayah kepulauan
		penguatan jaringan struktur ekonomi antar wilayah.
		Penguatan konektivitas antarwilayah dengan perbaikan akses jalan, pelabuhan, serta transportasi laut guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang
		Pengembangan Dukungan fasilitas pelabuhan Sapudi dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Keramaian (Pulau Masalembu)
		Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya
		Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri
		penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok
		Peningkatan pemenuhan air minum yang aman melalui perluasan jaringan perpipaan dan kapasitas pengolahan sumber daya air
		Peningkatan ketahanan bencana dengan penguatan mitigasi bencana.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Penataan pemukiman kumuh terpadu perkotaan
		pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil
	Peningkatan ekosistem lingkungan hidup yang berkualitas melalui peningkatan ketahanan air dan bencana	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
		peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alam serta lahan produktif
		pengendalian pencemaran den kerusakan lingkungan hidup
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan RENSTRA OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas

tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tabel IV- 1 Rencana Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
101 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**496.855.198.258,83**		**509.715.002.225,38**		**515.421.867.249,85**		**528.307.413.931,09**		**526.194.184.275,37**	
10101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**415.657.235.456,74**		**426.487.090.353,23**		**431.178.448.347,12**		**441.957.909.555,79**		**440.190.077.917,57**	
meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase dokumen perencanaan dan laporan berkualitas (%)	100	100	100	9.506.071,00	100	9.743.722,78	100	9.850.903,73	100	10.097.176,32	100	10.056.787,61	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (%)	87,70	88,00	89,00	415.647.729.385,74	90,00	426.477.346.630,45	91,00	431.168.597.443,39	92,00	441.947.812.379,47	87,70	440.180.021.129,96	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
10102 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**68.783.469.699,09**		**70.503.056.441,57**		**71.378.590.062,42**		**73.163.054.813,98**		**72.870.402.594,72**	
Menurunnya ATS	Persentase penurunan ATS (%)	45,77	50	50	14.779.041.341,650	55	15.063.403.092,870	60	17.720.860.552,660	63	16.261.404.926,410	65	18.135.257.592,710	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Terjaminnya Prasarana Pendidikan Yang Cukup dan Aman	Persentase Pemenuhan Prasarana yang Layak (%)	47	49	49	36.466.673.513,290	51	41.644.490.006,300	53	38.894.156.948,510	55	42.390.946.038,390	57	39.890.080.374,050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Terpenuhinya Sarana Pendidikan Yang Memadai	Angka Partisipasi SD, SMP, PAUD, Kesetaraan (%)	73,04	73,1	75,15	12.457.295.737,000	73,2	10.202.328.084,100	73,25	11.560.427.362,640	73,3	11.384.348.258,130	73,35	11.670.115.541,270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Dedikasi Tenaga Pendidik	Angka Partisipasi SD, SMP, PAUD, Kesetaraan (%)	45,77	45,8	45,85	478.133.924,150	45,9	490.510.075,300	45,95	502.820.015,610	46	424.030.408,050	46,05	472.623.903,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik	Proporsi PTK bersertifikat	33,20	37	37	2.310.482.616,000	40	810.482.616,000	42	408.482.616,000	44	410.482.616,000		410.482.616,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum paradigma baru	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum baru (%)	50	50	50	2.291.842.567,000	50	2.291.842.567,000	50	2.291.842.567,000	50	2.291.842.567,000	50	2.291.842.567,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
10103 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					**130.493.100,00**		**133.755.427,50**		**135.226.737,20**		**138.607.405,63**		**138.052.976,01**	
Meningkatnya satuan pendidikan yang menggunakan	Persentase satuan pendidikan yang	50	51	50	130.493.100,00	50	133.755.427,50	50	135.226.737,20	50	138.607.405,63	50	138.052.976,01	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
kurikulum paradigma baru bermuatan lokal	menerapkan kurikulum baru (%)													
10104 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					**11.951.000.003,00**		**12.249.775.003,08**		**12.384.522.528,11**		**12.694.135.591,31**		**12.643.359.048,95**	
Meningkatnya dedikasi tenaga pendidik dengan insentif	Indeks distribusi guru (Nilai)	33,20	0,79	33,20	11.951.000.003,00	33,20	12.249.775.003,08	33,20	12.384.522.528,11	33,20	12.694.135.591,31	33,20	12.643.359.048,95	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Lembaga Kursus/ Pelatihan dan PKBM berizin (Lembaga)	70	32	32		37		42		47		52		Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah SD terakreditasi A (Unit)	316	317	317		320		324		329		334		Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah SMP terakreditasi A (Unit)	88	108	108		112		116		120		124		Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi (%)	67,74	67,74	67,74		69,23		70,72		72,21		73,7		Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S-1 dan Bersertifikasi (%)	58,11	54,79	54,79		58,1		61,41		64,72		68,03		Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Tenaga Pendidik SD berkualifikasi S-1 dan Bersertifikasi (%)	62,58	63,67	62,58		64,76		64,76		65,85		66,94		Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Tenaga Pendidik SMP berkualifikasi S-1 dan Bersertifikasi (%)	62,3	63,61	63,61		64,22		64,83		65,44		66,05		Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
10105 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					**250.000.000,00**		**256.250.000,00**		**259.068.750,00**		**265.545.468,75**		**264.483.286,88**	
Menurunnya ATS melalui PKBM yang memiliki ijin operasional yang berlaku	Persentase penurunan ATS (%)	45,77	48	45,77	250.000.000,00	45,77	256.250.000,00	45,77	259.068.750,00	45,77	265.545.468,75	45,77	264.483.286,88	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
10106 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					**83.000.000,00**		**85.075.000,00**		**86.010.825,00**		**88.161.095,63**		**87.808.451,24**	
Meningkatnya satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum paradigma baru yang berkearifan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum baru (%)	50	51	50	83.000.000,00	50	85.075.000,00	50	86.010.825,00	50	88.161.095,63	50	87.808.451,24	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
102 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					**482.694.499.458,20**		**494.761.861.944,38**		**500.617.451.972,93**		**513.332.888.271,62**		**510.779.556.718,97**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
10201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**359.802.355.831,20**		**368.797.414.726,98**		**373.267.395.835,65**		**382.799.080.731,54**		**380.767.884.408,61**	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	112.130.060,00	100	114.933.311,50	100	116.197.577,93	100	119.102.517,37	100	118.626.107,31	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	113.914.520.807,200	80	117.991.262.352,440	80	117.446.154.811,700	80	121.860.833.902,590	80	114.613.731.100,850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi RSUD H MOH ANWAR	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka) (Nilai)	80	80	80	133.425.250.002,000	80	136.093.755.002,000	80	138.815.630.102,000	80	141.591.942.704,000	80	144.423.781.558,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi RSUD ABUYA KANGEAN	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka) (Nilai)	80	80	80	3.885.170.800,000	80	3.962.874.216,000	80	4.042.131.700,000	80	4.122.974.334,000	80	4.205.433.821,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Pragaan	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	5.982.283.364,000	80	6.101.929.031,000	80	6.223.967.612,000	80	6.348.446.964,000	80	6.475.415.903,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Bluto	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	4.391.825.651,000	80	4.479.662.164,000	80	4.569.255.407,000	80	4.660.640.515,000	80	4.753.853.326,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Kalianget	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.560.599.595,000	80	3.631.811.587,000	80	3.704.447.819,000	80	3.778.536.775,000	80	3.854.107.511,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Talango	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	2.704.496.152,000	80	2.758.586.075,000	80	2.813.757.797,000	80	2.870.032.952,000	80	2.927.433.612,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Batuan	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	2.877.619.640,000	80	2.935.172.033,000	80	2.993.875.473,000	80	3.053.752.983,000	80	3.114.828.043,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Pandian	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	1.884.206.507,000	80	1.921.890.637,000	80	1.960.328.450,000	80	1.999.535.019,000	80	2.039.525.719,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Rubaru	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.960.295.094,000	80	4.039.500.996,000	80	4.120.291.016,000	80	4.202.696.836,000	80	4.286.750.773,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Legung	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	2.006.297.692,000	80	2.046.423.646,000	80	2.087.352.119,000	80	2.129.099.161,000	80	2.171.681.144,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Dasuk	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.807.726.621,000	80	3.883.881.153,000	80	3.961.558.776,000	80	4.040.789.952,000	80	4.121.605.751,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Manding	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.176.123.228,000	80	3.239.645.693,000	80	3.304.438.606,000	80	3.370.527.379,000	80	3.437.937.926,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Moncek	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	2.491.415.599,000	80	2.541.243.911,000	80	2.592.068.789,000	80	2.643.910.165,000	80	2.696.788.368,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Lenteng	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	2.998.799.716,000	80	3.058.775.710,000	80	3.119.951.225,000	80	3.182.350.249,000	80	3.245.997.254,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Batang-Batang	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.538.759.916,000	80	3.609.535.114,000	80	3.681.725.817,000	80	3.755.360.333,000	80	3.830.467.540,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Saronggi	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.312.807.267,000	80	3.379.063.412,000	80	3.446.644.681,000	80	3.515.577.574,000	80	3.585.889.126,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Pamolokan	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	2.785.029.202,000	80	2.840.729.786,000	80	2.897.544.382,000	80	2.955.495.269,000	80	3.014.605.175,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Dungkek	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.782.343.691,000	80	3.857.990.565,000	80	3.935.150.376,000	80	4.013.853.384,000	80	4.094.130.451,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Ambunten	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	5.989.029.471,000	80	6.108.810.060,000	80	6.230.986.262,000	80	6.355.605.987,000	80	6.482.718.107,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Pasongsongan	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	4.225.615.180,000	80	4.310.127.484,000	80	4.396.330.033,000	80	4.484.256.634,000	80	4.573.941.767,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Batu Putih	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.621.003.906,000	80	3.693.423.984,000	80	3.767.292.464,000	80	3.842.638.313,000	80	3.919.491.079,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Gapura	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.511.332.727,000	80	3.581.559.382,000	80	3.653.190.569,000	80	3.726.254.381,000	80	3.800.779.468,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Guluk-guluk	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	4.786.458.438,000	80	4.882.187.607,000	80	4.979.831.359,000	80	5.079.427.986,000	80	5.181.016.546,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Ganding	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.458.994.481,000	80	3.528.174.371,000	80	3.598.737.858,000	80	3.670.712.615,000	80	3.744.126.867,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Raas	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	80	80	80	4.070.060.763,000	80	4.151.461.978,000	80	4.234.491.218,000	80	4.319.181.042,000	80	4.405.564.663,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Giligenting	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	2.528.516.196,000	80	2.579.086.520,000	80	2.630.668.250,000	80	2.683.281.615,000	80	2.736.947.248,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Nonggunong	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	1.429.891.849,000	80	1.458.489.686,000	80	1.487.659.480,000	80	1.517.412.669,000	80	1.547.760.923,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Gayam	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.928.848.140,000	80	4.007.425.103,000	80	4.087.573.605,000	80	4.169.325.077,000	80	4.252.711.578,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Arjasa	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	7.041.824.224,000	80	7.182.660.708,000	80	7.326.313.923,000	80	7.472.840.201,000	80	7.622.297.005,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Kangayan	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	2.222.771.591,000	80	2.267.227.022,820	80	2.312.571.563,270	80	2.358.822.994,540	80	2.405.999.454,430	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Sapeken	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	3.580.074.123,000	80	3.651.675.605,460	80	3.724.709.117,560	80	3.799.203.299,920	80	3.875.187.365,910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Masalembu	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	2.487.033.836,000	80	2.536.774.512,720	80	2.587.510.002,970	80	2.639.260.203,030	80	2.692.045.407,090	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Puskesmas Pagerungan Besar	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	2.004.076.302,000	80	2.044.157.828,040	80	2.085.040.984,600	80	2.126.741.804,290	80	2.169.276.640,370	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Laboratorium Kesehatan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	80	80	319.124.000,000	80	325.506.480,000	80	332.016.609,600	80	338.656.941,790	80	345.430.080,620	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
10202 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**107.461.536.394,000**		**110.148.074.803,400**		**111.359.703.626,570**		**114.143.696.217,230**		**113.687.121.432,750**	
Meningkatnya Aksesibilitas layanan kesehatan	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar (%)	80	85	87	10.751.686.541,000	89	11.432.012.879,000	91	11.655.688.276,000	92	20.114.162.341,000	92	19.973.705.692,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	85	80	85	67.416.955.883,000	90	68.836.250.075,000	93	69.228.562.964,190	95	62.943.473.990,760	95	62.011.039.038,930	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	99,57	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46		55		61		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun (%)	9	12,4	12,4		12,4		12,4		12,4		12,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	62,6	70	72		74		77		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,8	0,7	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	2,73	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	40	43	48		55		62		73		73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna (%)	96	50	50	212.000.000,000	50	217.300.000,000	100	219.690.300,000	100	225.182.557,500	100	224.281.827,270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Aksesibilitas layanan kesehatan RSUD Moh Anwar	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar (%)	80	85	87	2.294.143.500,000	89	2.340.026.370,000	92	2.386.826.897,400	92	2.434.563.435,340	92	2.483.254.704,050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Aksesibilitas layanan kesehatan RSUD Abuya Kangayan	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar (%)	80	85	87	4.829.740.749,000	89	4.926.335.563,980	90	5.024.862.275,260	92	5.125.359.520,760	92	5.227.866.711,180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Pragaan	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	1.040.727.000,000	55	1.061.541.540,000	61	1.082.772.370,800	70	1.104.427.818,210	70	1.126.516.374,580	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Bluto	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	48	1.002.918.000,000	55	1.022.976.360,000	61	1.043.435.887,200	70	1.064.304.604,940	70	1.085.590.697,040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Kalianget	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	665.688.000,000	55	679.001.760,000	61	692.581.795,200	70	706.433.431,100	70	720.562.099,720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Talango	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	712.301.000,000	55	726.547.020,000	61	741.077.960,400	70	755.899.519,600	70	771.017.510,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Batuan	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	499.419.000,000	55	509.407.380,000	61	519.595.527,600	70	529.987.438,150	70	540.587.186,910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Pandian	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	529.313.000,000	55	539.899.260,000	61	550.697.245,200	70	561.711.190,100	70	572.945.413,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Rubaru	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	788.317.000,000	55	804.083.340,000	61	820.165.006,800	70	836.568.306,930	70	853.299.673,070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Legung	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	609.689.000,000	55	621.882.780,000	61	634.320.435,600	70	647.006.844,310	70	659.946.981,190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Dasuk	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	847.568.000,000	55	864.519.360,000	61	881.809.747,200	70	899.445.942,140	70	917.434.860,980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Manding	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	809.504.021,000	55	825.694.101,420	61	842.207.983,440	70	859.052.143,110	70	876.233.185,980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Moncek	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	618.610.000,000	55	630.982.200,000	61	643.601.844,000	70	656.473.880,880	70	669.603.358,490	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Lenteng	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	642.226.000,000	55	655.070.520,000	61	668.171.930,400	70	681.535.369,000	70	695.166.076,380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Batang- Batang	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	49	628.962.000,000	55	641.541.240,000	61	654.372.064,800	70	667.459.506,090	70	680.808.696,210	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Saronggi	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	47	754.863.000,000	55	769.960.260,000	61	785.359.465,200	70	801.066.654,500	70	817.087.987,590	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Pamolokan	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	48	660.482.000,000	55	673.691.640,000	61	687.165.472,800	70	700.908.782,250	70	714.926.957,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Dungkek	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	880.500.000,000	55	898.110.000,000	61	916.072.200,000	70	934.393.644,000	70	953.081.516,880	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Ambunten	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	55	883.130.000,000	55	900.792.600,000	61	918.808.452,000	70	937.184.621,040	70	955.928.313,460	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Pasongsongan	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	52	758.120.000,000	55	773.282.400,000	61	788.748.048,000	70	804.523.008,960	70	820.613.469,130	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Batuputih	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	695.486.000,000	55	709.395.720,000	61	723.583.634,400	70	738.055.307,080	70	752.816.413,230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Gapura	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	807.264.000,000	55	823.409.280,000	61	839.877.465,600	70	856.675.014,910	70	873.808.515,210	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Ganding	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	729.346.000,000	55	743.932.920,000	61	758.811.578,400	70	773.987.809,960	70	789.467.566,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Guluk- guluk	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	48	738.829.000,000	55	753.605.580,000	61	768.677.691,600	70	784.051.245,430	70	799.732.270,340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Raas	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	704.912.000,000	55	719.010.240,000	61	733.390.444,800	70	748.058.253,690	70	763.019.418,770	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Giligenting	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	597.230.000,000	55	609.174.600,000	61	621.358.092,000	70	633.785.253,840	70	646.460.958,910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Nonggungong	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	629.662.000,000	55	642.255.240,000	61	655.100.344,800	70	668.202.351,690	70	681.566.398,730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Gayam	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	644.779.000,000	55	657.674.580,000	61	670.828.071,600	70	684.244.633,030	70	697.929.525,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Arjasa	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	948.653.000,000	55	967.626.060,000	61	986.978.581,200	70	1.006.718.152,820	70	1.026.852.515,880	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Kangayan	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	696.784.000,000	55	710.719.680,000	61	724.934.073,600	70	739.432.755,070	70	754.221.410,170	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Sapeken	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	481.408.200,000	55	491.036.364,000	61	500.857.091,280	70	510.874.233,100	70	521.091.717,760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Masalembu	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	508.149.000,000	55	518.311.980,000	61	528.678.219,600	70	539.251.783,990	70	550.036.819,670	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan Pagerungan Besar	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46	259.219.800,000	55	264.404.196,000	61	269.692.279,920	70	275.086.125,510	70	280.587.848,020	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	15	20		25		35		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	18	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,52	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,6	91	91,5		92		92,5		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Aksesibilitas layanan kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar (%)	80	85	87	182.950.700,000	89	186.609.714,000	92	190.341.908,280	92	194.148.746,440	92	198.031.721,370	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
10203 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					**14.039.880.000,000**		**14.390.877.000,000**		**14.549.176.647,000**		**14.912.906.063,180**		**14.853.254.438,920**	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Rasio)	5,0	5,1	5,3	14.039.880.000,000	5,4	14.390.877.000,000	5,4	14.549.176.647,000	5,5	14.912.906.063,180	5,5	14.853.254.438,920	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
10204 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					**235.100.000,000**		**240.977.500,000**		**243.628.252,500**		**249.718.958,810**		**248.720.082,980**	
Meningkatnya kualitas sarana kefarmasian, Industri makanan dan minuman	persentase rekomendasi ijin sarana kefarmasian dan industri makmin rumah tangga milik masyarakat/swasta (%)	100	100	100	235.100.000,000	100	240.977.500,000	100	243.628.252,500	100	249.718.958,810	100	248.720.082,980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
10205 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**1.155.627.233,000**		**1.184.517.914,000**		**1.197.547.611,200**		**1.227.486.300,700**		**1.222.576.355,470**	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	77,6	843.364.233,000	79,6	866.009.654,000	89,6	872.669.186,000	89,6	896.110.307,000	89,6	884.572.842,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Pragaan	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	14.460.000,000	77,6	14.749.200,000	78,6	15.044.184,000	89,6	15.345.067,680	89,6	15.651.969,030	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Bluto	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	16.800.000,000	77,6	17.136.000,000	78,6	17.478.720,000	89,6	17.828.294,400	89,6	18.184.860,280	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Kalianget	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	9.750.000,000	77,6	9.945.000,000	77,6	10.143.900,000	77,6	10.346.778,000	77,6	10.553.713,560	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Talango	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	8.868.000,000	77,6	9.045.360,000	77,6	9.226.267,200	77,6	9.410.792,540	77,6	9.599.008,390	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Batuan	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	6.510.000,000	77,6	6.640.200,000	77,6	6.773.004,000	77,6	6.908.464,080	77,6	7.046.633,360	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Pandian	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	1.920.000,000	77,6	1.958.400,000	77,6	1.997.568,000	77,6	2.037.519,360	77,6	2.078.269,740	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Rubaru	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	8.900.000,000	77,6	9.078.000,000	77,6	9.259.560,000	77,6	9.444.751,200	77,6	9.633.646,220	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Legung	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	9.940.000,000	77,6	10.138.800,000	77,6	10.341.576,000	77,6	10.548.407,520	77,6	10.759.375,670	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dasuk	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	20.250.000,000	77,6	20.655.000,000	77,6	21.068.100,000	77,6	21.489.462,000	77,6	21.919.251,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Manding	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	2.640.000,000	77,6	2.692.800,000	78,6	2.746.656,000	89,6	2.801.589,120	89,6	2.857.620,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Moncek	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	7.650.000,000	77,6	7.803.000,000	78,6	7.959.060,000	89,6	8.118.241,200	89,6	8.280.606,020	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Lenteng	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	9.060.000,000	77,6	9.241.200,000	78,6	9.426.024,000	89,6	9.614.544,480	89,6	9.806.835,370	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Batang-batang	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	10.980.000,000	77,6	11.199.600,000	78,6	11.423.592,000	89,6	11.652.063,840	89,6	11.885.105,110	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Saronggi	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	15.495.000,000	77,6	15.804.900,000	78,6	16.120.998,000	89,6	16.443.417,960	89,6	16.772.286,310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dungkek	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	7.150.000,000	77,6	7.293.000,000	78,6	7.438.860,000	89,6	7.587.637,200	89,6	7.739.389,940	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Pamolokan	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	960.000,000	77,6	979.200,000	78,6	998.784,000	89,6	1.018.759,680	89,6	1.039.134,870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Ambunten	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	21.530.000,000	77,6	21.960.600,000	0	22.399.812,000	0	22.847.808,240	0	23.304.764,400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Pasongsongan	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	15.720.000,000	77,6	16.034.400,000	0	16.355.088,000	0	16.682.189,760	0	17.015.833,550	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Batuputih	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	12.340.000,000	77,6	12.586.800,000	0	12.838.536,000	0	13.095.306,720	0	13.357.212,850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Gapura	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	14.650.000,000	77,6	14.943.000,000	0	15.241.860,000	0	15.546.697,200	0	15.857.631,140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Guluk- Guluk	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	20.400.000,000	77,6	20.808.000,000	0	21.224.160,000	0	21.648.643,200	0	22.081.616,060	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Ganding	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	11.200.000,000	77,6	11.424.000,000	0	11.652.480,000	0	11.885.529,600	0	12.123.240,190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Raas	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	11.340.000,000	77,6	11.566.800,000	0	11.798.136,000	0	12.034.098,720	0	12.274.780,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Giligenting	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	10.320.000,000	77,6	10.526.400,000	78,6	10.736.928,000	89,6	10.951.666,560	89,6	11.170.699,890	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Nonggunong	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	1.760.000,000	77,6	1.795.200,000	78,6	1.831.104,000	89,6	1.867.726,080	89,6	1.905.080,600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Gayam	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	4.500.000,000	77,6	4.590.000,000	78,6	4.681.800,000	89,6	4.775.436,000	89,6	4.870.944,720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Arjasa	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	16.340.000,000	77,6	16.666.800,000	78,6	17.000.136,000	89,6	17.340.138,720	89,6	17.686.941,490	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan kangayan	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	7.470.000,000	77,6	7.619.400,000	78,6	7.771.788,000	89,6	7.927.223,760	89,6	8.085.768,230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Sapeken	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	5.720.000,000	77,6	5.834.400,000	78,6	5.951.088,000	89,6	6.070.109,760	89,6	6.191.511,950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Masalembu	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	4.560.000,000	77,6	4.651.200,000	78,6	4.744.224,000	89,6	4.839.108,480	89,6	4.935.890,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Pagerungan Besar	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	72	74,6	76,1	3.080.000,000	77,6	3.141.600,000	0	3.204.432,000	0	3.268.520,640	0	3.333.891,050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
103 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**66.659.713.142,770**		**68.352.869.856,600**		**69.125.257.285,980**		**71.195.829.132,220**		**69.828.536.107,460**	
10301 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**19.242.102.497,330**		**19.730.851.900,770**		**19.953.810.527,230**		**20.780.344.770,480**		**19.542.522.365,490**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	3.990.600,000	100	4.091.961,240	100	4.138.200,400	100	4.242.896,870	100	4.260.292,750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	93	93	93	19.238.111.897,330	93	19.726.759.939,530	93	19.949.672.326,830	93	20.776.101.873,610	93	19.538.262.072,740	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10302 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					**5.289.408.045,240**		**5.423.759.009,590**		**5.485.047.486,400**		**5.623.819.187,800**		**5.646.876.846,470**	
Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA	Persentase peningkatan pengelolaan SDA (%)	50,78	52,64	52,64	5.289.408.045,240	52,64	5.423.759.009,590	52,64	5.485.047.486,400	52,64	5.623.819.187,800	52,64	5.646.876.846,470	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10303 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					**1.575.301.973,000**		**1.615.314.643,110**		**1.633.567.698,580**		**1.674.896.961,360**		**1.681.764.038,900**	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	% Rumah Tangga yang terlayani sistem penyediaan air minum (%)	5,74	30	33	1.575.301.973,000	33,9	1.615.314.643,110	33,9	1.633.567.698,580	34	1.674.896.961,360	35	1.681.764.038,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10304 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					**1.749.179.325,770**		**1.849.179.325,770**		**1.949.179.325,770**		**2.129.639.800,150**		**2.154.639.800,150**	
Terbangunnya Infrastruktur Persampahan yang memadai	Persentase Infrstruktur yang terbangun sesuai standar (%)	64	64,88	65,05	1.749.179.325,770	70	1.849.179.325,770	71	1.949.179.325,770	72	2.129.639.800,150	73	2.154.639.800,150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
10305 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					**4.752.902.133,500**		**4.873.625.847,690**		**4.928.697.819,770**		**5.053.393.874,610**		**5.074.112.789,500**	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air limbah	Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) (%)	60,10	62	62,15	4.752.902.133,500	62,90	4.873.625.847,690	62,90	4.928.697.819,770	63	5.053.393.874,610	63,25	5.074.112.789,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10306 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					**2.323.448.566,470**		**2.382.464.160,060**		**2.409.386.005,070**		**2.470.343.471,000**		**2.480.471.879,230**	
Meningkanya kualitas drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	93	93,25	93,27	2.323.448.566,470	93,38	2.382.464.160,060	93,45	2.409.386.005,070	93,54	2.470.343.471,000	93,65	2.480.471.879,230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10308 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					**10.200.000.000,000**		**10.403.509.154,870**		**10.441.964.534,710**		**10.575.000.000,000**		**10.265.914.917,520**	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	73,15	72	72,15	10.200.000.000,000	72,30	10.403.509.154,870	72,45	10.441.964.534,710	72,60	10.575.000.000,000	72,75	10.265.914.917,520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10310 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					**19.029.270.059,760**		**19.512.613.519,280**		**19.733.106.052,050**		**20.232.353.635,160**		**20.315.306.285,070**	
Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	70,39	70,45	70,52	19.029.270.059,760	71,17	19.512.613.519,280	71,20	19.733.106.052,050	71,30	20.232.353.635,160	71,40	20.315.306.285,070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10311 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					**498.100.645,570**		**510.752.401,970**		**516.523.904,110**		**529.591.958,880**		**531.763.285,920**	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga ahli kualifikasi ahli (%)	65	62,25	62,45	498.100.645,570	62,50	510.752.401,970	62,55	516.523.904,110	62,75	529.591.958,880	62,80	531.763.285,920	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10312 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					**1.999.999.896,130**		**2.050.799.893,490**		**2.073.973.932,290**		**2.126.445.472,780**		**2.135.163.899,210**	
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	14,29	14,79	20	1.999.999.896,130	20	2.050.799.893,490	20	2.073.973.932,290	21,43	2.126.445.472,780	21,47	2.135.163.899,210	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
104 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**3.785.995.950,000**		**3.882.160.247,130**		**3.926.028.657,920**		**4.025.357.182,970**		**4.041.861.147,420**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
10402 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					**324.997.200,000**		**333.252.128,880**		**337.017.877,940**		**345.544.430,250**		**346.961.162,410**	
Pemulihan Infrastruktur Perumahan Pasca Terdampak Bencana	Persentase infrastruktur perumahan terdampak bencana yang ditangani (%)	100	100	100	324.997.200,000	100	333.252.128,880	100	337.017.877,940	100	345.544.430,250	100	346.961.162,410	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
10403 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					**3.260.999.050,000**		**3.343.828.425,870**		**3.381.613.687,080**		**3.467.168.513,370**		**3.481.383.904,270**	
Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh (%)	62,50	65	65	3.260.999.050,000	67,5	3.343.828.425,870	70	3.381.613.687,080	72,5	3.467.168.513,370	75	3.481.383.904,270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
10405 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					**199.999.700,000**		**205.079.692,380**		**207.397.092,900**		**212.644.239,350**		**213.516.080,740**	
Meningkatnya Kualitas PSU Perumahan	Persentase PSU Dalam Kondisi Baik (%)	15	15	15	199.999.700,000	17	205.079.692,380	20	207.397.092,900	22	212.644.239,350	25	213.516.080,740	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
105 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**19.951.567.171,010**		**20.458.336.977,150**		**20.689.516.185,000**		**21.212.960.944,480**		**21.299.934.084,350**	
10501 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**10.285.035.186,83**		**10.465.270.346,19**		**10.449.432.111,41**		**10.624.115.048,41**		**10.492.221.322,27**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja (SATPOL PP)	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	4.000.000,000	100	7.500.000,000	100	10.500.000,000	100	14.000.000,000	100	21.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD (SATPOL PP)	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (%)	100	100	100	10.281.035.186,830	100	10.457.770.346,190	100	10.438.932.111,410	100	10.610.115.048,410	100	10.471.221.322,270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
10501 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**5.780.415.650,18**		**5.927.238.105,15**		**5.994.215.895,75**		**6.145.869.557,90**		**6.171.067.623,09**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja (BPBD)	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	5.373.924,000	100	5.510.319,130	100	5.572.585,740	100	5.713.572,150	100	5.736.997,800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD (BPBD)	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	89,89	90	90	5.775.041.726,180	90	5.921.727.786,020	90	5.988.643.310,010	90	6.140.155.985,750	90	6.165.330.625,290	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
10502 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**2.873.183.483,000**		**3.016.853.157,150**		**3.167.695.815,010**		**3.326.080.605,760**		**3.492.384.636,050**	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penangangan Gangguan Kamtibmas (%)	90	90	90	2.873.183.483,000	90	3.016.853.157,150	90	3.167.695.815,010	90	3.326.080.605,760	90	3.492.384.636,050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
10503 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					**573.338.372,000**		**587.901.166,660**		**594.544.449,830**		**609.586.424,410**		**612.085.728,750**	
Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani secara cepat (%)	100	100	100	213.298.551,000	100	218.716.334,200	100	221.187.828,770	100	226.783.880,840	100	227.713.694,750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana	Persentase objek terdampak bencana yang berhasil dipulihkan (%)	100	100	100	74.997.868,000	100	76.902.813,850	100	77.771.815,640	100	79.739.442,580	100	80.066.374,290	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas mitigasi bencana	Indeks Mitigasi Bencana (Indeks (Skala 0-100))	68	70	72	285.041.953,000	74	292.282.018,610	76	295.584.805,420	78	303.063.100,990	80	304.305.659,710	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
10504 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					**439.594.479,000**		**461.074.202,000**		**483.627.913,000**		**507.309.308,000**		**532.174.774,190**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran, dan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran, Evakuasi Non Kebakaran sesuai Waktu Tanggap kurang dari 15 Menit (%)	90	90	90	439.594.479,000	90	461.074.202,000	90	483.627.913,000	90	507.309.308,000	90	532.174.774,190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					**21.252.687.697,000**		**21.805.844.024,610**		**22.052.459.362,120**		**22.610.598.186,650**		**22.709.157.747,150**	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**7.827.069.397,000**		**7.729.882.242,990**		**7.817.229.912,340**		**8.015.005.829,130**		**8.047.867.353,020**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase dokumen perencanaan dan laporan berkualitas (%)	100	100	100	11.020.923,000	100	11.300.854,440	100	11.428.554,100	100	11.717.696,520	100	11.765.739,070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (%)	100	100	100	7.816.048.474,000	100	7.718.581.388,550	100	7.805.801.358,240	100	8.003.288.132,610	100	8.036.101.613,950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					**20.015.300,000**		**20.523.688,620**		**20.755.606,300**		**21.280.723,140**		**21.367.974,110**	
Meningkatnya kualitas PSKS Perorangan	Peresentase Perorangan yang berkualitas (%)	70	70	70	15.011.475,000	70	15.519.863,620	70	15.751.781,300	70	16.276.898,140	70	16.364.149,110	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya pemberdayaan PSKS terhadap kelembagaan	Jumlah pemberdayaan kelembagaan yang dilaksanakan (Lembaga)	0	35	35	5.003.825,000	40	5.003.825,000	45	5.003.825,000	45	5.003.825,000	50	5.003.825,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					**10.536.034.000,000**		**11.093.129.868,000**		**11.218.811.178,000**		**11.502.979.662,000**		**11.559.345.514,000**	
Meningkatnya Rehabilitasi dan Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang di rehabilitasi (%)	31,3	2	2	5.048.918.980,000	2	5.600.000.000,000	2	5.715.000.000,000	2	5.975.000.000,000	2	6.032.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya Kapasitas PPKS	Persentase PPKS yang Meningkat Kapasitasnya (%)	-	-	2	5.487.115.020,000	2	5.493.129.868,000	2	5.503.811.178,000	2	5.527.979.662,000	2	5.526.845.514,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					**2.500.000.000,000**		**2.563.500.000,000**		**2.592.467.550,000**		**2.658.056.979,020**		**2.668.955.012,630**	
Meningkatnya Jaminan Sosial bagi Penyandang PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial (%)	28,63	85	85	2.500.000.000,000	85	2.563.500.000,000	85	2.592.467.550,000	85	2.658.056.979,020	85	2.668.955.012,630	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					**369.569.000,000**		**378.808.225,000**		**382.975.115,480**		**392.549.493,360**		**390.979.295,390**	
Meningkatnya Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial (%)	74	100	100	369.569.000,000	100	378.808.225,000	100	382.975.115,480	100	392.549.493,360	100	390.979.295,390	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					0,000		20.000.000,000		20.220.000,000		20.725.500,000		20.642.598,000	
Terpenuhinya layanan duikungan Administrasi PD	persentase ketersediaan makam yang layak bagi perintis kemerdekaan dan veteran (Makam) (%)	0	0	38	0,000	38	20.000.000,000	38	20.220.000,000	38	20.725.500,000	38	20.642.598,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
207 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**19.836.570.000,360**		**20.340.418.878,370**		**20.570.265.611,690**		**21.090.693.331,670**		**21.177.165.174,330**	
20701 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**4.575.238.833,360**		**4.691.449.899,730**		**4.744.463.283,590**		**4.864.498.204,670**		**4.884.442.647,310**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase dokumen perencanaan dan laporan berkualitas (%)	0	0	100	4.575.238.833,360	100	4.691.449.899,730	100	4.744.463.283,590	100	4.864.498.204,670	100	4.884.442.647,310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
20703 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					**2.734.340.467,000**		**2.803.792.714,860**		**2.835.475.572,540**		**2.907.213.104,520**		**2.919.132.678,250**	
Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	0,24	0,26	0,28	2.734.340.467,000	0,30	2.803.792.714,860	0,32	2.835.475.572,540	0,34	2.907.213.104,520	0,36	2.919.132.678,250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
20704 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					**12.526.990.700,000**		**12.845.176.263,780**		**12.990.326.755,560**		**13.318.982.022,480**		**13.373.589.848,770**	
Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	44	46	48	12.526.990.700,000	50	12.845.176.263,780	52	12.990.326.755,560	54	13.318.982.022,480	56	13.373.589.848,770	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**928.394.112,500**		**938.637.263,100**		**949.034.563,680**		**972.833.535,340**		**970.987.045,620**	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					**49.991.984,000**		**51.241.783,600**		**51.805.443,220**		**53.100.579,300**		**52.888.176,980**	
Meningkatnya peran perangkat daerah dalam responsif gender	Persentase Perangkat Daerah yang Responsif GenderÂ (%)	0.37%	1	1	30.000.000,000	1	32.741.783,600	45	32.805.443,220	45	33.600.579,300	50	33.888.176,980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Keterlibatan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik	Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (%)	-	-	85	19.991.984,000	85	18.500.000,000	85	19.000.000,000	85	19.500.000,000	85	19.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					**186.170.000,000**		**190.824.250,010**		**192.923.316,750**		**197.746.399,660**		**196.976.414,060**	
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang Terselesaikan (%)	2	3.39 %	3.39 %	186.170.000,000	3.39 %	190.824.250,010	3.39 %	192.923.316,750	3.39 %	197.746.399,660	3.39 %	196.976.414,060	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					**150.000.000,000**		**153.750.000,000**		**155.441.250,000**		**159.327.281,250**		**158.689.972,130**	
Meningkatnya Peran Organisasi / Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang Terselesaikan (%)	0	0,0052	0,0052	150.000.000,000	0,0052	153.750.000,000	0,0052	155.441.250,000	0,0052	159.327.281,250	0,0052	158.689.972,130	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					**0,000**		**51.250.000,000**		**51.813.750,000**		**53.109.093,750**		**52.896.657,380**	
Meningkatnya Peran Perangkat Daerah dalam Responsif Gender	Persentase Perangkat Daerah yang Responsif GenderÂ (%)	0	0	0,10	0,000	0,10	51.250.000,000	0,10	51.813.750,000	0,10	53.109.093,750	0,10	52.896.657,380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					**297.742.128,500**		**240.968.979,490**		**243.691.928,960**		**249.857.334,760**		**250.881.749,840**	
Meningkatnya Akses Pemenuhan Hak Anak	Strata Kabupaten Layak Anak (*)	Madya Strata	Madya Strata	Madya Strata	297.742.128,500	Madya Strata	240.968.979,490	Madya Strata	243.691.928,960	Madya Strata	249.857.334,760	Madya Strata	250.881.749,840	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					**244.490.000,000**		**250.602.250,000**		**253.358.874,750**		**259.692.846,620**		**258.654.075,230**	
Meningkatnya Akses Pemenuhan Hak Anak	Strata Kabupaten Layak Anak (*)	98	100	100	244.490.000,000	100	250.602.250,000	100	253.358.874,750	100	259.692.846,620	100	258.654.075,230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
209 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**492.998.600,000**		**505.520.764,440**		**511.233.149,080**		**524.167.347,750**		**526.316.433,880**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
20902 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					**239.000.000,000**		**245.070.600,000**		**247.839.897,780**		**254.110.247,190**		**255.152.099,210**	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan akses pangan masyarakat	Laju Harga Pangan Terkendali (Angka)	-	-	4,95	239.000.000,000	4,9	245.070.600,000	4,85	247.839.897,780	4,8	254.110.247,190	4,75	255.152.099,210	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase ketersediaan pangan masyarakat (%)	108	109	110		111		112		113		114		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
20903 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					**152.103.900,000**		**155.967.339,060**		**157.729.769,990**		**161.720.333,170**		**162.383.386,540**	
Terlaksananya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	2.462	2.350	2.100	152.103.900,000	2.100	155.967.339,060	2.100	157.729.769,990	2.100	161.720.333,170	2.100	162.383.386,540	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
20904 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					**41.022.500,000**		**42.064.471,500**		**42.539.800,030**		**43.616.056,970**		**43.794.882,800**	
Menurunnya ketidakcukupan konsumsi pangan	Prevalency of Undernourishment (PoU) (%)	6,49	6,45	6,40	41.022.500,000	6,30	42.064.471,500	6,20	42.539.800,030	6,00	43.616.056,970	5,90	43.794.882,800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
20905 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					**60.872.200,000**		**62.418.353,880**		**63.123.681,280**		**64.720.710,420**		**64.986.065,330**	
Terlaksanaya Pengawasan Keamanan pangan	Indeks Keamanan Pangan Konsumsi (%)	-	70	70	60.872.200,000	70,25	62.418.353,880	70,50	63.123.681,280	70,75	64.720.710,420	71,00	64.986.065,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
210 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					**1.134.618.255,000**		**1.163.437.558,680**		**1.176.584.403,090**		**1.206.351.988,490**		**1.211.298.031,640**	
21004 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					**46.922.900,000**		**48.114.741,660**		**48.658.438,240**		**49.889.496,730**		**50.094.043,660**	
Meningkatnya penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100	100	100	46.922.900,000	100	48.114.741,660	100	48.658.438,240	100	49.889.496,730	100	50.094.043,660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
21005 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					**1.000.000.000,000**		**1.025.400.000,000**		**1.036.987.020,000**		**1.063.222.791,610**		**1.067.582.005,050**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terwujudnya Legalitas Kepemilikan Tanah	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan (%)	85	100	100	1.000.000.000,000	100	1.025.400.000,000	100	1.036.987.020,000	100	1.063.222.791,610	100	1.067.582.005,050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
21006 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					**40.833.255,000**		**41.870.419,680**		**42.343.555,420**		**43.414.847,370**		**43.592.848,250**	
Terwujudnya Redistribusi Lahan dalam 1 Kabupaten/Kota	Persentase Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%)	0	100	100	40.833.255,000	100	41.870.419,680	100	42.343.555,420	100	43.414.847,370	100	43.592.848,250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
21008 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					**46.862.100,000**		**48.052.397,340**		**48.595.389,430**		**49.824.852,780**		**50.029.134,680**	
Terwujudnya peningkatan nilai guna tanah kosong Pemda	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong (%)	45	100	100	46.862.100,000	100	48.052.397,340	100	48.595.389,430	100	49.824.852,780	100	50.029.134,680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
211 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**23.794.787.853,520**		**24.399.175.465,000**		**24.674.886.147,750**		**25.299.160.767,290**		**25.402.887.326,440**	
21101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**12.558.754.190,500**		**12.877.746.546,940**		**13.023.265.082,920**		**13.352.753.689,520**		**13.407.499.979,630**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	90	90	95	9.377.180,500	95	9.615.360,880	95	9.724.014,460	95	9.970.032,030	95	10.010.909,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	90	90	95	12.549.377.010,000	95	12.868.131.186,060	95	13.013.541.068,460	95	13.342.783.657,490	95	13.397.489.070,470	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
21102 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					**500.000.000,000**		**512.700.000,000**		**518.493.510,000**		**531.611.395,800**		**533.791.002,530**	
Meningkatnya Tindaklanjut Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Rencana Aksi perencanaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	18	18	20	500.000.000,000	21	512.700.000,000	22	518.493.510,000	23	531.611.395,800	24	533.791.002,530	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
21103 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					**700.000.000,000**		**717.780.000,000**		**725.890.914,000**		**744.255.954,120**		**747.307.403,540**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu (%)	85	85	86	700.000.000,000	87	717.780.000,000	88	725.890.914,000	89	744.255.954,120	90	747.307.403,540	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
21104 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					**3.000.000.000,000**		**3.076.200.000,000**		**3.110.961.060,000**		**3.189.668.374,820**		**3.202.746.015,150**	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik (%)	60	60	60	3.000.000.000,000	61,5	3.076.200.000,000	63	3.110.961.060,000	64,5	3.189.668.374,820	66	3.202.746.015,150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
21105 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					**100.000.000,000**		**102.540.000,000**		**103.698.702,000**		**106.322.279,160**		**106.758.200,510**	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3 (%)	90	90	90	100.000.000,000	90	102.540.000,000	90	103.698.702,000	90	106.322.279,160	90	106.758.200,510	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
21106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					**150.000.000,000**		**153.810.000,000**		**155.548.053,000**		**159.483.418,740**		**160.137.300,760**	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Aturan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap aturan lingkungan hidup (%)	50	50	50	150.000.000,000	50	153.810.000,000	50	155.548.053,000	50	159.483.418,740	50	160.137.300,760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
21108 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**300.000.000,000**		**307.620.000,000**		**311.096.106,000**		**318.966.837,480**		**320.274.601,520**	
Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Konservasi Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Peduli Lingkungan yang aktif dalam konservasi lingkungan hidup (Kelompok)	1	1	1	300.000.000,000	2	307.620.000,000	3	311.096.106,000	4	318.966.837,480	5	320.274.601,520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
21109 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**35.000.000,000**		**35.889.000,000**		**36.294.545,700**		**37.212.797,710**		**37.365.370,170**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	10	10	12	35.000.000,000	14	35.889.000,000	16	36.294.545,700	18	37.212.797,710	20	37.365.370,170	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
21110 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					**25.000.000,000**		**25.635.000,000**		**25.924.675,500**		**26.580.569,790**		**26.689.550,130**	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup (%)	50	50	50	25.000.000,000	50	25.635.000,000	50	25.924.675,500	50	26.580.569,790	50	26.689.550,130	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
21111 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					**6.426.033.663,020**		**6.589.254.918,060**		**6.663.713.498,630**		**6.832.305.450,150**		**6.860.317.902,500**	
Meningkatnya Tata Kelola Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah (%)	90	90	95	6.426.033.663,020	96	6.589.254.918,060	97	6.663.713.498,630	98	6.832.305.450,150	99	6.860.317.902,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
212 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**10.301.371.254,160**		**10.563.026.084,010**		**10.682.388.278,770**		**10.952.652.702,220**		**10.997.558.578,290**	
21201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**8.312.976.167,760**		**8.524.125.762,420**		**8.620.448.383,530**		**8.838.545.727,640**		**8.874.783.765,120**	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	2.600.000,000	100	2.666.040,000	100	2.696.166,250	100	2.764.379,260	100	2.775.713,210	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	83,5	84	86	8.310.376.167,760	88	8.521.459.722,420	90	8.617.752.217,280	92	8.835.781.348,380	94	8.872.008.051,910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
21202 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					**1.796.822.486,400**		**1.842.461.777,550**		**1.863.281.595,640**		**1.910.422.620,010**		**1.918.255.352,750**	
Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan (%)	83,28	85,3	85,67	1.796.822.486,400	87,5	1.842.461.777,550	88,33	1.863.281.595,640	89,5	1.910.422.620,010	92	1.918.255.352,750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
21203 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					**46.965.600,000**		**48.158.526,240**		**48.702.717,590**		**49.934.896,340**		**50.139.629,420**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan (%)	99,72	99,73	99,75	46.965.600,000	99,77	48.158.526,240	99,8	48.702.717,590	99,83	49.934.896,340	99,87	50.139.629,420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
21204 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					**93.369.400,000**		**95.740.982,760**		**96.822.855,870**		**99.272.474,120**		**99.679.491,260**	
Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna	Jumlah PKS Pemanfaatan dan Akses Data (Dokumen)	5	5	5	53.543.400,000	5	54.903.402,360	6	55.523.810,810	6	56.928.563,220	6	57.161.970,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Jumlah PKS Pemanfaatan dan Akses Data (Dokumen)	5	5	5	39.826.000,000	5	40.837.580,400	6	41.299.045,060	6	42.343.910,900	6	42.517.520,930	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
21205 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					**51.237.600,000**		**52.539.035,040**		**53.132.726,140**		**54.476.984,110**		**54.700.339,740**	
Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna (%)	100	100	100	51.237.600,000	100	52.539.035,040	100	53.132.726,140	100	54.476.984,110	100	54.700.339,740	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
213 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**14.050.931.955,460**		**14.407.789.627,120**		**14.570.391.098,820**		**14.939.021.993,630**		**14.964.025.004,500**	
21301 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**5.872.990.740,000**		**5.974.150.387,970**		**6.090.215.105,960**		**6.244.297.609,670**		**6.269.899.229,860**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	5.177.500,000	100	5.948.375,000	100	6.851.943,000	100	7.699.541,670	100	7.854.158,940	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	100	100	100	5.867.813.240,000	100	5.968.202.012,970	100	6.083.363.162,960	100	6.236.598.068,000	100	6.262.045.070,920	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
21302 - PROGRAM PENATAAN DESA					**8.714.900,000**		**8.936.258,450**		**9.037.298,180**		**9.265.880,310**		**9.303.870,420**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Keterpaduan Penataan Wilayah Desa dengan Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Desa yang difasilitasi dalam penataan Desa (%)	73,94	54,55	60,61	8.714.900,000	63,64	8.936.258,450	66,67	9.037.298,180	69,70	9.265.880,310	75,76	9.303.870,420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
21303 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					**423.999.600,000**		**434.769.189,840**		**439.682.081,690**		**450.806.038,350**		**452.654.343,100**	
Meningkatkan tindak lanjut hasil Kerjasama	Persentase MOU kerjasama yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa (%)	1,52	1,82	3,03	245.199.700,000	4,55	251.427.772,380	6,06	254.268.906,210	7,58	260.701.909,530	9,09	261.770.787,360	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Desa	Persentase BUMDes/BUMDesMa Kategori Maju (%)	14,20	17,05	19,89	122.345.900,000	21,31	125.453.485,860	22,73	126.871.110,250	24,15	130.080.949,340	25,57	130.614.281,230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Legalitas Kelembagaan Ekonomi Desa	Persentase BUMDes/BUMDesMA yang berbadan hukum (%)	19,89	23,30	25,57	56.454.000,000	28,41	57.887.931,600	31,25	58.542.065,230	34,09	60.023.179,480	36,93	60.269.274,510	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
21304 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					**4.161.663.200,000**		**4.315.347.762,110**		**4.315.347.762,110**		**4.424.526.060,500**		**4.406.419.638,050**	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Regulasi	Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi (%)	100	100	100	4.161.663.200,000	100	4.315.347.762,110	100	4.315.347.762,110	100	4.424.526.060,500	100	4.406.419.638,050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
21305 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					**3.583.563.515,460**		**3.674.586.028,750**		**3.716.108.850,880**		**3.810.126.404,800**		**3.825.747.923,070**	
Meningkatnya legalitas kelembagaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang memiliki dasar hukum pembentukan yang sah (SK Kepala Desa tau Perdes) (%)	4.45%	20.30%	23.35%	150.000.000,000	26.85%	153.810.000,000	30.88%	155.548.053,000	35.51%	159.483.418,740	40.83%	160.137.300,760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kapasitas SDM Kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase Pengurus Lembaga Masyarakat Desa yang telah mengikuti pelatihan berbasis peran dan fungsi (%)	1,53	7,47	7,70	3.433.563.515,460	7,81	3.520.776.028,750	7,92	3.560.560.797,880	8,01	3.650.642.986,060	8,09	3.665.610.622,310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
214 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					**1.972.733.322,000**		**2.022.840.748,380**		**2.045.698.848,830**		**2.097.455.029,710**		**2.106.054.595,330**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
21402 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					**520.563.670,000**		**533.785.987,220**		**539.817.768,870**		**553.475.158,430**		**555.744.406,580**	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR) (Orang)	2,08	2,07	2,06	520.563.670,000	2,05	533.785.987,220	2,04	539.817.768,870	2,03	553.475.158,430	2,03	555.744.406,580	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	33,7	32.7-32.7	31.7-31.7		30.7-30.7		30.50-30.50		30.30-30.30		30.30-30.30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	65,4	66,5	67,5		68,5		69,5		70,00		70,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	12	20	25		35,00		45,00		50,00		50,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
21403 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					**1.354.569.652,000**		**1.388.975.721,160**		**1.404.671.146,810**		**1.440.209.326,820**		**1.446.114.185,060**	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modem/Modem Contraceptive (mCPR) (%)	59,32	60,10	60,60	1.354.569.652,000	61,10	1.388.975.721,160	61,60	1.404.671.146,810	62,10	1.440.209.326,820	62,10	1.446.114.185,060	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,93	9,60	9,10		8,80		8,50		8,20		8,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	10,9	12,6	12,20		11,90		11,6		11,3		11,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
21404 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					**97.600.000,000**		**100.079.040,000**		**101.209.933,150**		**103.770.544,460**		**104.196.003,690**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	55,8	59,37	59,88	97.600.000,000	60,39	100.079.040,000	60,89	101.209.933,150	61,39	103.770.544,460	61,39	104.196.003,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	77,9	85,31	86,44		87,48		88,44		89,33		89,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	9	9,50	9,52		9,53		9,53		9,53		9,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana (%)	84,28	70,99	80,10		80,20		80,20		80,50		80,70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
215 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**40.279.542.192,010**		**41.302.642.563,690**		**41.769.362.424,660**		**42.826.127.294,000**		**43.001.714.415,910**	
21501 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**16.175.095.021,000**		**16.585.942.434,540**		**16.773.363.584,050**		**17.197.729.682,710**		**17.268.240.374,420**	
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	16.169.212.621,000	100	16.579.910.621,580	100	16.767.263.611,600	100	17.191.475.380,960	100	17.261.960.430,030	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	5.882.400,000	100	6.031.812,960	100	6.099.972,450	100	6.254.301,750	100	6.279.944,390	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
21502 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					**19.208.447.079,010**		**19.696.341.634,810**		**19.918.910.295,290**		**20.422.858.725,770**		**20.506.592.446,540**	
Meningkatnya Layanan Jaringan Trayek Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Darat (Rasio)	45	47	47	441.556.647,000	47,5	452.772.185,830	48	457.888.511,530	48,5	469.473.090,880	49	471.397.930,550	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Rata-Rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Kabupaten/Kota (Km/Jam)	30	35	35	18.766.890.432,010	35	19.243.569.448,980	35	19.461.021.783,760	35	19.953.385.634,890	35	20.035.194.515,990	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
21503 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					**4.796.000.092,000**		**4.917.818.494,340**		**4.973.389.843,320**		**5.099.216.606,360**		**5.120.123.394,440**	
Meningkatnya Layanan Jaringan Trayek Angkutan Laut	Rasio Konektivitas Laut (Rasio)	47	48	48	4.796.000.092,000	48,25	4.917.818.494,340	48,50	4.973.389.843,320	48,75	5.099.216.606,360	49	5.120.123.394,440	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
21504 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					**100.000.000,000**		**102.540.000,000**		**103.698.702,000**		**106.322.279,160**		**106.758.200,510**	
Meningkatnya Layanan Pengelolaan Penerbangan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Penerbangan (Kegiatan)	-	1	1	100.000.000,000	1	102.540.000,000	1	103.698.702,000	1	106.322.279,160	1	106.758.200,510	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
216 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**16.650.506.680,400**		**17.073.429.550,090**		**17.266.359.304,000**		**17.703.198.194,380**		**17.775.781.306,990**	
21601 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**7.844.968.972,640**		**8.044.231.184,550**		**8.135.130.996,930**		**8.340.949.811,150**		**8.375.147.705,380**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	90	90	90	5.558.200,000	95	5.699.378,280	95	5.763.781,250	100	5.909.604,920	100	5.933.834,300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	90	90		95		95		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	100	100	100	7.839.410.772,640	100	8.038.531.806,270	100	8.129.367.215,680	100	8.335.040.206,230	100	8.369.213.871,080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan kepegawaian dan administrasi umum yang tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
21602 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					**2.964.979.925,000**		**3.040.290.415,100**		**3.074.645.696,790**		**3.152.434.232,910**		**3.165.359.213,270**	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	75	80	2.964.979.925,000	85	3.040.290.415,100	87	3.074.645.696,790	90	3.152.434.232,910	92	3.165.359.213,270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik (%)	75	75	80		85		87		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
21603 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					**5.840.557.782,760**		**5.988.907.950,440**		**6.056.582.610,280**		**6.209.814.150,320**		**6.235.274.388,340**	
Meningkatnya Tingkat Implementasi Arsitektur TIK	Persentase Kualitas Aplikasi Arsitektur TIK (%)	87	87	90	5.840.557.782,760	92	5.988.907.950,440	93	6.056.582.610,280	95	6.209.814.150,320	97	6.235.274.388,340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
217 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					**13.633.403.520,000**		**13.974.238.608,000**		**14.127.955.232,700**		**14.481.154.113,510**		**14.423.229.497,060**	
21701 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**11.909.044.380,000**		**12.206.770.489,500**		**12.341.044.964,890**		**12.649.571.089,010**		**12.598.972.804,650**	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	90	90	90	17.108.100,000	90	17.535.802,500	90	17.728.696,330	90	18.171.913,740	90	18.099.226,080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Terpenuhinya Layanan Dukungan Administrasi PD	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	82	83	11.891.936.280,000	84	12.189.234.687,000	85	12.323.316.268,560	86	12.631.399.175,270	87	12.580.873.578,570	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
21702 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					**2.000.000,000**		**2.050.000,000**		**2.072.550,000**		**2.124.363,750**		**2.115.866,300**	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	49,58	50	55	2.000.000,000	60	2.050.000,000	62,50	2.072.550,000	65	2.124.363,750	67,50	2.115.866,300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
21703 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					**24.999.700,000**		**25.624.692,500**		**25.906.564,120**		**26.554.228,220**		**26.448.011,310**	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	49,59	50	55	24.999.700,000	60	25.624.692,500	62,50	25.906.564,120	65	26.554.228,220	67,50	26.448.011,310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
21704 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					**29.999.640,000**		**30.749.631,000**		**31.087.876,940**		**31.865.073,860**		**31.737.613,570**	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	49,59	50	55	29.999.640,000	60	30.749.631,000	62,50	31.087.876,940	65	31.865.073,860	67,50	31.737.613,570	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
21705 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					**200.000.300,000**		**205.000.307,500**		**207.255.310,880**		**212.436.693,650**		**211.586.946,880**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	49,59	50	55	200.000.300,000	60	205.000.307,500	62,50	207.255.310,880	65	212.436.693,650	67,50	211.586.946,880	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
21706 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					**989.899.800,000**		**1.014.647.295,000**		**1.025.808.415,250**		**1.051.453.625,630**		**1.047.247.811,120**	
Meningkatnya Skala Usaha Terhadap Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Skala Usahanya (%)	3	5	5	989.899.800,000	7	1.014.647.295,000	9	1.025.808.415,250	12	1.051.453.625,630	15	1.047.247.811,120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
21707 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					**254.999.900,000**		**261.374.897,500**		**264.250.021,370**		**270.856.271,910**		**269.772.846,820**	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan UMKM	Jumlah UMKM Baru (UMKM)	860	860	860	254.999.900,000	860	261.374.897,500	1.060	264.250.021,370	1.060	270.856.271,910	1.110	269.772.846,820	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
21708 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					**222.459.800,000**		**228.021.295,000**		**230.529.529,250**		**236.292.767,480**		**235.347.596,410**	
Meningkatnya Skala Usaha terhadap UMKM	Persentase UMKM yang Meningkat Skala Produksi (%)	4	4	4,3	222.459.800,000	4,5	228.021.295,000	4,8	230.529.529,250	5	236.292.767,480	5,2	235.347.596,410	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
218 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					**6.120.654.878,000**		**6.276.119.511,900**		**6.347.039.662,380**		**6.507.619.765,840**		**6.534.301.006,870**	
21801 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**5.569.936.678,000**		**5.713.723.069,620**		**5.778.485.090,310**		**5.927.021.892,590**		**5.950.410.866,460**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	90	95	95	2.468.200,000	95	2.530.892,280	100	2.559.491,360	100	2.624.246,490	100	2.635.005,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	5.567.468.478,000	100	5.711.192.177,340	100	5.775.925.598,950	100	5.924.397.646,100	100	5.947.775.860,560	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
21802 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					**150.000.000,000**		**151.500.000,000**		**153.015.000,000**		**154.545.150,000**		**156.090.601,000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Iklim Investasi	Nilai Investasi (triliun rupiah)	2,7	2,8	2,9	150.000.000,000	3	151.500.000,000	3,1	153.015.000,000	3,2	154.545.150,000	3,3	156.090.601,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
21803 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					**154.998.900,000**		**158.935.872,060**		**160.731.847,410**		**164.798.363,150**		**165.474.036,440**	
Meningkatnya Investor	Persentase peningkatan investor (%)	9,53	9,56	9,58	154.998.900,000	9,65	158.935.872,060	9,68	160.731.847,410	9,77	164.798.363,150	9,82	165.474.036,440	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
21804 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					**125.721.800,000**		**128.915.133,720**		**130.371.874,730**		**133.670.283,160**		**134.218.331,320**	
Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)	93,78	94,25	94,55	125.721.800,000	95,60	128.915.133,720	96,78	130.371.874,730	98,88	133.670.283,160	100	134.218.331,320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
21805 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					**94.999.900,000**		**97.412.897,460**		**98.513.663,200**		**101.006.058,880**		**101.420.183,720**	
Meningkatnya iklim investasi	Nilai Investasi (triliun rupiah)	2,7	2,8	2,9	94.999.900,000	3	97.412.897,460	3,1	98.513.663,200	3,2	101.006.058,880	3,3	101.420.183,720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
21806 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					**24.997.600,000**		**25.632.539,040**		**25.922.186,730**		**26.578.018,060**		**26.686.987,930**	
Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)	93,78	94,25	94,55	24.997.600,000	95,60	25.632.539,040	96,78	25.922.186,730	98,88	26.578.018,060	100	26.686.987,930	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
219 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**12.563.328.432,760**		**12.882.436.974,950**		**13.028.008.512,770**		**13.357.617.128,140**		**13.304.186.659,630**	
21901 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**7.058.328.432,760**		**7.237.609.974,950**		**7.319.394.967,670**		**7.504.575.660,350**		**7.474.557.357,710**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	80	80	80	565.600,000	80	579.966,240	80	586.519,860	80	601.358,810	80	598.953,380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	82	83	7.057.762.832,760	84	7.237.030.008,710	85	7.318.808.447,810	86	7.503.974.301,540	87	7.473.958.404,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
21902 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					**2.100.000.000,000**		**2.153.340.000,000**		**2.177.672.742,000**		**2.232.767.862,370**		**2.223.836.790,920**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pemuda Yang Unggul dan Berprestasi	Prosentase Peningkatan Pemuda Yang Unggul dan Berprestasi (%)	9,14	10	10	2.100.000.000,000	10	2.153.340.000,000	10	2.177.672.742,000	10	2.232.767.862,370	10	2.223.836.790,920	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
21903 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					**2.880.000.000,000**		**2.953.152.000,000**		**2.986.522.617,600**		**3.062.081.639,830**		**3.049.833.313,270**	
Meningkatnya Kompetensi Atlet Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olah Raga (%)	17	25	25	2.880.000.000,000	25	2.953.152.000,000	25	2.986.522.617,600	25	3.062.081.639,830	25	3.049.833.313,270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
21904 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					**525.000.000,000**		**538.335.000,000**		**544.418.185,500**		**558.191.965,590**		**555.959.197,730**	
Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan	Persentase peningkatan organisasi kepemudaan yang aktif dalam pemberdayaan pemuda (%)	6	5	5	525.000.000,000	5	538.335.000,000	5	544.418.185,500	5	558.191.965,590	5	555.959.197,730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
220 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					**53.293.590,000**		**54.647.247,190**		**55.264.761,080**		**56.662.959,530**		**56.895.277,670**	
22002 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					**53.293.590,000**		**54.647.247,190**		**55.264.761,080**		**56.662.959,530**		**56.895.277,670**	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,5	2,65	2,8	53.293.590,000	3	54.647.247,190	3,2	55.264.761,080	3,5	56.662.959,530	3,7	56.895.277,670	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
221 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					**55.711.000,000**		**57.126.059,400**		**57.771.583,870**		**59.233.204,940**		**59.476.061,080**	
22102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					**55.711.000,000**		**57.126.059,400**		**57.771.583,870**		**59.233.204,940**		**59.476.061,080**	
Meningkatnya Penguatan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	584	585	600	55.711.000,000	625	57.126.059,400	650	57.771.583,870	700	59.233.204,940	725	59.476.061,080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
222 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**695.023.800,000**		**712.677.404,520**		**720.730.659,190**		**738.965.144,870**		**736.009.284,280**	
22202 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					**395.000.000,000**		**405.033.000,000**		**409.609.872,900**		**419.973.002,680**		**418.293.110,670**	
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang dikembangkan (%)	54	55	56	395.000.000,000	57	405.033.000,000	58	409.609.872,900	59	419.973.002,680	60	418.293.110,670	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
22203 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					**199.999.800,000**		**205.079.794,920**		**207.397.196,600**		**212.644.345,680**		**211.793.768,290**	
Meningkatnya Kesenian Lokal Yang Dikembangkan	Persentase Kesenian Lokal Yang Dikembangkan (%)	49,70	55	56	199.999.800,000	57	205.079.794,920	58	207.397.196,600	59	212.644.345,680	60	211.793.768,290	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
22204 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					**25.000.000,000**		**25.635.000,000**		**25.924.675,500**		**26.580.569,790**		**26.474.247,510**	
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang dikembangkan (%)	54	55	56	25.000.000,000	57	25.635.000,000	58	25.924.675,500	59	26.580.569,790	60	26.474.247,510	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
22205 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					**50.024.000,000**		**51.294.609,600**		**51.874.238,690**		**53.186.656,930**		**52.973.910,300**	
Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%)	42	43	44	50.024.000,000	45	51.294.609,600	46	51.874.238,690	47	53.186.656,930	48	52.973.910,300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
22206 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					**25.000.000,000**		**25.635.000,000**		**25.924.675,500**		**26.580.569,790**		**26.474.247,510**	
Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%)	42	43	44	25.000.000,000	45	25.635.000,000	46	25.924.675,500	47	26.580.569,790	48	26.474.247,510	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
223 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					**4.944.509.466,000**		**5.294.480.152,920**		**5.354.307.778,640**		**5.489.771.765,440**		**5.512.279.829,680**	
22301 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**3.581.436.205,000**		**3.672.404.684,610**		**3.713.902.857,540**		**3.807.864.599,840**		**3.823.476.844,700**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	15.270.400,000	100	15.658.268,160	100	15.835.206,590	100	16.235.837,320	100	16.302.404,250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	100	100	100	3.566.165.805,000	100	3.656.746.416,450	100	3.698.067.650,950	100	3.791.628.762,520	100	3.807.174.440,450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
22302 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					**682.929.334,000**		**822.115.885,560**		**831.405.795,070**		**852.440.361,680**		**855.935.367,160**	
meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan minat baca masyarakat	Persentase Lembaga Perpustakaan yang dibina (%)	95	95	95	682.929.334,000	95	822.115.885,560	95	831.405.795,070	95	852.440.361,680	95	855.935.367,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
22303 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					**680.143.927,000**		**799.959.582,750**		**808.999.126,030**		**829.466.803,920**		**832.867.617,820**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengembangan warisan budaya bangsa berupa koleksi dan naskah kuno yang dijaga dan dilestarikan	Persentase Pengembangan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah (%)	85	85	85	680.143.927,000	85	799.959.582,750	85	808.999.126,030	85	829.466.803,920	85	832.867.617,820	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Pengembangan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah (%)	85	0	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
224 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					**218.822.066,000**		**224.380.146,480**		**226.915.642,130**		**232.656.607,870**		**233.610.499,970**	
22402 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					**195.000.000,000**		**199.953.000,000**		**202.212.468,900**		**207.328.444,360**		**208.178.490,990**	
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan baik (%)	80	0	80	195.000.000,000	80	199.953.000,000	80	202.212.468,900	80	207.328.444,360	80	208.178.490,990	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
22403 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					**23.822.066,000**		**24.427.146,480**		**24.703.173,230**		**25.328.163,510**		**25.432.008,980**	
Meningkatnya Sarana perlindungan dan Penyelamatan Arsip untuk menjamin ketersediaan, keutuhan, dan keamanan arsip dari berbagai ancaman	PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI SARANA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (%)	80	0	80	23.822.066,000	80	24.427.146,480	80	24.703.173,230	80	25.328.163,510	80	25.432.008,980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
325 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					**10.646.251.569,670**		**10.916.666.359,540**		**11.040.024.689,410**		**11.319.337.314,040**		**11.365.746.597,030**	
32501 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**6.236.577.658,640**		**6.387.273.253,100**		**6.460.579.440,860**		**6.676.922.561,880**		**6.559.314.897,480**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	12.596.700,000	100	12.916.656,180	100	13.062.614,390	100	13.393.098,540	100	13.448.010,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	0	85	87	6.223.980.958,640	90	6.374.356.596,920	93	6.447.516.826,470	95	6.663.529.463,340	95	6.545.866.887,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
32503 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					**3.939.676.817,030**		**1.939.744.608,180**		**1.900.393.722,260**		**1.900.393.722,260**		**2.000.754.183,430**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	3,15	1,2	1,2	3.939.676.817,030	1,2	1.939.744.608,180	1,3	1.900.393.722,260	1,4	1.900.393.722,260	1,5	2.000.754.183,430	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
32504 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					**289.996.076,000**		**1.697.361.976,330**		**1.700.722.166,660**		**1.708.330.437,480**		**1.709.594.592,270**	
Meningkatnya produksi perikanan	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	13,96	13	13	289.996.076,000	13	1.697.361.976,330	13	1.700.722.166,660	13	1.708.330.437,480	13	1.709.594.592,270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
32505 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					**90.000.509,000**		**192.286.521,930**		**193.329.359,630**		**195.690.592,420**		**196.082.923,850**	
Meningkatnya kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang undangan	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Perikanan terhadap Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku (%)	-	3	3,5	90.000.509,000	4	192.286.521,930	4,5	193.329.359,630	5	195.690.592,420	5,5	196.082.923,850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
32506 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					**90.000.509,000**		**700.000.000,000**		**785.000.000,000**		**838.000.000,000**		**900.000.000,000**	
Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase pertumbuhan produksi olahan perikanan (%)	1,8	2,5	3	90.000.509,000	3,5	700.000.000,000	4	785.000.000,000	4,5	838.000.000,000	5	900.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
326 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					**3.000.443.907,000**		**3.076.655.182,240**		**3.111.421.385,800**		**3.190.140.346,850**		**3.177.379.785,480**	
32602 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					**400.000.000,000**		**410.160.000,000**		**414.794.808,000**		**425.289.116,640**		**423.587.960,180**	
Meningkatnya Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata (Lokasi)	3	3	3	400.000.000,000	3	410.160.000,000	3	414.794.808,000	3	425.289.116,640	3	423.587.960,180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
32603 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					**2.150.443.907,000**		**2.205.065.182,240**		**2.229.982.418,800**		**2.286.400.973,990**		**2.277.255.370,100**	
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran wisata (%)	0	0,75	0,75	2.150.443.907,000	0,75	2.205.065.182,240	0,75	2.229.982.418,800	0,75	2.286.400.973,990	0,75	2.277.255.370,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
32604 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK					**200.000.000,000**		**205.080.000,000**		**207.397.404,000**		**212.644.558,320**		**211.793.980,090**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya Industri Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Industri Ekonomi Kreatif (%)	5	5	5	200.000.000,000	5	205.080.000,000	5	207.397.404,000	5	212.644.558,320	5	211.793.980,090	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
32605 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					**250.000.000,000**		**256.350.000,000**		**259.246.755,000**		**265.805.697,900**		**264.742.475,110**	
Meningkatnya Industri Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Industri Ekonomi Kreatif (%)	5	5	5	250.000.000,000	5	256.350.000,000	5	259.246.755,000	5	265.805.697,900	5	264.742.475,110	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
327 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**40.517.535.251,450**		**41.546.680.646,840**		**42.016.158.138,140**		**43.079.166.939,040**		**43.255.791.523,500**	
32701 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**26.715.608.051,450**		**27.394.184.495,960**		**27.703.738.780,760**		**28.404.643.371,910**		**28.521.102.409,740**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	1.499.800,000	100	1.537.894,920	100	1.555.273,130	100	1.594.621,540	100	1.601.159,490	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	100	100	100	26.714.108.251,450	100	27.392.646.601,040	100	27.702.183.507,630	100	28.403.048.750,370	100	28.519.501.250,250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
32702 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					**7.855.997.600,000**		**8.055.539.939,040**		**8.146.567.540,350**		**8.352.675.699,120**		**8.386.921.669,490**	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarana Pertanian yang BerkualitasÂ (%)	-	2	2	7.855.997.600,000	2	8.055.539.939,040	2	8.146.567.540,350	2	8.352.675.699,120	2	8.386.921.669,490	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
32703 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					**5.469.400.000,000**		**5.610.227.760,000**		**5.649.470.833,690**		**5.794.932.445,780**		**5.794.101.668,810**	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pemenuhan Prasarana Pertanian yang BerkualitasÂ (%)	-	2	2	5.469.400.000,000	2	5.610.227.760,000	2	5.649.470.833,690	2	5.794.932.445,780	2	5.794.101.668,810	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
32704 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN					**45.998.900,000**		**47.167.272,060**		**47.700.262,230**		**48.907.078,870**		**49.107.597,890**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MASYARAKAT VETERINER														
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian kasus penyakit hewan/ternak (Angka)	0,25	0,25	0,25	45.998.900,000	0,25	47.167.272,060	0,25	47.700.262,230	0,25	48.907.078,870	0,25	49.107.597,890	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
32705 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					**75.000.000,000**		**75.000.000,000**		**100.000.000,000**		**100.000.000,000**		**125.000.000,000**	
Meningkatnya pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertangani (%)	-	-	0,50	75.000.000,000	0,60	75.000.000,000	0,75	100.000.000,000	0,80	100.000.000,000	0,82	125.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
32706 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					**21.530.700,000**		**22.077.579,780**		**22.327.056,430**		**22.891.930,960**		**22.985.787,880**	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase usaha pertanian yang difasilitasi (%)	-	-	1	21.530.700,000	1	22.077.579,780	2	22.327.056,430	2	22.891.930,960	2	22.985.787,880	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
32707 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					**334.000.000,000**		**342.483.600,000**		**346.353.664,680**		**355.116.412,400**		**356.572.389,690**	
Meningkatnya kapasitas sumber daya pertanian	Jumlah Kelompok Usaha Pertanian (Angka)	-	-	10	334.000.000,000	12	342.483.600,000	12	346.353.664,680	15	355.116.412,400	17	356.572.389,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelompok Tani Naik Kelas (%)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
330 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					**1.246.319.355,200**		**1.277.477.339,080**		**1.291.529.589,820**		**1.323.817.829,560**		**1.318.522.558,240**	
33002 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					**24.964.000,000**		**25.588.100,000**		**25.869.569,100**		**26.516.308,330**		**26.410.243,090**	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Layak	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terstandarisasi (%)	0,03	0,03	0,03	24.964.000,000	0,03	25.588.100,000	0,03	25.869.569,100	0,03	26.516.308,330	0,03	26.410.243,090	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
33003 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					**679.111.855,200**		**696.089.651,580**		**703.746.637,750**		**721.340.303,690**		**718.454.942,480**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Layak	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terstandarisasi (%)	0,03	0,03	0,03	679.111.855,200	0,03	696.089.651,580	0,03	703.746.637,750	0,03	721.340.303,690	0,03	718.454.942,480	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
33004 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					**17.243.800,000**		**17.674.895,000**		**17.869.318,850**		**18.316.051,820**		**18.242.787,610**	
Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai perdagangan daerah (%)	0,4	0,4	0,5	17.243.800,000	0,6	17.674.895,000	0,7	17.869.318,850	0,8	18.316.051,820	0,9	18.242.787,610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
33005 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					**100.000.000,000**		**102.500.000,000**		**103.627.500,000**		**106.218.187,500**		**105.793.314,750**	
Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai perdagangan daerah (%)	0,4	0,4	0,5	100.000.000,000	0,6	102.500.000,000	0,7	103.627.500,000	0,8	106.218.187,500	0,9	105.793.314,750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
33006 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					**224.999.700,000**		**230.624.692,500**		**233.161.564,120**		**238.990.603,220**		**238.034.640,810**	
Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai perdagangan daerah (%)	0,4	0,4	0,5	224.999.700,000	0,6	230.624.692,500	0,7	233.161.564,120	0,8	238.990.603,220	0,9	238.034.640,810	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
33007 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					**200.000.000,000**		**205.000.000,000**		**207.255.000,000**		**212.436.375,000**		**211.586.629,500**	
Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai perdagangan daerah (%)	0,4	0,4	0,5	200.000.000,000	0,6	205.000.000,000	0,7	207.255.000,000	0,8	212.436.375,000	0,9	211.586.629,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
331 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**3.915.655.100,000**		**4.013.546.477,500**		**4.057.695.488,750**		**4.159.137.875,970**		**4.142.501.324,470**	
33102 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					**3.697.655.100,000**		**3.790.096.477,500**		**3.831.787.538,750**		**3.927.582.227,220**		**3.911.871.898,310**	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berkembang Skala usahanya (%)	2	2	2	3.697.655.100,000	2	3.790.096.477,500	2	3.831.787.538,750	2	3.927.582.227,220	2	3.911.871.898,310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
33103 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					**100.000.000,000**		**102.500.000,000**		**103.627.500,000**		**106.218.187,500**		**105.793.314,750**	
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Pertumbuhan IKM (%)	5	5	5	100.000.000,000	5,5	102.500.000,000	6	103.627.500,000	6,5	106.218.187,500	7	105.793.314,750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
33104 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM					**118.000.000,000**		**120.950.000,000**		**122.280.450,000**		**125.337.461,250**		**124.836.111,410**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Industri	Persentase Kesesuaian data dan informasi dengan SIINAS (%)	61	62	64	118.000.000,000	66	120.950.000,000	68	122.280.450,000	70	125.337.461,250	72	124.836.111,410	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
401 - SEKRETARIAT DAERAH					**52.825.268.539,920**		**54.167.030.360,830**		**54.779.117.803,910**		**56.165.029.484,350**		**55.095.306.105,240**	
40101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**41.395.777.459,740**		**42.447.230.207,210**		**42.926.883.908,560**		**44.012.934.071,440**		**42.893.387.101,140**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	3.271.400,000	100	3.354.493,550	100	3.392.399,330	100	3.478.227,040	100	3.492.487,770	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya layanan administrasi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Persentase OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana (%) (%)	100	100	100	1.426.771.500,000	100	1.463.011.496,100	100	1.479.543.526,010	100	1.516.975.977,210	100	1.523.195.578,720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase OPD yang menindaklanjuti Monev peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	PersentaseÂ Layanan Keprotokolan yang terpenuhi (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (%) (%)	100	100	100	39.965.734.559,740	100	40.980.864.217,560	100	41.443.947.983,220	100	42.492.479.867,190	100	41.366.699.034,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
40102 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					**9.460.480.460,180**		**9.700.776.663,870**		**9.810.395.440,170**		**10.058.598.444,810**		**10.099.838.698,430**	
Meningkatnya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, pelayanan kesejahteraan rakyat dan produk hukum yang dihasilkan	% Harmonisasi Produk Hukum Daerah (%)	100	100	100	9.460.480.460,180	100	9.700.776.663,870	100	9.810.395.440,170	100	10.058.598.444,810	100	10.099.838.698,430	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	% Kerjasama Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	% Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
40103 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					**1.969.010.620,000**		**2.019.023.489,750**		**2.041.838.455,180**		**2.093.496.968,100**		**2.102.080.305,670**	
Meningkatnya ketaatan dalam melaksanakan peraturan / kebijakan di bidang perekonomian dan pengadaan barang/ jasa serta pemenuhan data informasi pembangunan	% Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah (%)	100	100	100	1.969.010.620,000	100	2.019.023.489,750	100	2.041.838.455,180	100	2.093.496.968,100	100	2.102.080.305,670	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	% Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	% Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	% perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
402 - SEKRETARIAT DPRD					**68.101.286.425,200**		**69.831.059.100,400**		**70.620.150.068,230**		**72.404.145.677,670**		**71.491.795.961,740**	
40201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**47.448.732.059,200**		**48.653.929.853,500**		**49.203.719.260,840**		**50.445.879.170,560**		**49.621.362.520,650**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	90	90	90	98.684.713,000	90	101.191.304,710	90	102.334.766,450	90	104.918.232,330	90	103.203.388,300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	76	-	77	47.350.047.346,200	77,5	48.552.738.548,790	88	49.101.384.494,390	88,5	50.340.960.938,230	89	49.518.159.132,350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
40202 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					**20.652.554.366,000**		**21.177.129.246,900**		**21.416.430.807,390**		**21.958.266.507,110**		**21.870.433.441,090**	
Meningkatnya Fasilitasi Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Fasilitasi Persidangan dan Kajian Perundang-undangan (%)	100	100	100	4.408.368.200,000	100	4.520.340.752,280	100	4.571.420.602,780	100	4.687.077.544,030	100	4.668.329.233,850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (%)	100	100	100	5.351.468.640,000	100	5.487.395.943,460	100	5.549.403.517,620	100	5.689.803.426,610	100	5.667.044.212,910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan Kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan DPRD (%)	100	100	100	10.892.717.526,000	100	11.169.392.551,160	100	11.295.606.686,990	100	11.581.385.536,470	100	11.535.059.994,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
501 - PERENCANAAN					**10.941.255.712,650**		**11.219.163.607,750**		**11.345.940.156,520**		**11.632.992.442,480**		**11.680.687.711,490**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
50101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**8.451.161.924,650**		**8.665.821.437,540**		**8.763.745.219,780**		**8.985.467.973,850**		**9.022.308.392,540**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	10.111.400,000	100	10.368.229,560	100	10.485.390,550	100	10.750.670,940	100	10.794.748,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	8.441.050.524,650	100	8.655.453.207,980	100	8.753.259.829,230	100	8.974.717.302,910	100	9.011.513.643,850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
50102 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					**1.144.777.188,000**		**1.173.854.528,570**		**1.187.119.084,750**		**1.217.153.197,580**		**1.222.143.525,690**	
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam RKPD (%)	60	60	61	99.435.336,000	62	101.874.496,290	63	102.938.277,690	64	105.453.080,480	65	99.891.922,730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas (Data yang Valid) (%)	-	100	100	111.837.971,190	100	114.581.369,540	100	115.777.837,100	100	118.606.312,910	100	112.351.508,260	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Kinerja	Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD (%)	-	100	100	933.503.880,810	100	957.398.662,740	100	968.402.969,960	100	993.093.804,190	100	1.009.900.094,700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
50103 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**1.345.316.600,000**		**1.379.487.641,640**		**1.395.075.851,990**		**1.430.371.271,050**		**1.436.235.793,260**	
Meningkatnya Keberhasilan Pencapaian Target Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah yang Tingkat Keberhasilan Pencapaian Target > 85%Â (%)	-	85	86	381.341.171,850	87	390.695.515,190	88	394.775.187,950	89	404.419.625,410	90	405.733.255,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Pencapaian Program Prioritas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Program Prioritas yang Tercapai Targetnya (%)	-	90	91	118.723.394,960	92	121.635.693,660	93	122.905.822,970	94	125.908.437,010	95	126.317.410,960	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Keberhasilan Pencapaian Target Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah yang Tingkat Keberhasilan Pencapaian Target > 85%Â (%)	-	85	86	265.613.660,820	87	272.129.194,850	88	274.970.788,920	89	281.688.380,750	90	282.603.356,830	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Pencapaian Program Prioritas Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Program Prioritas yang Tercapai Targetnya (%)	-	90	91	143.579.098,630	92	147.101.110,640	93	148.637.151,800	94	152.268.387,400	95	152.762.983,340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Keberhasilan Pencapaian Target Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah yang Tingkat Keberhasilan Pencapaian Target > 85%Â (%)	-	85	86	41.081.019,790	87	42.088.741,990	88	42.528.235,890	89	43.567.209,270	90	43.708.723,640	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Pencapaian Program Prioritas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Program Prioritas yang Tercapai Targetnya (%)				394.978.253,950		405.837.385,310		411.258.664,460		422.519.231,210		425.110.063,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
502 - KEUANGAN					**618.871.243.390,000**		**634.343.024.474,750**		**641.320.797.743,970**		**657.353.817.687,570**		**654.724.402.416,820**	
50201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**57.532.045.218,00**		**58.970.346.348,43**		**59.619.020.158,29**		**61.109.495.662,24**		**60.865.057.679,59**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	2.000.000,000	100	2.050.000,000	100	2.072.550,000	100	2.124.363,750	100	2.115.866,300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	82	83	84	57.530.045.218,000	85	58.968.296.348,430	86	59.616.947.608,290	87	61.107.371.298,490	88	60.862.941.813,290	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
50201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**5.547.593.033,000**		**5.686.282.858,83**		**5.748.831.970,270**		**5.892.552.769,530**		**5.868.982.558,450**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	94,28	95	95	3.600.800,000	95	3.690.820,000	95	3.731.419,020	95	3.824.704,500	95	3.809.405,680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Badan Pendapatan Daerah	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	94,28	95	95	5.543.992.233,000	95	5.682.592.038,830	95	5.745.100.551,250	95	5.888.728.065,030	95	5.865.173.152,770	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
50202 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					**550.929.115.669,000**		**564.702.343.560,730**		**570.914.069.339,890**		**585.186.921.073,390**		**582.846.173.389,100**	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Tahapan Penganggaran , Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	100	100	100	550.929.115.669,000	100	564.702.343.560,730	100	570.914.069.339,890	100	585.186.921.073,390	100	582.846.173.389,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
50203 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					**502.671.723,000**		**515.238.516,080**		**520.906.139,750**		**533.928.793,240**		**531.793.078,070**	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan yang tertib dan akuntabel (%)	100	100	100	502.671.723,000	100	515.238.516,080	100	520.906.139,750	100	533.928.793,240	100	531.793.078,070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah (%)	5	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
50204 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					**4.359.817.747,000**		**4.468.813.190,680**		**4.517.970.135,770**		**4.630.919.389,170**		**4.612.395.711,610**	
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (%)	8,89	5	5	3.749.049.771,000	5	3.842.776.015,280	5	3.885.046.551,440	5	3.982.172.715,230	5	3.966.244.024,370	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak Daerah (%)	-	2	2	610.767.976,000	2,5	626.037.175,400	2,5	632.923.584,330	2,5	648.746.673,940	2,5	646.151.687,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
503 - KEPEGAWAIAN					**13.266.654.075,000**		**13.603.627.088,510**		**13.757.348.074,610**		**14.105.408.980,890**		**14.163.241.157,710**	
50301 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.795.412.675,000		12.095.016.156,950		12.231.689.839,510		12.541.151.592,460		12.592.570.313,990	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	1.210.000,000	100	1.240.734,000	100	1.254.754,290	100	1.286.499,580	100	1.291.774,230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Terpenuhinya Layanan Dukungan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	87,57	87,8	88	11.794.202.675,000	88,5	12.093.775.422,950	89	12.230.435.085,220	89,5	12.539.865.092,880	90	12.591.278.539,760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
50302 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					**1.471.241.400,000**		**1.508.610.931,560**		**1.525.658.235,100**		**1.564.257.388,430**		**1.570.670.843,720**	
Meningkatnya Kualitas Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Persentase Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan Ketentuan (%)	100	100	100	223.375.000,000	100	229.048.725,000	100	231.636.975,590	100	237.497.391,070	100	238.471.130,380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Informasi Kepegawaian Yang Akurat (%)	90	90,5	91	176.716.000,000	92	181.204.586,400	93	183.252.198,240	94	187.888.478,850	95	188.658.821,600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kuantitas Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi (%)	80,6	81	82	228.614.900,000	85	234.421.718,460	87,5	237.070.683,880	90	243.068.572,180	93	244.065.153,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase ASN Yang Penilaian Kinerjanya Baik (%)	90	91	93	249.986.000,000	93,5	256.335.644,400	94	259.232.237,180	94,5	265.790.812,780	95	266.880.555,110	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Penempatan ASN sesuai dengan Jabatan	Persentase ASN yang sesuai Jabatan (%)	74	100	100	592.549.500,000	100	607.600.257,300	100	614.466.140,210	100	630.012.133,550	100	632.595.183,300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
504 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**477.834.200,000**		**489.971.188,680**		**495.507.863,110**		**508.044.212,050**		**510.127.193,320**	
50402 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					477.834.200,000		489.971.188,680		495.507.863,110		508.044.212,050		510.127.193,320	
Meningkatnya Akurasi Data Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Data Pengembangan Kompetensi Yang Akurat (%)	75	80	90	46.492.500,000	90,5	47.673.409,500	91	48.212.119,030	91,5	49.431.885,640	92	49.634.556,370	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Pelatihan Manajerial dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (%)	48	50	58	431.341.700,000	61	442.297.779,180	64	447.295.744,080	67	458.612.326,410	70	460.492.636,950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
505 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**3.988.013.515,080**		**4.089.309.058,360**		**4.135.518.250,720**		**4.240.146.862,470**		**4.257.531.464,600**	
50501 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.925.738.921,000**		**3.000.052.689,600**		**3.033.953.284,980**		**3.110.712.303,100**		**3.123.466.223,540**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	4.788.400,000	100	4.910.025,370	100	4.965.508,640	100	5.091.136,020	100	5.112.009,670	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	2.920.950.521,000	100	2.995.142.664,230	100	3.028.987.776,340	100	3.105.621.167,080	100	3.118.354.213,870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
50502 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					**1.062.274.594,080**		**1.089.256.368,760**		**1.101.564.965,740**		**1.129.434.559,370**		**1.134.065.241,060**	
Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang Berdasarkan Kebutuhan Daerah (%)	81	-	81	890.389.347,040	82,5	913.005.236,450	84,5	923.322.195,630	85,78	946.682.247,180	87,13	950.563.644,390	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Inovasi Daerah yang Berprestasi di Regional/Nasional	Persentase Inovasi Daerah Yang Masuk Dalam 10 Besar Tingkat Regional/Nasional (%)	15	-	20	171.885.247,040	26,67	176.251.132,310	33,3	178.242.770,110	40	182.752.312,190	46,67	183.501.596,670	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					**18.901.296.298,500**		**19.381.389.224,480**		**19.600.398.922,720**		**20.096.289.015,460**		**20.178.683.800,430**	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.032.187.478,500		16.439.405.040,460		16.625.170.317,410		17.045.787.126,440		17.115.674.853,660	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Berkualitas (%)	91,00	92,00	93,00	19.998.351,000	94,00	20.506.309,120	95,00	20.738.030,410	96,00	21.262.702,580	97,00	21.349.879,660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	85,00	85,00	85,05	16.012.189.127,500	85,10	16.418.898.731,340	85,15	16.604.432.287,000	85,20	17.024.524.423,860	85,25	17.094.324.974,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					**2.315.108.820,000**		**2.336.984.184,020**		**2.329.228.605,310**		**2.364.001.889,020**		**2.333.508.946,770**	
Meningkatnya Efektivitas Pencegahan Korupsi melalui Penindakan	Nilai MCSP (Nilai)	94,86	95,00	95,30	272.500.000,000	95,50	278.000.000,000	95,70	284.000.000,000	95,90	290.500.000,000	96,00	290.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai SPI (Nilai)	77,58	77,70	77,90		78,00		78,10		78,20		78,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemkab. Sumenep	Nilai MR (Nilai)	3,034	3,048	3,062	87.856.000,000	3,076	87.856.000,000	3,092	87.856.000,000	3,106	87.856.000,000	3,120	87.856.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kapabilitas APIP melalui Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)	3,110	3,150	3,200	1.858.752.820,000	3,250	1.875.128.184,020	3,300	1.861.372.605,310	3,350	1.889.645.889,020	3,400	1.859.152.946,770	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas Hasil Evaluasi Internal SAKIP	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP Kabupaten (Nilai)	15,00	15,00	15,25	96.000.000,000	15,50	96.000.000,000	15,75	96.000.000,000	16,00	96.000.000,000	16,25	96.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					554.000.000,000		605.000.000,000		646.000.000,000		686.500.000,000		729.500.000,000	
Meningkatnya efektivitas Pencegahan Korupsi melalui Pencegahan	Nilai MCSP (Nilai)	2,910	2,920	2,930	350.000.000,000	2,940	385.000.000,000	2,950	415.000.000,000	2,960	444.000.000,000	2,970	474.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kapabilitas APIP melalui Pendampingan	Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)	3,110	3,150	3,200	104.000.000,000	3,250	110.000.000,000	3,300	116.000.000,000	3,350	123.500.000,000	3,400	131.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya PD / Unit Layanan yg mendapatkan ZI/WBK/WBBM	Persentase PD / Unit Layanan yg mendapatkan Predikat ZI/ WBK/ WBBM (%)	0	8	8	100.000.000,000	8	110.000.000,000	8	115.000.000,000	8	119.000.000,000	8	124.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
701 - KECAMATAN					**74.517.102.448,61**		**76.393.919.428,32**		**77.241.386.798,08**		**79.179.636.340,31**		**79.062.663.829,26**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**70.382.020.833,61**		**72.170.359.384,25**		**72.979.791.613,62**		**74.831.121.047,85**		**74.717.816.696,68**	
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.861.471.925,00**		**2.934.153.311,90**		**2.967.309.244,32**		**3.042.382.168,20**		**3.054.855.935,09**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja kec Bluto	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	80	80	80	3.432.400,00	80	3.519.582,96	80	3.559.354,25	80	3.649.405,91	80	3.664.368,47	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Bluto	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	80	80	80	2.858.039.525,00	80	2.930.633.728,94	80	2.963.749.890,07	80	3.038.732.762,29	80	3.051.191.566,62	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**3.009.315.985,00**		**3.085.752.611,02**		**3.120.621.615,53**		**3.199.573.342,39**		**3.212.691.593,10**	
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Gayam	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	80	81	82	3.005.299.485,00	83	3.081.634.091,92	84	3.116.456.557,16	85	3.195.302.908,05	86	3.208.403.649,98	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja kec Gayam	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	82	83	84	4.016.500,00	85	4.118.519,10	86	4.165.058,37	87	4.270.434,34	88	4.287.943,12	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**7.651.375.517,00**		**7.862.660.110,94**		**7.957.949.372,67**		**8.176.898.106,79**		**8.141.006.510,05**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Kota Sumenep	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	1.657.800,00	100	1.699.245,00	100	1.717.936,70	100	1.760.885,11	100	1.769.837,45	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Kota Sumenep	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	6.849.717.717,00	100	7.060.960.865,94	100	7.156.231.435,97	100	7.375.137.221,68	100	7.339.236.672,60	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Kelurahan Kepanjin	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kelurahan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Kelurahan Karangduak	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kelurahan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Kelurahan Bangselok	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kelurahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi Kelurahan Pajagalan	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kelurahan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.442.542.725,61**		**2.504.583.310,84**		**2.532.885.102,25**		**2.596.967.095,34**		**2.607.614.660,43**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja kec kalianget	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	3.039.400,00	100	3.116.600,76	100	3.151.818,35	100	3.231.559,35	100	3.244.808,75	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD kec Kalianget	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	2.439.503.325,61	100	2.501.466.710,08	100	2.529.733.283,90	100	2.593.735.535,99	100	2.604.369.851,68	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.159.209.644,00**		**2.214.053.568,96**		**2.239.072.374,29**		**2.295.720.905,35**		**2.305.133.361,06**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Talango	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	3.337.400,00	100	3.422.169,96	100	3.460.840,48	100	3.548.399,74	100	3.562.948,18	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Talango	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	84	85	86	2.155.872.244,00	88	2.210.631.399,00	90	2.235.611.533,81	91	2.292.172.505,61	92	2.301.570.412,88	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.651.519.787,00**		**2.717.807.781,58**		**2.747.703.667,18**		**2.816.396.258,86**		**2.805.130.673,83**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Saronggi	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	2.000.000,00	100	2.050.000,00	100	2.072.550,00	100	2.124.363,75	100	2.115.866,30	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Saronggi	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	81	82	83	2.649.519.787,00	84	2.715.757.781,58	85	2.745.631.117,18	86	2.814.271.895,11	87	2.803.014.807,53	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.226.420.397,00**		**2.282.971.475,08**		**2.308.769.052,75**		**2.367.180.909,78**		**2.376.886.351,52**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Lenteng	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	1.407.200,00	100	1.442.942,88	100	1.459.248,13	100	1.496.167,11	100	1.502.301,40	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Lenteng	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	0	82	83	2.225.013.197,00	84	2.281.528.532,20	85	2.307.309.804,62	86	2.365.684.742,67	87	2.375.384.050,12	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.042.931.466,00**		**2.094.004.752,84**		**2.117.038.805,13**		**2.169.964.775,26**		**2.161.284.916,15**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Giligenting	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	2.500.000,00	100	2.562.500,00	100	2.590.687,50	100	2.655.454,69	100	2.644.832,87	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD kec Giligenting	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	2.040.431.466,00	100	2.091.442.252,84	100	2.114.448.117,63	100	2.167.309.320,57	100	2.158.640.083,28	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**1.868.315.234,00**		**1.915.023.114,85**		**1.936.088.369,11**		**1.984.490.578,34**		**1.976.552.616,03**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Guluk- guluk	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	1.500.000,00	100	1.537.500,00	100	1.554.412,50	100	1.593.272,81	100	1.586.899,72	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Guluk Guluk	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	82	83	84	1.866.815.234,00	85	1.913.485.614,85	86	1.934.533.956,61	87	1.982.897.305,53	88	1.974.965.716,31	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.207.404.978,00**		**2.262.590.102,71**		**2.287.478.593,84**		**2.344.665.558,68**		**2.335.286.896,45**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Ganding	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	2.500.000,00	100	2.562.500,00	100	2.590.687,50	100	2.655.454,69	100	2.644.832,87	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Ganding	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	82	83	84	2.204.904.978,00	85	2.260.027.602,71	86	2.284.887.906,34	87	2.342.010.103,99	88	2.332.642.063,58	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.477.853.981,00**		**2.539.800.330,69**		**2.567.738.134,33**		**2.631.931.587,68**		**2.621.403.861,34**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Pragaan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	1.600.000,00	100	1.640.000,00	100	1.658.040,00	100	1.699.491,00	100	1.692.693,04	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Pragaan	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	84,00	85,00	86,00	2.476.253.981,00	87,00	2.538.160.330,69	88,00	2.566.080.094,33	89,00	2.630.232.096,68	90,00	2.619.711.168,30	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.353.433.953,00**		**2.412.269.801,83**		**2.438.804.769,65**		**2.499.774.888,89**		**2.489.775.789,33**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Rubaru	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	2.500.000,00	100	2.562.500,00	100	2.590.687,50	100	2.655.454,69	100	2.644.832,87	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Rubaru	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	83	84	85	2.350.933.953,00	86	2.409.707.301,83	87	2.436.214.082,15	88	2.497.119.434,20	89	2.487.130.956,46	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.357.598.131,00**		**2.417.481.123,53**		**2.444.798.660,23**		**2.506.652.066,32**		**2.516.929.339,80**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja kec Ambunten	Persentase dokumen perencanaan dan laporan berkualitas (%)	100	100	100	1.821.500,00	100	1.867.766,10	100	1.888.871,86	100	1.936.660,31	100	1.944.600,62	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Ambunten	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	82	83	84	2.355.776.631,00	85	2.415.613.357,43	86	2.442.909.788,37	87	2.504.715.406,01	88	2.514.984.739,18	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**1.967.390.868,00**		**2.017.362.596,44**		**2.040.158.793,78**		**2.091.774.811,26**		**2.100.351.087,98**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Pasongsongan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	10.747.200,00	100	11.020.178,88	100	11.144.706,90	100	11.426.667,99	100	11.473.517,32	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Pasongsongan	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	1.956.643.668,00	100	2.006.342.417,56	100	2.029.014.086,88	100	2.080.348.143,27	100	2.088.877.570,66	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**1.985.205.326,00**		**2.034.835.459,15**		**2.057.218.649,20**		**2.108.649.115,43**		**2.100.214.518,97**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja kec Dasuk	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	2.000.000,00	100	2.050.000,00	100	2.072.550,00	100	2.124.363,75	100	2.115.866,30	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Dasuk	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	83	84	85	1.983.205.326,00	86	2.032.785.459,15	87	2.055.146.099,20	88	2.106.524.751,68	89	2.098.098.652,67	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.998.720.171,00**		**3.073.688.174,87**		**3.107.498.744,79**		**3.185.186.213,41**		**3.172.445.468,56**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Batang- Batang	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	3.500.000,00	100	3.587.500,00	100	3.626.962,50	100	3.717.636,56	100	3.702.766,02	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Batang- Batang	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	85	84	85	2.995.220.171,00	86	3.070.100.674,87	87	3.103.871.782,29	88	3.181.468.576,85	89	3.168.742.702,54	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.611.645.621,00**		**2.676.936.761,53**		**2.706.383.065,90**		**2.774.042.642,55**		**2.762.946.471,98**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Batuputih	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	2.500.000,00	100	2.562.500,00	100	2.590.687,50	100	2.655.454,69	100	2.644.832,87	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Batuputih	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	82	83	84	2.609.145.621,00	85	2.674.374.261,53	86	2.703.792.378,40	87	2.771.387.187,86	88	2.760.301.639,11	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.823.565.503,00**		**2.894.154.640,58**		**2.925.990.341,62**		**2.999.140.100,16**		**2.987.143.539,76**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Gapura	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	3.200.000,00	100	3.280.000,00	100	3.316.080,00	100	3.398.982,00	100	3.385.386,07	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Gapura	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	-	83	84	2.820.365.503,00	85	2.890.874.640,58	87	2.922.674.261,62	89	2.995.741.118,16	90	2.983.758.153,69	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.140.104.404,00**		**2.193.607.014,10**		**2.217.736.691,26**		**2.273.180.108,53**		**2.264.087.388,10**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Dungkek	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu (%)	92	93	94	15.742.200,00	95	16.135.755,00	96	16.313.248,31	97	16.721.079,51	99	16.654.195,19	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Dungkek	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	94	95	96	2.124.362.204,00	97	2.177.471.259,10	98	2.201.423.442,95	99	2.256.459.029,02	100	2.247.433.192,91	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.187.484.495,00**		**2.242.171.607,38**		**2.266.835.495,06**		**2.323.506.382,43**		**2.314.212.356,90**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Nonggunong	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	1.500.000,00	100	1.537.500,00	100	1.554.412,50	100	1.593.272,81	100	1.586.899,72	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Nonggunong	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang Berjalan Efektif (Angka)	80	81	82	2.185.984.495,00	83	2.240.634.107,38	84	2.265.281.082,56	85	2.321.913.109,62	86	2.312.625.457,18	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.228.408.275,00**		**2.284.118.481,88**		**2.309.243.785,18**		**2.366.974.879,81**		**2.357.506.980,29**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Raas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	2.000.000,00	100	2.050.000,00	100	2.072.550,00	100	2.124.363,75	100	2.115.866,30	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Raas	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	0	83	84	2.226.408.275,00	85	2.282.068.481,88	87	2.307.171.235,18	89	2.364.850.516,06	90	2.355.391.113,99	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**1.854.868.760,00**		**1.901.982.426,50**		**1.923.474.827,93**		**1.972.138.741,07**		**1.980.224.509,91**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Masalembu	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	3.647.400,00	100	3.740.043,96	100	3.782.306,46	100	3.877.998,81	100	3.893.898,61	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Masalembu	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	82	83	84	1.851.221.360,00	85	1.898.242.382,54	86	1.919.692.521,47	87	1.968.260.742,26	88	1.976.330.611,30	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**3.090.740.206,00**		**3.169.245.007,23**		**3.205.057.475,82**		**3.286.145.429,96**		**3.299.618.626,21**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec, Arjasa	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	3.606.400,00	100	3.698.002,56	100	3.739.789,99	100	3.834.406,68	100	3.850.127,74	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Arjasa	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	82	83	84	3.087.133.806,00	85	3.165.547.004,67	86	3.201.317.685,83	87	3.282.311.023,28	88	3.295.768.498,47	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.381.479.693,00**		**2.441.016.685,33**		**2.467.867.868,86**		**2.529.564.565,59**		**2.519.446.307,33**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Sapeken	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	1.000.000,00	100	1.025.000,00	100	1.036.275,00	100	1.062.181,88	100	1.057.933,15	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD kec Sapeken	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	83	84	85	2.380.479.693,00	86	2.439.991.685,33	87	2.466.831.593,86	88	2.528.502.383,71	89	2.518.388.374,18	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.731.634.618,00**		**2.799.925.483,23**		**2.830.724.663,55**		**2.901.492.780,14**		**2.889.886.809,02**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Batuan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	2.500.000,00	100	2.562.500,00	100	2.590.687,50	100	2.655.454,69	100	2.644.832,87	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Batuan	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	82	83	84	2.729.134.618,00	85	2.797.362.983,23	86	2.828.133.976,05	87	2.898.837.325,45	88	2.887.241.976,15	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.217.878.593,00**		**2.273.325.557,83**		**2.298.332.138,96**		**2.355.790.442,44**		**2.346.367.280,67**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Kangayan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	74,20	81	82	2.000.000,00	83	2.050.000,00	84	2.072.550,00	85	2.124.363,75	86	2.115.866,30	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Kangayan	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	82	83	84	2.215.878.593,00	85	2.271.275.557,83	86	2.296.259.588,96	87	2.353.666.078,69	88	2.344.251.414,37	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2.853.500.577,00**		**2.924.838.091,43**		**2.957.011.310,43**		**3.030.936.593,19**		**3.018.812.846,82**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kec Manding	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	1.500.000,00	100	1.537.500,00	100	1.554.412,50	100	1.593.272,81	100	1.586.899,72	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD Kec Manding	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	81	82	838	2.852.000.577,00	84	2.923.300.591,43	85	2.955.456.897,93	86	3.029.343.320,38	87	3.017.225.947,10	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**344.425.677,00**		**353.064.154,21**		**356.969.266,63**		**365.915.146,90**		**365.050.787,18**	
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**4.320.000,00**		**4.429.728,00**		**4.479.783,93**		**4.593.122,46**		**4.611.954,26**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Kec Bluto	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	4.320.000,00	100	4.429.728,00	100	4.479.783,93	100	4.593.122,46	100	4.611.954,26	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**33.668.300,00**		**34.510.007,50**		**34.889.617,58**		**35.761.858,02**		**35.618.810,59**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di	% Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	33.668.300,00	100	34.510.007,50	100	34.889.617,58	100	35.761.858,02	100	35.618.810,59	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kecamatan Kec Kota Sumenep														
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**8.281.900,00**		**8.492.260,26**		**8.588.222,80**		**8.805.504,84**		**8.841.607,41**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Kalianget	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	8.281.900,00	100	8.492.260,26	100	8.588.222,80	100	8.805.504,84	100	8.841.607,41	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**18.803.600,00**		**19.281.211,44**		**19.499.089,13**		**19.992.416,08**		**20.074.384,99**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Talango	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	18.803.600,00	100	19.281.211,44	100	19.499.089,13	100	19.992.416,08	100	20.074.384,99	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**3.882.630,00**		**3.979.695,75**		**4.023.472,40**		**4.124.059,21**		**4.107.562,98**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Manding	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	3.882.630,00	100	3.979.695,75	100	4.023.472,40	100	4.124.059,21	100	4.107.562,98	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**9.146.000,00**		**9.374.650,00**		**9.477.771,15**		**9.714.715,43**		**9.675.856,57**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Saronggi	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	9.146.000,00	100	9.374.650,00	100	9.477.771,15	100	9.714.715,43	100	9.675.856,57	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**2.874.800,00**		**2.947.819,92**		**2.981.130,29**		**3.056.552,88**		**3.069.084,75**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Lenteng	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	2.874.800,00	100	2.947.819,92	100	2.981.130,29	100	3.056.552,88	100	3.069.084,75	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**5.682.600,00**		**5.824.665,00**		**5.888.736,32**		**6.035.954,72**		**6.011.810,90**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Giligenting	% Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	64,84	100	100	5.682.600,00	100	5.824.665,00	100	5.888.736,32	100	6.035.954,72	100	6.011.810,90	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**74.179.650,00**		**76.034.141,25**		**76.870.516,80**		**78.792.279,72**		**78.477.110,60**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Guluk-Guluk	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	74.179.650,00	100	76.034.141,25	100	76.870.516,80	100	78.792.279,72	100	78.477.110,60	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**11.575.100,00**		**11.864.477,50**		**11.994.986,75**		**12.294.861,42**		**12.245.681,98**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Ganding	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	11.575.100,00	100	11.864.477,50	100	11.994.986,75	100	12.294.861,42	100	12.245.681,98	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**11.146.800,00**		**11.425.470,00**		**11.551.150,17**		**11.839.928,92**		**11.792.569,21**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Pragaan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	11.146.800,00	100	11.425.470,00	100	11.551.150,17	100	11.839.928,92	100	11.792.569,21	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**48.324.700,00**		**49.532.817,50**		**50.077.678,49**		**51.329.620,45**		**51.124.301,97**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Rubaru	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	48.324.700,00	100	49.532.817,50	100	50.077.678,49	100	51.329.620,45	100	51.124.301,97	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**2.618.200,00**		**2.683.655,00**		**2.713.175,21**		**2.781.004,59**		**2.769.880,57**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Dasuk	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	2.618.200,00	100	2.683.655,00	100	2.713.175,21	100	2.781.004,59	100	2.769.880,57	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**7.933.200,00**		**8.134.703,28**		**8.226.625,43**		**8.434.759,05**		**8.469.341,56**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Ambunten	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	7.933.200,00	100	8.134.703,28	100	8.226.625,43	100	8.434.759,05	100	8.469.341,56	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**8.084.700,00**		**8.290.051,38**		**8.383.728,96**		**8.595.837,30**		**8.631.080,24**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Pasongsongan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	64,84	100	100	8.084.700,00	100	8.290.051,38	100	8.383.728,96	100	8.595.837,30	100	8.631.080,24	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**5.052.900,00**		**5.179.222,50**		**5.236.193,95**		**5.367.098,80**		**5.345.630,40**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Batang-batang	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	5.052.900,00	100	5.179.222,50	100	5.236.193,95	100	5.367.098,80	100	5.345.630,40	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**4.500.000,00**		**4.612.500,00**		**4.663.237,50**		**4.779.818,44**		**4.760.699,16**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Batuputih	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	4.500.000,00	100	4.612.500,00	100	4.663.237,50	100	4.779.818,44	100	4.760.699,16	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**8.002.500,00**		**8.202.562,50**		**8.292.790,69**		**8.500.110,45**		**8.466.110,01**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gapura	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	8.002.500,00	100	8.202.562,50	100	8.292.790,69	100	8.500.110,45	100	8.466.110,01	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**15.000.000,00**		**15.375.000,00**		**15.544.125,00**		**15.932.728,13**		**15.868.997,21**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Dungkek	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	15.375.000,00	100	15.544.125,00	100	15.932.728,13	100	15.868.997,21	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**4.402.000,00**		**4.513.810,80**		**4.564.816,86**		**4.680.306,73**		**4.699.495,99**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gayam	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	4.402.000,00	100	4.513.810,80	100	4.564.816,86	100	4.680.306,73	100	4.699.495,99	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**9.210.000,00**		**9.440.250,00**		**9.544.092,75**		**9.782.695,07**		**9.743.564,29**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Nonggunong	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	9.210.000,00	100	9.440.250,00	100	9.544.092,75	100	9.782.695,07	100	9.743.564,29	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**9.216.800,00**		**9.447.220,00**		**9.551.139,42**		**9.789.917,91**		**9.750.758,23**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Raas	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	9.216.800,00	100	9.447.220,00	100	9.551.139,42	100	9.789.917,91	100	9.750.758,23	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**6.656.400,00**		**6.825.472,56**		**6.902.600,40**		**7.077.236,19**		**7.106.252,86**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Masalembu	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	6.656.400,00	100	6.825.472,56	100	6.902.600,40	100	7.077.236,19	100	7.106.252,86	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**8.231.600,00**		**8.440.682,64**		**8.536.062,35**		**8.752.024,73**		**8.787.908,03**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Arjasa	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	8.231.600,00	100	8.440.682,64	100	8.536.062,35	100	8.752.024,73	100	8.787.908,03	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**10.000.000,00**		**10.250.000,00**		**10.362.750,00**		**10.621.818,75**		**10.579.331,48**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Sapeken	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.250.000,00	100	10.362.750,00	100	10.621.818,75	100	10.579.331,48	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**7.007.097,00**		**7.182.274,43**		**7.261.279,44**		**7.442.811,43**		**7.413.040,18**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Batuan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	7.007.097,00	100	7.182.274,43	100	7.261.279,44	100	7.442.811,43	100	7.413.040,18	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**6.624.200,00**		**6.789.805,00**		**6.864.492,86**		**7.036.105,18**		**7.007.960,76**	
Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan Kangayan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur (%)	100	100	100	6.624.200,00	100	6.789.805,00	100	6.864.492,86	100	7.036.105,18	100	7.007.960,76	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**1.463.619.270,00**		**1.480.312.266,03**		**1.487.874.539,59**		**1.505.151.132,54**		**1.504.537.687,27**	
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**815.952.300,00**		**816.351.107,50**		**816.530.969,68**		**816.944.243,92**		**816.876.466,95**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Kota Sumenep	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	15.952.300,00	100	16.351.107,50	100	16.530.969,68	100	16.944.243,92	100	16.876.466,95	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Kelurahan Kepanjin	Persentase Partisipasi Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kelurahan
Meningkatnya Partisipasi Kelurahan Karangduak	Persentase Partisipasi Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kelurahan
Meningkatnya Partisipasi Kelurahan Bangselok	Persentase Partisipasi Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kelurahan
Meningkatnya Partisipasi Kelurahan Pajagalan	Persentase Partisipasi Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kelurahan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**19.460.900,00**		**19.955.206,86**		**20.180.700,70**		**20.691.272,43**		**20.776.106,64**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Kalianget	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	19.460.900,00	100	19.955.206,86	100	20.180.700,70	100	20.691.272,43	100	20.776.106,64	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**23.244.200,00**		**23.834.602,68**		**24.103.933,69**		**24.713.763,21**		**24.815.089,64**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Talango	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	23.244.200,00	100	23.834.602,68	100	24.103.933,69	100	24.713.763,21	100	24.815.089,64	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**19.592.800,00**		**20.082.620,00**		**20.303.528,82**		**20.811.117,04**		**20.727.872,57**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Manding	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	19.592.800,00	100	20.082.620,00	100	20.303.528,82	100	20.811.117,04	100	20.727.872,57	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**27.782.000,00**		**28.487.662,80**		**28.809.573,39**		**29.538.455,60**		**29.659.563,26**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Bluto	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	27.782.000,00	100	28.487.662,80	100	28.809.573,39	100	29.538.455,60	100	29.659.563,26	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**27.805.600,00**		**28.500.740,00**		**28.814.248,14**		**29.534.604,34**		**29.416.465,93**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Saronggi	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	27.805.600,00	100	28.500.740,00	100	28.814.248,14	100	29.534.604,34	100	29.416.465,93	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**34.430.400,00**		**35.304.932,16**		**35.703.877,89**		**36.607.186,00**		**36.757.275,47**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Lenteng	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	34.430.400,00	100	35.304.932,16	100	35.703.877,89	100	36.607.186,00	100	36.757.275,47	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**22.940.900,00**		**23.514.422,50**		**23.773.081,15**		**24.367.408,18**		**24.269.938,54**	
Meningkatnya Partisipasi Desa/Kelurahan Kec Giligenting	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	22.940.900,00	100	23.514.422,50	100	23.773.081,15	100	24.367.408,18	100	24.269.938,54	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**23.744.000,00**		**24.337.600,00**		**24.605.313,60**		**25.220.446,44**		**25.119.564,65**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Guluk-guluk	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	23.744.000,00	100	24.337.600,00	100	24.605.313,60	100	25.220.446,44	100	25.119.564,65	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**20.813.800,00**		**21.334.145,00**		**21.568.820,60**		**22.108.041,11**		**22.019.608,95**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Ganding	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	20.813.800,00	100	21.334.145,00	100	21.568.820,60	100	22.108.041,11	100	22.019.608,95	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**20.202.600,00**		**20.707.665,00**		**20.935.449,32**		**21.458.835,55**		**21.373.000,21**	
Meningkatnya Partisipasi Desa/Kelurahan Kec Pragaan	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	20.202.600,00	100	20.707.665,00	100	20.935.449,32	100	21.458.835,55	100	21.373.000,21	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**19.825.000,00**		**20.320.625,00**		**20.544.151,88**		**21.057.755,67**		**20.973.524,65**	
Meningkatnya Partisipasi Desa/Kelurahan Kec Rubaru	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	19.825.000,00	100	20.320.625,00	100	20.544.151,88	100	21.057.755,67	100	20.973.524,65	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**22.324.800,00**		**22.891.849,92**		**23.150.527,82**		**23.736.236,18**		**23.833.554,75**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Ambunten	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	22.324.800,00	100	22.891.849,92	100	23.150.527,82	100	23.736.236,18	100	23.833.554,75	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**46.041.000,00**		**47.210.441,40**		**47.743.919,39**		**48.951.840,55**		**49.152.543,09**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Pasongsongan	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	99,34	100	100	46.041.000,00	100	47.210.441,40	100	47.743.919,39	100	48.951.840,55	100	49.152.543,09	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**16.724.000,00**		**17.142.100,00**		**17.330.663,10**		**17.763.929,68**		**17.692.873,96**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Dasuk	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	16.724.000,00	100	17.142.100,00	100	17.330.663,10	100	17.763.929,68	100	17.692.873,96	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**24.034.100,00**		**24.634.952,50**		**24.905.936,98**		**25.528.585,40**		**25.426.471,06**	
Meningkatnya Partisipasi Desa/Kelurahan Kec Batanag-Batang	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	24.034.100,00	100	24.634.952,50	100	24.905.936,98	100	25.528.585,40	100	25.426.471,06	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**26.146.400,00**		**26.810.518,56**		**27.113.477,42**		**27.799.448,40**		**27.913.426,14**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Batuputih	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	26.146.400,00	100	26.810.518,56	100	27.113.477,42	100	27.799.448,40	100	27.913.426,14	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**24.988.400,00**		**25.613.110,00**		**25.894.854,21**		**26.542.225,57**		**26.436.056,66**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Gapura	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	17	17	17	24.988.400,00	17	25.613.110,00	17	25.894.854,21	17	26.542.225,57	17	26.436.056,66	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**43.195.200,00**		**44.275.080,00**		**44.762.105,88**		**45.881.158,53**		**45.697.633,89**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Dungkek	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	43.195.200,00	100	44.275.080,00	100	44.762.105,88	100	45.881.158,53	100	45.697.633,89	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**18.592.000,00**		**19.064.236,80**		**19.279.662,68**		**19.767.438,14**		**19.848.484,64**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Gayam	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	18.592.000,00	100	19.064.236,80	100	19.279.662,68	100	19.767.438,14	100	19.848.484,64	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**37.197.470,00**		**38.127.406,75**		**38.546.808,22**		**39.510.478,43**		**39.352.436,52**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Nonggunong	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	37.197.470,00	100	38.127.406,75	100	38.546.808,22	100	39.510.478,43	100	39.352.436,52	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**15.683.200,00**		**16.075.280,00**		**16.252.108,08**		**16.658.410,78**		**16.591.777,14**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Raas	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	15.683.200,00	100	16.075.280,00	100	16.252.108,08	100	16.658.410,78	100	16.591.777,14	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**22.705.100,00**		**23.281.809,54**		**23.544.893,99**		**24.140.579,81**		**24.239.556,18**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Masalembu	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	22.705.100,00	100	23.281.809,54	100	23.544.893,99	100	24.140.579,81	100	24.239.556,18	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**15.558.900,00**		**15.954.096,06**		**16.134.377,35**		**16.542.577,09**		**16.610.401,66**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Arjasa	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	15.558.900,00	100	15.954.096,06	100	16.134.377,35	100	16.542.577,09	100	16.610.401,66	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN					**31.179.200,00**		**31.958.680,00**		**32.310.225,48**		**33.117.981,12**		**32.985.509,19**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Sapeken	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	31.179.200,00	100	31.958.680,00	100	32.310.225,48	100	33.117.981,12	100	32.985.509,19	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**12.020.200,00**		**12.320.705,00**		**12.456.232,76**		**12.767.638,57**		**12.716.568,02**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Batuan	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	12.020.200,00	100	12.320.705,00	100	12.456.232,76	100	12.767.638,57	100	12.716.568,02	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**31.434.800,00**		**32.220.670,00**		**32.575.097,37**		**33.389.474,80**		**33.255.916,91**	
Meningkatnya Partisipasi Desa Kec Kangayan	Persentase Desa yang Berpartisipasi (%)	100	100	100	31.434.800,00	100	32.220.670,00	100	32.575.097,37	100	33.389.474,80	100	33.255.916,91	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**391.105.948,00**		**400.932.576,10**		**405.380.502,05**		**415.553.107,86**		**414.945.434,71**	
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**10.884.600,00**		**11.156.715,00**		**11.279.438,87**		**11.561.424,84**		**11.515.179,14**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Kota Sumenep	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	10.884.600,00	100	11.156.715,00	100	11.279.438,87	100	11.561.424,84	100	11.515.179,14	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**10.198.500,00**		**10.457.541,90**		**10.575.712,12**		**10.843.277,64**		**10.887.735,08**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Kalianget	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	10.198.500,00	100	10.457.541,90	100	10.575.712,12	100	10.843.277,64	100	10.887.735,08	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**5.075.400,00**		**5.204.315,16**		**5.263.123,92**		**5.396.280,96**		**5.418.405,71**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Talango	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	5.075.400,00	100	5.204.315,16	100	5.263.123,92	100	5.396.280,96	100	5.418.405,71	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**3.823.600,00**		**3.919.190,00**		**3.962.301,09**		**4.061.358,62**		**4.045.113,18**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Manding	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	3.823.600,00	100	3.919.190,00	100	3.962.301,09	100	4.061.358,62	100	4.045.113,18	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**8.100.000,00**		**8.305.740,00**		**8.399.594,86**		**8.612.104,61**		**8.647.414,24**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Kota Bluto	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	8.100.000,00	100	8.305.740,00	100	8.399.594,86	100	8.612.104,61	100	8.647.414,24	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**11.880.000,00**		**12.177.000,00**		**12.310.947,00**		**12.618.720,68**		**12.568.245,79**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Saronggi	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	11.880.000,00	100	12.177.000,00	100	12.310.947,00	100	12.618.720,68	100	12.568.245,79	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**24.818.400,00**		**25.448.787,36**		**25.736.358,66**		**26.387.488,53**		**26.495.677,23**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Lenteng	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	24.818.400,00	100	25.448.787,36	100	25.736.358,66	100	26.387.488,53	100	26.495.677,23	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**11.679.200,00**		**11.971.180,00**		**12.102.862,98**		**12.405.434,55**		**12.355.812,82**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Giligenting	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	11.679.200,00	100	11.971.180,00	100	12.102.862,98	100	12.405.434,55	100	12.355.812,82	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**10.000.000,00**		**10.250.000,00**		**10.362.750,00**		**10.621.818,75**		**10.579.331,48**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Guluk-guluk	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.250.000,00	100	10.362.750,00	100	10.621.818,75	100	10.579.331,48	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**26.394.400,00**		**27.054.260,00**		**27.351.856,86**		**28.035.653,28**		**27.923.510,67**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Ganding	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	26.394.400,00	100	27.054.260,00	100	27.351.856,86	100	28.035.653,28	100	27.923.510,67	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**12.513.200,00**		**12.826.030,00**		**12.967.116,33**		**13.291.294,24**		**13.238.129,06**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Pragaan	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	12.513.200,00	100	12.826.030,00	100	12.967.116,33	100	13.291.294,24	100	13.238.129,06	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**5.449.600,00**		**5.585.840,00**		**5.647.284,24**		**5.788.466,35**		**5.765.312,48**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Rubaru	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	5.449.600,00	100	5.585.840,00	100	5.647.284,24	100	5.788.466,35	100	5.765.312,48	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**7.821.600,00**		**8.020.268,64**		**8.110.897,68**		**8.316.103,39**		**8.350.199,41**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Ambunten	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	7.821.600,00	100	8.020.268,64	100	8.110.897,68	100	8.316.103,39	100	8.350.199,41	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**16.271.000,00**		**16.684.283,40**		**16.872.815,80**		**17.299.698,04**		**17.370.626,80**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Pasongsongan	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	95,42	100	100	16.271.000,00	100	16.684.283,40	100	16.872.815,80	100	17.299.698,04	100	17.370.626,80	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**15.805.200,00**		**16.200.330,00**		**16.378.533,63**		**16.787.996,97**		**16.720.844,98**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Dasuk	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	15.805.200,00	100	16.200.330,00	100	16.378.533,63	100	16.787.996,97	100	16.720.844,98	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**26.098.800,00**		**26.751.270,00**		**27.045.533,97**		**27.721.672,32**		**27.610.785,63**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Batang-Batang	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	26.098.800,00	100	26.751.270,00	100	27.045.533,97	100	27.721.672,32	100	27.610.785,63	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**11.827.200,00**		**12.127.610,88**		**12.264.652,88**		**12.574.948,60**		**12.626.505,89**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Batuputih	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	11.827.200,00	100	12.127.610,88	100	12.264.652,88	100	12.574.948,60	100	12.626.505,89	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**4.934.300,00**		**5.057.657,50**		**5.113.291,73**		**5.241.124,03**		**5.220.159,53**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Gapura	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	4.934.300,00	100	5.057.657,50	100	5.113.291,73	100	5.241.124,03	100	5.220.159,53	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**24.150.000,00**		**24.753.750,00**		**25.026.041,25**		**25.651.692,28**		**25.549.085,51**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Dungkek	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	24.150.000,00	100	24.753.750,00	100	25.026.041,25	100	25.651.692,28	100	25.549.085,51	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**5.168.000,00**		**5.299.267,20**		**5.359.148,92**		**5.494.735,39**		**5.517.263,80**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Gayam	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	5.168.000,00	100	5.299.267,20	100	5.359.148,92	100	5.494.735,39	100	5.517.263,80	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**17.440.848,00**		**17.876.869,20**		**18.073.514,76**		**18.525.352,63**		**18.451.251,22**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Nonggunong	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	17.440.848,00	100	17.876.869,20	100	18.073.514,76	100	18.525.352,63	100	18.451.251,22	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**10.942.800,00**		**11.216.370,00**		**11.339.750,07**		**11.623.243,82**		**11.576.750,85**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Raas	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	10.942.800,00	100	11.216.370,00	100	11.339.750,07	100	11.623.243,82	100	11.576.750,85	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**22.458.000,00**		**23.028.433,20**		**23.288.654,50**		**23.877.857,45**		**23.975.756,67**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Masalembu	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	22.458.000,00	100	23.028.433,20	100	23.288.654,50	100	23.877.857,45	100	23.975.756,67	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**10.710.400,00**		**10.982.444,16**		**11.106.545,78**		**11.387.541,39**		**11.434.230,31**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Arjasa	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	10.710.400,00	100	10.982.444,16	100	11.106.545,78	100	11.387.541,39	100	11.434.230,31	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**11.959.600,00**		**12.258.590,00**		**12.393.434,49**		**12.703.270,35**		**12.652.457,27**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Sapeken	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	11.959.600,00	100	12.258.590,00	100	12.393.434,49	100	12.703.270,35	100	12.652.457,27	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**55.966.700,00**		**57.365.867,50**		**57.996.892,04**		**59.446.814,34**		**59.209.027,09**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Batuan	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	55.966.700,00	100	57.365.867,50	100	57.996.892,04	100	59.446.814,34	100	59.209.027,09	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**8.734.600,00**		**8.952.965,00**		**9.051.447,62**		**9.277.733,81**		**9.240.622,87**	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec Kangayan	Persentase Gangguan yang teratasi (%)	100	100	100	8.734.600,00	100	8.952.965,00	100	9.051.447,62	100	9.277.733,81	100	9.240.622,87	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**1.493.957.404,00**		**1.536.159.386,70**		**1.553.242.133,11**		**1.592.260.269,99**		**1.591.070.281,67**	
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**67.942.300,00**		**69.640.857,50**		**70.406.906,93**		**72.167.079,61**		**71.878.411,29**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec Kota Sumenep	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	75	79	79	67.942.300,00	81	69.640.857,50	83	70.406.906,93	86	72.167.079,61	87	71.878.411,29	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**44.358.700,00**		**45.485.410,98**		**45.999.396,12**		**47.163.180,85**		**47.356.549,89**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan kalianget	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	75	76	79	44.358.700,00	81	45.485.410,98	83	45.999.396,12	85	47.163.180,85	87	47.356.549,89	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**91.411.900,00**		**93.733.762,26**		**94.792.953,77**		**97.191.215,50**		**97.589.699,49**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatann talango	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	100	100	100	91.411.900,00	100	93.733.762,26	100	94.792.953,77	100	97.191.215,50	100	97.589.699,49	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**56.453.800,00**		**57.865.145,00**		**58.501.661,60**		**59.964.203,13**		**59.724.346,32**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan manding	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	100	100	100	56.453.800,00	100	57.865.145,00	100	58.501.661,60	100	59.964.203,13	100	59.724.346,32	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**63.213.304,00**		**64.818.921,92**		**65.551.375,74**		**67.209.825,55**		**67.485.385,83**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan bluto	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	75	76	79	63.213.304,00	81	64.818.921,92	83	65.551.375,74	85	67.209.825,55	87	67.485.385,83	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**20.360.000,00**		**20.869.000,00**		**21.098.559,00**		**21.626.022,98**		**21.539.518,88**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan saronggi	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	76	77	78	20.360.000,00	79	20.869.000,00	80	21.098.559,00	81	21.626.022,98	82	21.539.518,88	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**20.977.700,00**		**21.510.533,58**		**21.753.602,61**		**22.303.968,76**		**22.395.415,03**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan lenteng	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	76	76	79	20.977.700,00	81	21.510.533,58	83	21.753.602,61	85	22.303.968,76	87	22.395.415,03	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN					**58.822.600,00**		**60.293.165,00**		**60.956.389,82**		**62.480.299,56**		**62.230.378,36**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan giligenting	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	76	76	79	58.822.600,00	81	60.293.165,00	83	60.956.389,82	85	62.480.299,56	87	62.230.378,36	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**70.764.500,00**		**72.533.612,50**		**73.331.482,24**		**75.164.769,29**		**74.864.110,22**	
Meningkatnya koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan guluk-guluk	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	76	77	78	70.764.500,00	79	72.533.612,50	80	73.331.482,24	81	75.164.769,29	82	74.864.110,22	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**15.000.000,00**		**15.375.000,00**		**15.544.125,00**		**15.932.728,13**		**15.868.997,21**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan ganding	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	76	77	78	15.000.000,00	79	15.375.000,00	80	15.544.125,00	81	15.932.728,13	82	15.868.997,21	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**83.750.200,00**		**85.843.955,00**		**86.788.238,51**		**88.957.944,47**		**88.602.112,69**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan pragaan	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	82	83	84	83.750.200,00	85	85.843.955,00	86	86.788.238,51	87	88.957.944,47	88	88.602.112,69	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**36.459.500,00**		**37.370.987,50**		**37.782.068,36**		**38.726.620,07**		**38.571.713,59**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di tingkat kecamatan rubaru	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	78	79	80	36.459.500,00	81	37.370.987,50	82	37.782.068,36	83	38.726.620,07	84	38.571.713,59	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**69.923.800,00**		**71.699.864,52**		**72.510.072,99**		**74.344.577,84**		**74.649.390,60**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan ambunten	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	75	76	79	69.923.800,00	81	71.699.864,52	83	72.510.072,99	85	74.344.577,84	87	74.649.390,60	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**39.721.400,00**		**40.730.323,56**		**41.190.576,22**		**42.232.697,79**		**42.405.851,86**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan pasongsongan	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	100	100	100	39.721.400,00	100	40.730.323,56	100	41.190.576,22	100	42.232.697,79	100	42.405.851,86	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**85.796.500,00**		**87.941.412,50**		**88.908.768,04**		**91.131.487,24**		**90.766.961,29**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan dasuk	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	75	78	79	85.796.500,00	80	87.941.412,50	81	88.908.768,04	83	91.131.487,24	85	90.766.961,29	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**41.667.100,00**		**42.708.777,50**		**43.178.574,05**		**44.258.038,40**		**44.081.006,25**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Batang-Batang	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	75	90	90	41.667.100,00	90	42.708.777,50	90	43.178.574,05	90	44.258.038,40	90	44.081.006,25	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**27.051.500,00**		**32.352.908,10**		**32.718.495,96**		**33.546.273,91**		**33.683.813,63**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan batuputih	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	78	79	80	27.051.500,00	81	32.352.908,10	82	32.718.495,96	83	33.546.273,91	84	33.683.813,63	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**73.884.300,00**		**75.731.407,50**		**76.564.452,98**		**78.478.564,31**		**78.164.650,05**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan gapura	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	76	77	79	73.884.300,00	79	75.731.407,50	81	76.564.452,98	83	78.478.564,31	85	78.164.650,05	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**67.015.700,00**		**68.691.092,50**		**69.446.694,52**		**71.182.861,88**		**70.898.130,43**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan dungkek	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	78	79	79	67.015.700,00	81	68.691.092,50	83	69.446.694,52	85	71.182.861,88	86	70.898.130,43	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**74.706.700,00**		**76.604.250,18**		**77.469.878,21**		**79.429.866,13**		**79.755.528,58**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan gayam	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	76	77	78	74.706.700,00	79	76.604.250,18	81	77.469.878,21	83	79.429.866,13	85	79.755.528,58	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**50.750.000,00**		**52.018.750,00**		**52.590.956,25**		**53.905.730,16**		**53.690.107,24**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan nonggunong	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	79	79	79	50.750.000,00	79	52.018.750,00	79	52.590.956,25	79	53.905.730,16	79	53.690.107,24	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**33.700.000,00**		**34.542.500,00**		**34.922.467,50**		**35.795.529,19**		**35.652.347,07**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di tingkat kecamatan raas	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	75	78	79	33.700.000,00	81	34.542.500,00	83	34.922.467,50	85	35.795.529,19	87	35.652.347,07	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**84.142.800,00**		**86.280.027,12**		**87.254.991,43**		**89.462.542,71**		**89.829.339,13**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan masalembu	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	75	79	79	84.142.800,00	81	86.280.027,12	83	87.254.991,43	85	89.462.542,71	87	89.829.339,13	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**81.361.200,00**		**83.427.774,48**		**84.370.508,33**		**86.505.082,19**		**86.859.753,03**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan arjasa	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	75	79	79	81.361.200,00	81	83.427.774,48	83	84.370.508,33	85	86.505.082,19	87	86.859.753,03	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN					**37.019.600,00**		**37.945.090,00**		**38.362.485,99**		**39.321.548,14**		**39.164.261,95**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan sapeken	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	75	76	77	37.019.600,00	78	37.945.090,00	79	38.362.485,99	80	39.321.548,14	81	39.164.261,95	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**13.844.200,00**		**14.190.305,00**		**14.346.398,36**		**14.705.058,31**		**14.646.238,08**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan batuan	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	100	100	100	13.844.200,00	100	14.190.305,00	100	14.346.398,36	100	14.705.058,31	100	14.646.238,08	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**67.985.800,00**		**69.685.445,00**		**70.451.984,90**		**72.213.284,52**		**71.924.431,38**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kecamatan kangayan	Nilai Wawasan Kebangsaan (Nilai)	76	77	78	67.985.800,00	81	69.685.445,00	83	70.451.984,90	85	72.213.284,52	87	71.924.431,38	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**15.872.300,00**		**16.269.107,50**		**16.448.067,68**		**16.859.269,37**		**16.791.832,30**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan Kota	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	15.872.300,00	100	16.269.107,50	100	16.448.067,68	100	16.859.269,37	100	16.791.832,30	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**441.973.316,00**		**453.091.661,03**		**458.128.743,08**		**469.635.635,17**		**469.242.941,75**	
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**6.758.500,00**		**6.930.165,90**		**7.008.476,77**		**7.185.791,24**		**7.215.252,98**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan kalianget	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	6.758.500,00	100	6.930.165,90	100	7.008.476,77	100	7.185.791,24	100	7.215.252,98	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**11.671.800,00**		**11.968.263,72**		**12.103.505,10**		**12.409.723,78**		**12.460.603,65**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan talango	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	11.671.800,00	100	11.968.263,72	100	12.103.505,10	100	12.409.723,78	100	12.460.603,65	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**8.603.600,00**		**8.818.690,00**		**8.915.695,59**		**9.138.587,98**		**9.102.033,63**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan manding	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	8.603.600,00	100	8.818.690,00	100	8.915.695,59	100	9.138.587,98	100	9.102.033,63	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**19.060.016,00**		**19.544.140,41**		**19.764.989,19**		**20.265.043,42**		**20.348.130,10**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan bluto	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	19.060.016,00	100	19.544.140,41	100	19.764.989,19	100	20.265.043,42	100	20.348.130,10	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**12.778.800,00**		**13.098.270,00**		**13.242.350,97**		**13.573.409,74**		**13.519.116,11**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan saronggi	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	12.778.800,00	100	13.098.270,00	100	13.242.350,97	100	13.573.409,74	100	13.519.116,11	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**22.638.800,00**		**23.213.825,52**		**23.476.141,75**		**24.070.088,13**		**24.168.775,50**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan lenteng	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	22.638.800,00	100	23.213.825,52	100	23.476.141,75	100	24.070.088,13	100	24.168.775,50	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**8.983.600,00**		**9.208.190,00**		**9.309.480,09**		**9.542.217,09**		**9.504.048,22**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan lenteng	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	8.983.600,00	100	9.208.190,00	100	9.309.480,09	100	9.542.217,09	100	9.504.048,22	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**12.197.000,00**		**12.501.925,00**		**12.639.446,18**		**12.955.432,33**		**12.903.610,60**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan guluk-guluk	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	12.197.000,00	100	12.501.925,00	100	12.639.446,18	100	12.955.432,33	100	12.903.610,60	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**34.217.200,00**		**35.072.630,00**		**35.458.428,93**		**36.344.889,65**		**36.199.510,09**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Kecamatan ganding	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	34.217.200,00	100	35.072.630,00	100	35.458.428,93	100	36.344.889,65	100	36.199.510,09	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**20.514.800,00**		**21.027.670,00**		**21.258.974,37**		**21.790.448,73**		**21.703.286,93**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan pragaan	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	20.514.800,00	100	21.027.670,00	100	21.258.974,37	100	21.790.448,73	100	21.703.286,93	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**8.577.400,00**		**8.791.835,00**		**8.888.545,19**		**9.110.758,81**		**9.074.315,78**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan Rubaru	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	8.577.400,00	100	8.791.835,00	100	8.888.545,19	100	9.110.758,81	100	9.074.315,78	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**13.766.400,00**		**14.116.066,56**		**14.275.578,11**		**14.636.750,24**		**14.696.760,91**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan ambunten	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	13.766.400,00	100	14.116.066,56	100	14.275.578,11	100	14.636.750,24	100	14.696.760,91	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**37.807.800,00**		**38.768.118,12**		**39.206.197,85**		**40.198.114,66**		**40.362.926,93**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan pasongsongan	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	37.807.800,00	100	38.768.118,12	100	39.206.197,85	100	40.198.114,66	100	40.362.926,93	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**5.918.400,00**		**6.066.360,00**		**6.133.089,96**		**6.286.417,21**		**6.261.271,54**	
Meningkatnya Fasilitasi Desa/Kelurahan kecamatan dasuk	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	5.918.400,00	100	6.066.360,00	100	6.133.089,96	100	6.286.417,21	100	6.261.271,54	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**36.308.600,00**		**37.216.315,00**		**37.625.694,47**		**38.566.336,83**		**38.412.071,48**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Kec Batang- batang	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	36.308.600,00	100	37.216.315,00	100	37.625.694,47	100	38.566.336,83	100	38.412.071,48	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**17.843.400,00**		**18.296.622,36**		**18.503.374,19**		**18.971.509,56**		**19.049.292,75**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan batuputih	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	17.843.400,00	100	18.296.622,36	100	18.503.374,19	100	18.971.509,56	100	19.049.292,75	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**20.468.500,00**		**20.980.212,50**		**21.210.994,84**		**21.741.269,71**		**21.654.304,63**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan gapura	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	20.468.500,00	100	20.980.212,50	100	21.210.994,84	100	21.741.269,71	100	21.654.304,63	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**56.681.000,00**		**58.098.025,00**		**58.737.103,28**		**60.205.530,86**		**59.964.708,73**	
Meningkatnya Kualitas Tata KelolaPemerintahan Desa kecamatan dungkek	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	56.681.000,00	100	58.098.025,00	100	58.737.103,28	100	60.205.530,86	100	59.964.708,73	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**15.902.000,00**		**16.305.910,80**		**16.490.167,59**		**16.907.368,83**		**16.976.689,04**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan gayam	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	15.902.000,00	100	16.305.910,80	100	16.490.167,59	100	16.907.368,83	100	16.976.689,04	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**9.680.000,00**		**9.922.000,00**		**10.031.142,00**		**10.281.920,55**		**10.240.792,87**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan nonggunong	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	9.680.000,00	100	9.922.000,00	100	10.031.142,00	100	10.281.920,55	100	10.240.792,87	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**8.600.000,00**		**8.815.000,00**		**8.911.965,00**		**9.134.764,13**		**9.098.225,07**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan raas	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	8.600.000,00	100	8.815.000,00	100	8.911.965,00	100	9.134.764,13	100	9.098.225,07	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**16.276.400,00**		**16.689.820,56**		**16.878.415,53**		**17.305.439,45**		**17.376.391,75**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan masalembu	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	16.276.400,00	100	16.689.820,56	100	16.878.415,53	100	17.305.439,45	100	17.376.391,75	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**10.805.200,00**		**11.079.652,08**		**11.204.852,15**		**11.488.334,91**		**11.535.437,08**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan Arjasa	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	10.805.200,00	100	11.079.652,08	100	11.204.852,15	100	11.488.334,91	100	11.535.437,08	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**4.000.000,00**		**4.100.000,00**		**4.145.100,00**		**4.248.727,50**		**4.231.732,59**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan sapeken	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	4.000.000,00	100	4.100.000,00	100	4.145.100,00	100	4.248.727,50	100	4.231.732,59	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**11.914.500,00**		**12.212.362,50**		**12.346.698,49**		**12.655.365,95**		**12.604.744,49**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan batuan	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	11.914.500,00	100	12.212.362,50	100	12.346.698,49	100	12.655.365,95	100	12.604.744,49	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
70106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**9.999.600,00**		**10.249.590,00**		**10.362.335,49**		**10.621.393,88**		**10.578.908,30**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa kecamatan kangayan	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahannya yang Baik (%)	100	100	100	9.999.600,00	100	10.249.590,00	100	10.362.335,49	100	10.621.393,88	100	10.578.908,30	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kecamatan
801 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**11.135.157.445,00**		**11.335.009.751,37**		**11.375.887.368,18**		**11.681.005.960,74**		**11.878.275.333,71**	
80101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**3.964.503.865,00**		**4.065.202.263,18**		**4.111.139.048,73**		**4.215.150.866,68**		**4.232.432.985,23**	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas (%)	100	100	100	8.481.800,00	100	8.697.237,72	100	8.795.516,51	100	9.018.043,07	100	9.055.017,05	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif (Nilai)	100	100	100	3.956.022.065,00	100	4.056.505.025,46	100	4.102.343.532,22	100	4.206.132.823,61	100	4.223.377.968,18	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
80102 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					**1.679.625.880,00**		**1.722.288.377,35**		**1.741.750.236,02**		**1.785.816.516,99**		**1.793.138.364,71**	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang meningkat wawasan kebangsaannya (%)	100	100	100	1.679.625.880,00	100	1.722.288.377,35	100	1.741.750.236,02	100	1.785.816.516,99	100	1.793.138.364,71	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
80103 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					**3.910.048.900,00**		**4.009.364.142,06**		**4.054.669.956,87**		**4.157.253.106,77**		**4.174.297.844,51**	
Meningkatnya Kualitas Partai Politik	Persentase Parpol yang Berperan dalam Pembangunan (%)	100	100	100	3.910.048.900,00	100	4.009.364.142,06	100	4.054.669.956,87	100	4.157.253.106,77	100	4.174.297.844,51	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
80104 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					**100.147.500,00**		**102.691.246,50**		**103.851.657,59**		**106.479.104,52**		**106.915.668,85**	
Meningkatnya Kulaitas Ormas	Persentase Ormas yang Berperan dalam Pembangunan (%)	100	100	100	100.147.500,00	100	102.691.246,50	100	103.851.657,59	100	106.479.104,52	100	106.915.668,85	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
80105 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					**676.000.000,00**		**693.170.400,00**		**701.003.225,52**		**718.738.607,13**		**721.685.435,41**	
Meningkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Forum Ekonomi, Sosial, dan Budaya Yang Terfasilitasi (%)	100	100	100	676.000.000,00	100	693.170.400,00	100	701.003.225,52	100	718.738.607,13	100	721.685.435,41	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
80106 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					**804.831.300,00**		**742.293.322,28**		**663.473.243,45**		**697.567.758,65**		**849.805.035,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya koordinasi dalam deteksi dini	Persentase data dan informasi yang terkumpul / berkualitas (%)	100	100	100	804.831.300,00	100	742.293.322,28	100	663.473.243,45	100	697.567.758,65	100	849.805.035,00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					**2.191.278.179.889,26**		**2.246.853.629.172,14**		**2.272.155.660.718,87**		**2.329.658.507.492,93**		**2.320.149.662.872,66**	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.2.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Ukuran keberhasilan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan Pencapaian Tujuan Daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja Utama bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja Kabupaten Sumenep ditetapkan sebagaimana telah disajikan pada Bab III tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Sumenep selama lima tahun ke depan, sebagaimana disajikan berikut:

Tabel IV- 2 Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Sumenep

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,78	70	71,01	71,41	71,8	72,2	72,69	
2	% Penduduk Miskin	%	17,78	17,7	16,44	15,72	15,18	14,27	12,47	
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,77	4	4,13	4,2	4,3	4,4	4,5	
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,08	78,3	79	80	81	82	83	
5	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	ton CO2eq	44.308,70	45.194,88	46.098,78	47.020,75	47.961,17	48.920,39	49.898,80	
6	Rasio GINI	Indeks	0,308	0,3	0,295	0,288	0,278	0,268	0,258	
7	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Tenaga Kerja	37,45	39,4	40,9	42,4	43,9	45,4	46,9	
8	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	85,91	86	86,5	86,75	88,92	89	89,5	
9	Indeks Desa	Indeks	-	76,1	77,5	78,5	79,5	79,6	79,65	
10	IKM	Indeks	84,72	85,85	86,98	88,11	89,24	90,37	91,5	

4.2.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran Kinerja keberhasilan daerah berdasarkan urusan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator daerah yang telah ditetapkan merupakan dukungan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah Kabupaten Sumenep ditetapkan berdasarkan indikator urusan pada perangkat daerah dan indikator utama pembangunan yang ada pada RPJPD Kabupaten Sumenep selama lima tahun ke depan, sebagaimana disajikan berikut:

Tabel IV- 3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah RPJMD Kabupaten Sumenep

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	ton CO2eq	44.308,70	45.194,88	46.098,78	47.020,75	47.961,17	48.920,39	49.898,80	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,98	72,69	72,77	72,85	72,93	73,01	73,09	
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	68,46	68,56	68,66	68,76	68,86	68,96	
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,83	80,8	80,9	81	81,1	81,2	81,3	
5	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	38,34	64,97	64,97	64,97	64,97	64,97	64,97	
6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	82,4	82,7	83	83,4	83,7	84	84,5	
7	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	0,72	0,76	0,767	0,775	0,782	0,789	0,796	
8	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,77	79,97	80,17	80,37	80,57	80,77	80,97	
9	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	kWh	-	1.430	1.700	2.400	3.000	3.270	3.740	
10	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	6,49	5,18	4,97	4,76	4,56	4,35	4,14	
11	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	2	2,1	10	18	28	39	49,85	
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	9,11	20,03	24,31	28,59	32,87	37,15	40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	10,53	6,73	6,99	7,25	7,51	7,77	8,02	
14	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	10,38	10,58	10,78	10,98	11,18	11,38	11,58	
15	Indeks Risiko Bencana (IRB)	%	137,43	117,36	116,57	115,78	114,99	114,2	111,94	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
16	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Tenaga Kerja	37,45	39,4	40,9	42,4	43,9	45,4	46,9	
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,69	1,57	1,49	1,41	1,35	1,31	1,29	
18	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,78	70	71,01	71,41	71,8	72,2	72,69	
19	% Penduduk Miskin	%	17,78	17,7	16,44	15,72	15,18	14,27	12,47	
20	Rasio GINI	Indeks	0,308	0,3	0,295	0,288	0,278	0,268	0,258	
21	Indeks Pendidikan	Indeks	0,581	0,583	0,585	0,588	0,592	0,596	0,6	
22	Nilai Literasi Membaca	Nilai	N/a	46,08	50	52	55	58	60 - 65	
23	Nilai Numerasi	Nilai	N/a	13,79	16	17	18	19	20 - 25	
24	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	tahun	6,1	6,56	6,68	6,81	7	7,11	7,19	
25	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,59	13,6	13,62	13,69	13,78	13,84	13,88	
26	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	4,196	7,41	7,51	7,65	7,8	8,15	9,34	
27	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	tahun	72,65	74,01	74,27	74,52	74,78	75,03	75,28	
28	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	47,3	56,7	55,7	54,7	53,7	52,7	51,7	
29	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	11,2	14,57	13,62	12,74	11,91	11,13	11,13	
30	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	87,18	91	91,5	92	92,5	93	94	
31	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	91,6	91	91,5	92	92,5	93	94	
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,549	0,582	0,551	0,535	0,519	0,503	0,487	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
33	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	11,22	18,23	19,11	20,55	21,42	22,86	23,9	
34	Persentase Penyandang Disabilitas yang bekerja	%	N/a	1,70	2,04	2,38	2,72	3,06	3,40	
35	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	N/a	67	70,76	72,38	74	75,5	77,14	
36	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,05	6,19	7,31	8,43	9,55	10,67	11,79	
37	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	99,57	98	98	98	98	98	98	
38	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	56,33	60	62	64	66	68	70	
39	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja Perempuan	%	69,82	70,4	70,98	71,55	72,13	72,7	73,28	
40	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	57,4	64,4	66,1	67,8	69,5	71,2	71,2	
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
41	Indeks Desa	Indeks	-	76,1	77,5	78,5	79,5	79,6	79,65	
42	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,77	4	4,13	4,2	4,3	4,4	4,5	
43	ICOR	Indeks	7,03	4,6	4,95	4,95	4,94	4,94	4,93	
44	Nilai PDRB sektor Perdagangan	Juta Rupiah	5.783,78	6.133,78	6.483,78	6.833,78	7.183,78	7.533,78	7.883,78	
45	Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB)	%	5,62	23,46	23,55	23,61	23,65	23,68	23,7	
46	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan	%	0,24	0,53	0,83	1,03	1,23	1,34	1,42	
47	Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Juta Rupiah	3.042,55	3.242,55	3.442,55	3.642,55	3.842,55	4.042,55	4.242,55	
48	Rasio PDRB sektor Industri Pengolahan	%	6,73	6,74	6,76	6,77	6,78	6,8	6,81	
49	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0,79	0,8	0,82	0,84	0,86	0,88	0,9	
50	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	39,215	39,85	40,01	40,29	40,88	41,47	41,93	
51	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	
52	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,34	0,54	0,57	0,6	0,63	0,66	0,69	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
53	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Jumlah	1	3	4	5	6	7	8	
54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	N/a	32,42	33,33	33,64	34,55	35,45	35,76	
55	Persentase Desa Mandiri (%)	%	30,61	39,7	48,79	54,85	60,91	66,97	70	
56	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	1	5	7	9	11	13	15	
57	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	%	N/a	14,19	14,5	15	15,5	16	17	
58	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)	%	N/a	9,73	9,8	9,84	9,82	9,96	10	
59	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	N/a	10	11	12	13	14	15	
60	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	0,6	2,88	2,9	2,92	2,94	2,98	3	
61	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	42,1	44	46	47	48	49	50	
62	Realisasi Investasi (Millyar)	Milyar Rupiah	2.740	2800	2850	2900	2950	3000	3250	
63	Pengeluaran perkapita Disesuaikan	Rupiah	10.156.000	10.113.720	10.323.160	10.532.610	10.742.050	10.951.490	11.678.790	
64	Indeks Daya Beli	Indeks	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	
65	Indeks Kebutuhan Dasar	Indeks	48,14	48,2	48,3	48,4	48,6	48,8	48,9	
66	Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita ADHK)	Rupiah	39.564.488,00	39.824.967,23	41.000.000,00	42.500.000,00	43.500.000,00	45.000.000,00	46.000.000,00	
67	Tingkat Inflasi (%)	%	1,97	1±2,5	1±2,5	1±2,5	1±2,5	1±2,5	1±2,5	
68	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,44	1,1	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13	
69	Kontribusi PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi	%	2	2	2,1	2,2	2,3	2,35	2,4	
70	Area Blank Spot (wilayah)	Lokasi	N/a	20	19	28	17	16	15	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
71	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,08	78,3	79	80	81	82	83	
72	IKM	Indeks	84,72	85,85	86,98	88,11	89,24	90,37	91,5	
73	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	85,91	86	86,5	86,75	88,92	89	89,5	
74	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,06	80	82,03	83,1	84,02	84,7	85	
75	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)**	Indeks	3,73	3,8	1,62	1,72	1,82	1,92	2,02	
76	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	64,9	65	65,8	66,93	67,3	67,8	68	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
77	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,26	3,35	3,39	3,43	3,48	3,52	3,54	
78	SAKIP	Nilai	70,15 (BB)	77 (BB)	80,1 (A)	85 (A)	89 (A)	92 (AA)	94 (AA)	
79	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,16	3,16	3,17	3,175	3,18	3,185	3,9	
80	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,64	0,75	0,78	0,8	0,81	0,83	0,84	
81	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai	87,07	87,25	87,50	87,75	88	88,10	88,25	
82	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,42	3,42	3,6	3,75	3,8	3,82	3,85	
83	% Penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	%	89,5	90	90,5	91	91,5	92	93	
84	Wilayah rawan gangguan keamanan	%	31	30	29	28	27	26	25	
85	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	85	-	-	-	-	87	-	
86	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,13	57,6	57,8	58,1	58,5	59	60	
87	Indeks Harmoni	Indeks	N/a	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	
88	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	N/a	65,09	67,5	70	72,5	75	80	

*** Indeks SPBE akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintahan Digital mulai tahun 2026, sehingga target disesuaikan*

Tabel IV- 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sumenep

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Urusan Pendidikan**								
1.1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	73,1	75,15	73,2	73,25	73,3	73,35	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	84,725	84,775	84,825	84,875	84,925	84,975	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	45,8	45,85	45,9	45,95	46	46,05	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57,07	58	59	60	61	62	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	48,32	50	52	54	56	58	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,2	63	65	67	69	71	PD Pengampu Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,9	58	60	62	64	66	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	69,34	71	72	74	75	76	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	68,06	70	72	74	75	77	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Indeks	69,7	71	73	75	77	79	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Indeks	63,25	64,5	66	67	68	69	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Indeks	68,03	69	70	71	72	73	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Indeks	63,43	65	66	67	68	69	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Indeks	55,65	57	59	60	62	63	PD Pengampu Bidang Pendidikan
1.15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Indeks	52,4	54	56	57	58	59	PD Pengampu Bidang Pendidikan
2	**Urusan Kesehatan**								
2.1	Jumlah kematian ibu	Orang	10	9	9	9	8	8	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	14,57	13,62	12,74	11,91	11,13	11,13	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.15	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.16	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.17	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.18	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.19	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.20	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.21	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.22	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.23	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.24	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.25	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.26	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.27	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	%	85.00	87.00	89.00	91.00	92.00	92.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.28	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	83.00	86.00	89.00	92.00	95.00	95.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.29	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	36.00	46.00	55.00	61.00	70.00	70.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.30	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.31	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun	%	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.32	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	<23.4	<23.4	<23.4	<23.4	<23.4	<23.4	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.33	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	%	43.00	48.00	55.00	62.00	73.00	73.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.34	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	15.00	20.00	25.00	35.00	50.00	50.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.35	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	70.00	72.00	74.00	77.00	80.00	80.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.36	Persentase Lanjut usia yang mandiri	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.37	Persentase merokok penduduk usia 10 -21 taun	%	12.40	11,40	10,40	9,40	8,40	8,40	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.38	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	80.00%	85.00%	90.00%	93.00%	95.00%	95.00%	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.39	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.40	Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	%	90	90	90	90	90	90	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.41	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	/ jumlah penduduk	5,3 : 1000	5,3 : 1000	5,4 : 1000	5,4 : 1000	5,5 : 1000	5,5 : 1000	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.42	Persentase rekomendasi ijin sarana kefarmasian dan industri makmin Rumah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.43	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	74.60	76.10	77.60	78.60	89.60	89.60	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.44	Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna	%	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.45	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2.07	2.06	2.05	2.04	2.03	2.03	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.46	Angka Kelahiran Remaja Umur15-19 Tahun(Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19	%	32.7	31.7	30.7	30.50	30.30	30.30	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.47	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	66.5	67.5	68.5	69.5	70.00	70.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.48	Persentarse Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	20.00	25.00	35.00	45.00	50.00	50.00	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.50	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modem/ Modem Contraceptive (mCPR)	%	60.10	60.60	61.10	61.60	62.10	62.10	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.51	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9.60	9.10	8.80	8.50	8.20	8.20	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.52	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	12.60	12.20	11.90	11.60	11.30	11.30	PD Pengampu Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.53	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan	%	9.5	9.52	9.53	9.53	9.54	9.54	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.54	Presentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana	%	70.99	80.1	80.2	80.5	80.7	80.7	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.55	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	%	85,31	86,44	87,48	88,44	89,33	89,33	PD Pengampu Bidang Kesehatan
2.56	Indeks Lansia Berdaya	%	59,37	59,88	60,39	60,89	61,39	61,39	PD Pengampu Bidang Kesehatan
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/ Kota	%	78,63	78,76	78,89	79,02	79,15	79,28	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	22,37	22,55	22,72	22,9	23,07	23,25	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	60,61	64,66	66,43	68,2	69,98	71,75	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	91,24	91,29	92,34	92,42	92,53	92,61	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	81,5	82,01	82,5	82,9	83,34	83,62	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	70,92	71,17	71,44	71,68	71,95	72	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.7	Presentase tenaga kerja kontruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknis/analis	%	14,7	14,76	14,85	14,9	15	15,5	PD Pengampu Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
4.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	14,2	19,2	29,2	39,2	49,2	59,2	PD Pengampu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	81,76	76,76	70,76	64,76	57,76	47,76	PD Pengampu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	14	15	16	18	19	20	PD Pengampu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
5.4	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
5.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
5.6	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
5.7	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
5.8	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
5.9	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.10	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
5.11	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	14,9	14,8	14,6	14,2	PD Pengampu Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
6	**Urusan Sosial**								
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	PD Pengampu Bidang Sosial
6.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	PD Pengampu Bidang Sosial
6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	PD Pengampu Bidang Sosial
6.4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	PD Pengampu Bidang Sosial
6.5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	50	50	50	50	50	50	PD Pengampu Bidang Sosial
6.6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	N/A	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Sosial
6.7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PD Pengampu Bidang Sosial
6.8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	PD Pengampu Bidang Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PD Pengampu Bidang Sosial
6.10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	PD Pengampu Bidang Sosial
6.11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	N/A	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Sosial
6.12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	N/A	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Sosial
6.13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PD Pengampu Bidang Sosial
6.14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	95	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Sosial
7	**Urusan Tenaga Kerja**								
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Tenaga Kerja
7.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,27	0,28	0,3	0,32	0,34	0,36	PD Pengampu Bidang Tenaga Kerja
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	39,4	40,9	42,4	43,9	45,4	46,9	PD Pengampu Bidang Tenaga Kerja
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	13,56	13,81	14,06	14,31	14,56	14,81	PD Pengampu Bidang Tenaga Kerja
7.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	46	48	50	52	54	56	PD Pengampu Bidang Tenaga Kerja
8	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8,1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	60,22	60,62	61,02	61,42	61,82	62,22	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8,2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,562	0,525	0,5	0,475	0,45	0,425	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8,3	Persentase ARG Daerah	%	3,2	3,23	3,26	3,29	3,33	3,35	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8,4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8,5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	**Urusan Pangan**								
9.1	Persentase cadangan pangan pemerintah kab	%	0	2	4	5	6	7	PD Pengampu Bidang Pangan
9.2	Skor PPH	%	98,45	98,65	98,85	99,05	99,25	99,5	PD Pengampu Bidang Pangan
9.3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	%	14	12	10	9	8	7	PD Pengampu Bidang Pangan
9.4	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	%	90	90,5	91	91,5	92	92,5	PD Pengampu Bidang Pangan
10	**Urusan Pertanahan**								
10.1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	10	10	10	10	10	10	PD Pengampu Bidang Pertanahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	15	15	15	15	15	15	PD Pengampu Bidang Pertanahan
10.3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	25	25	25	25	25	25	PD Pengampu Bidang Pertanahan
10.4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Pertanahan
10.5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Pertanahan
10.6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	85	87,5	90	92,5	95	97,5	PD Pengampu Bidang Pertanahan
10.7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	46,41	55,33	64,39	73,89	83,44	93,04	PD Pengampu Bidang Pertanahan
10.8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Pertanahan
10.9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	20	20	20	20	20	20	PD Pengampu Bidang Pertanahan
11	**Urusan Lingkungan Hidup**								
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,69	72,77	72,85	72,93	73,01	73,09	PD Pengampu Bidang Lingkungan Hidup
11.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	75	75	76	77	78	79	PD Pengampu Bidang Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	%	20.00	20.20	20.40	20.61	20.81	21.02	PD Pengampu Bidang Lingkungan Hidup
12	**Urusan Pencatatan Sipil dan Administrasi Penduduk**								
12.1	Perekaman KTP Elektronik	%	96	97	97,5	98	98,5	99	PD Pengampu Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60	60	65	67	70	72	PD Pengampu Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.3	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran	%	99,2	99,25	99,3	99,4	99,5	99,6	PD Pengampu Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Angka	20	20	21	21	22	22	PD Pengampu Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
13.1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	29,7	22,9	18,63	15,71	13,57	11,95	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	24,24	25,76	27,27	28,79	30,3	33,33	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.3	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	7,14	9,52	11,9	14,29	16,67	12,57	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	10,27	10,36	10,46	10,56	10,66	10,76	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13.5	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	1,82	3,03	4,54	6,06	7,57	9,09	PD Pengampu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
14.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03	PD Pengampu Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	60,1	60,6	61,1	61,6	62,1	62,1	PD Pengampu Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,6	9,1	8,8	8,5	8,2	8,2	PD Pengampu Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14.4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	32.7	31.7	30.7	30,5	30,3	30,3	PD Pengampu Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai 0-100	57,3	57,2	57,1	57	56,9	56,9	PD Pengampu Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
15	**Urusan Perhubungan**								
15.1	Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	Rasio	95	95,75	96,5	97,25	98	98,75	PD Pengampu Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
15.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/ Kota	Rasio	0,275	0,27	0,265	0,26	0,255	0,25	PD Pengampu Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16	**Urusan Komunikasi dan Informatika**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh PD Pengampu Bidang Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Komunikasi dan Informatika
16.2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Komunikasi dan Informatika
16.3	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Komunikasi dan Informatika
17	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
17,1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	10	10	10	10	10	10	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17,2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	4	4	4	4	4	4	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17,3	Pertumbuhan Wirausaha	%	5	5	5	5	5	5	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18	**Urusan Penanaman Modal**								
18,1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	25	25,5	26,5	27,5	27,78	28	PD Pengampu Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18,2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rupiah	2,8 Trilyun	2,9 Trilyun	3 Trilyun	3,1 Trilyun	3,2 Trilyun	3,3 Trilyun	PD Pengampu Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**								
19.1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	PD Pengampu Bidang Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
19.2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	1	2	3	4	5	5	PD Pengampu Bidang Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
20	**Urusan Statistik**								
20.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,65	2,8	3	3,2	3,5	3,7	PD Pengampu Bidang Komunikasi dan Informatika
21	**Urusan Persandian**								
21.1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	%	70,63	76,42	81,88	90,5	94,43	95	PD Pengampu Bidang Komunikasi dan Informatika
22	**Urusan Kebudayaan**								
22.1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	30	33	35	37	40	43	PD Pengampu Bidang Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
22.2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	8	10	12	14	16	20	PD Pengampu Bidang Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
22.3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	4	6	8	10	12	14	PD Pengampu Bidang Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
23	**Urusan Perpustakaan**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	58	68,6	69	70,2	70,9	71	PD Pengampu Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	58	58,5	59,4	60,02	60,9	61,3	PD Pengampu Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
24	**Urusan Kearsipan**								
24,1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	58	59	60	60,2	61	61,15	PD Pengampu Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
25	**Urusan Kelautan dan Perikanan**								
25,1	Produksi Perikanan tangkap	ton	46.466	47.163	47.871	48.589	49.318	50.058	PD Pengampu Bidang Perikanan
25,2	Produksi Perikanan Budidaya	ton	8.644	9.941	11.432	13.147	15.149	17.387	PD Pengampu Bidang Perikanan
26	**Urusan Pariwisata**								
26.1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Rupiah	5.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000	9.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	PD Pengampu Bidang Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
26.2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	10	15	20	25	30	35	PD Pengampu Bidang Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
26.3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	1	2	3	4	5	6	PD Pengampu Bidang Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
27	**Urusan Pertanian**								
27,1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	0,13	0,131	0,132	0,133	0,134	0,135	PD Pengampu Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
27,2	Peningkatan produksi hortikultura	%	0,5	0,505	0,51	0,515	0,52	0,525	PD Pengampu Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
27,3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	0,5	0,501	0,502	0,503	0,504	0,505	PD Pengampu Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
27,4	Peningkatan produksi komoditas perkebunan	%	0,2	0,201	0,202	0,203	0,204	0,205	PD Pengampu Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
27,5	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	25	25	26	26	26	26	PD Pengampu Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
27,6	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,5	0,6	0,75	0,8	0,82	0,85	PD Pengampu Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
28	**Urusan Perdagangan**								
28.1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	16	98,34	99,81	99,87	99,91	99,95	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
28.2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	31,76	32	33	34	35	36	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29	**Urusan Perindustrian**								
29.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:	%	40	40	40	40	40	40	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29.2	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	30	30	30	30	30	30	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
29.3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	30	30	30	30	30	30	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29.4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	orang	19.226	22.226	25.226	28.226	31.226	34.226	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29.5	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Rp (Triliun)	110	130	140	160	200	220	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29.6	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Rp (Triliun)	Rp. 183	Rp. 200	Rp. 220	Rp. 240	Rp. 260	Rp. 280	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29.7	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
30	**Unsur Sekretariat Daerah**								
30.1	kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Orang	3	4	7	7	7	7	Sekretariat Daerah
30.2	tingkat kematangan UKPBJ	level	3	3	3	3	3	3	Sekretariat Daerah
32	**Unsur Perencanaan**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
32.1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	70	75	80	85	90	95	PD Pengampu Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
32.2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	78,57	79	79,3	79,87	80	80,12	PD Pengampu Bidang Riset dan Inovasi Daerah
33	**Unsur Keuangan**								
33.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	5	5	5	5	5	5	PD Pengampu Bidang Pendapatan Daerah
33.2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	PD Pengampu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
33.3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	5	5	5	5	5	5	PD Pengampu Bidang Pendapatan Daerah
33.4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	11,15	11,38	11,61	11,84	12,07	12,3	PD Pengampu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
33.5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	PD Pengampu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
33.6	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	28,19	28,19	28,19	28,19	28,19	28,19	PD Pengampu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
33.7	Persentase Penurunan SILPA	%	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	PD Pengampu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
34	**Unsur Kepegawaian**								
34.1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	indeks	84	85	86	87	88	89	PD Pengampu Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
35	**Unsur Penelitian dan Pengembangan**								
35.1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	37,06	40,56	45,45	51,05	57,34	64,34	PD Pengampu Bidang Riset dan Inovasi Daerah
37	**Unsur Pengawasan**								
37.1	persentase pertangungjawaban keuangan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (opini Laporan Keuangan)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	PD Pengampu Bidang Pengawasan
37.2	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94,48	94,52	94,72	95,02	95,42	95,92	PD Pengampu Bidang Pengawasan
37.3	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,17	3,175	3,18	3,185	3,19	3,195	PD Pengampu Bidang Pengawasan
37.4	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3,048	3,062	3,076	3,092	3,106	3,12	PD Pengampu Bidang Pengawasan
37.	Nilai Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4	PD Pengampu Bidang Pengawasan

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sumenep lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Sumenep tahun 2025-2045. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pemerintah Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029. Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumenep;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap PD berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029;
5. Renstra-PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;

6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Sumenep harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten;
8. RKPD Kabupaten Sumenep harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
9. Berkaitan dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Sumenep merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
10. Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
11. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership), melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha daerah yang tersebar diberbagai daerah di Kabupaten Sumenep, dan Penerbitan Obligasi Daerah serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini;

13. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Sumenep yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Sumenep dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Sumenep dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama dengan DPRD Kabupaten Sumenep bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Sumenep ini dan RKPD Kabupaten Sumenep 2025-2029 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

BUPATI SUMENEP

Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.